

PENGANTAR

Segenap puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunanNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan pada waktunya sebagai wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyusunan LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran kinerja Pemerintahan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Selain mengacu pada aturan-aturan tersebut, penyusunan LPPD ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 120.04./9803/OTDA tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2018.

Muatan LPPD mencakup urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Umum dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya digunakan sebagai parameter dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Khusus untuk muatan LPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula oleh indikator kinerja kunci Pemerintah 22 Kabupaten/Kota yang menjadi satu bagian dalam LPPD dan dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Muatan LPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan dari 3 (tiga) Kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018 (Januari sampai dengan medio Juli), Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (medio Juli sampai dengan awal September) serta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2018-2023 (awal September sampai dengan Desember). Dengan demikian, walaupun pelaksanaannya mengacu pada APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, namun sejak Triwulan III 2018 telah disinergikan dengan spirit NTT Bangkit Menuju Sejahtera dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam rangka percepatan pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.



Akhirnya perkenankan kami menyampaikan LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera.

Demikian untuk menjadi periksa, atas perkenan disampaikan terima kasih.

Kupang, 22 Maret 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah dan Kondisi Geografis Daerah	4
1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah.....	4
2. Topografis.....	5
3. Geologi	5
4. Iklim.....	6
C. Kondisi Geografis	7
1. Penduduk	7
2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.....	9
3. Pendidikan	11
D. Kondisi Ekonomi.	15
1. Potensi Unggulan Daerah	15
2. Indikator Ekonomi Daerah.....	22
 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	 27
I. Visi dan Misi	27
II. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	30
A. Strategi Pembangunan Daerah.....	30
B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	31
III. Prioritas Pembangunan Daerah	37
 BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	 42
A. Urusan Konkuren.....	42
I. Urusan Wajib	42
a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	42



Urusan Pendidikan	42
Urusan Kesehatan	49
Urusan Pekerjaan Umum	83
Urusan Penataan Ruang..	90
Urusan Perumahan	94
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	99
Urusan Sosial	108
b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	113
Urusan Ketenagakerjaan	113
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	118
Urusan Ketahanan Pangan	125
Urusan Pertanahan	133
Urusan Lingkungan Hidup	133
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	141
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	144
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149
Urusan Perhubungan	149
Urusan Komunikasi dan Informatika	159
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	167
Urusan Penanaman Modal	175
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	184
Urusan Statistik	195
Urusan Kebudayaan	195
Urusan Perpustakaan	204
Urusan Kearsipan	211
II. Urusan Pilihan	216
Urusan Pertanian	216
Urusan Peternakan	228
Urusan Kelautan dan Perikanan	233
Urusan Kehutanan	238
Urusan Pariwisata	245
Urusan Perindustrian	252
Urusan Perdagangan	256
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	264
Urusan Ketransmigrasian	268



B. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya.....	271
PENUNJANG URUSAN	271
Urusan Pengawasan	271
Urusan Perencanaan	276
Urusan Keuangan	281
Urusan Kepegawaian	286
Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	293
Urusan Penelitian dan Pengembangan	295
Urusan Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah	
Pusat Perbatasan	299
Urusan Perbatasan	302
Urusan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.....	306
PENDUKUNG URUSAN	310
Urusan Sekretariat Daerah.....	310
Urusan Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi NTT.....	346
C. Urusan Pemerintahan Umum.....	350
Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.....	350
Urusan Penanggulangan Bencana	364
D. Indikator Kinerja Kunci	368
Indikator Kinerja Kunci (IKK I.1)	368
Indikator Kinerja Kunci (IKK I.2)	378
Indikator Kinerja Kunci (IKK I.3)	600
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)	
TAHUN 2017	644
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	656
A. Tugas Pembantuan Yang di Terima	656
B. Tugas Pembantuan Yang di Berikan Kabupaten maupun Desa	736
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	737
A. Kerja Sama Antar Daerah	737
B. Kerja Daerah dengan Pihak ketiga	743



C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	761
D. Pembinaan Batas Wilayah	771
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	774
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	785
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	785
BAB VII PENUTUP	787



DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.	Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018	7
Tabel.1.2.	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	8
Tabel.1.3.	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2016- Agustus 2017.....	9
Tabel.1.4.	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013– 2017	10
Tabel.1.5.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2017.....	11
Tabel.1.6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) per Tingkat Pendidikan Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2017.....	12
Tabel.1.7.	Kondisi APM per Tingkat Pendidikan Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	13
Tabel.1.8.	Angka Pendidikan yang ditamatkan Per Kabupaten/Kota se NTT Tahun 2017.....	14
Tabel.1.9.	Angka Harapan Hidup per Kab/Kota Tahun 2013- 2017.....	15
Tabel.1.10.	Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017.....	16
Tabel.1.11.	Produktivitas Perkebunan Tahun 2013-2017	18
Tabel.1.12.	Perkembangan Populasi Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018.....	19
Tabel.1.13.	Produksi Perikanan Tahun 2016-2018.....	20
Tabel.1.14.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2016-2018.....	22
Tabel.1.15.	PDRB NTTTahun 2013-2017.....	23
Tabel.4.1.	Program Prioritas Pembangunan, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab.....	645
Tabel.5.1.	Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Kedelai Tahun 2018.....	657
Tabel.5.2.	Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau Tahun 2018.....	658
Tabel.5.3.	Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Teknik Budidaya menggunakan biji (TSS).....	673
Tabel.5.4.	Alokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Tahun 2018.....	674
Tabel.5.5.	Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Teknik Budidaya Menggunakan Umbi Tahun 2018.....	674



Tabel.5.6.	Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Tahun 2018.....	677
Tabel.5.7.	Alokasi Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2018.....	678
Tabel.5.8.	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Bawang Putih Tahun 2018.....	681
Tabel.5.9.	Pengembangan Kawasan Aneka Cabai Tahun 2018.....	681
Tabel.5.10.	Pengembangan Kawasan Buah Mangga di Rote Ndao Tahun 2018.....	683
Tabel.5.11.	Perluasan Tanaman Kopi Arabika Tahun 2018.....	685
Tabel.5.12.	Peremajaan Kopi Tahun 2018.....	686
Tabel.5.13.	Perluasan Tanaman Kakao Tahun 2018.....	686
Tabel.5.14.	Pengembangan Tanaman Kelapa.....	689
Tabel.5.15.	Pengembangan Tanaman Jambu Mete Tahun 2018.....	692
Tabel.5.16.	Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan Tahun 2018.....	695
Tabel.5.17.	Peremajaan Tanaman Jambu Mete di Wilayah Perbatasan Tahun 2018.....	696
Tabel.5.18.	Desa Pertanian Organik Berbasis Perkebunan Tahun 2018.....	701
Tabel.5.19.	Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2018.....	702
Tabel.5.20.	Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2018.....	702
Tabel.5.21.	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2018.....	704
Tabel.5.22.	Perluasan Tanaman Cengkeh Tahun 2018.....	705
Tabel.5.23.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2018.....	710
Tabel.5.24.	Realisasi Cetak Sawah Baru Tahun 2018.....	712
Tabel.5.25.	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Tanaman Pangan Tahun 2018.....	713
Tabel.5.25.	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Hortikultura Tahun 2018.....	713



A. Dasar Hukum

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Selain itu, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sehingga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuklah 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Setelah 59 Tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, aspirasi masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, maka sejak tahun 1996 hingga akhir tahun 2013, di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan 10 (sepuluh) daerah otonom baru (Kabupaten/Kota), yaitu:

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
2. Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

4. Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
6. Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
7. Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
8. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
10. Kabupaten Malaka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5396).

Dengan demikian secara keseluruhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga akhir Tahun 2017 terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Kupang.

Adanya pemekaran sejumlah Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur merupakan strategi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang kian hari terus meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Sejalan dengan harapan akan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang didelegasikan wewenang pengelolaannya kepada pemerintah, maka pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 69, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2016 Nomor 009, TLD Provinsi NTT Nomor 0082);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Gambaran Umum dan Kondisi Geografis Daerah.

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. NTT merupakan Provinsi kepulauan karena memiliki 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah daratan sebesar 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km².



2. Topografis.

Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dengan luas $\pm$ 2.309.747 Ha, sedangkan sebagian kecil atau 3,65% wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada ketinggian $\pm$ 1.000 m di atas permukaan laut. Lahan dengan kemiringan $\pm$ 15 s/d 40% mencapai 38,07% dan lahan dengan kemiringan $>$ 40 % mencapai 35,46%.

Keadaan topografis Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang berkisar antara $\pm$ 25 s/d 118 km. Di Daratan Flores dan Daratan Alor terdapat 11 gunung berapi dengan ketinggian berkisar antara $\pm$ 637 s/d 2.149 m di atas permukaan laut, yang sejak Tahun 1881 sampai dengan Tahun 2004 tercatat semua gunung berapi yang ada pernah mengalami letusan.

3. Geologi.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan circum-pasifik. Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan. Sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan daerah dengan kondisi tanah yang subur namun labil dan berpotensi untuk terjadi bencana alam.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat berbagai deposit tambang, baik mineral maupun sumber-sumber energi lainnya, seperti: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (AU), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata (Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps), Gypsum (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsitis, Pasir Batu (Pa), Batu apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/Clay (Td).

Dilihat dari struktur batuan, geologi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:



- a. Batuan Silicic (*acid*) Rock (batuan berasam kersi asam), terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, sebagian besar Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, sebagian besar Kabupaten Ngada, sebagian Kabupaten Manggarai, sebagian besar Manggarai Barat dan sebagian kecil Kabupaten Kupang;
- b. Batuan Matic Basic Rocks (batuan basa);
- c. Batuan Intermediate Basic (basa menengah);
- d. Batuan Pre Tertiare Undivideo (pra tersier tak dibedakan);
- e. Batuan Paleogene (pleogen);
- f. Alluvial Terrace Deposit and Coral Reefs (alluvium undak dan berumbar koral);
- g. Batuan Neogene (neogen);
- h. Batuan Kekeno Series (deret kekeno);
- i. Batuan Sonebait Series (deret sonebait);
- j. Batuan Sonebait and Ofu Series Terefolde (deret sonebait dan deret terlipat bersama);
- k. Batuan Ofu Series (deret ofu);
- l. Batuan Silicic Efusives (efusiva berasam kersik);
- m. Batuan Triassic (trias);
- n. Batuan Crystalline *Shist* (sekis hablur).

4. Iklim.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

Walau demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap air sudah berkurang yang menyebabkan volume hujan lebih sedikit di banding dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari – Maret, dan Desember) yang keadaan relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.



Suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 30 s/d 36°C dan suhu udara minimum berkisar antara 21 s/d 24,5°C, dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 mm/tahun.

C. Kondisi Demografis.

1. Penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi NTT kondisi Desember tahun 2018 sebanyak 5.411.203 jiwa yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota pada tahun 2018 yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi adalah Kabupaten TTS sebesar 466.068 jiwa dan terendah di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 86.980 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)	%
1	5301	Kupang	400.131	7,39
2	5302	TTS	466.068	8,61
3	5303	TTU	264.202	4,88
4	5304	Belu	223.433	4,13
5	5305	Alor	214.385	3,96
6	5306	Flores Timur	282.152	5,21
7	5307	Sikka	318.455	5,89
8	5308	Ende	273.850	5,61
9	5309	Ngada	167.064	3,09
10	5310	Manggarai	320.412	5,92
11	5311	Sumba Timur	239.668	4,44
12	5312	Sumba Barat	147.702	2,73
13	5313	Lembata	136.877	2,53
14	5314	Rote Ndao	146.048	2,70
15	5315	Manggarai Barat	259.302	4,79
16	5316	Nagekeo	162.242	3,00
17	5317	Sumba Tengah	86.980	1,61
18	5318	Sumba Barat Daya	310.216	5,73
19	5319	Manggarai Timur	266.228	4,92
20	5320	Sabu Raijua	94.822	1,75
21	5321	Malaka	192.418	3,56
22	5371	Kota Kupang	438.548	8,10
Total			5.411.203	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2019

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan tahun 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 309 Kecamatan, 327 Kelurahan dan 3.026 Desa. Rincian wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 1.2.



Tabel. 1.2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi NTT
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Kab/Kota	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Desa	Kel	Kec	Desa	Kel	Kec	Desa	Kel	Kec	Desa	Kel	Kec	Desa	Kel	Kec
1.	Kota Kupang	-	51	6	-	51	6	-	51	6	-	51	6	-	51	6
2.	Kupang	160	17	24	160	12	24	160	17	24	160	17	24	160	17	24
3.	TTS	266	12	32	266	12	32	266	12	32	266	12	32	266	12	32
4.	TTU	144	31	24	160	33	24	160	33	24	160	33	24	160	33	24
5.	Belu	69	12	12	69	12	12	69	12	12	69	12	12	69	12	12
6.	Malaka	127	-	12	127	-	12	127	-	12	127	-	12	127	-	12
7.	Rote Ndao	82	7	10	82	7	10	82	7	10	82	7	10	112	7	10
8.	Sabu Raijua	58	5	6	58	5	6	57	5	6	58	5	6	58	5	6
9.	Alor	158	17	17	158	17	17	158	17	17	158	17	17	158	17	17
10.	Lembata	144	7	9	144	7	9	144	7	9	144	7	9	144	7	9
11.	Flores Timur	229	21	19	299	21	19	229	21	19	229	21	19	229	21	19
12.	Sikka	147	13	21	147	13	21	147	13	21	147	13	21	147	13	21
13.	Ende	255	23	21	255	23	21	255	23	21	255	23	21	255	23	21
14.	Nagekeo	97	16	7	97	16	7	97	16	7	97	16	7	97	16	7
15.	Ngada	135	16	12	135	16	12	135	16	12	135	16	12	135	16	12
16.	Manggarai	145	17	11	145	17	11	145	17	11	145	17	11	145	26	12
17.	Manggarai Timur	159	17	9	159	17	9	159	17	9	159	17	9	159	17	9
18.	Manggarai Barat	164	5	10	164	5	10	164	5	10	164	5	10	164	5	12
19.	Sumba Barat Daya	129	2	11	129	2	11	173	2	11	173	2	11	173	2	11
20.	Sumba Barat	63	11	6	63	11	6	63	11	6	63	11	6	63	11	6
21.	Sumba Tengah	65	-	5	65	-	5	65	-	5	65	-	5	68	0	5
22.	Sumba Timur	140	16	22	140	16	22	140	16	22	140	16	22	140	16	22
JUMLAH		2.936	316	306	2.952	318	306	2.995	318	306	2.996	318	306	3.026	327	309

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri, Tahun 2018.

Seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan dan tuntutan akan pelayanan pemerintahan serta aspirasi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat pemekaran 8 (delapan) Calon Daerah Persiapan (CDP) otonom baru yaitu, CDP Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur, CDP Kota Maumere di Kabupaten Sikka, CDP Kabupaten Pantar di Kabupaten Alor, CDP Kabupaten Amfoang di Kabupaten Kupang, CDP Kabupaten Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta CDP Kabupaten Pahunga Lodu, CDP Kabupaten Sumba Selatan dan CDP Kabupaten Sumba Timur Jaya di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan 1 (satu) CDP Otonom Baru Kabupaten Manggarai Barat Daya di Kabupaten Manggarai Barat, saat ini masih berproses di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan kedelapan calon daerah persiapan otonom baru yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Dalam Negeri proses penetapannya masih menunggu ditandatanganinya RPP



yang mengatur tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai dasar atau payung hukum untuk Persyaratan dan penerapan kuota serta peresmian CDP kabupaten/kota menjadi Daerah Persiapan Kabupaten/kota.

2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2017 menurun 0,09 poin yaitu dari 69,18 persen pada Agustus 2016 menjadi 69,09 persen pada Agustus 2018. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2017 mencapai 2,32 juta orang, bertambah 43,0 ribu orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2016 sebesar 2,28 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 sebesar 3.27 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih tinggi 0,02 poin dibandingkan Agustus 2016 sebesar 3,25 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 5.50 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 1.3
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2016-Agustus 2017

Jenis Kegiatan Utama	2016 Februari	2016 Agustus	2017 Februari	2017 Agustus
1. Angktan kerja	2.445.323	2.353.648	2.503.057	2.398.609
Bekerja	2.357.624	2.277.068	2.422.809	2.320.061
Pengangguran	87.699	580	80.248	78.548
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.63	69.18	72.82	69.09
Laki-laki	81.23	79.68	84.47	80.00
Perempuan	64.41	59.15	63.60	58.65
3. Tingkat Pengangguran				
Terbuka	3.59	3.25	3.21	3.27
Perkotaan	7.83	5.56	4.61	8.66
Pedesaan	2.46	2.62	2.83	1.93

Sumber: Survey Sosial Budaya, BPS 2018

Kondisi ketenagakerjaan di NTT pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cukup fluktuatif, tergambar dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan persentase antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Berdasarkan data BPS, persentase TPAK tahun 2014 sebesar 68,91%, naik menjadi 69,25% pada tahun 2015 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 sebesar 69,15%.



Penurunan besaran persentase TPAK ini dipengaruhi oleh melambatnya laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja terhadap laju pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja pada Tahun 2016 sebesar 2.353.648 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) sebesar 3.402.075 orang. Namun tidak seluruhnya penduduk yang masuk dalam angkatan kerja terserap dalam pasar kerja. Penduduk yang terserap dalam pasar kerja atau disebut dengan bekerja pada tahun 2016 sebesar 2.277.068 orang (96,75%), sedangkan yang tidak terserap atau disebut dengan penganggur sebesar 76.580 orang (3,23%).

Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		2017	
		Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%
1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan & Perikanan	1.284.591	61,04	1.321.274	60,77	1.368.296	61,66	1.214.060	53,32	1,271534	54,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	23. 052	1,10	19.050	0,88	18.435	0,84	29.251	1,28	25.686	1,10
3.	Industri Pengolahan	150. 998	7,17	166.194	7,64	136.766	6,17	167.476	7,35	205.314	8,84
4.	Listrik, Gas & Air	3.734	0,18	5.038	0,23	3.537	0,16	9.354	0,41	6,173	0,26
5.	Bangunan	76.341	3,63	79.317	3,65	74.754	3,37	103.451	4,54	97.653	4,20
6.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan	165.532	7,87	177.571	8,17	189.109	8,53	231.989	10,19	237.329	10,22
7.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	104.267	4,95	90.815	4,18	105.091	4,74	126.833	5,57	102.245	4,40
8.	Keuangan Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan	22.371	1,06	23.528	1,08	29.180	1,32	20.806	0,91	35.197	1,51
9.	Jasa Kemasy. Sosial & Perorangan	273.621	13,00	291.441	13,40	294.123	13,26	373.848	16,42	338.618	14,59
Jumlah		2.104.507	100	2.174.228	100	2.219.291	100	2.277.068	100	2.320.061	100

Sumber : BPS – NTT Dalam Angka 2018

Bila dilihat dari penyerapan tenaga kerja menurut sektor menunjukkan bahwa Sektor Pertanian dan Perkebunan masih merupakan sektor utama yang menyerap banyak tenaga kerja yakni pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 54,80%, kemudian berturut-turut disusul oleh Sektor Jasa Kemasy.



Sosial & Perorangan 14,59 %, Sektor Perdagangan dan Rumah Makan 10,22% dan industri pengolahan 8,84%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Sektor Pertanian dan Perkebunan masih merupakan sektor andalan bagi sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur, meskipun mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan berdasarkan kondisi iklim dan musim tanam dari tiap daerah. Pada musim kemarau, ketika sebagian lahan pertanian tidak dapat digarap, sebagian tenaga kerja dari sektor pertanian beralih profesi ke sektor-sektor lainnya sebagai tenaga informal.

3. Pendidikan.

Pendidikan memegang peranan strategis dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang memiliki karakter yang kuat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal dan informal yang melibatkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, selanjutnya berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Berkaitan dengan itu, perlu mengoptimalkan delapan standar nasional pendidikan pada semua jenjang dan jalur.

1) Angka Melek Huruf.

Salah satu indikator yang dapat mengukur capaiandi bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. AMH yang semakin tinggi di suatu wilayah mengindikasikan mutu serta kualitas sumberdaya manusia di wilayah tersebut semakin baik. Peningkatan AMH selalu sejalan dengan penurunan angka buta huruf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatnya AMH secara tidak langsung menggambarkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menyerap informasi, meningkatkan intelektualitas pribadi sertaber komunikasi secara tertulis.

Tabel 1.5
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2013	92,99	90,29	91,61
2014	88,92	83,92	86,52
2015	93,89	91,61	92,73
2016	93,93	91,31	92,60
2017	94,13	91,38	92,73

Sumber Data: BPS – NTT Dalam Angka 2018

Berdasarkan data BPS, AMH penduduk NTT pada tahun 2013 sebesar 91,61%, 2014 sebesar 86,52%, 2015 sebesar 92,73%, tahun



2016 sebesar 92,60% dan tahun 2017 sebesar 92,73%. Sekalipun perkembangan menunjukkan fluktuatif namun terdapat kenaikan AMH selama tahun 2013-2017 dan laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan AMH perempuan. Hal ini salah satunya disebabkan kebiasaan dalam masyarakat yang memberikan kesempatan untuk bersekolah lebih besar kepada anak laki-laki.

2) **Angka Partisipasi Kasar (APK).**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (SD/MI=7-12 tahun, SMP/MTs=13-15 tahun dan SMA/MAN=16-18 tahun).

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan, atau dapat dikatakan bahwa APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Sejak tahun 2007, di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan dalam perhitungan nilai APK. Perkembangan APK berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) per Tingkat Pendidikan
Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

No	Jenjang pendidikan	Nilai APK (% perTahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	114,8	119,65	116,46	112,85	118,59
2	SMP/MTs	96,87	96,91	91,25	98,96	98,93
3	SMA/MAN	76,83	77,01	82,74	77,69	83,20

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Sesuai tabel 1.6. dapat dilihat bahwa sejak periode tahun 2011-2017 besarnya nilai APK untuk tiap jenjang pendidikan menunjukkan pola yang cenderung sama. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, dataAPK yang ada cenderung meningkat dan berada di atas 100%, hal ini menandakan bahwa untuk jenjang SD/MI masih banyak yang murid yang bersekolah lebih awal dan/atau melalui pendidikan non formal. Namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MAN belum semua anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan atas yang bersekolah, namun



demikian data yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah dari seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian APM merupakan indikator untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah tepat waktu atau pada usia yang tepat.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Kondisi APM per Tingkat Pendidikan
Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

No	Jenjang pendidikan	Nilai APM(% per Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/SDLB	97,10	97,80	98,00	98,49	98,93
2.	SMP/MTs/SMPLB	83,60	83,87	83,95	84,20	84,44
3.	SMA/SMK/MAN	73,03	73,51	73,90	74,47	74,59

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Tabel 1.7. di atas dapat dilihat bahwa kondisi APM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan pola yang sama, dimana semakin meningkat jenjang pendidikan maka daya daya serap atau partisipasi murid yang sesuai dengan umurnya semakin menurun. Namun bila dilihat dari perkembangannya tiap jenjang pendidikan, maka APM menunjukkan pola yang sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 persentase APM jenjang SD/MI/SDLB sebesar 98,93% atau meningkat sebelumnya sebesar 98,49. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan selanjutnya walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun persentasenya masih berkisar pada SMP/MTs/SMPLB sebesar 84,44% dan SMA/MA/SMK sebesar 74,59%.

4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi penduduk yang ditamatkan menunjukkan akses pendidikan masyarakat. Pendidikan penduduk usia 10 tahun yaitu tidak memiliki ijazah (33,33%), tamat SD (35,77%), tamat SMP (9,06%), tamat SMA (13,75%), tamat SMK (1,81%). Untuk kota Kupang pendidikan penduduk lebih baik dengan proporsi (9,46%) tidak punya



ijasah, tamat SD (22,44%), tamat SMP (12,23%), tamat SMA (35,14%), tamat SMK,(5,06%). Kondisi Angka Pendidikan yang di tamatkan dapat dilihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
Angka Pendidikan yang ditamatkan Per Kabupaten/Kota se NTT
Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Tidak Punya Ijasah	Tamat SD	Tamat SMTP	Tamat SMU	Tamat SMU Kejuruan
1	Sumba Barat	41,73	29,07	9,49	14,10	1,56
2	Sumba Timur	41,01	29,03	9,56	11,00	2,80
3	Kupang	31,13	36,19	11,04	13,85	2,26
4	TTS	38,80	34,99	8,88	12,31	1,03
5	TTU	30,51	40,57	7,73	12,13	1,66
6	Belu	34,87	35,32	9,56	13,28	1,30
7	Alor	30,33	40,29	8,95	12,22	2,52
8	Lembata	68,64	39,83	8,36	11,55	2,15
9	Flores Timur	34,72	36,67	9,88	11,85	2,52
10	Sikka	42,42	28,74	8,73	11,87	1,67
11	Ende	34,81	30,77	9,81	13,36	3,24
12	Ngada	22,15	48,68	7,86	12,23	2,14
13	Manggarai	33,15	38,78	8,79	12,20	0,57
14	Rote Ndao	34,24	38,43	6,81	14,16	0,87
15	Manggarai Barat	31,90	50,95	6,17	7,20	0,36
16	Sumba Barat Daya	40,11	33,33	8,22	12,79	1,86
17	Sumba Tengah	49,87	27,94	8,58	10,64	0,29
18	Nagekeo	29,82	40,08	9,29	11,78	2,00
19	Manggarai Timur	28,70	53,52	6,80	6,51	0,60
20	Kota Kupang	9,46	22,44	12,23	35,14	5,06
21	Sabu Raijua	38,22	36,22	10,37	11,41	0,52
22	Malaka	39,53	31,59	8,54	14,86	0,35
Jumlah		33,30	35,77	9,06	13,75	1,81

Sumber : BPS – NTT Dalam Angka 2018

5) Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup sebagai indikator pembangunan kesehatan menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Usia harapan hidup untuk Nusa Tenggara Timur tahun 2013mencapai (68,05) dan tahun 2014 mencapai (65.91) mengalami penurunan 2,05 dan kembali naik pada tahun 2015 mencapai (65,96) atau kenaikan sebesar 0,05 dari tahun 2014, hingga tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 66,04. Dalam kurun waktu tersebut, dari 22 Kabupaten/Kota, hanya Kota Kupang yang angka harapan hidupnya mencapai 70 tahun (73,46). Sedangkan angka harapan hidup terendah di Kabupaten Sabu Raijua (58,38).



Tabel 1.9.
Angka Harapan Hidup per Kab/Kota
Tahun 2013- 2017

No	Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	65,75	66,11	66,11	66,15	66,20
2	Sumba Timur	62,33	63,48	63,88	64,00	64,12
3	Kabupaten Kupang	65,94	62,97	63,17	63,33	63,49
4	Timor Tengah Selatan	67,26	65,45	65,55	65,60	65,65
5	Timor Tengah Utara	69,19	65,89	66,09	66,14	66,19
6	Belu	66,75	62,31	63,01	63,21	63,42
7	Alor	67,67	59,73	60,23	60,35	60,47
8	Lembata	66,88	65,35	65,85	66,02	66,19
9	Flores Timur	68,79	63,88	64,28	64,36	64,45
10	Sikka	69,66	65,70	66,10	66,20	66,30
11	Ende	65,31	64,27	64,37	64,42	64,48
12	Ngada	67,46	67,32	67,32	67,34	67,36
13	Manggarai	67,74	64,78	65,48	65,66	65,84
14	Rote Ndao	68,74	62,86	62,86	63,13	63,41
15	Manggarai Barat	66,84	65,98	65,98	66,19	66,19
16	Sumba Tengah	63,14	67,65	67,65	67,73	67,74
17	Sumba Barat Daya	64,20	67,08	67,08	67,71	67,76
18	Nagekeo	63,89	66,05	66,25	66,31	66,36
19	Manggarai Timur	68,19	67,27	67,27	67,39	67,40
20	Sabu Raijua	68,01	57,98	58,38	58,69	59,00
21	Malaka	66,87	64,15	64,15	64,27	64,29
22	Kota Kupang	73,46	68,14	68,34	68,46	
	Nusa Tenggara Timur	68,05	65,91	65,96	66,04	

Sumber: BPS - NTT Dalam Angka 2017

D. Kondisi Ekonomi.

1. Potensi Unggulan Daerah.

Potensi unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan.

a. Pertanian.

Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pertanian lahan kering. Oleh karena itu, produk pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat maka dilaksanakan ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana prasarana pertanian yang efisien dan memadai. Adapun produktivitas tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.10.
Produktivitas Tanaman Pangan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017

Tanaman Pangan	Uraian	Tahun		Bertambah/ Berkurang
		2016	2017*)	
Padi	Luas Tanam (ha)	280.161	316.183	36,022
	Luas Panen (ha)	259.270	307.989	48,719
	Produktivitas (kw/ha)	35,65	35,42	23
	Produksi (Ton)	924.403	1.090.821	16,64
Jagung	Luas Tanam (ha)	299.649	339.043	39,39
	Luas Panen (ha)	265.318	313.149	47,83
	Produktivitas (kw/ha)	25,95	25,86	9
	Produksi (Ton)	688.432	809.830	121,39
Kedelai	Luas Tanam (ha)	7.807	6.192	1,61
	Luas Panen (ha)	6.711	5.007	1,70
	Produktivitas (kw/ha)	8,69	12,59	390
	Produksi (Ton)	5.834	6.303	0,46
Kacang Tanah	Luas Tanam (ha)	13.857	12.128	1,72
	Luas Panen (ha)	11.474	11.899	0,42
	Produktivitas (kw/ha)	9,09	8,78	31
	Produksi (Ton)	10.431	10.445	0,01
Kacang Hijau	Luas Tanam (ha)	11.590	11.067	0,42
	Luas Panen (ha)	10.586	10.806	0,22
	Produktivitas (kw/ha)	5,79	6,69	90
	Produksi (Ton)	6.128	7.232	1,10
Ubi Kayu	Luas Tanam (ha)	53.418	60.689	7,27
	Luas Panen (ha)	51.336	59.227	7,89
	Produktivitas (kw/ha)	120,44	138,98	18,54
	Produksi (Ton)	618.281	823.114	204,83
Ubi Jalar	Luas Tanam (ha)	7.919	9.682	1,76
	Luas Panen (ha)	7.772	9.453	1,68
	Produktivitas (kw/ha)	71,34	77,17	583
	Produksi (Ton)	55.448	72.954	17,50

Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan angka sementara tahun 2017 menunjukkan bahwa luas panen, produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan di tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2016, hal ini terjadi karena adanya intervensi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menuju upaya pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai selama 4 tahun (tahun 2016 – 2019).

Komoditi padi, luas panen pada tahun 2016 sebesar 280.161 ha meningkat menjadi 316.183 ha tahun 2017. Komoditi jagung, luas panen pada tahun 2016 sebesar 299.694 ha meningkat menjadi 339.043 ha di tahun 2017 dan produksi jagung juga meningkat dari 688.432 ton di tahun 2016 menjadi 809.830 ton ditahun 2017.

Peningkatan yang terjadi pada kedua komoditi ini disebabkan adanya intervensi pemerintah berupa intensifikasi, diversifikasi, perluasa areal tanam (PAT), pencetakan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi serta adanya *carry over* dari pertanaman tahun 2016 karena terjadi pergeseran jadwal tanam pada akhir tahun atau bulan Desember tahun

2016 sehingga pertanaman baru menghasilkan atau dipanen pada bulan Maret dan April 2017.

Untuk komoditi kacang-kacangan dan umbi-umbian berdasarkan Angka Sementara tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan jika dibanding dengan tahun 2016.

Komoditi kedelai, luas panen pada tahun 2016 sebesar 6.711 ha dan mengalami penurunan menjadi 5.007 ha atau sebesar 1,70 persen di tahun 2017 penurunan luas panen disebabkan karena terjadi pergeseran waktu tanam, dimana luas tambah tanam (LTT) kedelai untuk semua kabupaten yang mendapat alokasi pertanaman melalui Tugas Pembantuan dan APBN maupun APBN-P baru melakukan proses penanaman pada akhir bulan November dan bulan Desember tahun 2017 sehingga prediksi panen baru dapat dilakukan pada bulan akhir bulan Pebruari dan Maret tahun 2018 sedangkan produksi kedelai pada tahun 2016 sebesar 5.834 ton meningkat menjadi 6.303 ton atau sebesar 0,46% persen di tahun 2017.

Sedangkan untuk komoditi kacang-kacangan dan umbi-umbian lainnya berdasarkan Data Angka Sementara Tahun 2017 menunjukkan peningkatan baik itu luas panen maupun produksi. Tanaman kacang tanah luas panen meningkat sebesar 0,42 persen dan produksi meningkat sebesar 0,01 persen pada 2017, Tanaman kacang hijau luas panen meningkat sebesar 0,22 persen dan produksi meningkat sebesar 1,10 persen pada tahun 2017, Tanaman ubi kayu luas panen meningkat sebesar 7,89 persen dan produksi meningkat sebesar 204,83 persen pada tahun 2017, Tanaman ubi jalar luas panen meningkat sebesar 1,68 persen dan produksi meningkat sebesar 17,50 persen.

b. Perkebunan.

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Kemiri, Cengkeh dan Vanili. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor. Produksi tujuh komoditas utama perkebunan Tahun 2013-2016 seperti pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11.
Produktivitas Perkebunan Tahun 2013-2017

No	Komoditi	Uraian	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Kelapa	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	92.132	89.650	87.596	89.211	899,405
		Produksi (Ton)	66.676	68.037	68.217	68.496	68,765
		Produktifitas kg/ha	724	759	779	768	769
2.	Jambu Mete	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	83.132	83.541	85.140	87.375	86,600
		Produksi (Ton)	43.035	44.030	47.480	49.440	49,875
		Produktifitas kg/ha	518	527	558	566	576
3.	Kopi	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	39.557	42.424	40.750	41.535	41,546
		Produksi (Ton)	21.835	21.488	21.217	22.228	21.363
		Produktifitas kg/ha	552	643	521	535	1,094
4.	Kakao	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	24.718	25.888	28.517	29.814	30,543
		Produksi (Ton)	14,862	15.063	18.408	19.096	19,295
		Produktifitas kg/ha	601	582	646	641	632
5.	Kemiri	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	42.595	45.007	45.972	46.105	49.100
		Produksi (Ton)	24,224	25.125	26.174	26.248	28,090
		Produktifitas kg/ha	569	558	569	569	572
6	Cengkeh	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	6.305	6.990	6.969	7.194	7,286
		Produksi (Ton)	2,460	2.632	3.012	3.169	3,246
		Produktifitas kg/ha	390	377	432	441	446
7	Vanili	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	1.195	1.181	1.056	1.146	1,192
		Produksi (Ton)	465	444	401	463	499
		Produktifitas kg/ha	389	376	380	404	419

Sumber: Dinas Pertanian Prov. NTT Tahun 2017

Tabel 1.11. di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 - 2017 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu kelapa, jambu mente, kopi, kakao, kemiri cengkeh dan vanili. Peningkatan produksi kelapa, jambu, mente, kopi, kakao, kemiri, cengkeh dan vanili kerana adanya penambahan luas areal tanaman yang menghasilkan sebagai akibat dari intervensi Pemerintah melalui kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi.

Kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat yang banyak diusahakan masyarkat petani di NTT. Pada table diatas terlihat bahwa produksi kelapa di NTT selama 5 Tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata 0,91 persen per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya produksi kelapa yang terjadi di Pulau/Daratan Timor, Alor dan Flores masing-masing 0,16 persen; 5,52 persen; dan 1,60 persen produksi kelapa tahun 2017 terbanyak di Kabupaten Malaka yakni 9.988 ton.



Perkembangan produksi jambu mente dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 4,83 persen per tahun. Peningkatan ini merata di seluruh daratan di NTT.

Produksi komoditi kemiri terbanyak di daratan Flores dengan produksi sebanyak 14.483 ton atau 52,84 persen dari total produksi seluruh NTT.

Produksi komoditi kopi tahun 2017 sebanyak 17.264 ton atau 80,81 persen dari total produksi seluruh NTT (22.363) ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Manggarai Timur, Ngada dan Ende. dalam kurun waktu 5 tahun terakhir komoditi ini mengalami penurunan angka produksi dikarenakan banyak tanaman yang sudah tua serta rusak dan baru dilakukan proses peremajaan kembali sehingga untuk peningkatan produksinya ditargetkan 4-5 tahun ke depan.

Komoditi kakao dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun 2016.

Komoditi cengkeh produksi tahun 2017 berjumlah 3.246 ton atau meningkat sebesar 2,37 persen di banding tahun 2016 sedangkan komoditi vanili tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,21 % dengan jumlah produksi 499 ton di bandingkan tahun 2016.

c. Peternakan.

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2017 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 1.12.

Tabel 1.12.
Perkembangan Populasi Ternak
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018

Jenis ternak	Populasi (Ekor/Tahun)		Perkembangan	
	2017	2018*)	Ekor	%
Sapi Potong	1.007.608	1.027.256	19.648	1,95
Sapi Perah	45	45	0	0,00
Kerbau	162.658	165.551	2.893	1,78
Kuda	112.589	114.514	1.925	1,71
Kambing	674.227	693.557	19.330	2,87
Domba	67.579	68.388	809	1,20
Babi	2.073.446	2.141.246	67.800	3,27
Ayam buras	10.362.140	10.430.260	68.120	0,66



Jenis ternak	Populasi (Ekor/Tahun)		Perkembangan	
	2017	2018*)	Ekor	%
Ayam ras pedaging	1.237.777	6.300.121	62.344	1,00
Ayam ras petelur	198.887	200.554	1.667	0,8
Itik	310.003	317.383	7.380	2,38
Kelinci	13.401	13.827	426	3,18
Puyuh	3.589	3.685	46	2,67
Merpati	10.180	10.450	270	2,65
Itik manila	35.747	36.527	780	2,18

Sumber: Dinas Peternakan Prov. NTT 2019
 Keterangan: *) Angka sementara

Berdasarkan tabel 1.12 diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Peningkatan populasi ternak sapi dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang cukup menggembirakan untuk mewujudkan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak, dimana perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif.

d. Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data BPS, pembangunan perikanan di NTT didukung potensi panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai ±200.000 km², dengan potensi pendukung sektor perikanan adalah hutan mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies), terumbu karang sebanyak ±160 Jenis dari 17 Famili, rumah tangga perikanan tangkap tahun 2017 sebanyak 32.778 Kepala Keluarga dan perikanan budidaya sebanyak 37.954 Kepala Keluarga. Adapun produksi perikanan di Provinsi NTT Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.13 berikut.

Tabel 1.13.
Produksi Perikanan Tahun 2016-2018

No	Deskripsi	2016	2017	2018
1.	Perikanan Tangkap			
	a. Jumlah tangkapan (ton)	123.765	138,367,96	141,135,32**
	b. Jumlah kapal penangkap ikan	32.147	32.147	32.239
	c. Jumlah RTP	32.451	25.002	25.094
	d. Jlh TPI /PPI (unit)	23	23	26
2.	Perikanan Budidaya			
	a. Luas tambak (Ha)	977,9	497,93	497,93**
	b. Luas kolam (Ha)	369	147,18	147,18**
	c. Produksi perikanan (ton)	1.836.869,6	1.941.707,75	1,953.524,54
	d. Jumlah RTP (KK)	37.657	37.657	37,105
	e. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	1	1	1
	f. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal	16	12	12



No	Deskripsi	2016	2017	2018
3.	Perusahaan			
a.	Pengalengan ikan (unit)	1	-	-
b.	Perusahaan pengolahan perikanan	35	63	63
c.	Pembenihan (Hatchery) (unit)	1	1	1
d.	Ekspor hasil perikanan (ton)	2.251	719,93	1.281.16

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, 2018
Keterangan : ** Angka Sementara

Jumlah Hasil Tangkapan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 138.367.96 Ton pada tahun 2017 menjadi 141.135.32 pada tahun 2018, hal ini disebabkan dengan adanya bantuan belanja hibah kepada masyarakat nelayan berupa kapal perikanan berukuran 3GT sebanyak 132 Unit dan perahu ketinting sebanyak 195 unit, sehingga memberikan dampak juga kepada penambahan jumlah kapal penangkap ikan dan jumlah RTP Perikanan.

Pada perikanan budidaya, jumlah produksi juga mengalami peningkatan, yaitu produksi sebanyak 1,953.524,54 Ton (dominasi rumput laut, Mutiara, kerapu) pada tahun 2018 dari produksi sebanyak 1.941.707,75 Ton pada tahun 2017, hal ini disebabkan adanya pengembangan budidaya rumput laut di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur 2 kelompok, Kabupaten Sumba Barat Daya 2 kelompok dan Sabu Raijua 2 kelompok.

Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari Potensi Lestari (MSY) sebanyak 388,7 Ton/Tahun, jumlah ikan ekonomis : 1. Ikan Pelagis; (Tuna Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung). 2. Ikan Demersal: (Kerapu, Ekor kuning, kakap, bambangan dll) 3. Komodi lainnya: (Lobster, Cumi-Cumi) Kerang Darah Dll).

e. Kehutanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, luas kawasan hutan NTT sebesar 1.808.990 Ha. Bahwa sebagian kawasan hutan tersebut mengalami perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, sehingga pada tahun 2014 ditetapkan regulasi baru Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 3911 Tahun 2014 tentang Kawasan hutan dan Konservasi perairan Provinsi NTT, seluas 1.784.751 ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan



atau sama dengan tahun 2016. Adapun luas kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat apda tabel 1.14 berikut.

Tabel 1.14.
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya
Tahun 2016-2018

No	Fungsi kawasan hutan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Kawasan Suaka alam/kawasan perairan	521.412	29,93	521.412	29,93
2	Hutan Lindung	684.572	39,29	684.572	39,29
3	Hutan Produksi Terbatas	169.707	9,74	169.707	9,74
4	Hutan Produksi Tetap	288.155	16,54	288.155	16,54
5	Hutan Produksi dpt dikonversi	78.494	4,51	78.494	4,51

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. NTT, 2018

Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan, telah dilaksanakan pembangunan kehutanan berupa kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, Pengembangan Tanaman Cendana, Uji Coba Pembuatan Agroforestry, Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove, Uji Coba Stek Pucuk Jati, Pembangunan Hutan Berbasis Gender, Pengembangan Tanaman Kayu Merah, Pembuatan Sarana Penyuluhan berupa Persemaian Tanaman Kehutanan di Maupoly, Perencanaan Pengelolaan DAS dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Non Kayu dan Hasil Hutan. Hasil produksi kayu Rimba Campuran, Jati, Mahoni, Kayu Merah, Kayu Sengon, Kemiri, Gamelina dan Kapuk. Sedangkan produk non kayu yang menonjol yaitu asam, kemiri, cendana, kayu papi dan madu.

2. Indikator Ekonomi Daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh melambatnya impor antar daerah, sementara indikator lain dari sisi permintaan seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maupun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2018, dimana akselerasi pertumbuhan terutama di dorong oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah, berdasarkan lapangan usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran menjadi



pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,11%, meskipun lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh 5,17%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, PDRB Provinsi NTT selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.15.
PDRB NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (milyard Rp.)	61,325,3	68,500,4	76,190,9	83,947,8	91.159,7
PDRB ADHK Tahun 2010 (milyard Rp.)	51.505,2	54.108,0	56.770,8	59.705,3	62.788
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	12,378,9	13,599,7	14,867,1	16,132,9	17241,6
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)	10,396,7	10,873,9	11,661,0	11,474,1	11,875,5

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Secara total, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga (atas dasar harga) berlaku di tahun 2017 sebesar 91.159,7 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) konstan 2010 maka PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 62.788,1 miliar Rupiah. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2017 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,5%; 5,4%; 5,1%; 4,9%; 5,2% dan 5,2%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 13,6%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2013-2017 PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 61.325,3 miliar Rupiah (2013); 68.500,4 miliar Rupiah (2014); 76.190.9 miliar Rupiah (2015); 83.947,8 miliar Rupiah (2016); dan 91.159,7 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi



produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Secara umum PDRB per kapita Provinsi NTT menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk NTT rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

c. Inflasi.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, triwulan IV 2018), Inflasi yang cukup signifikan yang menyebabkan inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai sebesar 3,07%. Nilai inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 2,00%. Inflasi yang tinggi ini disebabkan oleh tajamnya kenaikan harga tiket pesawat terbang yang terjadi secara nasional, ditambah juga tingkat harga daging ayam ras perkilogram di Provinsi NTT yang tercatat paling tinggi dibandingkan nasional masih belum menemukan titik temu solusinya secara keseluruhan, sepanjang tahun 2018 inflasi Provinsi NTT menunjukkan kondisi yang masih cukup terkendali. Walaupun sempat mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada komoditas bahan pangan seperti beras, di awal tahun namun terjadi stabilitasi harga hingga mencapai puncak deflasi di triwulan III 2018.

Inflasi sepanjang tahun 2018 di Provinsi NTT mencapai 3,07% walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 2,00% namun pencapaian ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar $3,5 \pm 1\%$. Terkendalnya harga sebagian bahan makanan pada komoditas ikan segar dan sayur-sayuran menjadi penyebab utama terkendalnya inflasi di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, tren inflasi masih mengalami pola musiman dengan deflasi di kisaran triwulan III di ikuti dengan kenaikan yang cukup tinggi pada dua bulan menjelang akhir tahun, namun begitu jika dibandingkan dengan tahun 2017, besar deflasi yang terjadi di bulan oktober tidak terlalu signifikan, terlebih lagi kelangkaan pangan di awal tahun 2018 masih memberi dampak pada tingkat harga secara keseluruhan, sehingga secara tahunan inflasi di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang berarti namun masih relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Operasi pasar yang rutin dilakukan bersama dengan PT BULOG dan Satgas Pangan juga

mampu menahan kenaikan komoitas beras yang sebelumnya mengalami lonjakan diawal tahun 2018.

Pada akhir tahun 2018 Provinsi NTT mengalami inflasi angkutan udara tertinggi paling tidak dalam 4 tahun terakhir secara tahunan. Walaupun secara bulanan tetap mengalami pola inflasi pada bulan November dan Desember, namun inflasi angkutan udara pada tahun 2018 ini cukup besar dampaknya bagi Provinsi Kepulauan seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian penduduknya juga berasal dari luar provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KEKR NTT, Maret 2018) jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1,13 Juta Jiwa atau 21,03%. Secara historis, prosentase penduduk miskin NTT terus mengalami perbaikan dari periode-periode sebelumnya. Yakni sebesar masing-masing adalah 21,38% dan 22,01 % pada agustus 2017 dan Agustus 2016. Jika dibandingkan secara nasional, persentase kemiskinan Provinsi NTT melampaui persentase kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,66% dengan jumlah rill 25,7 juta jiwa. Provinsi NTT berada pada posisi ketiga terbawah nasional hanya lebih baik dari Papua Barat dengan jumlah rill 213,7 ribu jiwa atau 22, 66% dan Papua dengan jumlah 915,22 ribu jiwa atau sebesar 27,43% penduduknya.

Secara lokasi komposisi penduduk miskin di Provinsi NTT per November 2018 terdiri dari 1,02 juta jiwa atau 24,65% penduduk di pedesaan dan 114,06 ribu jiwa atau 9,09 penduduk diperkotaan. Jumlah penduduk miskin dipedesaan mengalami penurunan sebanyak 160 orang sedangkan di perikotaan berkurang signifikan sebanyak 7.890 orang.

Pada sisi lain garis kemiskinan (GK) pada september 2018 mengalami kenaikan 1,46% dibandingkan maret 2018 dari Rp. 354.898 menjadi RP. 360.069 perkapita. Kenaikan ini didorong oleh komoditas makanan yang merupakan komoditas terbesar penyumbang GK sebesar 78,06% komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar antara lain: beras, rokok kretek filter dan gula pasir. Komoditas non makanan terdiri dari perumahan, pendidikan, kayu bakar, perlengkapan mandi, bensin, listrik dan angktutan. Komponen makanan dan non makanan pada Septemer 2018 msing-masing sebesar 0,77% dan 3,96%. Kenaikan ini terjadi baik diwilayah kota maupun pedesaan.

Peningkatan GK yang di iringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di NTT.

Pengukuran kedalaman dan keparahan kemiskinan terdapat indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi NTT pada September 2018 tercatat sebesar 4,549 meningkat dari Maret 2018 yang sebesar 3,908. Indeks keparahan kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. (P2) digunakan juga sebagai indikator intensitas kemiskinan dimana (P2) meningkat dari 1,026 menjadi 1,443 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan indeks kedalaman dan keparahan di pedesaan yang naik cukup signifikan dari 4,593 menjadi 5,616 untuk (P1) serta 1,224 menjadi 1,819 pada (P2). Sedangkan di perkotaan kedua indeks menunjukkan pola penurunan dengan masing-masing dari 1,605 menjadi 1,032 (P1) dan 0,363 menjadi 0,202 (P2).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur, maka Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni:

I. VISI DAN MISI

A. VISI

“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Visi di atas mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara Timuryang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitasdengan memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan haksertamenghargai pendapat dan menerima pendapat orang lain.

Berkualitas.

Kualitas, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing.

Sejahtera.

Sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur.

Demokratis.

Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan.

Dalam Bingkai Negara Republik Indonesia.

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam menyiapkan kerangka kerja agenda pembangunannya yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing.

Melalui misi ini, pemerintah ingin meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat baik yang di kota maupun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah maupun kualitas terutama penyebarannya. Namun, perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien.

2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Melalui misi ini, pemerintah ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda Nusa Tenggara Timur dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.

Misi ini menekankan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UKM dan Koperasi. Untuk itu, perekonomian Nusa



Tenggara Timur yang saat ini masih mengandalkan sektor-sektor tradisional harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri dan tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah.

Misi ini menunjukkan perlunya peningkatan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Misi ini menunjukkan pentingnya penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Sudah menjadi komitmen pembangunan nasional dan dunia untuk memperhatikan kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, pemerintah ingin meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan akses perempuan dan anak dalam sektor publik serta meningkatnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

7. Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan.

8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana alam.

Misi ini menekankan pada percepatan penanggulangan masalah yang mendasar di masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan masyarakat desa khususnya, yakni kemiskinan, bencana yang setiap tahun dialami masyarakat dan posisi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan yang memerlukan strategi tersendiri dalam penanganannya serta posisi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Negara lain seperti Timor Leste dan Australia yang rawan terhadap masalah-masalah lintas batas termasuk penyelundupan.

II. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH.

A. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.

Strategi pembangunan daerah merupakan pendekatan utama mengenai upaya-upaya pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Strategi Pokok Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Strategi Kemitraan

Satuan pemerintahan Provinsi mengemban misi representasi pemerintah Pusat dan sekaligus sebagai daerah otonom. Karenanya, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab untuk mengembangkan kemitraan secara internal dan eksternal. Kemitraan internal dengan kabupaten/kota didasarkan atas asas/prinsip kebersamaan, solidaritas dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kemajuan bersama serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kemitraan daerah Provinsi, LSM regional/nasional/ internasional maupun Negara sahabat merupakan bentuk kemitraan eksternal.

2. Strategi Berkelanjutan

Program pembangunan yang digulirkan merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Melalui proses pengkajian dan evaluasi yang akurat, dipetik hikmah dan pengalaman untuk menata program-program pembangunan selanjutnya dan tetap merangkainya sebagai suatu jalinan yang bermanfaat bagi rakyat. Pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

3. Strategi Peningkatan dan Percepatan

Pembangunan diarahkan untuk dapat mencapai perubahan dari kondisi pembangunan yang saat ini sedang berkembang dan belum optimal menuju kondisi perkembangan pembangunan yang lebih pesat, berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai perubahan dimaksud, maka perlu dilakukan peningkatan dan percepatan melalui program dan kegiatan yang berdaya ungkit besar dan pro rakyat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.



4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan peran dan akses masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Terkait dengan strategi tersebut, dikembangkanlah spirit dan paradigma **Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)**, yaitu mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (*belanja publik*) dari pada untuk belanja pemerintah (*belanja aparatur*) dengan penerapan penganggaran program/kegiatan dari berbagai sumber-sumber dana lebih Pro-Rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

5. Strategi Keterpaduan Antar Sektor

Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pembangunan dan komponen bangsa baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Tiap pihak yang terkait mewakili berbagai kepentingan dan sektor yang menjadi kewenangannya, karena itu dibutuhkan payung integrasi guna menciptakan keterpaduan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam upaya percepatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk megoptimalkan 5(lima)strategi pokok pembangunan yang menjadi landasan seluruh program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan yang mendukung strategi pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan masing-masing misi pembangunan.

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing.

Arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pemantapan kualitas pendidikan, diarahkan pada:

- a. Pendidikan dasar tanpa biaya bagi masyarakat miskin melalui BOS dan Beasiswa;
- b. Peningkatan Partisipasi Sekolah SD/MI 96.47 % dan SMP/MTS 90.63%;



- c. Wajib Belajar 9 Tahun;
- d. Peningkatan pendidikan yang ditamatkan SD 100% , SMP 98.46%, SMA 95.06 % dan SMK 98.37 %;
- e. Penurunan penduduk buta-huruf yang berumur > 15 tahun sebesar 8.49 %;
- f. Peningkatan Penduduk berijazah;
- g. Peningkatan rasio sekolah dengan penduduk usia sekolah;
- h. Peningkatan kualitas dan jumlah kelulusan;
- i. Peningkatan rasio guru murid;
- j. Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi);
- k. Peningkatan jumlah guru berijazah S1;
- l. Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan;
- m. Peningkatan sekolah kondisi baik;
- n. Penerapan kebijakan pendidikan berbasis sekolah 48%;
- o. Peningkatan Pengawasan kependidikan;
- p. Peningkatan perluasan dan mutu Perpustakaan;
- q. Pengembangan perpustakaan berbasis IT;
- r. Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan;
- s. Terdapat 12 organisasi kepemudaan yang aktif ;
- t. Pengembangan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda;
- u. Peningkatan kembangkan kewirausahaan generasi pemuda;
- v. Peningkatan organisasi olah raga;
- w. Peningkatan pembinaan atlet-atlet berprestasi;
- x. Penyelenggaraan lomba dan pertandingan/kejuaraan di daerah;
- y. Peningkatan pembinaan jenis olah raga prestasi;
- z. Peningkatan jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional dan Internasional;
- aa. Peningkatan jumlah Lapangan Olah raga;
- ab. Peningkatan Pemerataan parasarana olah raga.

2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat di jangkau seluruh masyarakat, diarahkan pada:

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan;
- b. Kemitraan dan koordinasi dalam pendataan kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;



- c. Peningkatan kapasitas institusi pelayanan kesehatan dan penguatan sistem rujukan;
- d. Pembangunan kesehatan Preventif terpadu;
- e. Peningkatan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Yohannez melalui:
 - a). peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
 - b). Pemindahan Lokasi Rumah Sakit ke tempat yang lebih layak
- f. Pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan koordinasi pelayanan KB.
- h. (1) Peningkatan kepesertaan masyarakat dalam JKN,(2) Peningkatan alokasi anggaran pembiayaan kesehatan bersumber APBD; (3) Kemitraan dengan donor agencies dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan perorangan dan masyarakat; dan (4) Realokasi anggaran secara proporsional di setiap sub sistem kesehatan daerah.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal:

- a. Peningkatan Produksi pangan;
- b. Pengembangan pangan khas daerah;
- c. Peningkatan Pengelolaan kawasan hutan produksi;
- d. Peningkatan Peranan komoditas jagung sebagai pendukung ketahanan pangan nasional sesuai kebijakan MP3EI;
- e. Pengembangan pembibitan ternak;
- f. Pencegahan penyakit terpadu;
- g. Peningkatan skala kepemilikan ternak;
- h. Peningkatan skala kepemilikan ternak;
- i. Pengembangan cendana sistem kontrak hidup;
- j. Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana;
- k. Penataan Destinasi dan pelayanan wisata berbasis Desa Wisata;
- l. Peningkatan investasi dan daya serap tenaga kerjakepariwisataan;
- m. Pengembangan SDM pariwisata;
- n. Pembentukan Badan Promosi Wisata.

4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah.

Arah kebijakan dalam rangka pembenahan sistem hukum daerah dan keadilan, yakni:



- a. Pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan 5 tahun;
- b. Pengawasan Produk Hukum dilaksanakan 5 tahun;
- c. Koordinasi penegakan hukum dan HAM dilaksanakan 5 tahun;
- d. Evaluasi dan kaji ulang produk hukum daerah dilaksanakan 5 tahun;
- e. Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilaksanakan tahun 1-2;
- f. Sosialisasi produk hukum dilaksanakan 5 tahun;
- g. Peningkatan kompetensi layanan publik dilaksanakan 5 tahun;
- h. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dilaksanakan 5 tahun;
- i. Menjamin kepastian hukum dan HAM pelayanan publik dilaksanakan selama 5 tahun;
- j. Terpeliharanya situasi yang kondusif di daerah selama 5 Tahun;
- k. Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kualitas Demokrasi Selama 5 Tahun
- l. Peningkatan kinerja yang terukur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 5 tahun
- m. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan selama 5 tahun menuju opini WTP
- n. Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik selama 5 tahun.
- o. Peningkatan sistem informasi dan manajemen pendapatan dan aset daerah selama 5 Tahun. Teroptimalisasinya pendayagunaan Aset bagi peningkatan PAD selama 5 Tahun.
- p. Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta meningkatkan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional;
- q. Peningkatan ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional serta meningkatkan partisipasi politik dan kualitas;
- r. Demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan dan Partai Politik);
- s. Pengawasan dan penegakan PERDA dan PERKADA
- t. Operasi gabungan dengan TNI/POLRI dan instansi terkait
- u. Bimtek/pelatihan fungsional bagi aparat Satpol PP dan Linmas;
- v. Perekrutan Tenaga Banpol Sat. Pol PP;

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup, adalah:

- a. Sinkronisasi tata ruang RPJMD dan Renstra SKPD;
- b. Peningkatan jalan dan jembatan Provinsi;
- c. Revitalisasi modal angkutan darat, laut dan udara;
- d. Peningkatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi partisipatif;
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengadaan barang dan jasa;
- f. Pemuktahiran sistem pengadaan barang dan jasa;
- g. Peningkatan dan pemeliharaan peralatan LAB dan SDM;
- h. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan peralatan kebinamargaan;
- i. Peningkatan kualitas SDM;
- j. Pembangunan perumahan layak huni yang berbasis lingkungan;
- k. Peningkatan jaringan distribusi air bersih baik HU maupun SR;
- l. Penyediaan sarana dan prasarana air baku;
- m. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
- n. Deliniasi kawasan hutan;
- o. Pembangunan sarana dan prasarana pengawasan kehutanan;
- p. Pembangunan sarana dan prasarana KPHL;
- q. Peningkatan SDM Pengawas;
- r. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kawasan hutan;
- s. Rehabilitasi dan reboisasi;
- t. Penguatan kelembagaan FORDAS;
- u. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah;
- v. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah GRK;
- w. Pengembangan PLTS, Mikrohidro, bio gas yang dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana;
- x. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, Tenaga Uap, Tenaga angin, Destilasi Air Laut, Panas bumi, biogas Dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana dengan mengacu pada RTRWP;
- y. Implementasi Praktek pertambangan yang baik dan berbasis tata ruang.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda, sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan perempuan yang optimal dari awal hingga akhir tahun rencana;
- b. Peningkatan dukungan perlindungan perempuan, dilaksanakannya dari awal hingga akhir tahun rencana;
- c. Optimalisasi dukungan perlindungan anak, dilaksanakan dari awal hingga akhir tahun rencana

7. Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dibidang Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Pembangunan kelautan dan perikanan berbasis Pembangunan “Blue Economic”;
- c. Optimalisasi potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. Percepatan penurunan kemiskinan dan pertumbuhan industri perikanan;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kelompok nelayan;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kelompok nelayan;
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kelompok nelayan;
- h. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan desain perencanaan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis klaster dan potensi;
- i. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan; ekonomi daerah;
- j. Percepatan pertumbuhan pasar industri perikanan yang berdaya; saing dipasar global;
- k. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- l. Pembinaan penduduk pesisir berorientasi kelautan dan perikanan;
- m. Pembinaan usaha budidaya perikanan laut dan darat.

8. Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.

Arah kebijakan dalam rangka Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan, sebagai berikut;

- a. Peningkatan keterpaduan dan sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Lanjutan program Desa Mandiri Anggur Merah;
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat penyandang masalah sosial;
- e. Peningkatan deteksi dini daerah rawan bencana dan pemulihan dampak bencana;
- f. Pembangunan ekonomi secara terpadu kawasan perbatasan;
- g. Peningkatan kemitraan dan keterpaduan penanganan batas wilayah antar negara dan batas wilayah Kabupaten;

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan didukung melalui pelaksanaan 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan Prioritas Pembangunan. Pencapaian Misi pembangunan melalui agenda dan program prioritas sebagai berikut:

1. Misi Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam

Rangka Terwujudnya Mutu

Pendidikan,

Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Tujuan Agenda: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan yang bermutu tinggi dan berdaya saing.
3. Program Prioritas.
 1. Program Urusan Pendidikan;
 2. Program Urusan Kebudayaan;
 3. Program Urusan Perpustakaan;
 4. Program Urusan Perpustakaan;
 5. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;



2. Misi Meningkatkan Derajat dan

Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.

a. Agenda Pembangunan Kesehatan.

Tujuan

Agenda:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu dan dapat dijangkau seluruh masyarakat.

b. Program Prioritas.

1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Gizi;
6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
7. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan;
8. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
10. Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan;

3. Misi Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

a. Agenda

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata

Tujuan Agenda: Mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan,

pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan kemampuan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan keunggulan potensi lokal.

b. Program Prioritas:

1. Program Urusan Ketenagakerjaan
2. Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi;
4. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;



5. Program Urusan Penanaman Modal ;
6. Program Urusan Pariwisata;
7. Program Urusan Ketahanan Pangan;
8. Program Urusan Pertanian;
9. Program Urusan Kehutanan;
10. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan;

4. Misi Pembinaan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah;

a. Agenda Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah

Tujuan Agenda: Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.

b. Program Prioritas:

1. Program Urusan Perencanaan;
2. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
3. Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat;
4. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
5. Program Urusan Kearsipan;
6. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi;
7. Program Urusan Umum.

5. Misi Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

a. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Tujuan Agenda: Meningkatkan konektivitas wilayah dengan tetap memperhatikan keserasian dan kesinambungan pembangunan sesuai dengan daya dukungnya.

b. Program Prioritas:

1. Program Urusan Pekerjaan Umum;
2. Program Urusan Perhubungan;
3. Program Urusan Lingkungan Hidup;
4. Program Urusan Kehutanan;
5. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

6. Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga,

Pemberdayaan Perempuan,

serta Perlindungan dan



Kesejahteraan Anak.

- a. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Tujuan Agenda: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagian anak.

- b. Program Prioritas:

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Hibah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

7. Misi Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan.

- a. Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan.

Tujuan Agenda: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan kelautan melalui (i) peningkatan skill sumberdaya pelaku produksi perikanan secara berkelanjutan, (ii) peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan, baik dalam produksi penangkapan dan budidaya perikanan serta dalam pengolahananya, (iii) peningkatan produktivitas sumberdaya perikanan dan kelautan, (iv) peningkatan nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan dan kelautan.

- b. Program Prioritas:

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan.

8. Misi Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.

- a. Agenda Khusus:

Merupakan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menangani masalah



usus yang menjadibagianstrategispembangunandaerah.

b. ProgramPrioritas:

1. Program Urusan PemberdayaanMasyarakatDesa;
2. Program Urusan Perbatasan;
3. Program Urusan Sosial;
4. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan khusus untuk tahun 2017, mengacu pada Isu Strategis Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan maka Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi Pembangunan.
 - a. Penggalian Sumber Dana Investasi Pembangunan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Investasi Pembangunan;
 - c. Peningkatan Pengelolaan Hasil Investasi Pembangunan.
2. Optimalisasi Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan.
3. Peningkatan dan Percepatan Pembangunan;
 - a. Pembangunan SumberDaya Manusia;
 - b. Pembangunan Ekonomi;
 - c. Peningkatan Konektivitas Wilayah;serta
 - d. Peningkatan Perumahan Air Bersih dan Kelistrikan;
 - e. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.
4. Program Desa Mandiri Anggur Merah:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan;serta
 - b. mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional melalui pengembangan pemukiman eks Timor-Timur.
5. Perwilayahan Pembangunan.
 - a. Pembangunan SDM.
 - b. Pembangunan Basis Ekonomi.
 - c. Pembangunan Prasarana dan Sarana.
 - d. Percepatan Penurunan Kemiskinan.
6. Prioritas Lokasi Pembangunan.
7. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan.
 - a. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran.
 - b. Partisipasi Masyarakat.
 - c. Tersedianya Data Yang Akurat.
 - d. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.
 - e. Sinergi Pembangunan.



f. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.



A. URUSAN KONKUREN**I. URUSAN WAJIB****a. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR****URUSAN PENDIDIKAN.****1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**a) Program Peningkata Mutu Pendidikan.**

- Alokasi Anggaran : Rp.453.197.478.043,-
- Realisasi : Rp.432.504.710.627,- (95,43%)

1) Kegiatan Rehab gedung sekolah.

- Alokasi Anggaran : Rp. 132.831.000.000,-
- Realisasi : Rp. 125.533.991.038,- (94,51%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Peralatan laboratorium FISIKA SMA untuk 31 SMA di 16 Kabupaten dan 1 Kota;
 - Tersedianya Jamban siswa SMA untuk 8 SMA di 7 Kabupaten;
 - Tersedianya Laboratorium IPA SMA untuk 19 SMA di 12 Kabupaten dan 1 Kota;
 - Adnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA sebanyak 35 ruang untuk 24 SMA di 17 Kabupaten;
 - Tersedianya peralatan media pendidikan SMA berupa Laptop dan LCD proyektor sebanyak 22 paket untuk 16 SMA di 11 Kabupaten dan 1 Kota;
 - Tersedianya rumah dinas guru sebanyak 2 unit di SMA Negeri Mutis Eban Kabupaten TTU sebagai daerah afirmatif;
 - Adanya Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK beserta Perabot sebanyak 73 paket untuk 73 SMK di 21 Kabupaten dan 1 Kota;

- Terbangunnya Laboratorium IPA SMK sebanyak 18 paket untuk 18 SMK di 9 Kabupaten dan 1 Kota;
 - Tersedianya Peralatan Praktik Siswa (APS) SMK sebanyak 50 paket untuk 47 SMK di 19 Kabupaten dan 1 Kota;
 - Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMK sebanyak 41 ruang untuk 18 SMK di 12 Kabupaten;
 - Tersedianya Rumah Dinas sebanyak 20 unit rumah dinas untuk 5 SMK di 2 Kabupaten.
- 2) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- Alokasi Anggaran : Rp. 3.933.958.400,-
 - Realisasi : Rp. 3.622.335.731,- (92,08%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terseleksinya siswa/i pada siswa dalam berbagai ajang lomba untuk mengikuti kegiatan pada tingkat nasional;
 - Juara II Cabang Karate tingkat Nasional, a.n. Joel Riwu Berek, SMKN 1 Atambua, Kab. Belu;
 - Juara Cabang Pencak Silat Juara III Tingkat Nasional, a.n. Aswin Irianto Ngaji, SMKP Yapenra YS Maumere, Kab. Sikka.
 - Juara III Cabang Atletik (Lompat Jauh) a.n Jessica A. Djara, SMKN 1 Waingapu, Kab. Sumba Timur;
 - Juara IV Cabang Atletik (Lempar Lembing), a.n Jessica A. Djara, SMKN 1 Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung UN *online* (UNBK).
- Alokasi Anggaran : Rp.5.990.120.000,-
 - Realisasi : Rp.5.926.259.900,- (98,93%)
 - Capaian/Hasil :

Tersedianya bantuan komputer client, server dan printer sebagai pendukung UNBK bagi sekolah negeri dan sekolah swasta sebanyak 38 SMA dan 21 SMK sekolah yang berada di 22 Kabupaten/Kota;
- 4) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.
- Alokasi Anggaran : Rp.2.192.016.582,-
 - Realisasi : Rp.1.876.229.089,- (85,59%)
 - Capaian/Hasil :

- Terpilihnya seorang guru untuk mewakili provinsi ke tingkat nasional atas nama: Marselina Ana Mali Dua;
 - Terjadinya peningkatan pemahaman terkait dengan K-13 bagi guru SMA/SMK;
 - Terlatihnya operator dan proctor yang berkaitan dengan instalasi LAN dan memiliki sertifikat sebagai pendamping operator atau proctor dalam pelaksanaan UNBK;
 - Adanya Komitmen Bersama Dalam Pencanangan Gerakan Literasi Di 22 Kabupaten/Kota;
 - Terlaksananya penguatan terhadap 118 kepala sekolah SMA/SMK se-Provinsi NTT.
- 5) Kegiatan Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- Alokasi Anggaran : Rp. 2.675.796.000,-
 - Realisasi : Rp. 2.557.965.100,- (95,60%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersusunnya bahan ajar berbasis multimedia bagi Guru SMA/SMK di 4 lokasi;
 - Para guru mendapatkan pengetahuan dalam menyusun bahan ajar berbasis multimedia, teknik dasar penyuntingan video dan audio, teknik dasar reformatting/converting audio dan video, teknik dasar pembuatan animasi dan teknik pengembangan multimedia
 - Para kepala sekolah mendapatkan pengetahuan dalam mengelola administrasi dan keuangan serta merancang strategi pembelajaran yang terintegrasi TIK;
 - Adanya bantuan untuk sekolah model at berupa laptop client 5 unit, laptop server 1 unit, hardisk eksternal 1 buah, modem + wifi + kartuGSM + kabelRJ45 1 unit/set dan proyektor + kabel + layar 1 paket.
- 6) Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- Alokasi Anggaran : Rp.2.078.100.000,-
 - Realisasi : Rp.1.881.301.120,- (90,53%)
 - Capaian/Hasil :

- Tersalurnya Bantuan operasional bagi 66 Kelompok MGMP di 22 Kabupaten/Kota;
- Tersalurnya biaya operasional/transportasi bagi 137 pegawai di 22 Kabupaten/Kota.

7) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SDLB dan sederajat/setara.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.443.747.500,-
- Realisasi : Rp.1.275.963.700,- (88,38%)
- Capaian/Hasil :

Terlaksananya ujian nasional yang berjalan dengan baik dan lancar.

8) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah.

- Alokasi Anggaran : Rp. 254.188.535.961,-
- Realisasi : Rp. 243.863.819.044,- (95,94%)
- Capaian/Hasil :

Tersalurannya dana BOS untuk 335 SMA Negeri dan 144 SMK Negeri yang berada di dan 26 SLB Negeri di 22 Kab./ Kota.

9) Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.

- Alokasi Anggaran : Rp.47.864.203.600,-
- Realisasi : Rp.45.966.845.905,- (96,04%)
- Capaian/Hasil :
 - Terpilihnya 111 peserta tingkat UPT dan 57 tingkat provinsi. Selanjutnya diseleksi dan 19 orang mewakili provinsi di tingkat nasional;
 - Terlaksananya pembayaran gaji tenaga guru kontrak provinsi sebanyak 2.310 orang;
 - Terlaksananya penilaian angka kredit bagi guru;
 - Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja terhadap 836 kepala sekolah.

b) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.740.213.182,-
- Realisasi : Rp.1.665.704.980,- (95,72%)

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.740.213.182,-
- Realisasi : Rp.1.665.704.980,- (95,72%)



- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya laporan pelaksanaan penyerapan dana BOS dan data terkait permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan dana BOS;
 - Terlaksananya monitoring ujian sekolah dan UN SMA/SMK di 22 kabupaten/kota;
 - Terpilihnya 13 orang anggota yang ditetapkan sebagai anggota BAN S/M Provinsi NTT periode 2018/2022;
 - Tersedianya dokumen kesepakatan dan rencana aksi antara provinsi dan kabupaten/kota serta penetapan lokasi rakor tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Adanya website Dinas Pendidikan sebagai sarana informasi public secara online;
 - Tersedianya data penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
 - Adanya aplikasi SIM-PTK sebagai sarana informasi terkait data pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di 22 kabupaten/kota.

c) Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa.

- Alokasi Anggaran : Rp.10.264.711.808,-
- Realisasi : Rp.9.599.616.414,- (93,52%)
- 1) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.
 - Alokasi Anggaran : Rp.769.506.708,-
 - Realisasi : Rp.680.953.714,- (88,49%)
 - Capaian/Hasil :
 - Adanya pemahaman Teknis penyusunan bahan ajar bagi 80 orang peserta;
 - Tersediannya bahan ajar;
- 2) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.257.030.500,-
 - Realisasi : Rp.1.208.009.500,- (96,10%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N);
 - Terlaksananya olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN), dan lomba keterampilan;
 - Terlaksananya Gebyar seni PKLK.



3) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.201.117.100,-
- Realisasi : Rp.3.194.161.000,- (99,78%)
- Capaian/Hasil :

Tersedianya dukungan operasional terhadap pusat layanan autis dalam pengelolaan dan pelayanan selama 12 bulan.

4) Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah Keberbakatan Olahraga.

- Alokasi Anggaran : Rp.5.037.057.500,-
- Realisasi : Rp. 4.516.392.200,-(89,66%
- Capaian/Hasil :

Tersedianya makan minum, seragam sekolah dan seragam olahraga, peralatan dapur, perlengkapan asrama serta kebutuhan administrasi dalam kegiatan pembelajaran di SKO Flobamorata Kupang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 173 orang, dengan kualifikasi:

a) Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = 3 orang; SLTA = 73 orang; Sarjana Muda/ Diploma = 12 orang; Sarjana = 90 orang; Magister = - orang.

b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 19 orang; Golongan III= 121 orang; Golongan II= 49 orang; Golongan I = 3 orang.

c) Pejabat Stuktural: 56 orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 11 orang; Eselon IV = 44 orang

d) Pejabat Fungsional: 6 orang.

Pengawas Sekolah = - orang; Arsiparis = 1 orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Pendidikan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pendidikan Non Formal	-	-
2.	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6.	-	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya
7.	Program Hibah Pendidikan	-	-
8.	Program Bantuan Sosial Kependidikan	-	-

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** memadai.
6. **Permasalahan dan Solusi:.**

Permasalahan:

Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.297.008.962,- disebabkan 4 sekolah tidak dapat melaksanakan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Ruang Kelas Baru (RKB) dikarenakan Ketersediaan Lahan yang tidak mencukupi, Jumlah siswa yang tidak sesuai dengan persyaratan, Pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan status lahan yang bermasalah, selain itu juga ada beberapa alat praktik siswa yang tidak bisa dibelanjakan karena kenaikan harga di e_katalog melebihi pagu yang tersedia dan ada beberapa alat yang tidak tersedia di e_katalog.

Solusi:

Menyurati Menteri untuk melakukan revisi Keputusan Menteri Pendidikan namun usulan tersebut tidak disetujui.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 1) Alokasi Anggaran : Rp.7.917.771.967,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.7.041.752.727,- (88,93%)



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.169.000.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.150.729.109,- (98,44%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.59.180.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.59.179.000,- (99,99%)

URUSAN KESEHATAN (DINKES).

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
 - Alokasi Anggaran : Rp.23.964.950.159,-
 - Realisasi : Rp.19.452.716.792,- (81,17%)
- 1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.973.708.500,-
 - Realisasi : Rp.671.583.956,- (68,9%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Obat dan perbekalan kesehatan.
 - Pendistribusian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan buffer stock dan hibah Kementerian Kesehatan ke 22 Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu dan Flores.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.009.815.000,-
 - Realisasi : Rp.926.479.071,- (91,75%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pelayanan Rujukan Dokter Spesialis yang dilaksanakan di 7 Kabupaten (Kabupaten Sikka, Ende, Ruteng, Sumba Timur, Alor, Belu, dan Sabu).
 - Terlaksananya Baksos Pelayanan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas Semau, Pulau Semau – Kabupaten Kupang. dengan total pasien yang dilayani sebanyak 61 orang.



- Terlaksananya Pengadaan Obat untuk 7 (tujuh) buah RS di 7 (tujuh) Kabupaten sesuai dengan spesialisasi yang diminta oleh Kabupaten.
- 3) Kegiatan Pengawasan, Pengelolaan Obat dan Vaksin.
- Alokasi Anggaran : Rp.165.342.900,-
 - Realisasi : Rp.161.946.600,- (97,9%)
 - Capaian/Hasil :
- Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman menjelang hari raya dilaksanakan di Kota Kupang dan 4 Kabupaten (Kabupaten Sikka : 49 sarana, Kab. Malaka : 6 sarana, Kab. TTS : 16 sarana dan Kab. TTU : 32 sarana). Sedangkan di Kota Kupang sebanyak 226 sarana/Toko yang menjual makanan dan minuman. Hasilnya semuanya aman.
- 4) Kegiatan Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
- Alokasi Anggaran : Rp.642.540.000,-
 - Realisasi : Rp.482.845.640,- (75,15%)
 - Capaian/Hasil :
- Terlaksananya Lomba-Lomba Terkait Promosi Kesehatan dan PSM bertempat di Halaman dan Aula Rumah jabatan Gubernur NTT dengan Peserta para Kader dan para pendamping dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TP PKK baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 42 orang yang berasal dari 22 Kabupaten/Kota.
 - Adanya kebijakan tentang PHBS 8 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, SBD, Flotim, Lembata dan Sabu Raijua).
 - Tersedianya Posyandu aktif yang ada sebesar (5.126 Posyandu dari total Posyandu 10.127 Posyandu atau sebesar 51 %).
 - Adanya Puskesmas yang melaksanakan 5 tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas 100%) (Makan sayur dan buah, aktivitas fisik, CEK Kesehatan secara rutin, cegah stunting dan TBC).
 - Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Berbagai Media (Media Promosi);



- Terselenggaranya Advokasi Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi bertempat di Hotel T-More Kupang.
- 5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- Alokasi Anggaran : Rp.2.762.196.100,-,-
 - Realisasi : Rp.2.374.812.320,- (85.98 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya bahan Kimia Klinik (Reagen ERBA);
 - Tersedianya bahan Kimia Klinik (Open Reagen);
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan hematologi;
 - Tersedianya Reagenssia untuk pembuatan media;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan kimia lingkungan;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan Kimia;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan Serologi;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan Parasitologi;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan mikrobiologi;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan mikrobiologi;
 - Pengadaaan Bahan Pakai Habis Penunjang Reagen Zn;
 - Tersedianya Reagen rapid test untuk pemeriksaan cepat di lokasi KLB;
 - Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan kesehatan casis/masyarakat;
 - Tersedianya Alat Bantu berupa Objek glass frostat = 10 dos; Cover glass = 10 dos; Tabung EDTA = 1000 buah; Tabung Reaksi = 1000 buah;
 - Tersedianya bahan habis pakai Kimia Klinik (Reagen ERBA);
 - Tersedianya bahan habis pakai Kimia Klinik (Reagen Open);
 - Tersedianya Reagensia unuk Pemeriksaan Kimia Lingkungan.
 - Tersedianya Reagensia untuk Pemeriksaan Kualitas Air tidak dilaksanakan.
 - Tersedianya bahan habis pakai Reagensia unuk Pemeriksaan Logam Berat;
 -

- Tersedianya Pengadaan bahan habis pakai berupa Reagensia Kultur Test densicheck plus calibration standart = 1 Botol; Reagen Kultur Darah untuk dewasa = 1 Dos; Reagen Kultur Darah Untuk Anak = 1 Dos; Titriplex III (EDTA) = 5 Botol; Urea = 3 kit; Asam Asetat; CH₃COOH = 1 Botol; Ninhydrin = 2 Botol;
 - Tersedianya Bahan/peralatan penunjang laboratorium untuk Kimia Klinik;
 - Tersedianya Peralatan Penunjang Hematologi;
 - Tersedianya Peralatan Penunjang Bakteriologi;
 - Tersedianya Peralatan Penunjang Media;
 - Tersedianya Peralatan Penunjang Kimia Lingkungan;
 - Tersedianya Peralatan Penunjang Mikrobiologi;
 - Adanya peralatan Penunjang Sampling;
 - Tersedianya Bahan Penunjang Teknis.
- 6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- Alokasi Anggaran : Rp.11.588.651.028,-
 - Realisasi : Rp.8.552.731.364,- (73,80 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Bimtek Akreditasi Puskesmas dilakukan dengan menggunakan instrumen bimbingan teknis yang disusun oleh pengelola program Mutu dan Akreditasi Dinkes Provinsi NTT;
 - Terlaksananya Bimbingan teknis dilakukan terhadap pengelola Akreditasi Puskesmas di 22 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan beberapa Puskesmas di 22 kab/kota tersebut yang persiapan Akreditasi maupun yang reakreditasi.
 - Terdata dan tersosialisasinya Pelayanan Kesehatan Tradisional dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh pengelola program yankes primer dan kesehatan tradisional.
 - Terlaksananya Operasional SP3T merupakan operasional rutin untuk sentra penerapatan dan pengembangan pengobatan tradisional dinas kesehatan provinsi nusa tenggara timur;

- Bertambahnya 17 buah Puskesmas dari 387 di tahun 2017 menjadi 404 di tahun 2018;
- Terlaksananya Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi se-NTT;
- Terlaksananya Penilaian Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib se-NTT;
- Terlaksananya Kegiatan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah NTT pada 16 RS;

7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa.

- Alokasi Anggaran : Rp.6.708.387.631,-
- Realisasi : Rp.6.178.892.141,- (92,11%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya alat-alat angkutan darat (pengadaan gerobak, trolley makanan);
 - Tersedianya peralatan kantor (mesin sidik jari);
 - Tersedianya perlengkapan kantor (genzet, AC, TV, terali besi);
 - Tersedianya komputer (komputer dan printer), Pengadaan peralatan dapur;
 - Tersedianya konstruksi jaringan air dan pengadaan konstruksi/pembelian gedung (bangunan rawat inap kelas 2 dan 3, pembangunan IPSRS gedung) sedangkan untuk pengadaan alat-alat kedokteran jiwa gagal karena gangguan system.

8) Kegiatan Pengawasan Makanan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (P-JAS)

- Alokasi Anggaran : Rp.114.309.000,-
- Realisasi : Rp.101.425.700 ,- (88,73%)
- Capaian/Hasil :

Sampling dan Pengujian BTM pada makanan jajanan anak sekolah di 22 Kabupaten/Kota yaitu, dengan hasil pengujian yang diuji semuanya memenuhi syarat.

b) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

- Alokasi Anggaran : Rp.657.003.100,-
- Realisasi : Rp.619.140.210,- (94,24%)



- 1) Kegiatan Pelaksanaan Revolusi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Rencana Aksi Daerah MDGS (Millenium Developmen Goals) serta Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
 - Alokasi Anggaran : Rp.246.146.500,-
 - Realisasi : Rp.230.855.000,- (93,8 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Adanya Peraturan Gubernur dan Petunjuk Pelaksanaan Juklak/juknis Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTT lokasi di 11 Kabupaten.
 - Surpervisi Fasilitatif Pelaksanaan ANC, INC dan PNC di 5 kabupaten fokus (Sikka, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo dan Flores Timur);
 - Pelatihan ANC Terintegrasi bagi Tenaga Kesehatan bagi 5 Kabupaten (Sikka, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo dan Flores Timur) di provinsi dengan peserta sebanyak 10 orang.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.198.087.600,-
 - Realisasi : Rp.162.551.400,- (82,06%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terfasilitasinya Pertemuan Pengelola Desa Siaga dalam rangka peningkatan UKBM (pokjanal dan desa siaga) yang dilaksanakan di Hotel Gree Nia Kupang jumlah peserta sebanyak 22 orang dari 22 Kab/Kota.
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu.
 - Alokasi Anggaran : Rp.212.769.000,-
 - Realisasi : Rp.196.750.000,- (92,5%)
 - Capaian/Hasil :
 - Orientasi Perencanaan terpadu KIA (DTPS-KIBBLA) Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di 5 kabupaten (Ngada, Lembata, Rote Ndao, Malaka dan Sabu Raijua), dengan peserta sebanyak 75 orang;
 - Evaluasi Sistem Pemantauan Ibu Hamil, Ibu melahirkan dan bayi baru lahir (sistem 2H2) di 22 Kabupaten/Kota.



c) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

- Alokasi Anggaran : Rp.940.218.400,-
- Realisasi : Rp.777.316.660,- (82,67%)

1) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

- Alokasi Anggaran : Rp.799.818.000,-
- Realisasi : Rp.637.880.180,- (79,75%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Bahan dan alat Laboratorium pendukung Kegiatan Malaria;
 - Tersedianya bahan dan alat pemeriksaan sediaan darah malaria;
 - Terlaksananya Pelatihan Partisipatoris Learning Action (PLA) bagi kepala desa, TP PKK, dan Kader;
 - Terbentuknya Percontohan Tim Malaria Desa, 15 Rencana Aksi dan akan dilanjutkan dengan pelatihan PLA Malaria di desa endemis malaria lainnya;
 - Tersedianya bahan pendukung logistik penunjang penderita TB dan APD Program TB;
 - Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Manggarai Barat jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 392 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 389 kasus meninggal 0 kasus
 - Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Ngada jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 806 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 806 kasus meninggal 1 kasus;
 - Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Lembata jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 540 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 540 kasus meninggal 2 kasus;
 - Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Flores Timur jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 1.565 kasus dan diberi Vaksin Anti Rabies 1.565 kasus meninggal 0 kasus;



- Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Ende jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 811 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 811 kasus meninggal 1 kasus;
- Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Manggarai Timur jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 489 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 444 kasus meninggal 1 kasus;
- Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Nagekeo jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 1.433 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 1.284 kasus meninggal 4 kasus;
- Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Sikka jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 1.624 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 1.325 kasus meninggal 2 kasus;
- Meningkatnya koordinasi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Manggarai jumlah kasus gigitan hewan penular rabies 735 kasus dan di beri Vaksin Anti Rabies 735 kasus meninggal 1 kasus;

2) Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana.

- Alokasi Anggaran : Rp.140,400,400,-
- Realisasi : Rp.139,436,480,- (99,31%)
- Capaian/Hasil :
 - Investigasi KLB dengan cara Penyelidikan Epidemiologi (PE) di Kab. Flores Timur ditemukan DBD 8 kasus, meninggal 1 orang;
 - Investigasi KLB di Kab. TTS dengan hasil diare jumlah 694 kasus dan tidak ada kematian;
 - Investigasi KLB di Kab. Belu dengan hasil : diare akut 131 kasus di wilayah puskesmas Kota Atambua dan 127 kasus di wilayah Puskesmas Atambua Selatan tidak ada kasus meninggal;
 - Investigasi KLB di Kab. Ngada dengan hasil : DBD 5 orang;



- Investigasi KLB di Kab. TTU dengan hasil : Malaria 1 Malaria positif dengan plamodium vivax;
- Investigasi KLB di Kab. TTS dengan hasil : keracunan makanan 39 orang;
- Investigasi KLB di Kabupaten Manggarai dengan hasil : Gigitan Hewan Penular Rabies meninggal 1 orang;
- Terlaksananya Bimtek Sistem Kewaspadaan Dini (SKDR) dan Respons terhadap pennyakit-penyakit potensial wabah dan KLB dilaksanakan di 7 Kabupaten.
- Jejaring Sistem Terpadu Pelaporan KLB Penyakit Menular Potensi Wabah (STP) KLB di 6 Kabupaten.

d) Program Peningkatan Gizi.

- Alokasi Anggaran : Rp.2.158.548.000,-
- Realisasi : Rp.1.787.178.070,- (82,80%)

1) Kegiatan Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita.

- Alokasi Anggaran : Rp.2.158.548.000,-
- Realisasi : Rp.1.787.178.070,- (82,80%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pertemuan Diseminasi Hasil Monitoring dan evaluasi Penerapan Pola Makan Keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang di 22 Kabupaten/Kota, dengan peserta sebanyak 660 orang;
 - Advokasi Penurunan Masalah Gizi di 5 kabupaten Fokus (Kabupaten Kupang , Rote Ndao, Ngada, Kota Kupang dan TTS;
 - Terlaksananya Kunjungan rumah oleh kader dalam rangka monitoring penerapan pola makan keluarga berbasis menu gizi seimbang (kader sebanyak 612 orang dan petugas gizi sebanyak 387 orang di 22 Kabupaten/Kota);
 - Adanya Penanganan Gizi Buruk berbasis Masyarakat (PGBM) bagi Tenaga Kesehatan dari puskesmas/polindes/pustu di 4 kabupaten (Kabupaten Kupang, Sikka, Timor Tengah Selatan dan Kota Kupang) dengan peserta sebanyak 100 orang;
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi NTT tentang Penanganan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBM);



- Adanya Kunjungan Dokter spesialis anak ke panti rawat gizi di 4 Kabupaten yaitu Kab. TTU, TTS, Belu dan Malaka;
 - Adanya Dukungan Operasional Sarana di 4 TFC/Panti Rawat Gizi;
 - Tersedianya Tablet Fe bagi ibu hamil dan remaja putri sebanyak 100.000 tablet bagi 70.000 ibu hamil dan 30.000 remaja putri.
- e) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Alokasi Anggaran : Rp.9.759.577.500,-
 - Realisasi : Rp.7.878.210.994,- (80,72%)
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Alokasi Anggaran : Rp.577.858.500,-
 - Realisasi : Rp.512.287.070,- (88,65%)
 - Capaian/Hasil :
 - Sosialisasi PPDS/PPDGS-BK/Tubel Online sebanyak 6 kali pertemuan. Setiap sosialisasi diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari PNS di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kab. Kupang, Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Para tenaga dokter umum/dokter gigi yang berstatus PNS, PTT, Pasca PTT dan Non PNS, untuk memperoleh gambaran tentang pendidikan lanjutan dengan biaya kementerian kesehatan;
 - Pertemuan TIM Penilai Akreditasi Pelatihan sebanyak 10 kali pertemuan yang diikuti oleh 20 orang yang merupakan tim penilai akreditasi pelatihan;
 - Pelaksanaan Wisuda, angkat sumpah dan pelantikan pada Institusi Diknakes bagi 1.070 orang di 9 Institusi Diknakes;
 - Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes di 9 Institusi Diknakes dengan jumlah mahasiswa yang diterima, sebanyak 598 orang;
 - Pendampingan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) di 8 Institusi;
 - Terlatihnya Pendamping Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kab./Kota se-Provinsi NTT Angkatan I sebanyak 27 orang yang dilaksanakan oleh UPT Latnakes Kupang;



- Terlatihnya 25 orang Pendamping Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Angkatan I;
 - Tersedianya 25 orang Tenaga Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Angkatan I;
 - Tersedianya 28 orang Tenaga Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Angkatan II;
 - Terlatihnya 25 orang tenaga Training Of Course Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi NTT;
 - Tersedianya 22 orang Fasilitator Kelas Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT;
 - Terlatihnya Jabfung Nutrisionist Jenjang Terampil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebanyak 25 orang yang dilaksanakan oleh UPT Latnakes Kupang;
 - Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Angkatan I sebanyak 30 orang yang dilaksanakan oleh UPT Latnakes Kupang;
 - Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Angkatan II sebanyak 30 orang yang dilaksanakan oleh UPT Latnakes Kupang;
 - Adanya TOT Puskesmas sebanyak 30 orang yang dilaksanakan oleh UPT Latnakes Kupang.
- 2) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis.
- Alokasi Anggaran : Rp.8.676.846.500,-
 - Realisasi : Rp.6.905.480.496,- (79,59,9%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersealisasinya pembayaran Honorarium Kesehatan PTT Daerah;
 - Adanya Data dalam rangka kajian kebutuhan Nakes;
 - Terlaksananya Monev PTT Daerah di 22 Kabupaten/Kota;
 - Pengabdian masyarakat mahasiswa Poltekkes di Desa Anggur Merah;
 - Terlaksananya Konsultasi atau pertemuan perencanaan informasi kebijakan nakes di Jakarta.

3) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.504.872.500,-
- Realisasi : Rp.460.443.428,- (91,19%)
- Capaian/Hasil :
 - Terealisasinya penerbitan STR pada tahun 2018 berjumlah : 11.021 STR;
 - Terpilihnya 13 Tenaga Kesehatan Teladan (8 orang tenaga kesehatan Provinsi dan 5 orang tenaga kesehatan teladan Nasional);
 - Diterbitkannya 652 PAK Jabatan Fungsional yaitu : Semester II Bulan Juli sd. Desember 2017 menerbitkan PAK sebanyak 488 Jabatan Fungsional, dan Januari sd. Juni 2018 menerbitkan PAK 164 Jabatan Fungsional;
 - Terlaksananya Sosialisai Uji Kompetensi yang diikuti oleh 83 Peserta berasal dari Dinas Kesehatan, BKD, RSUD Kabupaten/ Kota Se Provinsi NTT, OP Provinsi NTT, RSUD Prof. DR.W.Z. Johanis Kupang,Tim Penguji/Tim Pelaksana Ukom Provinsi NTT;
 - Terlaksananya Uji Kompetensi untuk 85 Jabatan fungsional namun yang memenuhi syarat adalah 62 Jabatan Fungsional (Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Elektromedis dan Perekam Medis) orang yang berasal dari RSUD Prof.DR.W .Z.Johanis Kupang RSUD S.K.Lerik Kota Kupang , RSUD Manggarai, dan RSUD Kefamenanu.

f) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.2.779.013.967,-
- Realisasi : Rp.2.756.013.967,-(99,18%)

1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.606.141.258,-
- Realisasi : Rp.606.121.640,- (100%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 22 buah laporan dan data dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas beserta permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahannya;



- Tersedianya 22 buah laporan dan data UW-SPM Bidang Kesehatan beserta permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahannya untuk penyusunan perencanaan tahun 2019 di 22 Kabupaten/Kota serta 22 buah laporan DAK dari Kabupaten/Kota terdiri dari DAK Dasar, Farmasi, Rujukan dan Tambahan untuk dikompilasi dan dikirimkan ke kementerian kesehatan.

2) Kegiatan Penelitian/Kajian di bidang Kesehatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.658.261.400,-
- Realisasi : Rp.635.159.100,- (96,5%)
- Capaian/Hasil :
 - Terciptanya pemahaman yang sama antara para Kepala Puskesmas dalam pentingnya Dana Desa dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal;
 - Kesepakatan dan tindak lanjut MPU dalam pengembangan program kerjasama bidang kesehatan atau MPU dengan 5 Provinsi lainnya;
 - Koordinasi perencanaan lintas sektor dan lintas program dalam mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju eliminasi berbagai penyakit menular dan tidak menular.

g) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

- Alokasi Anggaran : Rp.6.792.013.200,-
- Realisasi : Rp.3.274.970,- (48,22%)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin.

- Alokasi Anggaran : Rp.6.792.013.200,-
- Realisasi : Rp.3.274.970,- (48,22%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya pembinaan di Rumah Sakit pada 22 Kab./Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi penduduk miskin di kelas 3, yang dilaksanakan di 43 RS;
 - Tersedianya bantuan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan jumlah peserta JKN yang dibayar iurannya sebanyak 10.911 orang.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada tahun 2017 berjumlah 270 orang, terdiri dari 27 orang Pejabat Struktural, 45 orang Pejabat Fungsional dan 183 orang Fungsional Umum dengan rincian :

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sarjana Strata 3 (S-3) = 2 orang (L=2, P=0), Sarjana Strata 2 (S-2) = 40 orang (L=15, P=25), Sarjana Strata 1 (S-1) = 131 orang (L=38; P=71), Diploma 3 (D-3) = 49 orang (L=11, P=38), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat = 55 orang (L=38; P=17), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat = 0 orang (L=0, P=0), Sekolah Dasar (SD) = 0 orang (L=0, P=0).

b) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

1) Pangkat Pembina Golongan IV sebanyak 33 orang (L=13, P=20) dengan rincian : Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 1 orang (L=1, P=0), Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 0 orang (L=0, P=0), Pembina Tk.I (IV/b) sebanyak 9 orang (L=8, P=1), Pembina (IV/a) sebanyak 23 orang (L=6, P=17).

2) Pangkat Penata Golongan III sebanyak 206 orang (L=75, P=131) dengan rincian : Penata Muda (III/d) sebanyak 65 orang (L=19, P=46), Penata (III/c) sebanyak 58 orang (L=26, P=32), Penata Muda Tk.I (III/b) sebanyak 59 orang (L=21, P=38), Penata Muda (III/a) sebanyak 24 orang (L=9, P=15)

3) Pangkat Pengatur Golongan II sebanyak 27 orang (L=22, P=5) dengan rincian : Pengatur Tk.I (II/d) sebanyak 4 orang (L=2, P=2), Pengatur (II/c) sebanyak 17 orang (L=13, P=4), Pengatur Muda Tk.I (II/b) sebanyak 8 orang (L=5, P=3), Pengatur Muda (II/a) sebanyak 2 orang (L=2, P=0).

c) Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebanyak 27 orang dengan rincian : Eselon I = 0 orang, Eselon II = 1 orang, Eselon III = 8 orang, Eselon IV = 20 orang.

d) Jumlah Pejabat Fungsional

Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebanyak 44 orang dengan rincian : Analis Kepegawaian Penyelia = 6 orang, Analis Kepegawaian Muda = 1 orang, Analis Kepegawaian Trampil = 1



orang, Pustakawan Penyelia = 1 orang, Perencana Muda = 3 orang, Pranata Labkes Muda = 5 orang, Pranata Labkes Pertama = 6 orang, Pranata Labkes Pelaksana Pemula = 1 orang, Widyaiswara Madya = 2 orang, Widyaiswara Muda = 5 orang, Widyaiswara Pertama = 2 orang, Sanitarian Penyelia = 1 orang, Entomolog Kesehatan Madya = 1 orang, Entomolog Pelaksana Lanjutan = 3 orang, Epidemiolog Kesehatan Muda = 1 orang, Epidemiolog Kesehatan Pertama = 1 orang, Nutrisionis Pertama = 1 orang, Nutrisionis Pelaksana = 1 orang, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana = 1 orang, Asisten Apoteker Pelaksana = 2 orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Kesehatan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2.	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3.	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
4.	Program Peningkatan Gizi	Program Peningkatan Gizi	Program Peningkatan Gizi
5.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
6.	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
7.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Program Upaya Kesehatan Perorangan
8.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
9.	Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	-	-
10.	Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan	-	-



5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** Kurang Mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1) Alokasi Anggaran : Rp.2.717.787.725,-

2) Realisasi Anggaran : Rp.2.527.780.846,- (93,01%)

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1) Alokasi Anggaran : Rp.9.268.685.629,-

2) Realisasi Anggaran : Rp.8.184.121.091,- (94,29%)

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1) Alokasi Anggaran : Rp.24.000.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp.24.000.000,- (100%)

URUSAN KESEHATAN (RSUD)

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

➤ Alokasi Anggaran : Rp.64.939.168.300,-

➤ Realisasi : Rp.62.290.009.396 (95.92%)

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk.

• Alokasi Anggaran : Rp.2.395.000.000,-

• Realisasi : Rp.2.387.006.000,- (99.67%)

• Capaian/Hasil :

- Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa: perawatan/pengantaran jenazah tidak mampu/ tidak dikenal sebanyak 932 jenazah;
- Terlaksananya pengumuman jenazah sebanyak 9 kali;
- Terlaksananya pelayanan penguburan jenazah tidak dikenal sebanyak 9 jenazah.

2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

• Alokasi Anggaran : Rp.13.795.537.900,-



- Realisasi : Rp.13.191.361.306,- (95.62%)
- Capaian/Hasil :
 - Terselesaikannya 3 masalah pasien safety / Pelayanan Rujukanyang diselesaikan yaitu: Pencatatan dan pelaporan tidak lengkap, Informasi yang tidak memadai, Tidak patuh terhadap SOP;
 - Terbayarnya Tenaga Honorer sebanyak 177 orang;
 - Terselesaikannya Pembayaran Insentif Dokter Spesialis Sebanyak 55 orang;
 - Terselesaikannya Pembayaran Insentif Dokter Sub Spesialis Sebanyak 6 orang;
 - Terselesaikannya Pembayaran Insentif Rohaniawan Sebanyak 7 orang;
 - Tersedianya obat-obatan yang diadakan sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya bahan habis pakai ruangan sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya bahan habis pakai ruangan Reagensia sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya bahan hemodialisa sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya bahan pakai habis radiologi sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya alat kesehatan pakai habis sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya kantong darah sebanyak 2.250 bag;
 - Tersedianya bahan makan minum pasien sebanyak 19.209 hari Rawat;
 - Tersedianya jumlah mobil operasional (mobil untuk dokter spesialis)yang diadakan sebanyak 4 unit;
 - Terselesaikanya 2 Penelitian yaitu: Penelitian Analisa factor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pasien kanker mammae di RSUD Prof. DR W.Z Johannes Kupang dan Penelitian Determinan perilaku dalam manajemen asuhan keperawatan tim dengan pelaksanaan discart planning pada pasien di RSUD Prof. DR W.Z Johannes Kupang;
 - Tersedianya pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasanyaitu: Kasus KDRT, Kekerasan Seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, Penelantaran, Traficking dan Ingkar janji Nikah;



- Tersedianya dana pengadaan SIM untuk mengurangi kebocoran pembayaran klaim pasien sebanyak 1 paket.
- c) Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan.
- Alokasi Anggaran : Rp.47.750.000,-
 - Realisasi : Rp.36.400.000,- (76.23%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya dokument perpanjangan perijinan Radiologi sebanyak 1 Buku;
 - Tersedianya dokumen perpanjangan perijinan peralatan pendukung sebanyak 1 Buku;
 - Terlaksananya uji test rutin hidran kebakaran dengan hasil 1 Hidran dalam keadaan baik 1 Buku;
 - Tersedianya dokumen perpanjangan SIUP, SITU dan HO dari (BPPT Kota Kupang) sebanyak 1 Buku.
- d) Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- Alokasi Anggaran : Rp.48.700.880.400,-
 - Realisasi : Rp.46.675.245.090,- (95.84%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya alat-alat Kedokteran Umum yang diadakan sebanyak 81 zet/unit/buah;
 - Tersedianya alat-alat Kedokteran ICU sebanyak 33 unit/Zet;
 - Tersedianya alat-alat kedokteran Gawat Darurat Sebanyak 135 set/Unit;
 - terselesaikannya Pembangunan Gedung IGD yang baru sebanyak 1 gedung;
- b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- Alokasi Anggaran : Rp.113.564.478.102,-
 - Realisasi : Rp.90.784.729.749,- (80%)
- 1) Kegiatan Peningkatan Mutu Badan Layanan Umum (BLUD).
- Alokasi Anggaran : Rp.113.564.478.102,-
 - Realisasi : Rp.90.784.729.749,- (80%)
 - Capaian/Hasil :

- Terselesaikannya pembayaran honorarium pegawai / tidak tetap: Tenaga pengaman (Polisi Militer) sebanyak 12 bulan, Tenaga Teknik Mesin Alat Kesehatan khusus sebanyak 3 orang, Tunjangan Kesejahteraan Rohaniawan sebanyak 6 orang dan honorarium tenaga kontrak BLUD sebanyak 21 orang;
- Terselesaikannya pembayaran Tenaga Dokter Tamu sebanyak 1 paket;
- Terselesaikannya pembayaran Insentif Tenaga Medis dan non Medis sebanyak 1 paket;
- Terselesaikannya pembayaran lembur pegawai sebanyak 1 paket;
- Terselesaikannya pembayaran honorarium kepanitiaan kegiatan Revisi Formularium Rs sebanyak 30 orang, honorarium Tim penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebanyak 1 paket, Honorarium Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1 paket, Honorarium Tim Penguji Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 1 paket, Honorarium Tim Pelaksana Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 1 paket;
- Tersedianya Obat sebanyak 1 paket, Iur Biaya sebanyak 1 paket dan utang obat TA.2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Alat Kesehatan Pakai Habis Ruangan sebanyak 1 paket dan utang Alat Kesehatan Pakai Habis Ruangan T.A 2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Habis Pakai Ruangan sebanyak 1 paket, utang Bahan Habis Pakai Ruangan T.A 2017 sebanyak 1 paket dan Bahan Pakai Pelayanan Divisi Kosmetik Medik sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Habis Pakai Haemodialisa sebanyak 1 paket dan utang Bahan Pakai Haemodialisa T.A 2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan dan Alat Laborat Patologi Klinik dan Patologi Anatomi sebanyak 1 paket, dan utang Bahan dan Alat Laboratorium 2017 sebanyak 1 paket;



- Tersedianya bahan dan Alat Radiologi sebanyak 1 paket dan utang Bahan dan Alat Radiologi T.A 2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Alat CSSD sebanyak 1 paket dan utang Bahan dan Alat CSSD T.A 2017;
- Tersedianya Cairan darah sebanyak 1 paket dan utang Biaya Cairan Darah T.A 2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Gas Medis O2 sebanyak 1 paket dan dan utang Gas medis T.A 2017 sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Makanan Pasien untuk Pasien Rawat Inap sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Makanan Ruang Beresiko (Extra feeding) sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan sebanyak 1 Paket, Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan DPRD/ PILKADA sebanyak 1 paket dan Jasa Pelayanan manajemen sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Kalibrasi Alat Mesin Cytoquard Kemoterapi dan Kalibrasi alat Kesehatan sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pemeliharaan alat Kesehatan RS sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung RS sebanyak 1 pkt;
- Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik RS sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pemeliharaan Alat Transportasi RS sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah sakit : Pemeliharaan Mesin Pendingin (AC, Kulkas, Freezer) sebanyak 1 paket, Pemeliharaan Incenerator RS sebanyak 1 paket, Pemeliharaan Genzet RS sebanyak 1 paket, Pemeliharaan Lift sebanyak 1 paket, Pemeliharaan Mesin Cuci sebanyak 1 paket dan Pemeliharaan Perlengkapan RS lainnya sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Perlengkapan Ruang SMF Anak sebanyak 1 Paket, tempat Penyimpanan Blok Parafin PA sebanyak 1 paket dan Perlengkapan Ruang RS sebanyak 1 paket;



- Tersedianya Linen Rumah Sakit sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Cetakan RS sebanyak 1 Paket;
- Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan/copy sebanyak 1 paket dan cetak Penggandaan Copy Audit Medik sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Jasa Sosial / Pasien Miskin sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasionalisasi Kendaraan bagi Tenaga Medis dan non medis di RSUD Prof DR.W.Z Johannes Kupang dan Bahan Bakar Solar untuk Operasionalisasi Genzet, Incenerator sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Alat Tulis kantor sebanyak 1 paket, Alat Tulis Kantor Rekam Medik sebanyak 1 paket, Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Kesehatan DPRD sebanyak 1 paket, Alat tulis kantor audit Medik sebanyak 1 paket dan Alat Tulis Kantor Revisi Formularium RS sebanyak 1 paket;
- Tersedianya makan Minum Rapat sebanyak 1 paket, Makan Minum Rapat Audit Medik sebanyak 1 paket dan Makan Minum Rapat Revisi Formularium RS sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis dan Non medis : Pelatihan Tenaga Endoscopy sebanyak 1 paket, Pelatihan Tenaga Bronkoskopi sebanyak 6 orang;
- Pelatihan Sedasi ringan sebanyak 1 orang, Pelatihan Proteksi Radiasi sebanyak 6 orang dan Pelatihan lainnya sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan dan Alat Sanitasi (Pemeriksaan Kualitas Lingkungan) sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan (bahan pembersih dan alat kebersihan Laundry, bahan pembersih dan alat kebersihan) di lingkup RSUD Prof DR.W.Z Johannes Kupang sebanyak 1 paket ;
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak Tanah untuk Instalasi Gizi dan Ruang Rawat Inap sebanyak 1 paket (7.500 liter);



- Tersedianya Bahan Gas untuk Dapur sebanyak sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan dan Alat Dapur/Pantry sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Persediaan Peralatan Listrik/ Elektronik di lingkup RSUD Prof DR.W.Z Johannes Kupang sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Jaringan air bersih ke ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai RS sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Pemeriksaan Pemantapan Mutu Eksternal ILKI tahun 2018 sebanyak 1 paket dan Rujukan Parsial sebanyak 1 paket;
- Tersedianya sewa Rumah bagi Dokter Ahli/Tahun sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Jasa Kebersihan di lingkup RSUD Prof DR.W.Z Johannes Kupang (Jasa Outsourcing CS) sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Barang dan Jasa lain-lain sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Bahan Promosi Pemasaran dan Publikasi sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Penataan Taman sebanyak 1 paket;
- Terealisasinya pembayaran lembur Pegawai sebanyak 1 paket dan honor Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Benda Pos dan Pengiriman (materai) sebanyak 2.400 lembar;
- Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Administrsasi Umum sebanyak 1 paket, Alat Tulis Kantor Penyusunan laporan Keuangan sebanyak 1 paket dan Alat Tulis Kantor Dewan Pengawas sebanyak 1 paket;
- Tersedianya cetakan dan pengadaan umum sebanyak 1 paket, cetakan dan Penggandaan Penyusunan laporan Keuangan sebanyak 1 paket, cetakan dan penggandaan Dewan Pengawas sebanyak 1 paket dan cetak sertifikat



- Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Makan dan Minum Rapat sebanyak 1 paket dan Makan Minum Tamu sebanyak 1 Paket;
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 1 paket, Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 1 paket, Perjalanan Dinas Dewas sebanyak 1 paket dan Rakontek DAK Tahun 2019 sebanyak 1 paket dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 1 paket;
 - Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung sebanyak 1 paket, dan Pemeliharaan Instalasi/Jaringan sebanyak 1 paket;
 - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Transportasi sebanyak 1 paket;
 - Terlaksananya Pemeliharaan Teknologi Informasi (Pemeliharaan Hardware & Software) sebanyak 1 paket, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 1 paket, dan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (mesin foto copy) sebanyak 1 paket;
 - Terlaksananya Pengesian Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya Jasa Konsultan/Narasumber: (Survei Verifikasi Akreditasi 1 paket, Jasa Dokter Spesialis konsultan Ginjal dan Hipertensi 1 paket, Jasa Konsultan Studi Kelayakan Persiapan RS menjadi Pusat Kanker Prov. NTT termasuk Radioterapi sebanyak 1 paket, Jasa Konsultan Auditor Eksternal/Akuntan Publik sebanyak 1 paket dan Jasa Narasumber Kegiatan sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya Jasa Langganan Listrik/Air/Telp.Internet sebanyak 1 paket dan Handphone MVPN sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya Jasa Pengangkutan Sampah sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya Bahan Bakar minyak (BBM) bagi Pejabat & Petugas Administrasi sebanyak 1 paket;
 - Tersedianya Souvenir/Cindra Mata sebanyak 1 paket;



- Terlaksananya Pemasaran/Publikasi/Advertorial/Iklan sebanyak 1 paket dan Pameran Pembangunan sebanyak 1 paket;
- Terlaksananya Perijinan/Legalisasi sebanyak 1 paket, Pengiriman barang Dinas RS sebanyak 1 paket, Jasa Angkut sebanyak 1 paket, Pendampingan Konsultan Hukum sebanyak 1 paket dan Retensi Pegawai sebanyak 1 paket;
- Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan;
- Tersedianya Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Mesin Absensi 5 buah dan Alat kantor dan RT 1 paket;
- Tersedianya Alat Perlengkapan Rumah Sakit (Ruang Cath Lab, Alat perlengkapan RS) sebanyak 1 paket;
- Tersedianya Komputer dan Printer sebanyak 5 buah.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penjelasan tentang Capaian Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing Unit Pelayanan RS sebagai sub indikator dari IKU Presentase capaian SPM RS adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Gawat Darurat

- Waktu tanggap pelayanan dokter IGD tahun 2018 mencapai 3,3 menit. Waktu ini lebih tinggi dari target tahun 2018 dan target pada akhir periode renstra (tahun 2018) yaitu 2,5 menit. Jika dibandingkan dengan standar nasional yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit masih dibawah standar yaitu 3,3 menit sehingga capaian kinerja terhadap standar nasional adalah 134%.
- Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS/ BLS tahun 2018 mencapai 73,16% atau mengalami penurunan 5,84% dari tahun 2017 yang sebesar 79%. Hal ini disebabkan beberapa tenaga medis dan keperawatan melanjutkan pendidikan pada Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100% maka capaian indikator ini adalah 73% hal ini



menunjukkan bahwa tenaga medis yang bersertifikat sudah mencapai standar yang diharapkan di tahun 2018. Bila dibandingkan dengan standar nasional 100% maka capaian tahun 2018 sebesar 73%. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu sasaran strategis RS yaitu terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit sehingga pemenuhan standar kualitas SDM menjadi prioritas RS walaupun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan BLUD karena pembiayaan peningkatan kualitas SDM RS hanya bersumber dari pendapatan fungsional RS.

- Jam buka pelayanan gawat darurat pada tahun 2018 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100% sudah tercapai sehingga tetap dipertahankan.
- Terjadi peningkatan angka kematian pasien ≤ 24 jam di IGD pada tahun 2018 sebesar 9 permil. Jika dibandingkan dengan standar nasional yang maksimal 2 per mil maka capaian kinerja ini belum berhasil. Penyumbang peningkatan angka kematian berasal dari pasien rujukan maupun kecelakaan dari rumah sakit lain yang sudah kritis. Perbaikan sistem transport/pemindahan pasien gawat darurat dari RS atau klinik atau Puskesmas perlu diperbaiki karena seharusnya pasien distabilkan dulu baru dirujuk. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka yang terjadi hanyalah pemindahan tempat meninggal pasien. Pasien dapat meninggal di jalan atau di depan pintu IGD RS Rujukan tanpa sempat mendapat tindakan medis.
- Kepuasan pelanggan eksternal IGD tahun 2018 mencapai 94% dari standar renstra sebesar 80%, ini harus dipertahankan.

2) Pelayanan Rawat Jalan

- Dokter pemberi pelayanan di poliklinik dokter spesialis pada tahun 2018 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 92,75%, maka mengalami peningkatan sebesar 7,25%. Jika dibandingkan dengan standar nasional 100%, maka tahun 2018 sudah sesuai dengan standar nasional. Hal ini perlu dipertahankan.



- Ketersediaan pelayanan rawat jalan tahun 2018 mencapai 100%. Minimal 4 spesialisasi dasar yaitu kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah dilayani oleh spesialis. Tahun 2017, 4 spesialisasi dasar ini sudah dilayani oleh dokter spesialis sehingga tetap terus dipertahankan demi menjangkau pelayanan rawat jalan yang lebih baik.
 - Buka pelayanan sesuai ketentuan tahun 2018 mencapai 100% menit, sudah sesuai dengan standar nasional yaitu sebesar 100%. Ini perlu terus dipertahankan.
 - Waktu tunggu di rawat jalan tahun 2018 mencapai 35 menit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 25 menit mengalami penurunan sebesar 10%. Jika dilihat dengan standar nasional sebesar 60 menit maka capaian kinerja RS sudah baik yaitu sesuai standar ≤ 60 menit.
 - Pasien rawat jalan tuberkulosis yang dilayani dengan strategi DOTS tahun 2018 mencapai 100% dan sesuai dengan standar nasional sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100% sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan.
 - Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopi tuberkulosis tahun 2018 mencapai 100% dari target 60% dan standar nasional sebesar 60%. Ini menunjukkan capaian melebihi target yang ditetapkan sehingga kinerja RS tentang penanganan tuberkulosis termasuk sangat baik.
 - Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit tahun 2018 mengalami 100%.
 - KB mantap tahun 2018 mencapai 100%.
 - Konseling KB mantap tahun 2018 mencapai 100%.
 - Kepuasan pelanggan eksternal Rawat Jalan tahun 2018 mencapai 90% dari standar nasional sebesar 100% dan perlu dipertahankan.
- 3) Pelayanan Rawat Inap
- Kejadian infeksi luka operasi/Angka infeksi luka operasi (AILO) tahun 2018 mencapai 0% sesuai target yang ditetapkan sebesar 0%. Sudah memenuhi standar nasional karena standar nasional sebesar 1,5%.



- Kejadian infeksi *nosocomial* (*decubitus* dan *phlebitis*) pada tahun 2018 sebesar 0% dengan standar nasional sebesar 1,5%, hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi di RS berjalan baik.
- Indikator-indikator seperti : Angka kelengkapan dokumen asuhan keperawatan, pemberi pelayanan rawat inap, jam visite dokter spesialis, tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian telah memenuhi target sehingga dipertahankan.
- Kejadian pulang paksa standar nasional sebesar 5%, pada tahun 2018 mencapai 1%. Bila dibanding dengan target sebesar 4% maka capaian RS adalah sebesar 0,07% atau sangat berhasil.
- Indikator-indikator seperti kematian ibu karena persalinan (perdarahan, pre-eklamsi, sepsis), pemberi pelayanan persalinan normal, pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit, pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif telah memenuhi target yang ditetapkan.
- Kepuasan pelanggan eksternal Rawat Inap dengan standar nasional yaitu 80% pada tahun 2018 realisasinya sebesar 76%, dibawah target yang ditetapkan sebesar 80%.

4) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

- Tahun 2018 angka kematian pasien pada ruangan ICU sebesar 0,05% dari target sebesar 36%. Indikator ini tidak ada standar nasionalnya.
- Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam dengan standar nasional sebesar 0%, pada tahun 2018 realisasinya sangat baik yaitu 0%, sama dengan realisasi tahun 2017 dengan capaian target 100% sehingga perlu dipertahankan.
- Pemberi pelayanan di unit intensif adalah tenaga yang berkompeten tahun 2018 sebesar 100% sedangkan standar nasional sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan standar yang ada.



- Angka kematian neonatus di ruang NICU tahun 2018 sebesar 19,26 % dari target sebesar 12% ini menunjukkan dibawah angka diatas target yang ditetapkan. Kondisi ini dikarenakan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes sebagai RS rujukan dari semua RS yang ada di Kota Kupang dan NTT, disertai tingginya angka kelahiran bayi dengan BBLR..
 - Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr dengan standar nasional sebesar 100%, pada tahun 2018 sebesar 92,02%
- 5) Pelayanan Bedah Sentral
- Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari dengan standar nasional sebesar 100% pada tahun 2018 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka sudah sesuai dengan standar yang ada sehingga perlu dipertahankan.
 - Waktu tunggu operasi cito ≤ 2 jam tahun 2018 tidak dilakukan pengukuran karena tidak ada standar nasionalnya.
 - Indikator-indikator lainnya di instalasi bedah sentral selain yang telah dipaparkan diatas telah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
- 6) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium tahun 2018 adalah 2 jam 15 menit. Jika dibandingkan dengan target dalam renstra yang ditetapkan sebesar 2 jam capaian yang diperoleh capaian sebesar 92,5%. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 2,33 jam capaian yang sudah sesuai.
 - Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium oleh dr.Sp.PK tahun 2018 mencapai hanya 95% dari target Renstra sebesar 100%
 - Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik tahun 2018 mencapai 100% atau sama dengan realisasi tahun 2017 dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik tidak pernah salah diberikan kepada pasien sehingga perlu dipertahankan.

- Kepuasan pelanggan eksternal patologi klinik tahun 2018 sebesar 75% dari target Renstra. Hal ini menunjukkan kepuasan pasien cukup baik.
- 7) Pelayanan Radiologi
- Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto tahun 2018 sudah sesuai dengan standar nasional maupun target dalam renstra.
 - Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen oleh Sp.Rad pada tahun 2018 sebesar 72,37%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 69,88%.
 - Kejadian kegagalan pelayanan rontgen pada tahun 2018 sebesar 1,7% dari target 1,2%. Mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 8,08%. Bila dibandingkan dengan standar nasional maksimal 2% maka capaian tahun 2018 adalah 118%. Pencapaian sudah hampir mencapai target karena sistem pelayanan film rontgen sudah tertata baik.
 - Kepuasan pelanggan eksternal radiologi tahun 2018 dengan realisasi 75% dibawah target 2018 sebesar 80%.
- 8) Pelayanan Farmasi
- Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dan standar nasional.
 - Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit pada tahun 2018 terealisasi sebesar 44,62% dari target 100%.
 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit pada tahun 2018 terealisasi sebesar 67,01% dari target 100%, dan belum berhasil.
 - Tidak adanya kesalahan pemberian obat pada tahun 2018 mencapai 75% salah satu indikator mutu pelayanan farmasi sudah bagus. Sehingga perlu ditingkatkan.
 - Penulisan resep sesuai formularium tahun 2018 target 100% dengan realisasikan 75%
 - Kepuasan pelanggan eksternal farmasi tahun 2018 yang dilaksanakan oleh instalasi farmasi terealisasi sebesar 80%, sudah mencapai target dalam renstra maupun standar nasional sehingga perlu dipertahankan.



- 9) Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- Kejadian *dropout* pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 19% dengan realisasi 17,93% dengan capaian 106%. Jika dibandingkan dengan target nasional maksimal 50% maka kinerja instalasi rehabilitasi medik sangat baik
 - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik sehingga perlu dipertahankan..
 - Kepuasan pelanggan eksternal Rehabilitasi Medik tahun 2018 sebesar 80% melebihi target renstra maupun standar nasional.
- 10) Pelayanan IPSRS
- Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat pada tahun 2018 mencapai 84,21% dari target renstra. Dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja indikator ini 104%, karena target nasional hanya 80% sedangkan target renstra 86,66%.
 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat tahun 2018 sebesar 84% dengan target 80% sesuai dengan target renstra dengan capaian 104%, tetapi masih dibawah standar nasional sehingga perlu ditingkatkan.
 - Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi sesuai dengan ketentuan kalibrasi tahun 2018 sebesar 100%.
- 11) Pelayanan Sanitasi/Pengolahan Limbah
- Baku mutu air limbah sesuai dengan aturan/standar pada tahun 2018 sebesar 100% sesuai target renstra dan standar nasional.
 - Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan tahun 2018 terealisasi sebesar 100%.
- 12) Pelayanan Gizi
- Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien tahun 2018 mencapai 86,31%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90% maka capaiannya sebesar 96%, namun masih dibawah standar nasional yaitu 90%.

- Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien tahun 2018 mencapai 20,41%, jika dibandingkan dengan target sebesar 20% maka capaiannya sebesar 98%. Pada indikator ini semakin kecil capaian yang didapat semakin baik kinerja.
- Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet tahun 2018, sehingga perlu ditingkatkan sesuai standar nasional.

13) Pelayanan Rekam Medik

- Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 80%. Dengan capaian 80% dari target renstra maupun standar nasional sebesar 100%. Realisasi indikator ini berhubungan erat dengan lambatnya klaim JKN yang tentunya berimbas pada pendapatan serta *cash flow* rumah sakit. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya operasional RS mulai dari ketersediaan obat-obatan dan logistik RS sampai dengan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan/insentif.
- Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas tahun 2018 realisasi 91%.
- Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan tahun 2018 mencapai 7,0 menit lebih lama. Sudah memenuhi target nasional yaitu maksimal 10 menit.

14) Pelayanan Loundry

- Berdasarkan data yang ada, tidak adanya kejadian linen yang hilang tahun 2018.
- Berdasarkan data yang ada, sepanjang Tahun 2018 linen selalu tersedia sebesar 100%.

15) Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Ambulance Jenazah

- Waktu penyediaan ambulance jenazah mencapai tahun 2018 75% dari target 24 jam.
- Kecepatan memberikan pelayanan ambulance jenazah di rumah sakit tahun 2018 mencapai 75% dari target 30%;
- Waktu pelayanan penyerahan jenazah kepada keluarga tahun 2018 mencapai 75% dari target 2 jam.

16) Pelayanan Administrasi dan Manajemen

- Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi tahun 2018 realisasi sebesar 80% sehingga perlu ditingkatkan.



- Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 sudah sesuai target.
- Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat tahun 2018 mencapai 90% mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya.
- Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun pada tahun 2018 mencapai 50% dari sesuai target 50% sehingga capaian 100%. Hal ini disebabkan dalam rangka penilaian akreditasi versi 2012 di RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang dilaksanakan *in house training* Bantuan hidup dasar, pencegahan dan pengendalian infeksi, Mutu dan Keselamatan Pasien, Penanggulangan Kebakaran/ Pemadaman, Kewaspadaan Bencana dan Evakuasi bagi seluruh karyawan rumah sakit.
- *Cost recovery*, *Cost recovery* adalah jumlah pendapatan fungsional dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu. *Cost recovery* menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*Revenue*). Tahun 2018 mencapai 86% jika dibanding dengan target 70% maka capaiannya 123%. Namun jika dibandingkan dengan target nasional minimal 40% maka capaiannya 215%. BLUD RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang tahun 2018 mampu menutupi biaya operasional dari penerimaan.
- Indikator Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tahun 2018 sebesar 75% dari target 100%.
- Ketepatan waktu penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 sebesar 75% dari target 100%.
- Ketepatan waktu laporan pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga tahun 2018 sebesar 75% dari target 100%.
- Kecepatan pendistribusian surat dari TU ke tujuan maksimal 1 jam, tahun 2018 sebesar 80% dari target 100%.
- Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap sudah memenuhi target.

- Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) tahun 2018 capaiannya 80%. Hal ini ada kaitannya dengan *cash flow* rumah sakit yang sudah dijelaskan sebelumnya pada indikator Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.

17) Pelayanan Bank Darah

- Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi tahun 2018 mencapai 100% atau sama dengan capaian tahun 2015 dan tahun 2016 an 2017 serta sesuai standar nasional sehingga perlu dipertahankan.
- Kejadian reaksi transfusi tahun 2018 adalah 0% dengan capaian sebesar 100%.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Per 31 Desember 2018 berjumlah 1.048 orang dengan kualifikasi :

a) Latar belakang pendidikan:

SD= 5 orang; SLTP= 12 orang; SLTA= 159 orang; Diploma = 499 orang; Sarjana = 305 orang; Magister= 68 orang

b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV= 84 orang; Golongan III = 587 orang; Golongan II = 366 orang; Golongan I = 11 orang

c) Pejabat Struktural sebanyak : 27 Orang

Eselon II = 0 orang; Eselon III = 10 orang; Eselon IV = 14 orang

d) Pejabat Fungsional : -.- orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program Renja yang di akomodir dalam RKPD Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagai berikut:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Program Upaya Kesehatan Perorangan
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya



5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

- a) Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan kepada seluruh karyawan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, dikarenakan keterlambatan transferan klaim pembayaran dari BPJS.
- b) Sering tertumpuknya sampah medis dikarenakan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang memiliki alat pembakaran yang sering rusak.
- c) Obat-obatan BPJS lebih khusus pada obat kemotherapy untuk pasien kanker, dimana harganya mahal dan keterbatasan stok secara nasional karena kekosongan bahan baku obat di pabrikaan.

Solusi:

- a) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang perlu memperbaiki system verifikasi untuk percepatan klaim tagihan pasien BPJS.
- b) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sudah bekerjasama dengan pihak lain yang telah memiliki izin untuk penanganan sampah medis dan merencanakan pengadaan alat pembakaran (*Incenerator*).
- c) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sudah membuat Rencana Kerja Obat (RKO) tahunan sesuai tren jumlah pasien kanker dan pasien-pasien khusus lainnya dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperkuat fungsi preventive.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.2.106.206.236,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.2.013.219.896,- (95.59%)
- b) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.14.865.384,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.12.048.800,- (81.05%)



URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.191.424.004.870,-
- Realisasi : Rp.189.473.652.476,- (98.98%)

1) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.168.359.716.870,-
- Realisasi : Rp.166.834.064.530,- (99,09)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pembangunan Jalan Sepanjang 49,5 Km yang tersebar pada 17 Kabupaten/ Kota;
 - Terlaksananya Pembangunan Jembatan sepanjang 85 Meter pada 5 Kabupaten (Kabupaten Kupang, Belu, Ende, Sumba Timur dan Sumba Barat) ;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Kupang, Kab. Kupang dan Alor;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan di Kab.TTS dan Kab. Belu;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Flores Timur dan Kab. Lembata;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan di Kab.Sikka dan Kab. Ende;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan di Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Kab. Manggarai Barat;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya;
 - Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Sumba Timur dan Sumba Tengah;



- Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan DAK di Kab. Kupang;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan DAK di Kab. Kupang;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Jalan DAK di Kab. Sumba Barat Daya;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan sepanjang 22 Km di pulau Timor;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan sepanjang 21.60 Km di pulau Flores 1;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan sepanjang 21.60 Km di pulau Flores 2;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan sepanjang 11.50 Km di pulau Sumba;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 70 M di Pulau Timor;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 93 M di Pulau Flores;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 75 M di Pulau Sumba;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Bokong – Lelogama 1;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Hansisi – Tanjung Meolao (4.00 Km) Kab. Kupang
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Bokong – Lelogama 3 sepanjang 10 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Bokong – Lelogama 4 sepanjang 10 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Saba - Ege sepanjang 6.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Kokar – Tulta – Mali sepanjang 8.00 Km;



- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Waiklambu – (Bts. Kab) - Riung – Mboras sepanjang 10.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan di Kab. Manggarai Timur sepanjang 40.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Reok – Dampek – Pota sepanjang 5.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan di Kab. Sumba Timur sepanjang 50.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Mamboro - Bts. Kab. Sumba Tengah sepanjang 6.00 Km;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 20 M di Kab. TTU;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 50 M di Kab. Nagekeo;
- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan sepanjang 50 M di Kab. TTS;
- Terlaksananya Review Disign Ruas Jalan Penunjang KSN Sp. Ngorang – Wangkuna – Kondo (2.00 Km) Kab. Manggarai Barat;
- Adanya Penyiapan Dokumen UKL – UPL Sp. Ngorang – Wangkuna – Kondo (2.00 Km) Kab. Manggarai Barat.

2) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- Alokasi Anggaran : Rp.23.064.288.000,-
- Realisasi : Rp.22.639.587.946,- (98.24%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan berkala Jalan sebanyak 5 Ls dan 4 paket;
 - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan sepanjang 0.85 Km di pulau Timor;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sepanjang **2.00** Km di pulau Flores;
 - Terlaksananya Pemeliharaan Jalan sepanjang **2.00** Km di pulau Sumba;



- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan sepanjang **2.00** Km di pulau Sumba;
- Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan (**1 Ls**) di Kab. Manggarai Timur.
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. Kupang dan Alor;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. TTS dan Kab. Belu;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di Kab. Sumba Timur;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. Sikka;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. Ngada dan Manggarai Timur;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. Alor;
- Terlaksananya Pengawasan Teknis rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Kab. TTS;
- Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi sebanyak 8 Ls;
- Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Provinsi sebanyak 3 Ls.

b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Alokasi Anggaran : Rp.8.493.292.480,-
- Realisasi : Rp.7.961.579.726,- (93.74%)

1) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.932.146.800.-
- Realisasi : Rp.3.868.133.270,- (98.37%)
- Capaian/Hasil :
Terpeliharanya Bantaran dan Tanggul Sungai dan tersedianya data Base sungai pada daerah irigasi Kewenangan Provinsi.

2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sistem Penyediaan Air Minum.

- Alokasi Anggaran : Rp.4.561.145.680,-



- Realisasi : Rp.4.093.446.456,- (89.75%)
 - Capaian/Hasil :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Air Bersih Kawasan Kota Kupang.
- c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi.
- Alokasi Anggaran : Rp.64.054.880.250,-
 - Realisasi : Rp.56.901.738.074,- (88.83%)
- 1) Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi.
- Alokasi Anggaran : Rp.21.493.629.200,-
 - Realisasi : Rp.17.003.412.097,- (79.11%)
 - Capaian/Hasil :
meningkatnya fungsi layanan Jaringan Irigasi sederhana sebanyak 9 paket Daerah Irigasi.
- 2) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi (Ha).
- Alokasi Anggaran : Rp.9.579.021.000,-
 - Realisasi : Rp.8.745.434.294,- (91.30%)
 - Capaian/Hasil :
Terlaksananya Rehabilitasi dan terpeliharanya sistem Jaringan Irigasi.
- 3) Kegiatan Pembangunan Embung Kecil.
- Alokasi Anggaran : Rp.27.420.858.050,-
 - Realisasi : Rp.25.710.207.801 (93.76%)
 - Capaian/Hasil :
Terbangunnya embung kecil sebanyak 20 buah dan tersedianya tampungan air.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung.
- Alokasi Anggaran : Rp.5.561.372.000,-
 - Realisasi : Rp.5.442.683.882,- (97.87%)
 - Capaian/Hasil :
Tersedianya tampungan air melalui Rehabiliatsi dan Pemeliharaan Embung Kecil.
- d) Program Manajemen Dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan.
- Alokasi Anggaran : Rp.2.687.478.900,-
 - Realisasi : Rp.2.657.228.735,- (98,87%)



- 1) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu.
 - Alokasi Anggaran : Rp.490.812.000.-
 - Realisasi : Rp.488.032.853,- (99.43%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya laporan kegiatan fisik dan keuangan yang akurat sebagai laporan pertanggung jawaban dinas Dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum serta tersedianya hasil monitoring dan evaluasi di 22 Kabupaten/ Kota.
 - Terlaksananya Aplikasi Sistem Informasi Data Base Kepegawaian Dinas PUPR Provinsi NTT.
- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian.
 - Alokasi Anggaran : Rp.2.196.666.900,-
 - Realisasi : Rp.2.169.195.882,- (98.75%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya kalibrasi alat-alat laboratorium pengujian;
 - Terlaksananya pemeliharaan alat-alat laboratorium pengujian dan alat-alat Berat;
 - Tersedianya Gudang Peralatan Laboratorium Pengujian.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 317 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:

SD= 6 orang; SLTP= 8 orang; SLTA= 114 orang; Diploma= 33 orang; Sarjana = 136 orang; Magister= 19 orang; Doktor =1 orang.
- b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV= 15 orang; Golongan III = 184 orang; Golongan II = 111 orang; Golongan I = 7 orang.
- c) Pejabat Struktural sebanyak : 25 Orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 18 orang
- d) Pejabat Fungsional

Arsiparis = 2 Orang; Widya Iswara = - Orang.



4. **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah : -**

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Pekerjaan Umum yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
3.	Program Pengolahan Sumber Air	Program Pengolahan Sumber Air	Program Pengolahan Sumber Air
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
5.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	-	-
6.	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur PU	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur PU	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur PU

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.3.084.651.400,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.2.935.374.602,- (95.16 %)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.2.940.850.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.2.745.094.226,- (93.34 %)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.81.720.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.81.693.010,- (99.97%)



PENATAAN RUANG. (Bappeda)

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.078.475.000,-
- Realisasi : Rp.1.023.387.350,- (94.89%)

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Alokasi Anggaran : Rp.858.475.000,-,-
- Realisasi : Rp.823.595.280,- (95.94%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya dokumen laporan sinergitas RTRWP sebanyak 2 buku;.
 - Tersedianya laporan koordinasi percepatan pelaksanaan satu peta provinsi NTT dan pengembangan data spasial, sebanyak 1 (satu) buku;
 - Tersedianya data spasial pembangaunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - Tersedianya Data Spasial pengembangan, Daerah Irigasi;
 - Tersedianya data spasial pembangunan embung;
 - Tersedianya Data Spasial Pengembangan Kawasan Hutan;
 - Tersedianya Data Spasial Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan;
 - Tersedianya Pengembangan Data Spasial Kawasan Perbatasan.

2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa/ Kelurahan.

- Alokasi Anggaran : Rp.220.000.000,-
- Realisasi : Rp.199.792.070,- (90,81%)



- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Dokumen Database perkembangan desa tertinggal dan desa berkembang sebanyak 15 buku;
 - Adanya laporan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Panduan Perencanaan Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 5 buku;
 - Adanya Laporan Rakor dan sosialisasi Indeks Pembangunan Desa dan Desa membangun sebanyak 5 buku

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 98 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a) Latar belakang pendidikan:

SD = 1 orang; SLTP = 0 orang; SLTA = 24 orang; Diploma = 5 orang; Sarjana = 47 orang; Magister = 19 orang; Doktor = 1 orang.
- b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 14 orang; Golongan III = 69 orang; Golongan II = 14 orang; Golongan I = 1 orang.
- c) Pejabat Struktural sebanyak : 20 Orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 15 orang.
- d) Pejabat Fungsional : 13 orang, terdiri dari

Pranata Humas = 1 orang; Pustakawan = 1 orang; Arsiparis = 1 orang; Perencana = 10 orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT untuk Urusan Penataan Ruang tidak terpisah dari urusan Perencanaan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3.	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
4.	Program Desa Mandiri Anggur Merah	Program Desa Mandiri Anggur Merah	-
5.	Program Hibah Ekonomi Produktif	-	-
6.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yang tidak terpisah dari urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT.

PENATAAN RUANG. (PU)

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.097.856.000,-
- Realisasi : Rp.2.782.538.600,- (98.74%)

1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.097.856.000,-
- Realisasi : Rp.2.782.538.600,- (89,82%)
- Capaian/Hasil :

Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Pembuatan Deliniasi KSP.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 338 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:
SD= 6 orang; SLTP= 8 orang; SLTA= 114 orang; Diploma= 33 orang; Sarjana = 136 orang; Magister= 19 orang; Doktor =1 orang.
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV= 15 orang; Golongan III = 184 orang; Golongan II = 111 orang; Golongan I = 7 orang.
- c) Pejabat Struktural sebanyak : 25 Orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 18 orang.
- d) Pejabat Fungsional
Arsiparis = 2 Orang; Widya Iswara =- Orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Penataan Ruang tidak terpisah dari urusan Pekerjaan Umum yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
3.	Program Pengolahan Sumber Air	Program Pengolahan Sumber Air	Program Pengolahan Sumber Air
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
5.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	-	-
6.	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum



5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yang tidak terpisah dari urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

URUSAN PERUMAHAN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana.

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

- Alokasi Anggaran : Rp.117.753.426.000,-
- Realisasi : Rp.106.422.375.709,- (90,40%)

1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Perkantoran.

- Alokasi Anggaran : Rp. 41.616.560.000,-
- Realisasi : Rp. 40.128.370.404,- (96,42%)
- Capaian/Hasil :
 - Adanya Dokumen ANDALALIN kawasan NTT Fair di laksanakan di Kawasan NTT Fair Kota Kupang (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, Album Dokumentasi)
 - Adanya Dokumen UKL-UPL Pengembangan Kawasan NTT Fair di laksanakan di Kawasan NTT Fair Kota Kupang (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, dan Album Dokumentasi);
 - Adanya Dokumen ANDALALIN kawasan Gelanggang Pemuda Oepoi di laksanakan di Kawasan GOR Oepoi Kota Kupang (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, Album Dokumentasi);



- Adanya Dokumen UKL-UPL Pengembangan Kawasan GOR Oepoi Kota Kupang di Kawasan GOR Oepoi Kota Kupang (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, dan Album Dokumentasi);
 - Adanya Laporan rencana teknis bangunan gedung (*review design*) Gelanggang Pemuda Oepoi di Kawasan GOR Oepoi Kota Kupang berdasarkan hasil kajian struktur, rencana detail teknis (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan rencana pelaksanaan pembangunan;
 - Bangunan Pameran NTT Fair (Laporan pendahuluan, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir, dan ringkasan pelaksanaan);
 - Adanya Bangunan Pameran NTT Fair.
 - Pembangunan Konstruksi Jalan pada lokasi kawasan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Kupang
 - Pembangunan Pagar Kantor Gubernur;
 - Penataan Trotoar dan Taman Ruas Jalan Kota Kupang;
 - Tertatanya *Landscape* Kawasan Kantor Gubernur;
 - Identifikasi dan Rentek Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lembata;
 - Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Pedesaan/Nelayan Kawasan Pesisir Kota Lembata;
 - Pembangunan PSU – Permukiman - Liliba Kota Kupang.
- 2) Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- Alokasi Anggaran : Rp.76.136.866.000,-
 - Realisasi : Rp.66.321.998.166,- (87,11%)
 - Capaian/Hasil :
 - Adanya rekomendasi berkaitan dengan upaya pengembangan program dan kegiatan bidang perumahan di Provinsi NTT;
 - Terbentuknya Badan Pengurus Asosiasi KP- SPAM oleh ROMS XI NTT bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;

- Dikukuhkannya Asosiasi SPAM Tingkat Provinsi NTT oleh Gubernur NTT pada tanggal 6 Juni 2018
- Adanya dokumen Laporan Pendahuluan (4 Rangkap), Laporan Antara (4 Rangkap), Laporan Akhir (4 Rangkap) serta Album Peta (5 Rangkap) dan 5 buah cd;
- Penyusunan Data Base Air Bersih/ Air Minum Provinsi NTT di laksanakan oleh CV. Bayu Pratama dengan produk berupa: Pembuatan Aplikasi (Software) d; Hardcopy SOP aplikasi; pengadaan 1 unit server dan kelengkapannya; Laporan Pendahuluan dan akhir (masing-masing 5 rangkap) dan 5 buah CD;
- Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Kelembagaan SPAM (2 Kabupaten) yang diadakan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ngada;
- Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan SPAM (3 Kabupaten) yang diadakan di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Kupang;
- Identifikasi dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Sumba Barat yang dilaksanakan oleh CV. Aries Design;
- Identifikasi dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Manggarai Timur yang dilaksanakan oleh CV. Aries Design;
- Identifikasi dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Sumba Tengah yang dilaksanakan oleh CV. Detikon Teknik;
- Identifikasi dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kab. Malaka yang dilaksanakan oleh CV. Inti Murni Teknik;
- Identifikasi dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten TTU yang dilaksanakan oleh CV. Raska Konsultan;



- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran Lingkungan Pemerintah Provinsi SMA/SMK yang dilaksanakan oleh CV. DISEN KONSULTAN;
- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Hotel Ina Boi(PT. DWIPA MITRA KONSULTAN);
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Fasilitas Umum dan Sosial yang dilaksanakan oleh CV. DESAKON;
- Identifikasi Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Potensi Pengembangannya;
- Tersusunnya Data Base Air Bersih/ Air Minum Provinsi NTT, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2018 s/d 31 Juli 2018, lokasi : referensi dari lokasi paket “ IDENTIFIKASI CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA” yaitu 4 kecamatan dan Desa di Kabupaten Kupang;
- Tersusunnya Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Segmen 3 (Tugu Tiroso-Bandara Eltari);
- Tersusunnya Rencana Teknis/DED Jaringan Air Bersih/Air Minum Praikalala dilaksanakan di Kab. Sumba Timur;
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Pedesaan/Nelayan Kawasan Pesisir Lembata;
- Adanya Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum dilaksanakan pada tanggal 02 Mei s/d 18 Oktober 201 di Kecamatan Kubaglobit Kabupaten Flores Timur yang didahului dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Camat kubaglobit;
- Perencanaan Perluasan Pengembangan SPAM di kabupaten Flores Timur-Adonara;
- Manajemen Konstruksi Pembangunan Monumen Garuda Pancasila di Kawasan Bolok Kabupaten Kupang (Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang);
- Terbangunnya Monumen Flobamora Rumah Pancasila;
- Adanya Dokumen ANDALALIN (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, Album Dokumentasi);



- Adanya Dokumen UKL-UPL (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Surat Rekomendasi, Ringkasan Pelaksanaan, dan Album Dokumentasi);
- Tersedianya tenaga listrik untuk Bangunan Monumen Pancasila;
- Tersedianya tenaga listrik untuk Bangunan Monumen Pancasila (Laporan mingguan dan dokumentasi);
- Adanya Dokumen RTBL berupa (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, Laporan Akhir, Gambar Perspektif, Rancangan Perwali, CD Dokumentasi).
- Terlaksananya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 650 unit rumah tidak layak huni.
- Teridentifikasi BSPS Provinsi NTT.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 111 orang, dengan kualifikasi:

- Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = - orang; SMA = 20 orang; Diploma = 27 orang; Sarjana = 48 Orang; Magister = 16 Orang; Doktor = - Orang.
- Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 5 Orang; Golongan III = 73 Orang; Golongan II = 11Orang; Golongan I = - Orang.
- Pejabat Stuktural: 15 Orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 11 orang.
- Pejabat Fungsional: - Orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Perumahan Tahun 2018 yang di akomodir dalam RKPD sebanyak 1 (Satu) Program, yaitu: Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: belum memadai.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.



7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.7.162.575.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.7.058.926.758,- (98,55%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.67.600.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.67.300.000,- (99,56%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.25.000.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.23.795.390,- (95,18%)

URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA).

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - Alokasi anggaran : Rp.2.217.569.344.-
 - Realisasi : Rp.2.158.138.292.- (97,32%)
 - 1) Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
 - Alokasi anggaran : Rp.95,593,280.-
 - Realisasi : Rp.93,783,080.- (98,00%)
 - Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pengetahuan serta peran aparaturnya perlindungan masyarakat tentang bahaya kebakaran
 - Meningkatnya pengetahuan tentang Penyelamatan dan Evakuasi terhadap kejadian bencana;
 - Meningkatnya Pengetahuan pemberdayaan Linmas di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat.



2) Kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat.

- Alokasi anggaran : Rp.61.333.304.-
- Realisasi : Rp.60.151.302.- (98,07%).
- Capaian/Hasil
 - Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Jakarta. Hasilnya mendapat masukan dan petunjuk tentang Literatur yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pencegahan penyakit masyarakat (Pekat).
 - Terlaksananya Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan Rote Ndao. Hasilnya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang anggota Satlinmas dalam melaksanakan Pembinaan dan pencegahan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan Rote Ndao berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

3) Kegiatan Peningkatan Fungsi Pemeliharaan Trantibum.

- Alokasi anggaran : Rp.550.000.000.-
- Realisasi : 529.505.400,- (96,27%)
- Capaian/Hasil :
 - meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, meningkatkan profesionalisme, terbangunnya pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam tugas pokok dan fungsi.
 - meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan pola pikir yang kreatif dan inovatif;
 - peningkatan kemampuan dalam pengendalian masa dan pengawasan pejabat, meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur, terbentuknya pola pikir Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang kreatif dan inovatif
 - meningkatkan pengetahuan peraturan baris-berbaris, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar dan memiliki etos kerja yang tinggi. Terbangunnya pola pikir



- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang kreatif dan inovatif dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Tercapainya kemampuan untuk memiliki sifat , etika, sopan santun serta memiliki teknis untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman dalam menjaga di Kantor Gubernur
- 4) Kegiatan Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se-NTT.
- Alokasi anggaran : Rp. 93.185.160.-
 - Realisasi : Rp.93.184.550.- (100 %)
 - Capaian/Hasil :
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari di tengah-tengah masyarakat
- 5) Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan.
- Alokasi anggaran : Rp. 1.087.418.000.-
 - Realisasi : Rp.1.070.112.800.- (98,41%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Operasi Gabungan Darat, Laut tidak di temukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - Operasi Penertiban ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT tidak ditemukan ASN berkeliaran di jam kerja sedangkan kedapatan 4 orang siswa dan 3 orang siswi berada diluar sekaolah pada jam pelajaran di jembatan Petu jalur BTN Kolhua, terdapat 5 (lima) orang siswa di GOR Oepio, dan di baawah ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk di BAP sekaligus mendapat pembinaan.
 - Penertiban asset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yang diokupasi dan pemasangan plang oleh saudara Leonard Tomboy di tanah milik Provinsi NTT letak Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- Penertiban sebanyak 13 ASN yang telah habis masa purna bakti/pensiun bersama keluarga belum juga mengosongkan rumah Dinas pada Dinas Sosial Provinsi NTT di jalan Rambutan Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- Penertiban lokasi tanah di Gedung Pemuda Kelurahan Konino Kecamatan Oebobo bersama dengan petugas BPPKAD Prov. NTT, mendatangi Okupan/mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT tanpa izin pemerintah Provinsi NTT.
- Penertiban asset tidak bergerak milik Pemerintah Provinsi NTT di RCTI Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- Penertiban asset daerah pada Kantor Gubernur I pada saat demonstrasi terkait trafiking pada hari libur.
- Melakukan operasi penertiban asset bergerak dan tidak bergerak
- Pebertiban kendaraan dinas milik Dinas Kominfo Provinsi NTT yang dipegang oleh bendahara barang lebih dari 1 (satu) dan rumah dinas di Kelurahan Oetete yang dalam keadaan rusak berat dan tidak ada jalan masuk dengan solusinya adalah saudara Kenenias sebagai bendahara barang Dinas Komimfo Provinsi NTT sudah dikembalikan Kebdaraan Dinas kepada Dinas terkait serta rumah dinas telah dilaporkan ke Kepala Dinas Komfinfo Provinsi NTT untuk di ambil langkah-langkah selanjutnya.
- Melakukan rapat bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT, BPPKAD Prov. NTT, Pemda Kabupaten TTS, Kodim TTS, Polres TTS, Camat Amanuban Selatan, Kepala Desa Besi Pae, Masyarakat di Desa Besi Pae dan melakukan persuasive terkait tanah milik Pemerintah Provinsi yang di okupasi oleh masyarakat di Desa Besipae.
- Melakukan operasi di tempat penampungan calon tenaga kerja dan Pelabuhan Tenau Kupang, Bandara El Tari Kupang yang menghasilkan terjaring TKI/TKW illegal



kemudian di serahkan kepada Satgas Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk memberikan pembinaan

- Pengamanan pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan calon Bupati se- Provinsi NTT di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanis Kupang.
- Pengamanan demonstrasi unjuk rasa penolakan batu mangan dari aliansi Mahasiswa dan masyarakat Sabu Raijua;
- Pengamanan pada pembagian RASTA (beras sejahtera) bagi masyarakat di kantor Bupati Kupang-Oelamasi.
- Pengamanan dalam rangkamenertibkan fasilitas milik Pemerintah Provinsi NTT/Dinas Nakertrans Perdagangan dimana faasilitas tersebut ada di Dinas Nakertrans Prov. NTT.
- Pengamanan unjuk rasa dari Mahasiswa Universitas Widiya Mandira (UNWIRA) Kupang di Kantor DPDR Provinsi NTT.
- Pengamanan pada tamu-tamu VVIP (RRT) Tionghoa dari Hotel Aston menuju ke Mesium dan Bandara Eltari Kupang, pengamanan dalam rangka kegiatan bakti sosial bersama RRC, Pemerintah Provinsi dan Ormas tionghoa di Titong Kabupaten Kupang.

6) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi anggaran : Rp.75.450.400.-
- Realisasi : Rp.71.219.760.- (94,39%)
- Capaian/Hasil :

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 18 Kabupaten/Kota sehingga tersinkronisasinya Program dan Kegiatan antara Satpol PP Provinsi NTT dan Kabupaten Kota.

7) Kegiatan Perayaan HUT Polisi Pamong Praja dan Linmas Tingkat Nasional Tahun 2017 dan Rakornas Polisi Pamong Praja tingkat Nasional.

- Alokasi anggaran : Rp.176.700.000.-
- Realisasi : Rp.169.082.200,- (95,69 %),-
- Capaian/Hasil :



Terlaksananya Perayaan HUT Polisi Pamong Praja Tingkat Nasional di Banjar Baru dan Tingkat Provinsi di Kabupaten Nagekeo serta Rakornas Polisi Pamong Praja Provinsi Tahun 2018 yang diikuti kurang lebih dari 2.000 (dua ribu) anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Gubernur NTT, PLT Kepala Daerah Nagekeo serta Para Kasat se Kabupaten/Kota.

8) Kegiatan Penyusunan Profil Wilayah Berpotensi Terhadap Ancaman Kebakaran.

- Alokasi anggaran : Rp.77.889.200.-
- Realisasi : Rp.71.099.200.- (91,28%)
- Capaian/Hasil :

Tersedianya sarana prasarana pemadam kebakaran belum memenuhi standar yang diharapkan dan perlu menganggarkan untuk tahun anggaran 2019 sehingga dapat membantu melaksanakan Tupoksi dengan baik dan benar

b) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah.

- Alokasi anggaran : Rp.631.676.200.-
- Realisasi : Rp.612.888.200.- (97,03%)

1) Kegiatan Pelatihan Calon PPNS dan Bimbingan Teknis PPNS.

- Alokasi Anggaran : Rp.108.318.000.-
- Realisasi : Rp.107.666.000.- (99,40%)
- Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya kemampuan PPNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
 - Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
 - Terlaksananya Operasi Tipiring dalam rangka peningkatan PAD bersama Pengadilan Klas I-A Kupang, Kejati NTT, Lantas Polda NTT, Disreskrim Polda NTT, Propam Polda NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT (UPT LLAJ Wilayah Kota Kupang), UPT BPPKAD Wilayah Kupang, Balai UPTD Wilayah XIII Provinsi NTT;
 - Terlaksananya Operasi Intelejen Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi NTT dalam Pemantauan kegiatan;



- Terlaksananya kegiatan Penyelidikan 2 (dua) kasus Pelanggaran Perda dan Pergub;
 - Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota Satpol. PP Provinsi NTT dalam Penyelesaian kasus Pelanggaran Perda.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum.
- Alokasi Anggaran : Rp.54.859.040,-
 - Realisasi : Rp.52.959.040.- (96.54%)
 - Capaian/Hasil :
Terdatanya aset Pemerintah Provinsi NTT di BPPKAD di 6 (enam) Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Alor dan Malaka.
- 3) Kegiatan Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- Alokasi Anggaran : Rp.364.813.000.-
 - Realisasi : Rp.354.091.000.- (97.06%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Operasi Penertiban Aset Pemerintah Provinsi NTT bersama BPPKAD di Kabupaten/Kota Kupang terhadap Tanah milik Pemerintah Provinsi NTT dan Melakukan operasi penertiban asset bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Provinsi NTT di lokasi RCTI Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Terlaksananya operasi Tera bersama Disperindag Kota Kupang selama 3 (tiga) hari di SPBU di Kota Kupang, Pasar Kasih Naikoten I dan para penjual buah terhadap pertimbangan pegas dan logam sehingga konsumen tidak dirugikan;
 - Melakukan operasi di tempat hiburan malam dan pitrad-pitrad terhadap pekerja diluar Provinsi NTT yang bekerja di wilayah Provinsi NTT;
 - Melakukan operasi di tempat penampungan calon tenaga kerja (TKI dan TKW) agar diberi kursus dan pelatihan sebelum di pekerjakan di dalam maupun diluar negeri;

- Terlaksananya Operasi Ijin Trayek bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTT selama 6 (enam) hari di Kota Kupang dan hasilnya, melakukan operasi penertiban terhadap angkutan barang dan angkutan orang di jembatan timbang Kelurahan Namosain dan jembatan timbang di jalan timor raya kelurahan Oesapa.

4) Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS.

- Alokasi Anggaran : Rp.103.686.160.-
- Realisasi : Rp.98.172.160.- (94.68%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang PPNS selama 3 (tiga) hari di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Ende, TTS, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat. Hasilnya meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PPNS di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Meningkatnya Kinerja PPNS di Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPNS;

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT sebanyak 125 orang dengan perincian sebagai berikut:

a) Latar belakang pendidikan:

Doktor (S3) = - orang; Magister (S2) = 5 orang; Sarjana (S1) = 42 orang; Diploma = 1 orang; SLTA = 77 orang;

b) Pangkat/Golongan:

Pembina Utama Madya (IV/d) = 1 Org; Pembina Tk I (IV/b) = 4 Org; Pembina (IV/a) = 2 Org; Penata Tk. I (III/d) = 10 Org; Penata (III/c) = 7 Org; Penata Muda Tk I (III/b) = 18 Org; Penata Muda (III/a) = 19 Org; Pengatur Tingkat I (II/d) = 6 Org; Pengatur (II/c) = 45 Org; Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 4 Org; Pengatur Muda (II/a) = - org.

c) Pejabat Stuktural: 17 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 11 orang dan 1 orang Pejabat Eselon IV belum terisi.



4. **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Uraian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Meningkatkan Peran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS) dalam penengakkan Paraturan Daerah dan Peraturan Kapala Daerah serta aparat SATLINMAS dalam upaya melakukan Perlindungan Masyarakat;	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.744.747.456,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.602.877.880,- (80,95%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.630.151.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.616.124.000,- (97.77%).
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.22.040.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.22.040.000,- (100%).



URUSAN SOSIAL.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) lainnya.

- Alokasi anggaran : Rp.1.144.734.678,-
- Realisasi : Rp.1.096.117.620,- (95.75%)

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping PMKS.

- Alokasi Anggaran : Rp.390.980.178,-
- Realisasi : Rp.383.438.500,- (98.07%)
- Capaian/Hasil :

Tersalurnya bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di 22 Kabupaten/Kota, dan pemberian bantuan sembako bagi 50 KK miskin di Kota Kupang pada pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Kegiatan Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH).

- Alokasi Anggaran : Rp.655.573.500,-
- Realisasi : Rp.620.590.620,- (94.66%)
- Capaian/Hasil :

Meningkatnya pemahaman para pendamping, operator PKH dan petugas lintas sektor di 22 Kabupaten/Kota sebanyak 1.122 orang Pendamping dan Operator PKH dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi masyarakat.

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp. 98.181.000,-
- Realisasi : Rp. 92.088.500,- (93,79%)
- Capaian/Hasil : Tersedianya data Profil Dinas

Tersedianya data Profil Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

➤ Alokasi anggaran : Rp.12.727.854.890,-

➤ Realisasi : Rp.12.636.151.500,- (99.28%)

1) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Jompo dan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

- Alokasi Anggaran : Rp. 12.317.854.890,-

- Realisasi : Rp. 12.238.555.300,- (99.28%)

- Capaian/Hasil :

Terpenuhinya kebutuhan klien bagi penghuni panti berjumlah 569 orang di 7 (tujuh) panti yang terdiri dari 3 Panti Anak yang berlokasi di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Sumba Barat, 2 panti Jompo/Lanjut Usia berlokasi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka sedang 2 Panti Rehabilitas Sosial yaitu Panti Tuna Netra yang berlokasi di Kota Kupang dan Panti Sosial Karya Wanita di Kabupaten Kupang ; dan 60 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA/OHIDA), Pemberian bantuan dan pelatihan menjahit serta pertukangan bagi 60 orang anak terlantar di kabupaten Malaka dan Kabupaten Lembata , Memberikan Bantuan SEMBAKO bagi 100 orang lanjut usia pada penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional di UPT Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Kupang.

2) Peningkatan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta

- Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-

- Realisasi : Rp.148.500.000,- (99,00 %)

- Capaian/Hasil :

Meningkatnya kesejahteraan dan fungsi sosial 30 orang eks penyakit kroni dan kusta di Kab. Ngada (15 orang) dan Kab. Manggarai (15 Orang).

3) Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan.

- Alokasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-

- Realisasi : Rp.249.096.200,- (99,64 %)

- Capaian/Hasil :



Terfasilitasinya operasional Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) bagi 20 orang Petugas RPTC selama 1 tahun.

c) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Eks Taruma.

- Alokasi anggaran : Rp.336.417.095,-
- Realisasi : Rp. 331.543.500,- (98,55%)

1) Kegiatan Penanganan Deportasi dan Orang Terlantar.

- Alokasi Anggaran : Rp. 136.417.095,-
- Realisasi : Rp. 136.403.500,- (99.99%)
- Capaian/Hasil :

Tertanganinya masalah deportasi dan orang terlantar sehingga dapat kembali ke daerah asal dengan baik.

2) Pendidikan dan latihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.

- Alokasi Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi : Rp.195.140.000,- (97.57%)
- Capaian/Hasil :

Meningkatnya Kesejahteraan 40 orang Eks Narapidana di Nusa Tenggara Timur dengan memberikan bantuan dan Pelatihan.

d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

- Alokasi anggaran : Rp.1.825.787.500,-
- Realisasi : Rp.1.763.496.050,- (96,59%)

1) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial.

- Alokasi Anggaran : Rp.465.787.500,-
- Realisasi : Rp.441.297.150,- (94.74%)
- Capaian/Hasil :

300 org masyarakat mendapatkan informasi penyuluhan tentang Kesejahteraan Sosial dan DIKLAT bagi 70 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

2) Kegiatan Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakwaan Sosial.

- Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-
- Realisasi : Rp.150.000.000,- (100%)
- Capaian/Hasil :



Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dengan Instansi terkait yang di ikut 200 orang peserta kegiatan Hari Pahlawan, dan 300 org peserta kegiatan Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSAN).

- 3) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan peran serta taruna siaga bencana (TAGANA).
- Alokasi Anggaran : Rp.1.210.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.172.198.900,- (96.88%)
 - Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi 70 orang TAGANA;
 - Terbentuknya kampung siaga bencana di Kab. Ende dan Kab. Kupang sebanyak 500 orang (masing-masing 250 org)

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

- a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Jompo dan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
- b) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kapasitas dan peran serta taruna siaga bencana (TAGANA).

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi NTT per 31 Desember 2018 sebanyak 216 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a) Latar belakang pendidikan:
SD = 2 orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 100 orang;Diploma III = 17 orang; Sarjana = 82 orang; Magister = 14 orang.
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 15 orang; Golongan III= 126 orang; Golongan II= 72 orang; Golongan I = 3 orang;
- c) Pejabat Stuktural: 36 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 9 orang; Eselon IV = 26 orang
- d) Pejabat Fungsional : 21 orang.
Penyuluh Sosial = 1 orang, Arsiparis = 5 orang, Peksos = 15 orang.



4. **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Sosial yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kerssos (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kerssos (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kerssos (PMKS) Lainnya
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-
4	Program Penyandang Penyakit Sosial	Program Penyandang Penyakit Sosial Lainnya	Program Penyandang Penyakit Sosial Lainnya
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6	Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga	-	-

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.2.015.836.927,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.953.559.725,- (96.91%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.330.579.200,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.312.792.365,- (98.66%);
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp. 19.970.200,- (99,85%)



b. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

URUSAN KETENAGAKERJAAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang Pelatihan dan Penggunaan Tenaga Kerja (PPTK), UPTD Pelatihan Tenaga Kerja (PTK) dan UPT Pengembangan Produktifitas dan Transmigrasi (PPT).

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan.

➤ Alokasi : Rp.3.553.611.700,-

➤ Realisasi : Rp.3.404.654.825,- (95,81)

1) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas.

- Alokasi Anggaran : Rp.208.000.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 204.400.000,- (98,27%)

- Capaian/Hasil :

- Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Manggarai sebanyak 20 orang;

- Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Desa Produktif di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Desa Produktif sebanyak 1 paket / 20 di Kab. Sumba Barat Daya;

- Terlatihnya 20 orang peserta Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu Pendayagunaan Semen di Kelurahan Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;

2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja.

- Alokasi Anggaran : Rp.963.515.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp.880.707.120,- (91,41 %),-

- Capaian/Hasil :

- Terlaksananya Pelatihan Processing sebanyak 20 orang di Kabupaten Alor bekerjasama dengan LPK Adi Putra;

- Terlaksananya Pelatihan Daur Ulang sebanyak 20 orang di Kota Kupang bekerjasama dengan LSM Kelimutu;



- Terlaksananya Bimbingan Teknis Standar Mutu Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebanyak 15 orang di Kota Kupang;
 - Terlatihnya 16 orang tenaga penjahit di Kalabahi Kab. Alor;
 - Tersedianya 32 orang tenaga Otomotif (sepeda motor) di Kelurahan Tarus Kab. Kupang dan Kab. Flores Timur;;
 - Tersedianya 32 orang tenaga meubelar di Kota Kupang dan Kabupaten Belu;
 - Tersedianya 16 orang tenaga Las di Kabupaten Sikka;
 - Tersedianya 16 orang tenaga Otomotif (Mobil) di Kota Kupang (UPT Pelatihan Tenaga Kerja Kupang).
- 3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja.
- Alokasi Anggaran : Rp.1.318.790.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.935.358.000,- (70,93%)
 - Capaian/Hasil :
 - Rehabilitasi Rumah Pompa 1 unit, Tower dan Pompa Submersible 1 paket, Pagar Kantor 1 unit
- 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Alokasi Anggaran : Rp.195.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.181.591.210,- (93,12%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 50 buku monitoring program kegiatan dan pelatihan kerja;
 - Adanya Bantuan Peralatan Kesenian dan Peralatan Tenun serta Bahan sebanyak 1 paket di UPT WIOI Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Kegiatan Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- Alokasi Anggaran : Rp.787.070.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.683.675.200,- (86,86 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Buku Penyusunan Informasi Pasar Kerja di Dinas Provinsi tentang Bursa Kesempatan Kerja (Bursa Kerja) sebanyak 360 buku;
 - Tersedianya Buku Booklet Informasi Ketenagakerjaan sebanyak 540 buku;



- Tersedianya Buku Glosarium Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebanyak 1 paket / 50 buku;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kupang dengan peserta 22 Kab/Kota;
- Tersedianya Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2018 – 2023 di Kota Kupang sebanyak 1 dokumen / 100 buku;
- Terpublikasinya Masalah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

b) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- Alokasi : Rp.2.163.730.000,-
- Realisasi : Rp.1.641.838.140,- (75,88 %)

1) Peningkatan Kemitraan Tripartite dalam Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja.

- Alokasi Anggaran : Rp.200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.195.263.500,- (97,63%)
- Capaian/Hasil :
 - Terealisasinya Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebanyak 28 kasus yaitu : Kab.TTS sebanyak 12 kasus, Kab.Rote Ndao sebanyak 1 kasus, Sikka sebanyak 4 kasus, Sumba Barat sebanyak 1 kasus, Sumba Timur 7 kasus, dan Flores Timur sebanyak 3 kasus;
 - Terbinanya Sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebanyak 3 kali di Kota Kupang;
 - Adanya Keputusan Gubernur NTT Nomor :342 / KEP / HK / 2018 Tanggal, 29 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;
 - Terlaksananya Monitoring Upah Minimum Provinsi di 2 Kabupaten sebanyak 50 perusahaan,yakni di Kab. Kupang 20 perusahaan dan Kota Kupang 30 perusahaan;
 - Terbentuknya Posko May Day 2018 di Kota Kupang untuk antisipasi Pemogokan Hari Buruh Nasional;

2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- Alokasi Anggaran : Rp.694.930.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.566.093.460,- (81,46%)



- Capaian/Hasil :
 - Tersosialisasinya Norma Ketenagakerjaan sebanyak 1 paket / 50 orang di Kota Kupang;
 - Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang Upah Minimum Provinsi, Jamsostek dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebanyak 2 kasus di Kota Kupang;
 - Terlaksananya Pemeriksaan Norma Kerja dan NormaKepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebanyak 20 Kab/Kota;
 - Terlaksananya Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Norma Tenaga Kerja Perempuan dan Anak sebanyak 20 Perusahaan di Kota Kupang;
 - Adanya RANPERDA tentang Tenaga Kerja Asing;
 - Terlaksananya Advokasi dan Pelatihan Wirausaha di Desa Migran sebanyak 4 paket / 80 orang.
 - Adanya MOU Kerjasama Perlindungan TKI dengan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.
- Alokasi Anggaran : Rp.1.268.800.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 880.481.180- (69,39%)
 - Capaian/Hasil :
 - Teridentifikasinya Calon Tenaga Kerja Indonesia/TKI/ AKAD/AKAN//Non Prosedural dan Bermasalah sebanyak 1.379 orang;
 - Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebanyak 2 Kabupaten / 100 orang yaitu : *di Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka*;
 - Terlaksananya Rapat Teknis Penempatan Tenaga Kerja ke luar NTT sebanyak 1 lokasi yaitu : *di Kabupaten Belu*.
 - Terlatihnya 21 orang tenaga operator Sistem Aplikasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kota Kupang khusus tenaga operator untuk Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri;
 - Terpublikasinya Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI;

- Terlaksananya Pengawas dan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) ke Kabupaten untuk Pemeriksaan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebanyak 8 Kabupaten;
- Operasional Posko Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang;
- Rehabilitasi Ruang Imigrasi, Ruang Kesehatan, Ruang Tunggu dan Selasar sebanyak 3 Unit;
- Tertanganinya TKI yang meninggal dan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 104 orang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2018 sebanyak 166 orang, dengan perincian sebagai berikut:

a) Menurut SKPD:

Dinas Nakertrans = 119 orang; UPT PTK = 32 orang; UPT PPT = 15 orang.

b) Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 52 orang; Sarjana Muda/Diploma III = 7 orang; Sarjana = 101 orang; Magister = 6 orang.

c) Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 15 orang; Golongan III= 127 orang; Golongan II= 24 orang; Golongan I = - orang;

d) Pejabat Stuktural: 26 orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 20 orang

e) Pejabat Fungsional: 21 orang.

Pengantar Kerja = 5 orang, Arsiparis = 4 orang, Pemberdayaan Swakarsa Mandiri (PSM) = 4 orang, Instruktur Latihan Kerja = 4 orang, Instruktur Produktifitas = 4 orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Ketenagakerjaan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
2.	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.	Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.109.135.100,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.963.646.770,- (86,88 %)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.310.800.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.285.858.000,- (91,97%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.111.520.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.104.305.000,- (93,53%).

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.920.900.012,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.839.366.740,- (91,15%)



- 1) Kegiatan Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 - Alokasi Anggaran : Rp.135.640.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.107.709.600,- (79,41%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI dan dihadiri 88 peserta dari 22 kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Wakil Walikota /Wakil Bupati se-NTT, Bappeda, DPRD dan DP3A/Bag PP dan KB se-NTT;
 - Adanya rekomendasi Bidang Kelembagaan Gender & Data (Kelompok I)
 - Adanya rekomendasi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (Kelompok II)
 - Adanya rekomendasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (Kelompok III)
 - Adanya rekomendasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak (Kelompok IV)
- 2) Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - Alokasi Anggaran : Rp.449.049.012,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.439.476.000,- (97,87%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Penyusunan RAD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan menghasilkan 1 (satu) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/KEP/HK/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2018-2022;
 - Terlaksananya kegiatan Pembentukan Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Konflik Sosial (P3AKS) di Provinsi NTT yang dihadiri oleh 25 orang



peserta dari instansi terkait yang dilaksanakan di kota kupang pada tanggal 15 Mei 2018 di Kota Kupang dengan menghasilkan 6 (enam) Rekomendasi;

- Terlaksananya Kampanye Anti Trafficking dihadiri oleh 300 orang terdiri dari semua Organisasi Perempuan, OPD, Masyarakat dan Mahasiswa Pelajar se – Kota Kupang;
- Terselenggaranya Talk Show yang dihadiri oleh 150 orang terdiri dari berbagai Organisasi Perempuan se Kota Kupang;
- Tersosialisasinya Pornografi dihadiri oleh 100 orang yang terdiri dari Siswa-siswi SMPK St. Yoseph Kota Kupang
- Dialog Interaktif di RRI dihadiri oleh 60 orang dan TVRI Stasiun Kupang yang berlangsung tanggal 27 November s.d. 10 Desember 2018 di Kota Kupang.

3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.336.211.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.292.181.140,- (86,90%)
- Capaian/Hasil :
 - Adanya data dari 22 kab/kota dan 1 Dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Terpadu.

b) Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- Alokasi Anggaran : Rp.645.076.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.596.649.090,- (92,49 %)

1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

- Alokasi Anggaran : Rp.140.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.133.928.500,- (95,66 %)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan POKJA PUG yang dilaksanakan di Hotel Jon's Kota Kupang dengan jumlah 49 peserta dari OPD di Provinsi;
 - Tersedianya sumber daya aparatur di Perangkat Daerah yang memahami tentang kajian PPRG yang melalui GAP, GBS dan TOR;
 - Tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan yang menggunakan analisis GAP, GBS dan TOR pada setiap tahun anggaran;



- Meningkatnya partisipasi TAPD dalam mengawal setiap rencana kerja dan kegiatan yang telah menggunakan kajian PPRG yang diusulkan oleh Perangkat Daerah pada setiap anggaran;
 - Terlaksananya Fasilitas Pembentukan P2TP2A di Kabupaten Malaka
 - Terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional;
 - Adanya konsolidasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan;
 - Tersedianya akses bagi perempuan dalam mengembangkan usaha /ekonomi perempuan.
- 2) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak .
- Alokasi Anggaran : Rp.200.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.199.920.000,- (99,96 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pemahaman anak tentang hak-haknya dan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatkan kemampuan anak dalam berorganisasi;
 - Adanya perubahan sikap dan perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat sesuai etika, moral dan peradaban bangsa;
 - Meningkatnya kepengurusan Forum anak Nasional dan Daerah;
 - Terbentuknya lembaga/wadah perlindungan anak semakin meningkat;
 - Jaminan terhadap perlindungan anak semakin meningkat;
 - Meningkatnya kepedulian terhadap anak.
 - Terbayarnya jasa 12 orang Tenaga Ahli.
- 3) Kegiatan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- Alokasi Anggaran : Rp.190.926.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.159.088.550,- (83,32%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Aula Kantor Bupati Sumba Barat yang dihadiri oleh 23 orang

- peserta yang terdiri dari : Camat, Lurah, Kades, LSM, Pemerhati Anak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Guru/Pendidik, Anak Sekolah dan Dunia Usaha;
- Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Gereja Pantekosta – Anakalang Kabupaten Sumba Tengah yang dihadiri oleh 23 orang peserta yang terdiri dari : Camat, Lurah, Kades, LSM, Pemerhati Anak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Guru/Pendidik, Anak Sekolah dan Dunia Usaha;
 - Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka yang dihadiri oleh 23 orang peserta yang terdiri dari : Camat, Lurah, Kades, LSM, Pemerhati Anak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Guru/Pendidik, Anak Sekolah dan Dunia Usaha;
 - Terlaksananya Konferensi Anak Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kabupaten Malaka yang diikuti oleh utusan dari Kabupaten/Kota se – NTT;
 - Terlaksananya Konferensi Anak Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kabupaten Malaka yang diikuti oleh utusan dari Kabupaten/Kota se – NTT;
 - Terjalannya keakraban diantara anak-anak peserta konferda dan mengenal beraneka ragam budaya dan adat istiadatnya;
 - Terlaksananya kegiatan perlombaan dengan menghasilkan para pemenang lomba;
 - Terpilihnya 6 (enam) Duta Anak Nusa Tenggara Timur dan 4 (empat) orang anak sebagai Peninjau yang akan mewakili anak-anak NTT untuk mengikuti Forum Anak Nasional di Bogor Jawa Barat.
 - Terlaksananya Forum Anak Nasional (FAN) dilaksanakan pada tanggal 19 - 24 Juli 2018 bertempat di Aula Hotel Singgasana jalan Gunung Sari – Dukuh Pati Surabaya.
- 4) Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Peranserta Perempuan dalam Pembangunan.
- Alokasi Anggaran : Rp.114.150.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.103.712.040,- (90,86 %)



- Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Perempuan dalam meningkatkan ekonomi sebanyak 30 orang;
 - Tersedianya akses bagi perempuan dalam membangun usaha/ekonomi keluarga;
 - Terlaksananya Lokakarya Pengakuan Posisi dan Peran Perempuan dalam urusan Pengambilan Keputusan jumlah 30 orang peserta di Kabupaten Alor;
 - Sosialisasinya Hak-hak Politik Perempuan Potensial di Kabupaten Nagekeo di Hotel Sinar Kasih Mbay Kabupaten Nagekeo tanggal 26 September 2018 yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari 12 Partai Politik yang menghasilkan 3 Rekomendasi;

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT per 31 Desember 2018 sebanyak 50 Orang dengan perincian, sebagai berikut:

a) Latar belakang pendidikan.

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 15 orang (L = 4; P = 11); Diploma = 3 orang (L = - orang, P = 3 orang); Sarjana = 26 orang (L = 6 orang, P = 20 orang); Magister = 6 orang, (L = 2 org, P = 4 org).

b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 6 orang (L = 2 orang, P = 4 orang); Golongan III = 37 orang; (L = 7 orang, P = 30 orang), Golongan II = 7 orang, (L = 4 orang, P = 3 orang).

c) Pejabat Stuktural:

Eselon II = 1 orang (P = 1 orang), Eselon III = 4 orang (L = 1 orang, P = 3 orang), Eselon IV = 10 orang (L = 4 orang P = 6 orang).

d) Pejabat Fungsional: 2 orang yang terdiri dari Analis Kepegawaian Penyelia (Perempuan) dan Perencana Muda (Laki-laki)

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3.	Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** cukup memadai.

6. **Permasalahan dan Solusi:**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah tentang Data dan data terpilah.

Solusi :

Sejak terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT ada satu (1) seksi pada Bidang Kelembagaan Gender dan Data yaitu seksi yang menangani data dan akan membentuk forum data serta ada kegiatan pemutakhiran Buku Profil Gender dan Anak pada Tahun Anggaran 2018.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 1) Alokasi Anggaran : Rp.169.545.488,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp.164.849.850,- (97,23 %)

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 1) Alokasi Anggaran : Rp.56.000.000,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp.55.965.000,- (99,94%)

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 1) Alokasi Anggaran : Rp.10.400.000,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp.10.400.000,- (100,00%).



URUSAN KETAHANAN PANGAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

- Alokasi Anggaran : Rp.7.360.271.500,-
- Realisasi : Rp.7.254.352.265,- (98,56%).

1) Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan

- Alokasi Anggaran : Rp.479.412.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.474.005.700,- (98,87%).
- Capaian/Hasil :
 - Terumuskannya rumusan kesepakatan *melalui* pertemuan apresiasi pengembangan cadangan pangan pemerintah Tingkat Provinsi NTT Tahun 2018 di Kupang;
 - Terumuskannya 7 (tujuh) point rencana tindak lanjut dalam Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di 22 Kabupaten/Kota;
 - Tersedianya 1 (satu) dokumen data perkembangan ketersediaan dan cadangan cadangan pangan 6 Kabupaten yang telah memperoleh bantuan cadangan pangan dan penguatan modal usaha serta pemantauan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Tahun 2018;
 - Tersedianya 1 (satu) dokumen rekapitulasi hasil analisa risiko rawan pangan yang di ukur berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan serta aspek akses pemanfaatan pangan dimana dari aspek ketersediaan dari 15 kabupaten/Kota (232 kecamatan);
 - Terumuskannya 6 (enam) point rencana tindak lanjut yang harus dilaksanakan di 22 kabupaten/Kota *melalui* kegiatan Apresiasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Tahun 2018;



- Tersedianya 1 (satu) dokumen rekapitulasi data kerusakan komoditi di 16 Kabupaten/Kota Tahun 2018;
- Tersedianya 1 (satu) dokumen yang menggambarkan pertumbuhan dan hasil budidaya sumber daya pangan lokal (sorghum di TTU, talas ubi ungu di Ngada, dan padi parewangi kodi di Sumba Barat Daya) dalam rangka pengembangannya untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan masyarakat *melalui* Kegiatan Demplot Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal di 3 Kabupaten.

2) Kegiatan Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

- Alokasi Anggaran : Rp.504.110.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.495.224.300,- (98.24%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 2 (dua) dokumen berupa data kondisi kegiatan PUPM Tahun 2016 - 2017 di 6 Kabupaten di provinsi NTT dimana kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2016 pada 6 (enam) gapoktan di 6 (enam) kabupaten dengan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 200.000.000,-/gapoktan, sebesar Rp. 140.000.000,- untuk pembelian gabah/beras dan Rp.60.000.000,- untuk operasional. Selanjutnya pada tahun 2017 diberikan dana operasional sebesar Rp.60.000.000,-/Gapoktan *melalui* kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan PUPM;
 - Tersedianya 2 (dua) dokumen berupa data harga pangan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Natal di Pasar Kabupaten/Kota Tahun 2018;
 - Terjaganya kestabilan harga menjelang hari raya Idul Fitri Tahun 2018 *melalui* kegiatan Gelar Pasar Murah Sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTT dengan mendatangkan distributor-distributor yang menjual bahan pangan pokok yaitu PT. Transmart, Bulog, Swalayan Glory, Gapoktan Tunmoni, GS Organik dan Perusahaan Perdagangan Indonesia serta Bank Indonesia yang menyediakan jasa penukaran uang;



- Tersedianya 1 (satu) dokumen berisi Penetapan Gapoktan penerima Hibah Barang dan Jasa (Pembangunan kios) yaitu Kabupaten Kupang Gapoktan Toga Bersatu dan Kabupaten Malaka Gapoktan Lakekun dan terselesaikannya bahan-bahan yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan kios pangan lokal;
- Adanya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota gapoktan dalam hal pengelolaan Kios pangan lokal menjadi lebih baik;
- Terumuskannya 9 (sembilan) poin rencana tindak lanjut Pertemuan Evaluasi Kios Pangan Lokal *melalui* Pertemuan Evaluasi Kegiatan Akses Pangan Tkt Prov. NTT Thn 2018.

3) Kegiatan Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan

- Alokasi Anggaran : Rp.4.149.310.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.4.106.689.230,- (98.97%).
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 1 (satu) dokumen upaya pemberdayaan masyarakat dalam usaha optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk penganekaragaman konsumsi pangan keluarga pada 83 kelompok di 22 kabupaten / kota yang disertai pendampingan yang intensif dengan konsep (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) *melalui* kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - Tersalurkannya Bantuan Alat penepungan kepada 45 Kelompok di 22 Kab/Kota Se NTT *melalui* kegiatan Pengembangan Usaha Penepungan dan Pengolahan Pangan Lokal oleh 21 orang pelaksana pada bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - Terlaksananya Warung Kuliner Pangan Lokal yang bertujuan mempromosikan aneka produk pangan NTT baik dalam bentuk segar maupun olahan di tingkat nasional serta terjadinya sharing informasi pengembangan dan pengolahan pangan dengan daerah dan lembaga lain *melalui* kegiatan Pengembangan dan Model Usaha warung kuliner pangan lokal oleh 21 orang pelaksana pada bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;



- Tersedianya 1 (satu) dokumen Analisis dan Pengkajian Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi penduduk NTT *melalui* kegiatan Survei Analisis dan Pengkajian Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dimana menghasilkan Angka/Scor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi NTT Tahun 2018;
- Tersosialisasinya aneka jenis pangan dan makanan berbasis pangan lokal yang berdampak pada meningkatnya pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat *melalui* kegiatan Sosialisasi Pangan B2SA Berbasis Pangan Lokal;
- Tersedianya 1 (satu) dokumen berisi pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi.

4) Sosialisasi dan Pengawasan Pangan Segar

- Alokasi Anggaran : Rp.643.505.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp.625.138.700,- (97,14%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 8 (delapan) dokumen hasil pelaksanaan sidak Produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
 - Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan pangan bagi kesehatan *melalui* kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan;
 - Terumuskannya 5 (lima) poin kesepakatan Pertemuan Bimbingan Teknis bagi Pengawas Keamanan Pangan Segar/PPC;
 - Tersedianya 6 (enam) dokumen hasil pelaksanaan rapat Anggota Komisi Teknis dan Tim Teknis OKKP-D Provinsi NTT *melalui* kegiatan Fasilitasi Rapat Anggota Komisi Teknis;
 - Terbitnya 11 (sebelas) dokumen sertifikat prima 3 yang diberikan kepada Poktan/Gapoktan/Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);



- Tersalurkannya hibah barang kepada kelompok tani yaitu KWT le Hari yang bergerak dalam usaha di bidang PSAT di Kota Kupang sebesar Rp 5.000.000 untuk pembuatan demplot *melalui* kegiatan Demplot Poktan/Gapoktan Produsen serta peredaran PSAT Tahun 2018;
- 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
- Alokasi Anggaran : Rp.566.721.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.560.840.800,- (98,96%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terumuskannya 17 (tujuh belas) point rumusan dari lima aspek yakni aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi, harga, akses dan pasokan pangan, aspek konsumsi dan penganeekaragaman pangan, aspek keamanan pangan dan aspek dukungan teknis dan manajemen melalui kegiatan Pertemuan Evaluasi TA. 2017 dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan TA. 2018 Perencanaan 2019 yang dilaksanakan di Atambua Kabupaten Belu;
 - Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2018 pada 22 Kabupaten/Kota;
 - Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2018 pada 22 Kabupaten/Kota melalui kegiatan Rapat Pimpinan Evaluasi Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Hotel Swiss – Belinn Kristal – Kota Kupang;
 - Terumuskannya 12 (dua belas) point rumusan rencana tindak lanjut melalui kegiatan Pertemuan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi NTT yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Swiss – Belinn Kristal – Kota Kupang.
- 6) Kegiatan Pengawasan Database dan Website Ketahanan Pangan
- Alokasi Anggaran : Rp.133.136.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.132.652.100,- (99,63%).
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya 1 (satu) dokumen database ketahanan pangan dengan menggunakan aspek-aspek ketahanan pangan;

- Tersedianya 61 artikel pada keadaan semester I (Januari s/d Juni 2018) serta 34 artikel pada keadaan semester II (Juli s/d Desember 2018) mengenai informasi ketahanan Pangan *melalui* kegiatan pengelolaan data ketahanan pangan melalui website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT (www.ketahananpangan.nttprov.go.id) Tahun 2018;

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 89 orang dengan perincian, sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Pendidikan
SD = - orang; SLTP: - Orang; SLTA = 24 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 49 orang; Magister = 9 orang.
- b) Pangkat/Golongan :
Golongan IV= 9 Orang; Golongan III = 71 Orang; Golongan II= 9 Orang; Golongan I=- Orang.
- c) Pejabat Struktural : 17 orang
Eselon II= 1 orang; Eselon III= 5 orang; Eselon IV= 11 orang.
- d) Pejabat Fungsional : -

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk urusan ketahanan pangan yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
2.	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani	-

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: lengkap.

6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan:

- a) Dengan perubahan Institusi BKPP menjadi Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, terjadilah pergantian personil pula, sehingga menyulitkan pemantauan terhadap Kegiatan –Kegiatan pada DMP,



DMP-DS dan KMP, dimana sebelumnya juga kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh petugas pendamping yaitu penyuluh PNS/Non PNS yang memiliki tugas yang sangat banyak dan cakupan wilayah binaan yang sangat luas;

- b) Rendahnya kemampuan dan dukungan pendanaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk optimalisasi kegiatan dilapangan yaitu pendampingan, pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi maupun untuk pengembangan kegiatan;
- c) Terjadi penimbunan di tingkat distributor pada komoditas tertentu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga terutama menjelang HBKN;
- d) Kurangnya kesadaran para enumerator panel harga dalam pengiriman sms center sehingga terjadi kekosongan data pada laporan provinsi NTT di Pusat;
- e) Harga Penetapan Pemerintah (gabah) lebih rendah daripada harga rill di tingkat petani sehingga perputaran modal di tingkat gapoktan pelaksana PUPM lambat;
- f) Kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani ketahanan pangan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota menyangkut penyusunan program dan kegiatan;
- g) Keterlambatan dalam proses pencairan dana sehingga tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan;
- h) Pelaku usaha/Pemohon belum memahami prosedur sertifikasi PSAT;
- i) Pelaku usaha belum memahami cara penyusunan SOP sesuai dengan persyaratan yang ada dalam proses sertifikasi;
- j) Kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani ketahanan pangan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota menyangkut penyusunan program dan kegiatan;
- k) Keterlambatan dalam proses pencairan dana sehingga tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Solusi:

- a) Pembinaan terus dilakukan oleh Tim Kerja Program Kawasan Mandiri Pangan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Tim Pangan Desa dan Pendamping;



- b) Melakukan integrasi dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring kegiatan yaitu dilaksanakan bersama dengan kegiatan lainnya;
- c) Bekerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka melakukan sidak di gudang distributor terutama pada saat menjelang HBKN dan intervensi untuk menstabilkan harga pada komoditi tertentu dari instansi terkait melalui gelar pasar murah;
- d) Diberikan pembinaan kepada enumerator agar selalu tepat waktu dalam pengambilan data di Pasar dan melakukan sms center;
- e) Harga Penetapan Pemerintah (gabah) lebih rendah daripada harga rill di tingkat petani sehingga perputaran modal di tingkat gapoktan pelaksana PUPM lambat;
- f) Perlu adanya koordinasi yang baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar adanya keterpaduan perencanaan, sinkronisasi program dan pembiayaan serta evaluasi.
- g) Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan optimal, proses percepatan dana perlu dipercepat sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- h) Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha/Pemohon kaitan dengan prosedur sertifikasi PSAT;
- i) Menerbitkan buku Dokumen Sistem Mutu (DOKSISTU) sesuai dengan persyaratan yang ada dalam proses sertifikasi;
- j) Perlu adanya koordinasi yang baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar adanya keterpaduan perencanaan, sinkronisasi program dan pembiayaan serta evaluasi;
- k) Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan optimal, proses percepatan dana perlu dipercepat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.649.089.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.624.817.035,- (96,26%).



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.208.700.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.208.696.400,- (99,99%).
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.26.288.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.26.288.000,- (100%).

URUSAN PERTANAHAN.

Urusan Pertanahan masih merupakan urusan Pemerintah Pusat, namun urusan ini dalam pelaksanaanya di daerah tetap dilaksanakan sebatas koordinasi untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan urusan tersebut.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Peningkatan Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - Alokasi Anggaran : Rp.2.097.600.400,-
 - Realisasi : Rp.1.941.563.321,- (92,56%)
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian LH.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.283.031.500,-
 - Realisasi : Rp.1.202.489.445,- (93,72%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terbentuknya Kota Sehat / Adipura yang berwawasan lingkungan di 6 Kabupaten/Kota yaitu Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Sikka, Ende, Ngada;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang LH (PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016) dilaksanakan pada 5 Kabuapten dengan



kesepakatan bahwa kabupaten tersebut siap menjadikan Peraturan Daerah Provinsi NTT sebagai Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta kegiatan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup;

- Tersedianya Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan Tahun Anggaran 2018, sebanyak 1 eksemplar;
- Tersedianya Laporan Akhir Pertemuan Tekhnis Laboratorium Lingkungan se-Nusa Tenggara Timur, sebanyak 1 eksemplar;
- Terlaksananya Pertemuan Tekhnis Laboratorium Lingkungan se-Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 April 2018 bertempat di Aula PUSPAS Waibakul Sumba Tengah;
- Terujinya sampel laboratorium, gas asetilen, bahan kimia, bahan penunjang laboratorium, sarana K3 pengujian dan sampling serta obat-obatan P3K, Terkalibrasinya alat laboratorium;
- Terjaganya status dan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium;
- Terjaminnya mutu hasil pengujian;
- Tersedianya Laporan Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium;
- Meningkatnya kemampuan validasi metode pengujian kimia dan mikrobiologi;
- Meningkatnya konsolidasi lingkup laboratorium tingkat Nasional dan Ekoregion Bali Nusra dan Provinsi NTT;
- Tersedianya Laporan Kegiatan Survailen Kedua dan Asesmen Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi, sebanyak 1 eksemplar;
- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Terlaksananya Audit Internal pada UPT Laboratorium Lingkungan;
- Terlaksananya Kaji Ulang Manajemen UPT Laboratorium Lingkungan;



- Terlaksananya Survailen dan asesmen penambahan ruang lingkup oleh KAN di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Tersedianya Laporan Akhir In House Training Validasi Metode Pengujian Parameter kimia dan Mikrobiologi, sebanyak 1 eksemplar;
- Terlaksananya In House Training Validasi Metode Pengujian Mikrobiologi bertempat di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT;
- Terlaksananya In House Training Validasi Metode Pengujian Kimia bertempat di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT;
- Tersedianya Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Laboratorium Lingkungan pada 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, sebanyak 1 eksemplar;
- Tersedianya Laporan Saka Kalpataru 2018, sebanyak 3 eksemplar;
- Terlaksananya rekrutmen anggota Saka Kalpataru sebanyak 16 orang melalui Kwartir Cabang Kota Kupang Gugus Depan 005-006 SMAN 3 Kupang (4 siswa), Gugus Depan SMAN 5 Kupang (5 siswa) dan Gugus Depan SMA Plus Masa Depan Mandiri (4 siswa);
- Terlaksananya Perkemahan Saka Kalpataru dalam rangka peningkatan peran Saka Kalpataru yang mempertemukan antar Saka Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai Daerah se-Nusa Tenggara Timur;
- Terlaksananya Perkemahan Saka Kalpataru, Sosialisasi dan penanaman 300 anakan Kelor bersama SMP Negeri 2 Semau, pada tanggal 24 s/d 26 Nopember 2018;
- Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Saka Kalpataru serta Sosialisasi 3 (tiga) Krida Saka Kalpataru di Kabupaten Ende, Sikka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan dan Belu.



- 2) Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan LH.
- Alokasi Anggaran : Rp. 97.963.000,-
 - Realisasi : Rp. 84.392.762,- (86,15%)
 - Capaian/Hasil :
 - Adanya rekomendasi/kecepatan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup 22 Kabupaten/Kota dengan isi kecepatan Komitmen bersama Perlu menyesuaikan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Urusan Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota sesuai dengan Permen LHK Nomor p.74/Menlhk/Sekjen/Ku.I/8/2016;
 - Terlaksananya Perayaan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT pada Tahun 2019 di Kabupaten Alor.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Sampah.
- Alokasi Anggaran : Rp. 332.036.000,-
 - Realisasi : Rp. 305.761.328,- (92,09%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terfasilitasinya Pelayanan Kesehatan Pada 21 Kab Se- Provinsi NTT pada 38 Rumah Sakit.
- 4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengawasan dan Pegendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Alokasi Anggaran : Rp. 273.616.400,-
 - Realisasi : Rp. 251.875.850,- (92,05%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Workshop Pembinaan Mutu Dokumen Lingkungan Hidup serta Inventarisasi KegiatanWajib DELH dan DPLH Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT dilaksanakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT;
 - Tersedianya Dokumen IKPLH Merupakan sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjadi salah satu instrument perencanaan pembangunan yang berguna dalam membuat kebijakan dan peraturan;
 - Tersusunnya dokumen IKPLHD masyarakat akan memperoleh haknya terhadap akses informasi lingkungan hidup yang berdampak pada peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Terlaksananya pembinaan penyusunan dokumen KLHS sesuai peraturan yang berlaku dandilaksanakan di 10 Kabupaten.

5) Kegiatan Pegndalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dam LH.

- Alokasi Anggaran : Rp. 110.953.500,-
- Realisasi : Rp. 97.043.936,- (87,46%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA di 3 kabupaten;
 - Terlaksananya Pengendalian kerusakan pesisir akibat aktivitas didarat dan di laut di 5 kabupaten/kota;
 - Terlaksananya Pengendalian bahan perusak ozon (BPO) Pada Tahun 2018 dilaksanakan di 4 kabupaten/kota.

b) Program Perlindungan dan Pemulihan Konsevasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup.

- Alokasi Anggaran : Rp. 641.474.700,-
- Realisasi : Rp. 608.314.210,- (94,83%)

1) Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas.

- Alokasi Anggaran : Rp. 641.474.700,-
- Realisasi : Rp. 608.314.210,- (94,83%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pilot Project Bank Pohon dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Belu, Manggarai Timur dan Lembata;
 - Terlaksananya Pengembangan Bank Pohon Provinsi Jenis anakan yang disediakan di Bank Pohon sebanyak 14 jenis antara lain : trambesi, sawo, angkana, glodok, palem, sengon, mahoni, manga, cendana, nangka, jatiputih, advokat, flamboyant dan kelor;
 - Evaluasi terhadap target anakan Total anakan yang tersedia di Bank Pohon Provinsi NTT maupun kabupaten sejumlah 113.684 anakan dari total target anakan yang direncanakan sejumlah 60.000 anakan Total anakan bank pohon sejumlah 113.684 anakan;



- Terdistribusinya anakan bank pohon provinsi NTT tahun 2018 adalah sejumlah 19.469 anakan yang didistribusikan kepada 159 pemohon anakan yang terdiri dari masyarakat umum, lembaga keagamaan, instansi pemerintah, pihak swasta dan lembaga pendidikan;
- Terlaksananya Panen Air Hujan Kegiatan Panenan Air Hujan (Pembangunan Sumur Resapan) ini dilaksanakan di Kota Kupang dan 4 Kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan , Timor Tengah Utara, Belu dan Alor;
- Adanya Penyediaan benih mangrove dalam upaya konservasi dan perlindungan daerah pesisir pantai dilaksanakan di Dusun Namandoi Desa Nangahale Kac. Talibura Kab. Sikka dan Kel. Kota Ndora Kec. Borong Kab. Mangarai Timur, Dengan total anakan 3.000 dari kedua kelompok (masing masing kelompok 1.500 anakan).

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 berjumlah 84 orang dengan rincian :

- Latar Belakang Pendidikan
Sekolah Dasar (SD) : 1 orang; SLTP : - orang; SLTA : 21 orang;
Diploma (D3) : 6 org; Sarjana (S1) : 40 org; Magister (S2) : 16 org.
- Pangkat/Golongan :
Golongan IV : 15 orang; Golongan III : 53 orang; Golongan II : 15 orang; Golongan I : 1 orang.
- Pejabat Struktural :
Eselon II : 1 orang; Eselon III : 6 orang; Eselon IV : 14 orang.
- Pejabat Fungsional : 1 orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah:

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Lingkungan Hidup yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

- a) Kondisi fasilitas gedung kantor memadai;
- b) Fasilitas air dan listrik sudah memadai, sehingga kebersihan prasarana dan sarana sanitasi terjaga dengan baik serta penerangan kantor pada malam hari sudah terpenuhi;
- c) Mobil operasional sampai dengan saat ini tidak tersedia sementara aktivitas dan mobilitas untuk menunjang kinerja sangat padat;
- d) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT tidak memiliki Kendaraan roda dua (motor) sehingga proses pendistribusian surat mengalami kendala (menggunakan kendaraan pribadi);
- e) Kurangnya sarana komputer di DLH sehingga sebagian pegawai menggunakan notebook/laptop pribadi;
- f) Ruangan atau tempat khusus untuk menata / menyimpan dokumen-dokumen dinas belum ada.

6. Permasalahan dan Solusi:

- a) Permasalahan
 - 1) Program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT yang merupakan program prioritas Nasional tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya alokasi anggaran.
 - 2) Menindaklanjuti *point* 1 di atas, dengan tidak adanya alokasi anggaran tersebut maka dapat mengakibatkan target / *output* yang telah direncanakan tidak tercapai.
 - 3) Secara keseluruhan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran. 2018, dari total anggaran Belanja Langsung DLH Provinsi NTT sebesar Rp.3.710.901.600,- dengan realisasi keuangannya mencapai Rp.3.410.227.339,- atau 91,90% dikarenakan ada sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan secara



real cost dan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Jenis belanja dengan sisa anggaran terbesar terdapat pada: belanja Jasa dan Surat Menyurat, pengangkutan beras, jasa komunikasi sumber daya listrik dan air, Jasa administrasi Keuangan, Pengelola Sistem Akuntansi Instansi, bahan bacaan dan perundang-undangan, Transportasi dan Akomodasi, belanja sertifikat, belanja cetak dan penggandaan, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas, Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas, Pemeliharaan Rutin peralatan gedung kantor, belanja air untuk penyiraman tanaman, belanja dokumentasi, ATK, belanja perjalanan dinas.

b) Solusi:

Solusi yang ditempuh oleh DLH Provinsi NTT adalah dengan senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda Provinsi NTT baik secara lisan maupun tertulis berkaitan dengan anggaran sehingga Program/kegiatan prioritas Nasional yang belum mendapat alokasi anggaran kiranya dapat segera diusulkan pada saat pembahasan anggaran atau perubahan anggaran. koordinasi *intern* antara pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan lebih ditingkatkan lagi, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.881.526.500,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.784.513.415,- (88,99 %)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.73.960.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.59.502.993,-(80,45 %
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.16.340.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.16.333.400,-(99,96 %).



URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah.

➤ Alokasi Anggaran : Rp.2.191.673.000,-

➤ Realisasi : Rp.2.028.973.407,- (92,58%)

a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan.

- Alokasi Anggaran : Rp.79.468.320,-

- Realisasi : Rp.77.981.870,- (98,13%)

- Capaian/Hasil :

- Terselenggaranya rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi 22 orang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se- NTT melalui Rapat Koordinasi Perekaman KTP-el di Labuan Bajo-Manggarai Barat guna mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD pada 17 April 2019 yang akan datang;

- Adanya rumusan hasil Rakornas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) melalui kepesertaan Rakornas Dukcapil II di Semarang yang diikuti oleh seluruh aparatur yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia;

- Terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur Dukcapil melalui Bimtek Kapasitas pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Yogyakarta bagi Administrator Database Kependudukan Provinsi sebanyak 1 orang

b) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.2,334,219,000,-

- Realisasi : Rp.2,153,371,123,- (92,25%)

- Capaian/Hasil :



- Terlaksananya pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan (Adminduk) melalui Sosialisasi Kebijaksanaan Terkait Penyelenggaraan Adminduk Tingkat Provinsi NTT di Kota Kupang bagi para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Adminduk dari 22 Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan target 46 orang peserta yang hadir sebanyak 37 orang;
- Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Adminduk bagi 22 Kabupaten/Kota melalui Bimtek Pendaftaran Penduduk di Kota Kupang bagi para Kabid dan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) dengan target 46 orang yang hadir 44 orang dan kabupaten yang tidak hadir Sumba Barat dan Sumba Tengah;
- Terlaksananya Bimtek Pencatatan Sipil dari target 46 orang yang hadir 42 orang dan kabupaten yang tidak hadir Manggarai Barat dan Manggarai;
- Terlaksananya Bimtek PIAK dari target 46 orang yang hadir 41 orang dan kabupaten yang tidak hadir Nagakeo;
- Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dari target 46 orang yang hadir 41 orang dan kabupaten yang tidak hadir Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Nagakeo;
- Terfasilitasinya pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi dalam rangka Perekaman KTP-el untuk 22 Kabupaten/kota dengan peserta yang hadir sebanyak 27 orang;
- Pengambilan blanko KTP di Jakarta sebanyak 100 outer (200.000 keping) dengan berat 1.200 kg oleh 18 orang petugas dan Distribusi Blanko KTP-el ke 22 Kabupaten/Kota sebanyak 100 outer (200.000 keping) oleh 90 orang petugas, blanko KTP-el adalah dokumen Negara yang dicetak oleh Perum PERURI secara bertahap sesuai kebutuhan sehingga pendistribusian juga secara bertahap dengan pengawasan petugas.
- Adanya Buku Profil Kependudukan Tingkat Provinsi sebanyak 25 buku dan Penyusunan Buku Data Kependudukan (per semester) Tingkat Provinsi sebanyak 25 buku.



- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui Koordinasi dan konsultasi ke Jakarta untuk pejabat sebanyak 12 orang; Rapat kerja Nasional Dukcapil di Gorontalo oleh pejabat sebanyak 4 orang ; Bimbingan Teknis terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jakarta untuk 5 orang aparatur dan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Jakarta untuk pejabat sebanyak 5 orang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT berjumlah 270 orang, terdiri dari 27 orang Pejabat Struktural, 45 orang Pejabat Fungsional dan 183 orang Fungsional Umum. Khusus bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai yang menangani urusan Kependudukan sebagai berikut:

- Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 3 orang; D3 = - orang; Sarjana = 4 orang; Magister = - orang.
- Berdasarkan Pangkat dan Golongan.
Golongan IV = 1 orang; Golongan III = 3 orang; Golongan II = 3 orang; Golongan I = - orang.
- Jumlah Pejabat Struktural.
Eselon II = - orang; Eselon III = 1 orang; Eselon IV = 3 orang
- Jumlah Pejabat Fungsional: - orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diakomodir dalam RKPD yaitu : Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah.

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Kurang Mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yang tidak terpisahkan dari Program SKPD pada urusan Sosial.



URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BPMD).

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.786.278.700,-
- Realisasi : Rp.3.601.668.096,- (95,12%)

1) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.102.464.000,-
- Realisasi : Rp.1.039.473.330,- (94,29%)
- Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pengetahuan kader Posyandu dari 8.621 Posyandu yang tersebar di 22 Kab/Kota.
 - Meningkatnya pemahaman Tim Pokjanal Posyandu dalam proses pembinaan kelembagaan Posyandu.
 - Meningkatnya Kualitas Kader Posyandu dalam pendampingan terhadap kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran.
 - Adanya Juara Lomba Posyandu (Adanya Juara Lomba Posyandu, Juara Lomba Posyandu Strata Mandiri).

2) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Alokasi Anggaran : Rp. 2.006.314.300,-
- Realisasi : Rp. 1.932.731.766,- (96,33%)
- Capaian/Hasil :
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui TP – PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui TP-PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - Terselenggaranya sistem pelaksanaan tugas TP PKK Kab/ Kota yg seirama dan selaras sesuai kepekatan yang dibuat dalam RAKON TP PKK bagi TP PKK 22 Kab./Kota se-NTT;



- Terciptanya refresing kader PKK bagi kader-kader berprestasi tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program ditingkat RT/RW/Dusun Lingkungan di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
- Terdapatnya juara-juara Lomba-Lomba PKK (Lomba Administrasi, Lomba Pokja I Lomba, Pokja II, Lomba Pokja III dan Lomba Pokja IV) dalam tahun berjalan;
- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Rutin Sekretariat TP PKK Prov.NTT dan Terdapat Memori pertanggung jawaban Ketua TPPKK prov.NTT masa bhakti 2013-2018;
- Terciptanya Kader Pokja I yang paham dalam program membangun Karakter anak dlm keluarga sejak dini mulai dari tingkat Prov. s/d tingkat Kabupaten/Kota ta se-NTT
- Terciptanya pengurus/kader Pokja II yang mampu mengelola Managemen dan meningkatkan Pengelolaan Kelompok UP2K-PKK ditingkat kepengurusan masing-masing, Terciptanya kader Pokja III yang memahami dan mampu menjalankan kegiatan HATINYA PKK di tingkat Provinsi s/d Kabupaten/Kota se-NTT;
- Mendapatkan kesamaan persepsi atau langkah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat dalam penurunan jumlah kematian bayi di NTT bagi TP PKK Provinsi NTT dan TP PKK Kabupaten/Kota se-NTT;
- Meningkatkan penurunan jumlah kematian Bayi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan keluarga dalam membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi dari tahun ke tahun.

3) Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pokja desa Mandiri Anggur Merah.

- Alokasi Anggaran : Rp.350.000.000,-
- Realisasi : Rp.317.534.500,- (97,72%)
- Capaian/Hasil :
 - Para anggota pokja / Pokmas mampu melakukan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan;



- 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.
 - Alokasi Anggaran : Rp.327.500.000,-
 - Realisasi : Rp.311.928.500,- (95,25%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi program/Kegiatan sesuai indikator renstra.
 - Adanya sinkronisasi kegiatan DPMD Provinsi dan Kab/Kota guna pencapaian target RPJM Provinsi NTT.
- b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa.
 - Alokasi Anggaran : Rp.804.491.600,-
 - Realisasi : Rp.772.927.500,- (96,08%)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Alokasi Anggaran : Rp.72.491.600,-
 - Realisasi : Rp.72.091.600,- (99,47%)
 - Capaian/Hasil :

Terciptanya kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan akan pentingnya kekeluargaan dan gotong royong.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 - Alokasi Anggaran : Rp. 500.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 482,242,400,- (96,95%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Juara Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Provinsi untuk mengikuti Lomba Desa/ Kelurahan Regional IV dan Nasional;
 - Terciptanya perangkat desa yang memahami tugas dan fungsinya Meningkatnya Pengetahuan para Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Kabupaten / Kota;
 - Adanya pemahaman terhadap tupoksi dari aparat desa / kelurahan.
 - 3) Kegiatan Pengembangan Sekolah Aplikasi Lapangan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kader.
 - Alokasi Anggaran : Rp.232.000.000,-
 - Realisasi : Rp.218.593.500,- (94,22)
 - Capaian/Hasil :

- Terlatihnya anggota BPD yang memahami peran dan fungsinya.
 - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang responsif anak.
- c) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan.
- Alokasi Anggaran : Rp.318.200.000,-
 - Realisasi : Rp.312.674.750,- (98,26%)
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pekan Gelar Teknologi Tepat Guna dan IPTEK Nasional.
- Alokasi Anggaran : Rp.151.061.000,-
 - Realisasi : Rp.146.335.500,- (96,87%)
 - Capaian/Hasil :
Peningkatan peran UKM dalam membuat / menginovasi peralatan TTG.
- 2) Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna dan Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat.
- Alokasi Anggaran : Rp.167.139.000,-
 - Realisasi : Rp.166.339.250,- (99,52%)
 - Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok masyarakat UKM TTG;
 - Tersedianya peralatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal;
 - Terbantunya masyarakat dalam penggunaan energi alternatif biogas.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 54 orang, dengan kualifikasi:

a) Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = 1 orang; SMU = 17 orang; D3 = 2 orang;
Sarjana = 28 orang; Magister = 6 orang.

b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 10 orang; Golongan III = 35 orang; Golongan II = 9 orang; Golongan I = - orang.



- c) Pejabat Stuktural: 16 orang
 - Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 12 orang
- d) Pejabat Fungsional: - orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
2.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
3.	Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan	Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan	Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
4.	Program Hibah Perumahan (P2LDT)	-	-

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.662.747.600,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.604.689.190,- (90,56 %)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.153.542.500,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.148.598.875,- (96,78 %)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.24.000.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.23.750.000,- (98,96 %)



URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih merupakan urusan pemerintah, namun urusan ini dalam pelaksanaannya di daerah tetap dilaksanakan sebatas koordinasi untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan urusan tersebut.

URUSAN PERHUBUNGAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.

- Alokasi Anggaran : Rp.8.970.000.000,-
- Realisasi : Rp.8.514.352.204,- (94,92%)

1) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.

- Alokasi Anggaran : Rp.6.349.185.810,-
- Realisasi : Rp.6.113.898.760,- (96,29%)-
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Inventarisasi Sarana dan Prasaran Transportasi Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 (lima belas) kab/kota yaitu Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Timur Tengah Selatan, Kab. Timur Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Timur;
 - Terlaksananya Pendataan Awal Pendangkalan di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 4 (empat) Lokasi Pelabuhan Laut yaitu Pelabuhan Laut Waebela (Kab. Ngada), Kab. Sumba Timur, Kab. Belu dan Kab. Sabu Raijua;
 - Terlaksananya Master Plan Pembangunan Laut Oepoli di Kab. Kupang – Oepoli. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa 5 dokumen;



- Terlaksananya FS Pelabuhan Laut Maubesi Hasan Kabupaten Malaka. Laporan hasil kegiatan berupa 5 dokumen;
- Terlaksananya FS Bandar Udara Booking, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan hasil kegiatan berupa 5 dokumen;
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan 3 (tiga) Rancangan Perda Sektor Perhubungan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi 3 (tiga) Ranperda sector Perhubungan di Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Laporan hasil kegiatan berupa 5 (lima) dokumen;
- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi SIG bidang bidang Perhubungan di Kementerian Perhubungan RI yang pelaksanaan kegiatannya di Jakarta;
- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi SIG bidang Perhubungan di Badan Informasi Geospasial yang pelaksanaan kegiatannya di dilaksanakan di Jakarta;
- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi SIG di bidang Perhubungan di lembaga Perinderaan Jarak Jauh Antariksa Negara yang pelaksanaan kegiatannya di Jakarta;
- Terlaksananya Rehabilitasi Terminal Tipe B Kota Kupang yaitu Terminal Oebobo;
- Terlaksananya dan Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten ende (ende-nuabosi), Kabupaten Sumba Timur (melolo-kananggar) dan Kabupaten Kupang (Ekam-Baun).

2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan.

- Alokasi Anggaran : Rp.2.037.997.750,-
- Realisasi : Rp.1.879.715.538,- (92,23%),-
- Capaian/Hasil :



- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Teknis UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara di 5 (lima) Kabupaten / Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur. Laporan Pelaksanaan berupa 1 Dokumen;
- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Harian dan Hari-Hari Besar Keagamaan di 5 (lima) UPT yaitu UPT Kupang (kota kupang), UPT Belu (Kab. Belu), UPT Sikka, UPT Manggarai dan UPT Sumba (Kab. Sumba Timur). Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 Dokumen;
- Terlaksananya dan terselenggaranya kegiatan Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor bersama instansi terkait untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di 5 (lima) UPT yaitu : UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Kupang di Kota Kupang, Kab. Kupang, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Belu di Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Kab. Belu dan Kab. Malaka. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Sikka di Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Nagekeo dan Kab. Lembata. UPT Perijinana dan Pengawasan LLAJ Manggarai di Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat. UPT Pengawasan dan Perijinan LLAJ Sumba di Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah dan Kab. Sumba Timur. Laporan Hasil Pelaksanaan berupa 1 dokumen dan 3 kali kegiatan;
- Terlaksananya dan terselenggaranya kegiatan Inventarisasi dan Pendataan Subyek dan Obyek Retribusi UPT Pengwasan Perijinan LLAJ Kupang di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua. UPT Perijinan dan Pengawasan Perijinan Sikka di Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab, Nagekeo dan Kab. Lembata. UPT Perijinan dan Pengawasan Manggarai di Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai Barat. Laporan Hasil Pelaksanaan berupa 1 dokumen;



- Terlaksananya dan Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian Terminal Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kab. Kupang), Haumeni (Kab. Timor Tengah Selatan), Kefamenanu (Kab. Timor Tengah Utara, Lolowa (Kab. Belu), Lamawalang (Kab. Flores Timur), Watujaji (Kab. Ngada) dan Nggorang (Kab. Manggarai Barat) Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 Dokumen dan di 8 Lokasi Terminal;
- Terlaksananya dan Terselenggaranya Pengawasan Pelayanan Perijinan Kendaraan Bermotor di 2 (dua) Pelabuhan Yaitu Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dan Pelabuhan Penyeberangan Aimere (Kab. Ngada). Laporan Hasil Pelaksanaan Berupa 1 dokumen.

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan.

- Alokasi Anggaran : Rp.270.510.000,-
- Realisasi : Rp.240.471.706,- (88,90%)-
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya dan Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal yang dilaksanakan di Kota Kupang di Hotel Neo selama 3 hari yang ikuti sebanyak 15 orang peserta. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 dokumen
 - Keikutsertaan Aparatur Perhubungan dalam Diklat PKB Dasar di Denpasar yang di ikuti oleh 2 (dua) orang peserta selama 20 hari. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 Dokumen;
 - Terlaksananya kegiatan Workshop Penyusunan dan Pelaporan Data Perhubungan dan Rencana Gas Daerah Rumah Kaca di Jakarta selama 2 (dua) hari. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 2 dokumen;
 - Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat dan Penerimaan Calon Taruna di BPSPDM Jakarta 2 kali. Yang diikuti oleh 2 orang selama 2 (dua) hari. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 Dokumen;



- Terlaksananya study banding di Pelabuhan Tanjung Api – Api Palembang Sumatera Selatan dalam Rangka Pembentukan UPT Pelabuhan Penyeberangan yaitu Teluk Gurita (Kab. Belu), Aimere (Kab. Ngada) dan Nangakeo (Kab. Ende). selama 3 (tiga) hari. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 (satu) dokumen.

4) Kegiatan Peningkatan koordinasi teknis perhubungan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Alokasi Anggaran : Rp.313.190.500,-
- Realisasi : Rp.280.266.200,- (89,49%),-
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksana dan Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Teknis yaitu kegiatan Rakornis Perhubungan yang dilaksanakan di kota kupang dan di ikuti oleh Dinas Perhubungan Kab/Kota Se-Provinsi NTT dan para mitra perhubungan;
 - Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion yang dilaksanakan di kota kupang dan di ikuti oleh Dinas Perhubungan Kab/Kota Se-Provinsi NTT dan para mitra perhubungan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa 1 dokumen;
 - Terlaksananya Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018. Laporan Pelaksanaan berupa 1 (satu) dokumen;
 - Terlaksananya Pembahasan Penetapan trayek/lintasan/ rute angkutan keperintisan jalan, penyebrangan dan laut yang dilaksanakan di Jakarta. Laporan hasil kegiatan berupa 3 kegiatan.

b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

- Alokasi Anggaran : Rp.2.038.468.200,-
- Realisasi : Rp.1.972.718.670,- (96,77%),-

1) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Moda Angkutan.

- Alokasi Anggaran : Rp.444.675.000,-
- Realisasi : Rp.428.336.310,- (96,33%),-
- Capaian/Hasil :



- Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
- Terlaksananya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taxi/Angkutan Sewa) yang Pelaksanaan Kegiatannya di laksanakan pada 5 (lima) lokasi yaitu Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai dan Kab. Sumba Timur;
- Terlaksana dan Terselenggaranya Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nagekeo dan Teluk Gurita pada 3 (lokasi) yaitu Pelabuhan Penyeberangan Aimere (Kab. Ngada), Pelabuhan Penyeberangan Nagekeo (Kab. Ende) dan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita (Kab. Belu);
- Terlaksana dan Terselenggaranya Pemantauan dan Penilaian kegiatan penyelenggaraan operasional Pelabuhan Penyeberangan pada 2 (lokasi) yaitu Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita (Kab. Belu) dan Pelabuhan Penyeberangan Waikarang (Kab. Lembata);
- Terlaksananya dan Terselenggaranya kegiatan Pendataan Perijinan dan Depo Peti Kemas yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Kota Kupang;
- Terlaksananya Survey penertiban ijin terhadap penetapan RIP dan DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, Izin usaha, badan usaha di pelabuhan pengumpan regional, izin pengembangan pelabuhan dan pengoperasian selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, izin pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan untuk pelabuhan pengumpan regional. Kegiatan tersebut di laksanakan di 22 kab/kota se Provinsi NTT yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Alor, Lembata dan Flores Timur.



2) Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa.

- Alokasi Anggaran : Rp.400.000.000,-
- Realisasi : Rp.398.637.580,- (99,66%),-
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya dan Terselenggaranya Profil/Perhubungan dalam angka tahun 2018 dan updating Geodatabase Perhubungan se Provinsi NTT yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu 22 kab/kota : Kota Kupang, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Lembata dan Kab. Flores Timur;
 - Terlaksananya dan Terselenggaranya kegiatan Survey Load Faktor Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilaksanakan di beberapa lokasi di 22 Kab/kota Se- Provinsi NTT yaitu : Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Lembata dan Kab. Flores Timur;
 - Terlaksana dan Terselenggaranya kegiatan Survey Load Faktor Angkutan Penyeberangan yang dilaksanakan di 8 Lintasan penyeberangan di diantaranya Lintasan Kupang – Rote, Lintasan Kupang – Kalabahi, Lintasan Kupang – Seba, Lintasan Kupang – Larantuka, Lintasan Kupang – Lewoleba, Lintasan Kupang – Aimere, Lintasan Kupang – Ende dan Lintasan Labuan Bajo – Sape;
 - Terlaksana dan Terselenggaranya Survey pengawasan terhadap persetujuan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di 5 (lima) lokasi kab/kota;



- Terselenggara dan Terlaksananya Manajemen Lalu Lintas Pada ruas jalan Provinsi di Provinsi NTT yang pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota kupang dengan 2 (dua) survey yang dilakukan yaitu Survey Inventarisasi Fasilitas Lalu Lintas, Survey Road Side Interview (RSI), Survey Volume Lalu Lintas Harian rata-rata(Trafic Cone), Survey kecepatan Lalu Lintas Jalan, Survey Kebutuhan Parkir, Survey Home Interview (HI) dan Survey Tata Guna Lahan (Land Use);
 - Terlaksana dan Terselenggaranya Kegiatan Surey Load Faktor Angkutan Laut dibeberapa Lintasan Perintis Angkutan Laut di antaranya : Lintasan R-23 (kupang – waikelo), Lintasan R-24 (Kupang – Wini), Lintasan R-25 (Kupang Atapupu), Lintasan R-26 (Kupang – Labuan Bajo), Lintasan R-27 (Maumere – Kupang) dan Lintasan R-28 (Maumere – Labuan Bajo) Capaian/hasil yaitu Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.
- Alokasi Anggaran : Rp.655.397.700,-
 - Realisasi : Rp.611.940.880,- (93,37%),-
 - Capaian/Hasil :
 - Terpilihnya 1 (satu) Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat Provinsi/Nasional, dan terpilihnya kab/kota tertib lalu lintas dan keselamatan jalan tingkat provinsi/nasional dan pelopor keselamatan tingkat provinsi NTT;
 - Terpilihnya 1 (satu) awak kendaraan umum teladan tingkat Provinsi/Nasional, dan terpilihnya kab/kota tertib lalu lintas dan keselamatan jalan tingkat provinsi/nasional dan pelopor keselamatan tingkat provinsi NTT;
 - Terlaksananya dan Terselenggaranya Sosialisasi / Penyuluhan Angkutan Orang Dalam Trayek yang pelaksanaan kegiatannya di laksanakan di 5 (lima) UPT Pengawasan dan Perijinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu UPT Pengawasan dan

Perijinan Wilayah Kupang, UPT Pengawasan dan Perijinan Wilayah Belu, UPT Pengawasan dan Perijinan Wilayah Sikka, UPT Pengawasan dan Perijinan Wilayah Manggarai, UPT Pengawasan dan Perijinan Wilayah Sumba;

- Terpilihnya 1 orang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan.

4) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.538.395.500,-
- Realisasi : Rp.533.803.900,- (99,15%)-
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Monev Terpadu Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang kegiatan pelaksanaanya di laksanakan di 22 Kab / Kota se - Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Terlaksana dan Terselenggaranya kegiatan Monev dan Pelaporan Kepegawaian dan Aset yang pelaksanaan kegiatannya di laksanakan di 5 (lima) lokasi;
 - Terlaksana dan Terselenggaranya Pengawasan dan Pelayanan Kapal Angkutan Penyeberangan Pada Saat hari Besar Keagamaan yang Dilaksanakan di beberapa Pelabuhan Penyeberangan;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan di atas Kapal Motor Penyeberangan.
 - Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut / SAR yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di beberapa lintasan perintis laut yaitu : Lintasan R-23 (lintasan kupang – waikelo), Lintasan R-24 (lintasan kupang – wini), Lintasan R-25 (lintasan Kupang – Atapupu), Lintasan R-26 (lintasan kupang – Labuan bajo), Lintasan R-27 (lintasan maumere – kupang) dan Lintasan R-28 (lintasan maumere – Labuan bajo);
 - Terlaksananya Pemantauan Angkutan Paskah, Lebaran, Natal dan Tahun Baru pada hari hari besar keagamaan tahun 2018 yang dilaksanakan di 8 (delapan) Terminal Tipe B yang pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;



- Terlaksana dan Terselenggaranya Pemantauan Pengelolaan Terminal Type B Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang dilaksanakan di 8 (delapan) lokasi terminal Type B yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- Terselenggara dan Terlaksananya Survey Evaluasi Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten;
- Terselenggara dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Lintasan Angkutan Penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pelaksanaan kegiatannya di laksanakan pada 8 (delapan) Lintasan Penyeberangan.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 136 orang, dengan kualifikasi:

a) Latar belakang pendidikan:

SD= 1 orang; SLTP= 3 orang; SLTA= 46 orang; Diploma= 12 orang; Sarjana = 59 orang; Magister= 15 orang.

b) Pangkat/Golongan:

Golongan IV/a = 4 orang; Golongan IV/b = 6 orang; Golongan IV/c = - orang; Golongan IV/d = - Golongan III/a = 13 orang; Golongan III/b = 31 orang; Golongan III/c = 21 orang; Golongan III/d = 32 orang; Golongan II/a = 3 orang; Golongan II/b = 6 orang; Golongan II/c = 13 orang; Golongan II/d = 7 orang; Golongan I/d = 1 orang.

c) Pejabat Stuktural: 36 orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 8 orang; Eselon IV = 27 orang.

d) Pejabat Fungsional: 2 orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Perhubungan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** Kurang memadai.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.2.331.688.940,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.2.165.982.523,- (92,89%).
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.177.437.650,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.151.317.799,- (97,78 %)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.24.038.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.23.856.000,- (99,24%)

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Pengembangan Data / Informasi.
 - Alokasi Anggaran : Rp.972.668.500,-
 - Realisasi : Rp.783.052.330,- (801,51%)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - Alokasi Anggaran : Rp.147.000.000,-
 - Realisasi : Rp.127,256,270,- (86,57%)



- Capaian/Hasil :
 - Terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas;
 - Terbentuknya hubungan interaktif dengan dunia usaha, pembentukkan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat;
 - Terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien dan memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah.
- 2) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi.
- Alokasi Anggaran : Rp.96.760.000,-
 - Realisasi : Rp.89.084.000,- (92,07%)
 - Capaian/Hasil :
Tersedianya Analisis Data Informasi khususnya pada aspek kebijakan, aplikasi, Perencanaan di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.
- Alokasi Anggaran : Rp.90.246.000,-
 - Realisasi : Rp.77.841.500,- (86.25%)
 - Capaian/Hasil :
 - Teridentifikasinya feedback konstan kepada setiap progress dari program dan kegiatan, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan efisiensi dari implementasi program dan kegiatan;
 - Mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah program dan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya proyek tersebut baik itu positif maupun negative.
- 4) Kegiatan Pengembangan Website www.nttprov.go.id website diskominfo.nttprov.id
- Alokasi Anggaran : Rp.144.899.900,-
 - Realisasi : Rp.130.125.900,- (89.80%)
 - Capaian/Hasil :

- Menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi NTT kepada masyarakat luas;
- Pengembangan antarmuka website resmi Pemerintah Provinsi NTT;
- Tersedianya SDM pengelola website di 10 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pengelola website kabupaten/kota di NTT;
- Terpublikasinya informasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui website dengan jumlah pengunjung website sebesar 574.285. Berita yang paling banyak diakses adalah kondisi geografis Provinsi NTT sebanyak 5.441 akses.

5) Kegiatan Pengembangan E-office di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- Alokasi Anggaran : Rp.493.762.600,-
- Realisasi : Rp.358.744.660,- (72.66%)
- Capaian/Hasil :

Terbangunnya aplikasi e-office melalui aplikasi e-surat dan e-absensi serta *e-Report* di Pemerintah Provinsi NTT.

b) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.74.999.850,-
- Realisasi : Rp.70.049.850,- (93.40%)

1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Informasi dan Komunikasi.

- Alokasi Anggaran : Rp.74.999.850,-
- Realisasi : Rp.70.049.850,- (93.40%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Pelatihan PNS Box dan Kriptosoft bagi tenaga operator dan pejabat struktural di lingkup Dinas Kominfo Provinsi NTT khususnya dan Pemerintah Provinsi NTT pada umumnya;
 - Terpahaminya manajemen dan keamanan jaringan serta fitur lain dari PNS Box; dan memahami cara memanfaatkan layanan PNS Box;



- Peserta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penting dan manfaat pengamanan data dan informasi serta cara-cara mengantisipasi dan menyelesaikan masaah-masalah terkait persandian.
- Peserta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penting dan manfaat pengamanan data dan informasi serta cara-cara mengantisipasi dan menyelesaikan masaah-masalah terkait persandian;
- Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem dan peralatan sandi untuk pengamanan informasi milik pemerintah di Provinsi dan Kab/kota; dan terwujudnya sinergitas pembinaan penyelenggaraan persandian dan tingkat keamanan informasi di Kab/Kota se-Provinsi NTT yang sesuai regulasi, sistem dan standar yang berlaku.

c) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.415.401.050,-
- Realisasi : Rp.1.325.022.290,- (93.61%)

1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Informasi yang Bersifat Penyuluhan.

- Alokasi Anggaran : Rp.877.074.000,-
- Realisasi : Rp.690.410.000,- (94.26%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya pameran HUT RI ke 73 tahun 2018 di Kupang selama 10 hari dari tanggal 15 – 24 Agustus 2018, bertempat di JL. Timor Raya Depan Eks Restoran Teluk Kupang Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Kegiatan mencakup Peragaan materi pameran, Juru Informasi stand, panggung hiburan rakyat dan beberapa acara perlombaan yang bersifat hiburan sekaligus informatif dan komunikatif;
 - Terpublikasinya program/kegiatan dan hasil karya pemerintah dalam bentuk data dan grafik selama 5 tahun terakhir (2013 s/d 2018);
 - Terdokumentasinya kegiatan pembangunan dan hasil produk dan mitra usaha swasta industri kecil dan pengrajin di Nusa Tenggara Timur melalui Audio Visual;



- Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa dan ASN dan TNI/POLRI mendapatkan ruang dan waktu untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai jenis Lomba Krida yang dilaksanakan;
 - Terlibatnya secara aktif kelompok kesenian milik masyarakat, sanggar/group kesenian, pelajar dan mahasiswa yang ada di tengah masyarakat;
 - Terjadinya Transaksi jual beli dan peredaran uang dari pelaku usaha swasta dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
- Alokasi Anggaran : Rp.125.500.200,-
 - Realisasi : Rp.107.274.000,- (85.48%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terbentuknya Komsosdes di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten TTU (Desa Bijaepasu) dan Sabu Raijua (Desa Raenyala), dengan tujuan untuk memfasilitasi arus informasi di pedesaan yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setempat;
 - Terlaksananya pembinaan Komsosdes di Desa Nian Kabupaten TTU. Diikuti oleh warga masyarakat desa sebanyak 30 orang dengan tema “Pola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK”;
 - Terlaksananya pembinaan persandian di 15 Kabupaten oleh Pejabat dari Dinas Kominfo Provinsi NTT.
- 3) Kegiatan Pengembangan e-Government Provinsi NTT.
- Alokasi Anggaran : Rp.812.826.850,-
 - Realisasi : Rp.812.826.850,- (100%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terbentuknya Tim Evaluator Internal SPBE Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 sebagai tim kerja evaluator SPBE;

- Tersosialisasinya Evaluasi SPBE bagi seluruh OPD lingkup Pemprov NTT guna memahami kegiatan evaluasi dan mengisi kuisioner tingkat kematangan dan kuisioner format umum bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT pada tanggal 25 Juli 2018 yang dihadiri oleh perwakilan 49 OPD;
- Menjaring data pelaksanaan SPBE di OPD lingkup Pemprov NTT;
- Membangun sinergi pengamanan data dan informasi milik pemerintah baik secara fisik maupun artifisial;
- Adanya buku/dokumen panduan perencanaan kegiatan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) Tahun ke depan.

d) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.150.199.200,-
- Realisasi : Rp.150.199.200,- (100%)

1) Kegiatan Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Informasi Masyarakat.

- Alokasi Anggaran : Rp.59.099.200,-
- Realisasi : Rp.59.099.200,- (100%)
- Capaian/Hasil :
 - Terbentuknya kelompok sebagai fasilitator pemerintah dalam menyampaikan informasi pemerintahan, pembangunan daerah dan informasi yang bersifat penyuluhan yang sedang dan akan berlangsung. Pembentukan Komsosdes dilaksanakan di 2 Kabupaten;
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomis, cara budidaya kelor/cara Menanam daun kelor, kandungan gizi, manfaat dan khasiat, cara membuat teh daun kelor, cara membuat bubuk (serbuk) daun kelor;
 - terbentuknya Kelompok Media Tradisional di Desa Bao Pana, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dan di Kampung Aman Kabupaten TTS;
 - Terlaksananya kegiatan pembinaan Metra di Kelurahan Cendana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



- Terdesiminasinya informasi pembangunan di NTT melalui media film dokumenter tentang keberhasilan program-program Pemerintah NTT;
- Tersebarinya informasi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah melalui dialog televisi dan radio dan terlaksananya pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- Terealisasinya perbaikan ruangan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Tersedianya data dan informasi yang sesuai klarifikasi informasi wajib, serta merta dan setiap saat berupa soft copy maupun *hard copy* pada setiap perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT;
- Terdokumentasinya daftar dan fisik Data Informasi Publik yang dikuasai Perangkat Daerah dengan baik sesuai ketentuan.

2) Kegiatan Pengembangan Informasi Pedesaan

- Alokasi Anggaran : Rp.91.100.000,-
- Realisasi : Rp.91.100.000,- (100%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Survey Blank Spot Area Daratan Flores dan Daratan Timor;
 - Perluasan wawasan, peningkatan pemahaman peserta tentang kebijaksanaan, arah pembangunan serta pengembangan e-government berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas melayani masyarakat dalam bentuk penyediaan data informasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - Terbangunnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi dan komunikasi (TIK) antar Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se-NTT.
 - Sebagai tolak ukur dalam pengembangan e-government yang menjadi acuan untuk PeGi (Pemeringkatan e-Government di Indonesia) di Prov. dan Kab/Kota se NTT.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 100 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:
SD = 2 orang; SLTP = 2 orang; SMU = 46 orang; D3 = 4 orang;
Sarjana = 37 orang; Magister = 9 orang.
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 10 orang; Golongan III = 68 orang; Golongan II = 21 orang; Golongan I = 1 orang.
- c) Pejabat Stuktural: 18 orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 12 orang
- d) Pejabat Fungsional: 10 orang.
Pranata Humas = 7 orang ; Pustakawan = 1 orang; Pranata Komputer = 2 orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Komunikasi dan Informatika yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
2.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3.	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Program Pengembangan Data/ Informasi	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
4.	Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-
5.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Program Pengemb. Informasi Pembangunan Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi

- 5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.



7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.975.484.416,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.751.203.887,- (77.01%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.380.602.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.351.519.500,- (92.36%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.19.600.584,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.19.600.000,- (100%)

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Peningkatan Dan Pengembangan Koperasi.
 - Alokasi Anggaran : Rp.17.039.672.400,-
 - Realisasi : Rp.16.204.811.938,- (95,10%)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
 - Alokasi Anggaran : Rp.13.623.368.800,-
 - Realisasi : Rp.12.963.496.194,- (95,16%)
 - Capaian/Hasil :
 - Adanya perubahan status dari koperasi tidak aktif menjadi aktif;
 - Terfasilitasi akta notaris dengan diterbitkannya 150 koperasi memiliki Akta Pendirian Koperasi sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi;
 - Terlaksannya Sinkronisasi Program dan Kegiatan serta Penjaringan Aspirasi Penyusunan Renstra 2018-2023 di 22 Kab/Kota yaitu terbangunnya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional antara pusat dan daerah;



- Terlaksananya penyerahan NIK dan Sertifikat antara lain untuk Koperasi Aktif yang sudah ber NIK sebanyak 2.356 dan Koperasi yang sudah bersertifikat sebanyak 448 dan semuanya tersebar di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
- Tersedianya informasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM di 22 Kab/Kota serta terwujudnya program yang sinergis antar Pusat, Prov. dan Kab/Kota;
- Terlaksananya pembinaan dan Simulasi RAT di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Belu serta meningkatnya pelaksanaan RAT di 2 Kabupaten tersebut.;
- Terlaksananya pelatihan penyuluhan perkoperasian bagi petugas penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) serta meningkatnya koperasi aktif dan bertumbuhnya koperasi di 9 Kabupaten tersebut.;
- Adanya data Keragaan Koperasi dan UMKM yang valid selama 12 bulan (tahun 2018) di 22 Kabupaten/Kota;
- Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan koperasi dan pelaporan maka dapat mendorong bertumbuhnya koperasi aktif di 22 Kabupaten/Kota;
- Meningkatnya pengetahuan bagi 40 orang peserta dalam pengelolaan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil;
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi 30 orang anggota Koperasi KSP/USP dan KSPPS/USPPS dalam penyusunan laporan keuangan pada usaha koperasi yang dikelolanya.
- Terlatihnya 30 orang peserta untuk melaksanakan pengendalian internal KSP/USP dan KSPPS/USPPS sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi Anggaran : Rp.416.306.600,-
- Realisasi : Rp.376.114.240,- (90,35%)
- Capaian/Hasil :
- Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Rekonsiliasi Dana Bergulir Kementerian Koperasi (KSP/USP,LKM dan Koperasi Produsen 2000 s/d 2007) serta Dana Bergulir APBD 1 2007 s/d 2010 di 22 Kabupaten/Kota;



- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi & UMKM pada 22 Kabupaten/Kota;
- Meningkatnya Kualitas produk/hasil kerja/produktifitas dan semangat kerja serta masyarakat semakin memahami tentang berkoperasi, terlebih tentang cara penilaian koperasi;
- Adanya Dana Bantuan Sosial Kementrian Koperasi dan UKM RI bagi Koperasi-koperasi/UKM yang tersebar di Kabupaten TTS, TTU, Belu, dan Malaka bagi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan UKM.

3) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.000.000.000,-
- Realisasi : Rp.2.865.201.504,- (90,35%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlatihnya 50 orang peserta pendampingan DAK Non fisik;
 - Terwujudnya kegiatan pengawasan (penilaian kesehatan bagi 50 orang pengurus KSP/USP);
 - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pembinaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) se Daratan Timor di Atambua diikuti 40 peserta;
 - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pembinaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) se Daratan Flores di Larantuka diikuti 40 peserta;
 - Terlaksananya Pelatihan Laporan Keuangan Bagi Koperasi Primer/Sekunder Tingkat Provinsi di Kota Kupang yang diikuti 40;
 - Meningkatnya pengetahuan bagi pengawas KSP/USP, KSPPS/USPPS sebanyak 40 orang dalam pengawasan terhadap koperasi yang dibinanya se daratan Flores dan Lembata di Kabupaten Flores Timur;
 - Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan bagi Pengelola KSP/USP di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Alor Sabu Raijua di Kota Kupang dengan peserta 40 orang;



- Terlatihnya 40 orang peserta mampu menilai kesehatan koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam yang dikelolanya, apakah sehat, tidak sehat dan dalam pengawasan;
- Terlatihnya 40 orang peserta mampu menilai kesehatan koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam yang dikelolanya, apakah sehat, tidak sehat dan dalam pengawasan se daratan Timor (Kabupaten Malaka,Belu, TTU dan TTS) di Malaka;
- Terlatihnya 40 orang peserta mampu menilai kesehatan koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam yang dikelolanya, apakah sehat, tidak sehat dan dalam pengawasan se daratan Flores dan Lembata di Ende;
- Terlatihnya 40 orang peserta mampu menilai kesehatan koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam yang dikelolanya, apakah sehat, tidak sehat dan atau dalam pengawasan se daratan Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) di Waingapu;
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sebanyak 40 orang dalam mengelola manajemen keuangan KSP/USP yang dibina di wilayahnya masing-masing;
- Meningkatnya pengetahuan pengelola KSP/USP, KSPPS/USPPS koperasi di Kabupaten Alor dalam membuat laporan keuangan sebanyak 40 orang;
- Meningkatnya pengetahuan pengelola KSP/USP, KSPPS/USPPS koperasi dalam membuat laporan keuangan sebanyak 30 orang sedaratan Sumba;
- Terlatihnya 40 orang peserta kewirausahaan bagi Wira Usaha pemula se daratan Flores di Ende;
- Terlatihnya 40 orang peserta kewirausahaan bagi Wira Usaha pemula se daratan Sumba di Kabupaten Sumba Barat;
- Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan tentang manfaat dan pentingnya perlindungan produk usaha sehingga dapat tercipta kenyamanan, keamanan dan



keselamatan serta daya saing usaha yang lebih kompetitif bagi 40 orang pelaku usaha sedaratan Timor di TTU;

- Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan tentang manfaat dan pentingnya perlindungan produk usaha sehingga dapat tercipta kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta daya saing usaha yang lebih kompetitif bagi 40 orang pelaku usaha sedaratan Flores di Manggarai Timur;
- Terlaksananya kegiatan Pelatihan Teknis Penyediaan Pakan Ternak bagi Anggota Koperasi/UKM Bidang Peternakan di Kabupaten Belu, dihadiri 30 orang masing-masing : Kabupaten Belu 20 orang, Kabuapten TTU 10 orang dan Kabupaten TTS 10 orang;
- Meningkatnya ketrampilan perajin tenun ikat dalam mendesain produk tenun ikat bagi anggota koperasi/UKM di Maumere;
- Meningkatkan pengetahuan pengurus/pengelola koperasi dalam menjalankan usaha, demi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi;
- terwujudnya 40 orang pengelola UKM yang dapat memahami kualitas dari sebuah produk dari setiap usahanya agar mampu menembus pasar di era milenial.

b) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

- Alokasi Anggaran : Rp.666.510.400,-
- Realisasi : Rp.575.196.930,- (86%)

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

- Alokasi Anggaran : Rp.416.022.400,-
- Realisasi : Rp.373.159.420,- (89,70%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersosialisasi HKI bagi 40 pelaku Usaha/ UKM di Kabupaten TTS,TTU, Belu dan Alor yang memahami akan kegunaan dan manfaat sertifikasi HAKI untuk Jangka waktu tertentu;
 - Terlaksananya Sertifikasi Halal bagi 20 pelaku Usaha/ UKM di Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur agar memahami akan kegunaan dan manfaat sertifikasi Halal;



- Meningkatnya kepercayaan konsumen atas produk yang dikeluarkan;
- Memberi kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global;
- Meningkatnya citra produksi dan meningkatnya jumlah pelaku UKM yang terlindung dari produk haram dan membahayakan akan kesehatan. Tingkat pemahaman mencapai 85 % dari sebelumnya 40 %;
- Tersedianya 100 Pelaku usaha/UKM memahami dan dapat bermitra dengan lembaga Keuangan (BUMN), BUMD (Bank NTT) dalam hal akses permodalan;
- Tersedianya 200 Pelaku usaha/UKM memahami dan dapat bermitra dengan lembaga Keuangan (BUMN), BUMD (Bank NTT) dalam hal akses permodalan;
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi 450 orang wirausaha pemula agar mampu mandiri dan kuat secara ekonomi sosial dan finansial demi meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya;
- Tersedianya 450 orang wirausaha pemula telah siap untuk memenuhi/melengkapi segala kriteria dan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur NTT tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula.

2) Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi.

- Alokasi Anggaran : Rp.250.488.000,-
- Realisasi : Rp.202.037.510,- (80.66%)
- Capaian/Hasil :
 - Terfasilitasinya bantuan sarana usaha bagi 4 PKL Kuliner;
 - Terfasilitasinya Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi PKL/UKM kuliner anggota Koperasi;
 - Meningkatnya Omset Penjualan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 72 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 16 orang; Diploma = 10 orang; Sarjana = 30 orang; Magister = 16 orang ; Doktoral = - orang.
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 8 orang; Golongan III = 43 orang; Golongan II = 10 orang; Golongan I = - orang.
- c) Pejabat Stuktural:
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 13 orang.
- d) Pejabat Fungsional: 11 orang (widyaaiswara 2 orang dan Arsipharis 9 orang).

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
2.	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
3.	Program Hibah Koperasi	-	-

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Lengkap.

6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan:

- a) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan aparat dalam rangka kesinambungan pembinaan bagi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota juga masih rendah dimana masih terdapat banyak koperasi primer Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan RAT dalam beberapa tahun terakhir;



- b) Secara kuantitatif jumlah koperasi dan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi akhir tahun 2018 sebesar (4.146 koperasi dan 56.971 UKM), namun dilain pihak kemampuan koperasi dan UKM untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan sangat terbatas. Hal ini menyebabkan ketergantungan koperasi dan UKM terhadap bantuan pemerintah sangat besar, sedangkan sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas.
- c) Terbatasnya sarana usaha yang dimiliki gerakan Koperasi yang menyebabkan koperasi dan UKM belum mampu dalam mengakses pasar dan teknologi dalam rangka mengembangkan usaha.

Solusi:

- a) Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur yang membidangi Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan teknis pembinaan koperasi dan UKM.
- b) Membantu Koperasi dan UKM agar mampu melengkapi sarana usahanya, membekali dengan berbagai Diklat teknis, Bimtek untuk peningkatan kualitas produknya dan pengembangan usaha koperasi dan UKM serta melakukan pembinaan Diklat teknis RAT;
- c) Koperasi dan UKM diharapkan mampu mengakses pasar yang secara bertahap dilakukan melalui promosi dan pameran produk.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.853.522.904,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.804.222.612,- (94.22%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.842.630.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.829.357270,- (98,42 %)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.38.247.296,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.38.061.800,- (99,52%).



URUSAN PENANAMAN MODAL.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

- Alokasi Anggaran : Rp.1.986.246.288,-
- Realisasi : Rp.1.893.934.773,- (95,35 %)

1) Kegiatan Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

- Alokasi Anggaran : Rp.453.688.000,-
- Realisasi : Rp.438.585.276,- (96,67%)
- Capaian/Hasil :
 - Terjalannya kemitraan antar pengusaha daerah dengan Pemerintah Provinsi NTT Untuk memberikan informasi yang aktual dan akurat dalam memudahkan masyarakat dunia usaha dalam berinvestasi;
 - Adanya kesepahaman terhadap berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka membangun NTT;
 - Adanya dukungan dan partisipasi para Investor/Pelaku Usaha terhadap Kebijakan dan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan;
 - Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan investasi lintas sektor di daerah;
 - Terbangunnya sinergitas dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Fasilitasi Lintas Sektor Bidang Investasi setiap tahun yang dilaksanakan secara bergilir di setiap Kabupaten/Kota;



- Tersedianya Video Presentasi Potensi Unggulan Daerah di 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Malaka, Sabu Raijua, Alor, Flores Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat, dengan durasi 10 menit sebanyak 10 buah Paket Video.

2) Kegiatan Promosi Potensi Investasi Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.193.896.288,-
- Realisasi : Rp.1.138.998.847,- (95,40%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya materi dan bahan promosi yang efektif dan efisien serta adanya pernyataan minat Investor, untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 12 investor;
 - Terlaksananya kegiatan Regional Investment Forum (RIF) bertempat di Hotel Gunawangsa Merr Surabaya – Provinsi Jawa Timur;
 - Terpublikasinya berbagai potensi dan peluang investasi di Wilayah Provinsi NTT serta adanya penawaran kerjasama investasi antara para pengusaha lokal NTT dengan para calon investor;
 - Terciptanya peningkatan wawasan Pengusaha Daerah dan Investor Nusa Tenggara Timur tentang mekanisme pasar produk unggulan;
 - Terlaksananya kegiatan Pameran Sunda Kecil Expo 2018 dengan mempromosikan berbagai potensi dan peluang investasi di Wilayah Provinsi NTT serta adanya penawaran kerjasama investasi antar para pengusaha lokal (UMKM) NTT dengan UMKM NTB dan Bali;
 - Adanya kesepakatan kerjasama pada Pertemuan Bersama Anggota Forum Sunda Kecil 2018 (Bali, NTB dan NTT);
 - Adanya kesepakatan Pertemuan dengan Konjen RRT di Denpasar Bali;
 - Tersedianya Forum khusus Investasi Daerah dan meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan Bank Indonesia, BKPM, kadin Indonesia dan KBRI Singapura;



- Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan Bank Indonesia, BKPM, kadin Indonesia dan KBRI Singapura;
- Tersosialisasinya perkembangan Investasi dan peluang potensi investasi di Nusa Tenggara Timur;
- Adanya pernyataan minat dari beberapa Investor baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur (Investor Asal RRT Zhejiang Qianzu Pearl Co., LTD; Investor Asal RRT Zhejiang Qianzu Pearl Co., LTD; PT. Anugerah Lahan Bumi dan Investor Asal RRT Zhejiang Qianzu Pearl Co., LTD)
- Tersedianya Kursi Auditorium NTT Fair sebanyak 620 buah untuk sarana dan prasarana Gedung Kantor NTT Fair;
- Tersedianya 1 unit Pompa Air, 1 Roll Karpet untuk perlengkapan Gedung Kantor NTT Fair;
- Tersedianya peralatan studio berupa 1 unit LCD/Projector Layar Infocus dan 1 unit Infocus untuk sarana prasarana Gedung Kantor NTT Fair.

3) Kegiatan Pengawasan Investasi Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.338.662.000,-
- Realisasi : Rp.316.350.650,- (93,41%)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Dokumen Berita Acara Pengawasan PMA dan PMDN;
 - Teridentifikasinya beberapa permasalahan dan hambatan dalam kegiatan investasi (PMA dan PMDN);
 - Adanya kesepakatan pada Sosialisasi LKPM Online Klaster I di Kabupaten Alor dengan peserta dari beberapa Perusahaan dan Aparatur DPMPTSP (Kabupaten Alor, Sabu, Rote, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka);
 - Adanya kesepakatan pada Sosialisasi LKPM Online Klaster II di Kab Ngada dengan peserta dari beberapa Perusahaan dan Aparatur DPMPTSP (Kabupaten Ngada, Manggarai barat, Manggarai, Manggarai Timur, Flotim, Lembata, Sikka, Ende, Nagekeo);



- Adanya kesepakatan pada Sosialisasi LKPM di Klaster III di Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 23 Maret 2018 di Kab. Sumba Barat dengan peserta 40 orang (20 peserta dari DPMPTSP dan 20 orang peserta dari pelaku usaha).
- Teridentifikasinya berbagai permasalahan dan hambatan pelaksanaan penanaman Modal di Provinsi NTT;
- Tersedianya Berita Acara Hasil Pengawasan;
- Tersedianya hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan, untuk tahun 2018 mencapai 85,18 (predikat kinerja Sangat Memuaskan) yang diperoleh dari 4 triwulan, Triwulan I : 83,86 dengan Kategori Sangat Memuaskan , Triwulan II : 85,20 dengan kategori Sangat Memuaskan, Triwulan III 85,75 (Sangat memuaskan), Triwulan IV 85,90 (Sangat memuaskan) berupa 4 dokumen (20 buku.

b) Program Peningkatan Investasi Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.728.746.560,-
- Realisasi : Rp.673.755.260,- (92,45 %)

1) Kegiatan Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.577.502.000,-
- Realisasi : Rp.538.293.500,- (93,21 %)
- Capaian/Hasil :
 - Tersedianya data dan informasi potensi investasi yang ada di Kota Kupang dan 21 Kabupaten, berupa Buku Potensi Investasi sebanyak 30 buku dan CD 30 Keping;
 - Adanya kesamaan dan sinkronisasi data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi NTT;
 - Adanya pemetaan Potensi dan Peluang Investasi unggulan untuk ditawarkan kepada para Investor;
 - Tersedianya buku Kajian pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Unggulan 30 buku dan 30 Keping CD (Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Nagekeo);
 - Tersedianya buku kajian potensi dan peluang investasi rumput laut di 2 (dua) Kabupaten;



- Tersedianya Buku Kajian Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wini di Kabupaten TTU;
- Tersedianya buku kajian potensi dan peluang investasi rumput laut di 2 (dua) Kabupaten;
- Tersedianya Buku Kajian Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wini di Kabupaten TTU;
- Tersedianya Album Peta Potensi dan Peluang Investasi;
- Teridentifikasinya berbagai permasalahan dan hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Adanya sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- Tersedianya SDM aparatur yang mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) di institusi masing-masing;
- Meningkatnya realisasi investasi serta adanya perbaikan kualitas pelayanan perizinan di daerah;
- Adanya kesepakatan/rekomendasi bersama untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebanyak 17 (tujuh belas) kesepakatan/rekomendasi;
- Adanya Ranperda tentang Perizinan tertentu;
- Tersedianya Buku Kajian Optimalisasi Pelayanan Perijinan sebanyak 40 buku;

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Investasi dan UMKM.

- Alokasi Anggaran : Rp.76.685.360,-
- Realisasi : Rp.66.015.360,- (96,55 %)
- Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya agar tercipta kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UKM di Provinsi NTT;
 - Tersedianya tenaga profesional yang terampil dan dapat memberikan dan menyajikan informasi tentang pedoman dan peluang investasi untuk menarik minat investor baik investor dalam negeri maupun investor asing.



3) Kegiatan Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi antar Daerah dan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan.

- Alokasi Anggaran : Rp. 74.559.200,-
- Realisasi : Rp. 69.446.400,- (93,14 %)
- Capaian/Hasil :
 - Adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan upaya-upaya percepatan dan peningkatan realisasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah;
 - Tersedianya tenaga profesional dan berkualitas dalam pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Investasi;
 - Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

c) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.

- Alokasi Anggaran : Rp.664.460.000,-
- Realisasi : Rp.637.388.600,- (95,93 %)

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan.

- Alokasi Anggaran : Rp.664.460.000,-
- Realisasi : Rp.637.388.600,- (95,93 %)
- Capaian/Hasil :
 - Adanya peningkatan pemahaman Aparatur Sipil dalam menyusun SP dan SOP. Sudah 18 Dinas PM dan PTSP Kabupaten sudah mulai membuat SP dan SOP sesuai dengan regulasi yang baru;
 - Meningkatnya kualitas standar pelayanan perizinan kepada stakeholder dan masyarakat;
 - Adanya Mekanisme dan aturan yang jelas berkaitan dengan dokumen ijin yang akan diterbitkan. Adanya Pergub nomor 44 tahun 2018 tentang SP dan SOP.;
 - Tersedianya surat rekomendasi teknis beserta kelengkapannya yang digunakan untuk proses penerbitan dokumen Izin / non izin;
 - Diterbitkannya Ijin sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 6.823 izin (113,72 %) dari target Renstra sebanyak 6.000 izin. Terjadi pelampauan target;



- Meningkatnya jumlah ijin yang diberikan kepada stakeholder dan masyarakat di 4 lokasi seperti kota Kupang, Kabupaten belu, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 - Adanya Integrasi Ijin Penanaman Modal dari Aplikasi SPIPISE kedalam Aplikasi SPESIAL;
 - Mendapatkan pelajaran praktis dalam Study Banding yang dapat diterapkan pada DPMPTSP Provinsi NTT seperti : Penggunaan Nota Dinas untuk tanda tangan izin, penggunaan nomor antrian secara manual, penegasan waktu jam pelayanan dan mendapatkan inspirasi untuk melakukan inovasi – inovasi berkaitan dengan pelayanan perizinan yang lebih baik;
 - Tersedianya 4 unit tablet untuk menunjang penandatanganan dokumen izin secara elektronik.
- d) Program Pengembangan Data dan Informasi Perizinan Investasi.
- Alokasi Anggaran : Rp.277.828.000,-
 - Realisasi : Rp.260.215.950,- (93,66 %)
- Kegiatan Pengembangan Data Base Pelayanan Perizinan.
- Alokasi Anggaran : Rp. 277.828.000,-
 - Realisasi : Rp. 260.215.950,- (93,66%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya data kelembagaan dan penyelenggaraan DPMPTSP Kab/Kota tahun 2018;
 - Adanya Data dan Informasi perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Time Series, berupa buku Database / Profil DPMPTSP NTT tahun 2018 tentang perkembangan Perizinan dan Investasi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 10 buku;
 - Tersedianya Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, berupa buku Rencana Strategi (RENSTRA) sebanyak 20 buku.
 - Terlaksananya System Online Single Submission secara regulasi;
 - Tersedianya Aplikasi Manajemen Arsip Perizinan secara Digital;

- Terbangunnya koordinasi antar lembaga pelayanan perijinan, *stakeholders* dan asosiasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Nusa Tenggara Timur;
- Adanya berbagai langkah dan upaya bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan investasi terkait perizinan, infrastruktur, listrik dan masalah lahan.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 78 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 19 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 47 orang; Magister = 4 orang ; Doktoral = - orang..
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 9 orang; Golongan III = 55 orang; Golongan II = 14 orang; Golongan I = - orang.
- c) Pejabat Stuktural: 17 orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 12 orang..
- d) Pejabat Fungsional: 2 orang (Fungsional Perencana dan Arsipharis)

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Penanaman Modal yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.	Program Peningkatan Investasi Daerah	Program Peningkatan Investasi Daerah	Program Peningkatan Investasi Daerah

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:

Masih kurang memadai, terutama gedung kantor, Bidang Pelayanan masih kantor sendiri yaitu Eks Kantor PTSP Provinsi NTT, sebelumnya sedangkan Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang lainnya berkantor di Kantor Eks BKPM Provinsi NTT.



6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan:

- a) Ketersediaan lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi;
- b) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk akses masuk ke lokasi rencana investasi;
- c) Terbatasnya ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri;
- d) Belum tersedianya kawasan investasi baru yang ditetapkan Pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- e) Masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur di bidang IT;
- f) Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai (terutama di beberapa kabupaten) sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan, untuk perlu dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten);
- g) Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyerahkan urusan pelayanan perizinan kepada SKPD/Instansi Pelayanan Perizinan (beberapa Kabupaten);
- h) Masih terbatasnya pengetahuan para tenaga operator (Investor) dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (Triwulanan) dengan Sistem LKPM ONLINE;
- i) Masih banyak kabupaten/kota yang belum mendorong peran swasta dalam percepatan pembangunan di daerah melalui kegiatan investasi PMA maupun PMDN dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang investasi yang ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.848.560.152,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.813.110.118,- (95,82 %)



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.88.284.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.88.247.538,- (99,96 %)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.41.088.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.41.082.000,- (99,99 %)

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a) Program Peningkatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.966.973.200,-
 - Realisasi : Rp.1.889.693.652,- (96,07%)
 - 1) Kegiatan Pembinaan Kepemudaan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.966.973.200,-
 - Realisasi : Rp.1.889.693.652,- (96,07%)
 - Capaian/Hasil :
 - Terlatihnya 48 orang Paskibraka Tingkat Provinsi perwakilan dari 22 Kab/kota se NTT masing masing 1 orang putra dan 1 orang putri, di tambah 2 orang dari calon peserta paskibraka tingkat nasional yang tidak lulus seleksi tingkat Provinsi dan pelatih sebanyak 5 orang yang bertugas melatih dan menyampaikan materi dasar peraturan baris dan pembentukan formasi penaikan dan penurunan bendera, terdiri dari: 1). Satu orang Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Komandan Latihan, 2). Satu orang Bintara TNI Angkatan Darat sebagai Pelatih, 3). Satu orang Bintara TNI Angkatan Udara sebagai Pelatih, 4). Satu orang Bintara Brimobda NTT sebagai Pelatih, 5). Satu orang Bintara Wanita Polda NTT sebagai Pelatih;



- Terlaksananya Forum Komunikasi antara Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018, bertempat di Hotel Videsy Rote Ndao;
- Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan dalam rangka Peningkatan Wawasan Keparlemenan bagi Pemuda Tahun 2018, dilaksanan di hotel Pelita Kota Waikabubak;
- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Pemuda di Bidang Tenun Ikat di Kota Kupang Provinsi NTT Tahun 2018 dengan jumlah peserta 57 orang, dengan rincian: Kota Kupang 14 orang, Kabupaten TTS 13 orang, Kabupaten TTU 10 orang, Kabupaten Belu 10 orang, dan Kabupaten Malaka 10 orang;
- Terlaksananya Seleksi kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Tahun 2018 di Kupang, diikuti peserta pelatihan 50 orang berasal dari Undana (32 orang), Politeknik Negeri Kupang (9 orang), Unika (6 orang), SMA (3 orang);
- Terlaksananya Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2018, di Kupang, Tanggal 10 s/d 11 April 2018, seleksi tahap pertama diikuti 125 peserta dari hasil seleksi ditetapkan 30 orang untuk mengikuti seleksi potensil,bakat dan wawancara, ditetapkan 2 (dua) orang yang lulus yaitu: (1) Negara Korea Alberto Selan (2) Negara Jepang Silvianus E. Tatus;
- Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Provinsi NTT selama 7 (tujuh) hari, tanggal 5 s/d 11 November 2018 di Sport Centre Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.

2) Kegiatan Pembibitan Olahraga Berbakat.

- Alokasi Anggaran : Rp.903.487.000,-
- Realisasi : Rp.834.041.000,- (66,84%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) I selama 3 hari, tanggal 26 s.d 28 Oktober 2018 bertempat di Hotel Pelagi Kota Kupang, Peserta



berasal dari 3 kabupaten yakni: Kota Kupang 28 peserta, Kabupaten Kupang 10 peserta, Kabupaten Timor Tengah Selatan 17 peserta. Adapun Narasumber/ moderator berjumlah 65 Wasit dengan rincian Wasit/ Juru Atletik 45 Wasit, Wasit/Juru Tennis Meja 15 Wasit, Wasit/Juru Catur 10 Wasit, Wasit/Juru Bulutangkis 28 Wasit, Hasil perolehan medali : Kota Kupang 6 medali Emas, 6 medali Perak, 7 medali perunggu, Kabupaten Kupang 1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali perunggu, Kabupaten Timor Tengah Selatan 9 medali Emas, 8 medali Perak, 8 medali perunggu.;

- Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Tahun 2018 di Provinsi Jambi pada tanggal 6 – 9 Juli 2018, sebelum mengikuti Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional terlebih dahulu dilakukan Pemusatan Latihan (TC) dari tanggal 3 s.d 5 Juli 2018 di Kupang, jumlah peserta 23 orang dan 7 panitia, cabang olahraga tradisional yang dilombakan yakni permainan “SINNAL GARAMURAL” yang berasal kabupaten Alor;
- Terlaksananya Festival KIDS Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, selama 2 hari yakni: di Kompleks Halaman Gor Flobamora Kupang, peserta berjumlah 70 orang yang berasal dari: Cabang Atletik 20 orang, Cabang Tinju 15 orang, Cabor Kempo 20 orang, Cabang Taek Won Do 15 Orang, jumlah Wasit/Juri 65 wasit dengan rincian: Cabang Atletik 20 Wasit/Juri, Cabor Tinju 15 Wasit/Jui, Cabor Kempo 20 Wait/Juri, Taek Won Do 15 Wasit/Juri. Hasil Festival KIDS Olahraga **Cabor Atletik**: Juara 1 SDN Kuanino, Juara II SD Inpres Perumnas 1, Juara III SDN Maulafa, Juara IV SDN Oesapa Kecil 1, Juara V SD Inpres Labat, Juara VI SDInpres Oeba I, Juara VII SD Gmit Oebufu. **Cabor Kempo**: Juara I SDInpres Bertingkat Oebobo, Jaura II SD Inpres Bakunase II, Juara III SD Kristen Citra Bangsa, Juara IV SDN Bertingkat Naikoten, Juara V SD N Oetona, Juara VI SDNTunas Mandiri, Juara VII SDN Nunhila, **Cabor Taek Won Do** :



Juara I SD Gmit Oepura, Juara II SD Inpres Maulafa, Juara III SD Inpres Maupoli, Juara IV SD Oehendak, Juara V SD Katolik, Juara VI SDN Batuplat, Juara VII SDN Batuplat, Cabor **Tinju**: Juara I SD Inpres Kelapa Lima 2, Juara II SD Katholik Assumtha, Juara III SD Oebufu, Juara IV Khatolik Muder Theresa, Juara VII SD Khatolik Santa Yosep 3.

- Terlaksananya Fun Bike Sepeda Ria di Kota Kupang Jln. Eltari Kupang, tanggal 1 Desember 2018, jumlah peserta 500 orang, Hasilnya ada DOORPRIZE, Strika 2 buah, Kipas Angin 2 buah, Dispenser 2 buah, Rice Cooker 2 buah, HP Samsung 2 buah, Sepeda mini 2 buah, TV 28 Inci 1 buah, Lemari Es 1 buah, Sepeda Gunung 1 buah.

b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

- Alokasi Anggaran : Rp.8.073.873.300,-
- Realisasi : Rp.6.789.041.480,- (84,09)

1) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Olahraga.

- Alokasi Anggaran : Rp.7.170.350.300,-
- Realisasi : Rp.5.955.000.480,- (83,05%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) III di Kota Kupang, Tanggal 11 – 15 Mei 2018, jumlah peserta POPDA III Tahun 2018 20 Kabupaten/1 Kota sebanyak 883 Atlet dan 2 Kabupaten yang tidak ikut yakni: Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur , jumlah Official 75 orang, Manager 75 orang, jumlah wasit/juri 160 wasit, Hasil Perolehan medali percabor : **1). Cabor Atletik** : Kota Kupang (7 emas, 2 perak, 1 perunggu), Ngada (2 emas, 1 perak,. Sikka (2 emas, 1 perak) Sumba Barat Daya (1 emas, 7 perak, 3 perak), Belu (1 emas, 1 perak), Ende (1 emas, 1 perak), Alor (1 perak), Manggarai Barat (1 perak), Kupang (3 perunggu), Flores Timur (2 perunggu), Sumba Barat (1 perunggu), dan TTS (1 Perunggu, **2). Cabor Shorinji Kempo**: Kota Kupang (12 Emas, 9 Perak, 9 Perunggu), TTU (4 emas, 6 perak, 6 perunggu), Belu (3 emas, 2 perunggu, 11 perunggu), Manggarai Barat (2 emas, 8 perak, 1 perunggu), Kupang



(2 emas, 4 perak, 3 perunggu), Alor (2 Emas, 2 perak, 5 perunggu), Rote Ndao (2 emas, 2 perak, 3 perunggu), Sabu Raijua (2 emas, 2 perak, 2 perunggu), Ngada (2 emas, 1 perak, 4 perunggu), TTS (2 emas, 3 perunggu), Sumba Timur 1 emas, 2 perak, 4 perunggu), Ende (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), Sumba Barat Daya (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), Sumba Tengah (1 emas, 1 perunggu), Sumba Barat (1 emas), Flores Timur (1 emas), **3). Cabor Taekwondo:** Kota Kupang (12 Emas, 1 perak, 1 perunggu), TTU (1 emas, 5 perak, 5 perunggu), Sikka (1 emas, 2 perak, 4 perunggu), Manggarai (1 emas), Sumba Barat (1 emas), Malaka (3 perak, 2 perunggu), Ende (4 perak), Belu (1 emas, 5 perunggu), Kupang (3 perunggu), Flores Timur (2 perunggu), Sumba Timur (2 perunggu), dan TTS (1 perunggu), **4). Cabor Tinju:** TTS (6 emas, 3 perak, 1 perunggu), Belu (5 emas, 4 perak, 3 perunggu), Kota Kupang (3 emas, 4 perak, 4 perunggu), Sumba Timur (2 emas, 1 perak, 2 perunggu), Alor (1 emas, 2 perak, 4 perunggu), Sumba Barat Daya (1 emas, 2 perak, 3 perunggu), Flores Timur (1 perak, 3 perunggu), Sikka (1 perak, 3 perunggu), Sumba Barat (1 perak, 2 perunggu), TTU (1 perak 2 perunggu), Ende (2 perunggu). **5). Cabor Pencak Silat:** Belu (4 emas, 4 perunggu), Kota Kupang (3 emas, 2 perak, 3 perunggu), Sikka (2 emas, 1 perak, 3 perunggu), Kupang (1 emas, 2 perak, 3 perunggu), Flores Timur (1 emas, 1 perak, 1 perunggu), Alor (1 emas, 1 perunggu), Ngada (3 perak, 2 perunggu), TTU (1 perak, 1 perunggu), Sumba Timur (1 perak, 1 perunggu), **6). Cabor Karate:** Kota Kupang, (7 emas, 2 perunggu), TTU (emas, 2 perak, 3 perunggu), Sikka (1 emas, 1 perunggu), Belu (1 emas, 3 perak, 3 perunggu), TTS (2 perak, 4 perunggu), Sumba Timur (1 perak), 7). Flotim (1 perak), Kupang (1 perunggu), Juara PODA III yakni: Juara Umum I Kota Kupang 44 Emas, 18 Perak, 20 Perunggu, Juara Umum II Belu 14 Emas, 11 Perak, 26 Perunggu dan Juara Umum III TTS, 8 emas, 5 perak, 10 perunggu;

- Terselenggaranya Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV di Prov. NTB Tahun 2018, di kota Mataram jumlah Peserta 745 orang, dengan rincian: 1). Jawa Timur 165 orang, mengikuti 8 cabor, 2). NTB 164 orang, mengikuti 8 cabor, 3). Kaltim 126 orang, mengikuti 8 cabor, 4). Sulawesi Selatan 92 orang, 5 cabor, 5). Sulawesi Barat 84 orang, 6 cabor, 6). Sulawesi Tenggara 74 orang, mengikuti 5 cabor, 7). NTT 40 orang, mengikuti 2 cabor. Cabang Olahraga yang di pertandingkan ada 8 cabang yakni: 1). Bulu Tangkis, 2). Bola Basket, 3). Tenis Meja, 4) Pencak Silat, 5). Tenis lapangan, 6). Sepak Takraw, 7). Bola Volly 8). Sepak Bola, Hasil pertandingan: 1). Jatim 24 emas, 4 perak, 4 perunggu, 2). Kaltim, 3 emas, 10 perak, 11 perunggu, 3). Sulawesi Selatan 3 emas, 5 perak, 6 perunggu, 4). NTT, 3 emas, 1 perak, 2 perunggu, 5). NTB, 2 emas, 11 perak, 17 perunggu, 6). Sulawesi Tenggara, 3 perak, 6 perunggu, 7). Sulawesi Barat, 1 perak, 6 perunggu;
- Terlaksananya Sepak Bola Liga 3 Gubernur Cup VIII Tahun 2018, Tanggal 10 – 24 juli 2018 di Lapangan sepak bola TNI AU Penfui – kota kupang, Jumlah peserta 220 Atlet dari 10 Kabupaten yakni: 1). PSKK Kota Kupang 22 Atlet, 2). PSK Kab. Kupang, 22 Atlet, 3). Perss Soe, 22 Atlet, 4). Persab Belu, 22 Atlet, 5). Persema Malaka, 22 Atlet, 6). Persada Sumba Barat Daya, 7). Persim Manggarai 22 Atlet, 8). Perseftim Flores Timur 22 Atlet, 9). Perse Ende 22 Atlet, 10). PSN Ngada 22 Atlet, Hasil Pertandingan: 1). Juara Umum 1 Kab. Ngada, 2). Juara Umum II Kab. Kupang, 3). Juara Umum III Kab. TTS, 4). Juara umum IV Kab. Ende, 5). Team Fair Play Kabupaten TTS, 6). Top Scoore Oktovianus pone, 7). Pemain terbaik Oktovianus Pone;
- Terlaksananya Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar di Hotel Romita, Tanggal 8 – 9 September 2018, jumlah peserta 67 orang dari 7 Cabang Olahraga yakni: 1). Cabor Atletik 15 Pelatih, 2). Cabor Tinju 12 Pelatih,



- 3). Cabor Taekwondo 13 Pelatih, 4). Cabor Pencak Silat 10 Pelatih, 5). Cabor Kempo 5 Pelatih, 6). Cabor Tarung Derajat 5 pelatih, 7). Cabor Futsal 5 pelatih, 8). Cabor Sepak Bola 2 pelatih. Narasumber/Instruktur : 1. Dr. Jhoni Lumba,S.Pd.M.Pd dan Dr. Lukas Boleng S.Pd, M.Kes, AIFO, dan Nara Sumber Kecabangan 5 orang.Hasil Pelatihan: 1). Peserta dapat menjelaskan dan mempraktekan dengan baik tentang proses pelatihan kepada atlet dengan baik, 2). Peserta dapat menginternalisasi masing masing program pelatihan dengan baik, 3). Peserta mampu mengimplementasikan dalam proses pembinaan /pelatihan di cabangnya masing masing dengan baik;
- Terlaksananya Pekan Olahraga Memperingati HUT ke 60 Provinsi NTT di kota kupang, tanggal 19 November – 5 Desember 2018, jumlah cabang olahraga yang di pertandingkan ada 5 cabor yakni: 1). Atletik 5 Km , dan Atletik 10 Km, 2). Tinju di lapangan Tennis PUPR Prov.NTT, 3). Futsal di Gor Futsal Oipoi kupang, 4). Taekwondo di Aula Benboi Kupang, 5). Kempo di Gor Futsal Oipoi Kupang, Jumlah Peserta 2.200 Atlet dengan hasil pertandingan sebagai berikut: I) **Cabang Shorinji Kempo** Juara Umum I dari Dojo Kota A, 16 emas, 21 perak, 10 perunggu , 2) Juara Umum II dari Dojo Kota B,16 Emas, 9 perak, 19 Perunggu, 3) Juara Umum III dari Dojo Kota C, 15 Emas, 22 Perak, 16 Perunggu, II). Cabor Taekwondo Juara Umum I Kategori Pra Junior dari Dojang SMKN 1 Kupang 6 emas, 4 perak, 6 perunggu, 2). Juara Umum II dari Dojang BTC 6 emas, 4 perak, 5 perunggu, 3). Juara Umum III SDI Fatufeto 3 emas, 4 perak, 7 perunggu,
- CaborTaekwondo** Juara Umum I Kategori Junior yakni: 1). Juara Umum I dari Kabupaten Kupang, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu, 2). Juara Umum II dari SMKN 1 kupang, 3 emas, 2 perak, 1 perunggu, 3). Juara Umum III dari BTC, 3 emas, 1 perak , 4 perunggu, Taekwondo Juara Umum I Kategori Senior: 1). Juara Umum I dari BTC, 8 emas, 2

- perak, 1 perunggu, 2). Juara Umum II dari SMA 3 Kupang, 2 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu, 3). Juara Umum III dari kabupaten TTS, 1 emas, 4 perak, 4 perunggu., Juara dari **Cabang Atletik** yakni: 1). Juara I Mateus Wuli, 2) Juara II Omri Sina, 3), Juara III Marselino Fallo, 4). Juara IV Oktovianus Talo, **Cabang Futsal : 1).** Juara Umum I Inerie Futsal Club, 2) Juara Umum II IFF Futsal Club, 3). Juara Umum III Tangueray Futsal Club, 4). Juara Umum IV Rizky Futsal, 5). Juara Umum V JS Futsal Foundation, 6). Juara Umum VI Petir Futsal Club, 7). Tim Fair Play Landas Futsal Club, 8). Top Scoore Gregorius Boesele, 9). Best Player Ardy Nifu, **Cabang Tinju:** 1). Juara Umum I Kabupaten Belu, 2). Juara Umum II Kabupaten TTS, 3). Juara Umum III Kota Kupang, 4). Petinju Terbaik Lucky Hari Kota Kupang, 5). Petinju Faforit Erman Bere Kab. Belu, 6). Petinju Harapan Calvin Sir Kabupaten Alor;
- Terlaksananya Kejuaraan **Shorinji Kempo** Mangopura Cup I di Bali bertempat Tanggal 27 Juni – 2 Juli 2018 jumlah atlet yang mengikuti pertandingan sebanyak 12 atlet terdiri dari Atlet PPLD (10 orang), Atlet PPLM (2 orang), Pelatih (PPLD 2 orang, Pelatih PPLM 1 orang) dan pendamping dari dispora 1 orang, adapun hasil perolehan medali yakin: 7emas, 1 Perak, 4 Perunggu,dengan rincian sebagai berikut:1). Medali emas kategori Randori kelas 70 kg atas nama Toba Rajaguguk, medali emas, 2) Katagori embu Niken Dakamuli, 3). Shendy Toh kategori Embu, 3). Lydia Ludji Kategori Embu, 4). Putri Radja Huki kategori embu 2 mas, 5). Bella Lomi kategori Embu, 6). Lasim Djati Kategori Randori kelas 60 Kg medali perak, Fandri Ragalawa, kategori Randori kelas 65 Kg, 7). Putri Raja Huki kategori embu medali perunggu, 8). Bela Lomi kategori embu medali perunggu;
 - Terlaksananya **Kejuaraan Atletik** tahun 2018 dilaksanakan selama 6 hari terhitung tanggal 6 s.d 12 Mei 2018 di Jakarta, Jumlah Pelatih PPLD dan PPLMD cabang Atletik 1 (orang) 1). 1 emas, 6 perak, 5 perunggu, dengan rincian

sebagai berikut: 1) Delvita Baku 1 medali emas, 2). Meri M. Paijo 1 medali perak, 3). Delvita baku 2 medali perak, 4). Nufriana Taunus 1 mperak, 5). Apsonia Bell 1 perak, 6). Maria m Paijo 1 perunggu, 7). Nofriana Taunus 1 perunggu, 9). Absonia bell 1 perunggu;

- Terlaksananya **Kejuaraan Kepri Open Taekwondo Championship** bertempat di Kepri, tanggal 2 s/d. 7 Agustus 2018, jumlah pelatih PPLD dan PPLMD 2 (dua) orang atas nama Dudy Baranuri, SE, Roynaldi Hamat, atlet PPLD dan PPLM NTT berjumlah 7 orang, hasil perolehan medali: 3 emas, 1 Perak, 1 perunggu, dengan rincian sebagai berikut: 1). Paskalis Risky Saban 1 emas, 2). Harry Daniel 1 emas, 3). Fenisia Suseno 1 emas, 4). Pasti Putri Mamun 1 perak, Yasvin Mahben 1 perunggu;
- Terlaksananya **Kejuaraan Nasional Sudirman Pencak Silat** antar PPLP/PPLPD Tahun 2018 di Kota Semarang, pada tanggal 13 s.d. 18 Juli 2018, selama 6 (enam) hari, pelatih 1 orang, jumlah atlet 5 (lima) orang, Hasil perolehan medali 1 emas, 2 perak, an 1). Jeni Elvis Kause, 2). Kholil Aklis;
- Terlaksananya **Kejuaraan Tinju Amatir Elite** yang di ikuti oleh atlet PPLD dan PPLMD, pada tanggal 3 s/d 12 Desember 2018 di lampung, selama 10 (sepuluh) hari, pelatih 1 orang David Harry, jumlah atlet 5 (lima) orang, Hasil perolehan medali, 1 perak, 2. perunggu, nama atlet yang memperoleh medali yakni: 1). Margarita Nata 1 perak, 2). Albertus Taralandu 1 perunggu, 3). Jefry Hitarihun 1 perunggu;
- Terlaksananya **Kejuaraan Terbuka Karate Nasional** yang di ikuti oleh atlet PPLD dan PPLMD, pada tanggal 31 Oktober 4 November 2018 selama 4 (empat) hari, pelatih 1 orang, jumlah atlet 2 (dua) orang, Hasil perolehan medali, 1 perak, 1 Perak, 1 perunggu, nama atlet yang memperoleh medali yakni: 1). Soleman Runteh 1 emas, 2). Anis Tefa 1 Perak, 3). W Benoe 1 Perunggu.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 118 orang, dengan kualifikasi:

- a) Latar belakang pendidikan:
SD = 1 orang; SLTP = 3 orang; SLTA = 43 orang; Diploma = - orang; Sarjana = 64 orang; Magister = 7 orang ; Doktoral = - orang.
- b) Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 9 orang; Golongan III = 72 orang; Golongan II = 20 orang; Golongan I = 3 orang.
- c) Pejabat Stuktural: 25 orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 18 orang.
- d) Pejabat Fungsional: - orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Pemuda dan Olahraga yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
3.	Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan:

- a) Masih kurangnya koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi dengan kabupaten/Kota tentang sinergitas Program Kepemudaan dan Kelolahragaan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada beberapa Kab/kota.



- b) Data perkembangan kepemudaan dan keolahragaan yang diperoleh dari Kab/Kota sebagai acuan dalam pembinaan yang berkelanjutan sangat kurang, karena kurangnya dukungan dana dalam rangka pendataan, koordinasi, identifikasi/verifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kab/Kota;
- c) Lemahnya Sumber Daya Manusia sebagai akibat dari Dinas Pemuda dan Olahraga baru dibentuk pada tahun 2014 termasuk sebagai Aparatur yang membidangi Kepemudaan dan Keolahragaan adalah Aparatur yang dimutasi sehingga kurang memahami hal-hal teknis kepemudaan dan keolahragaan;
- d) Terbatasnya Sarana Olahraga yang dimiliki turut mempengaruhi pertumbuhan/perkembangan atlet berprestasi dalam event Nasional maupun Internasional;
- e) Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan partisipasi didalam proses pembangunan.

Solusi:

- a) Meningkatkan koordinasi untuk penyamaan persepsi dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan;
- b) Perlu adanya dukungan Pemerintah Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota untuk membentuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga di semua Kab/Kota;
- c) Perlu adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk pendataan, koordinasi, identifikasi/verifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten/Kota sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam pembinaan yang berkelanjutan;
- d) Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur yang membidangi teknis Kepemudaan dan Keolahragaan perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pembinaan, di Pusat, Provinsi dan di daerah;
- e) Untuk mendapatkan atlet berprestasi yang mampu bersaing pada event Nasional dan Internasional perlu adanya dukungan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi berbagai kekurangan Sarana Olahraga yang turut mempengaruhi pertumbuhan/perkembangan atlet berprestasi dalam event Nasional maupun Internasional.



7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.385.038.760,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.328.013.679,- (95,88%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.8.505.700.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.8.204.235.520,- (96,46%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.30.677.240,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.29.832.000,- (97,24%)

URUSAN STATISTIK.

Urusan Statistik masih merupakan urusan Pemerintah Pusat, namun urusan ini dalam pelaksanaanya di daerah tetap dilaksanakan sebatas koordinasi untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan urusan tersebut.

URUSAN KEBUDAYAAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - Alokasi Anggaran : Rp.4.711.763.362,-
 - Realisasi : Rp.4.630.167.790,- (99,24%)
 - 1) Kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
 - Alokasi Anggaran : Rp.198.161.212,-
 - Realisasi : Rp.196.261.070,- (99,04%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya data dan dokumen Warisan Budaya TakBenda (WBTB) yang akan diusulkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Nasional pada tahun 2019;



- Adanya 1 (satu) rekomendasi Pemajuan Kebudayaan;
 - Tersusunnya 1 (satu) laporan.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.
- Alokasi Anggaran : Rp.232.968.000,-
 - Realisasi : Rp.230.883.400,- (99,11%)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya hasil kajian tradisi megalitik yang berkaitan dengan Kampung Adat;
 - Terlaksananya penelitian Ekskavasi/Penggalian tentang tinggalan budaya dan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya;
 - Tersedianya 1 buah Naskah yang di susun dalam bentuk buku Sistem Pemerintahan Tradisional;
 - Adanya 1 buah naskah yang disusun dalam bentuk buku Sejarah Pejuang Lokal;
 - Adanya 1 buah naskah yang disusun dalam bentuk buku Sistem Pengetahuan Tradisional.
- 3) Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.
- Alokasi Anggaran : Rp.96.120.000,-
 - Realisasi : Rp.95.970.000,- (99,84%)
 - Capaian/Hasil :

Adanya data dan informasi tentang wujud dan jenis bahasa daerah dan lingkup Budaya orang Manggarai Timur serta materi muatan lokal sebagai reverensi bagi mahasiswa;
- 4) Kegiatan Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Daerah serta Pameran Museum Daerah.
- Alokasi Anggaran : Rp.471.047.400,-
 - Realisasi : Rp.458.825.900,- (97,41%)
 - Capaian/Hasil :
 - Masyarakat dapat memahami pelestarian nilai-nilai tradisi leluhur dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur;
 - Terpublikasinya informasi berbagai koleksi kain tenun yang ada di Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat tingkat Nasional;



- Terpublikasinya informasi berbagai alat musik yang ada di Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat tingkat Nasional;
- Terseleksinya tim/sekolah terbaik dengan peringkat: juara I SMPK Sta. Theresia Kupang, juara II SMPK St. Yoseph Kupang dan juara III SMP Kristen Citra Bangsa Kupang;
- Adanya 1 Dokumen dalam bentuk CD Visualisasi Ritual Tinju Tradisional (Etu).
- Terkoleksinya tenun pengadaaan Tahun 1991/1992 - Tahun 1993/1994 sebanyak 238 lembar kain tenun yang menghasilkan 1 (satu) paket katalog manual dan 1 (satu) paket digital;
- Perawatan Koleksi Kayu berjumlah koleksi sebanyak 229 buah terdiri dari 108 buah peralatan makan dan minum, 38 buah perkakas rumah tangga, 55 buah patung dan miniatur, 18 buah topeng dan 10 buah tiang rumah adat;
- Terlaksananya Pameran Kain Tenun Nusantara tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 23 Oktober 2018 di Bandung;
- Adanya pengenalan museum kepada 100 siswa dari 25 TK/PAUD di Kota Kupang dan serta adanya MoU antara Dinas Kebudayaan Provinsi NTT dan Sekolah TK/PAUD di Kota Kupang agar mengunjungi museum secara reguler
- Terwujudnya data hasil penyuntingan tarian asli daerah dalam bentuk CD;
- Tersedia Brosur dan Leaflet Museum sebanyak 500 exemplar sebagai tujuan dari memperkenalkan museum dan koleksi- koleksi benda budaya di NTT.

5) Kegiatan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- Alokasi Anggaran : Rp.43.049.250,-
- Realisasi : Rp.43.049.250,- (100%)
- Capaian/Hasil :

Adanya pencerahan kepada para guru dan siswa/i tentang film documenter berkarakter dalam menumbuhkan aspirasi 18 nilai karakter yang mengilhami dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang terdiri dari guru-guru pendamping dan pelajar tingkat



SMP dan SMA dengan judul film yang diputar adalah CENDANA dan JIKA AKU BISA karya Bapak Piter Kembo .

6) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.414.755.000,-
- Realisasi : Rp.403.192.170,- (97,21%)
- Capaian/Hasil :
 - Terpilihnya juara terbaik tingkat TK/PAUD, SD, SMP dan SMA masing-masing 6 katagori dan Pagelaran seni musik terpilih 3 penyaji terbaik dan tari terpilih 6 penyaji terbaik.

- Adanya 1 dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7) Kegiatan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan.

- Alokasi Anggaran : Rp.184.938.500,-
- Realisasi : Rp.183.769.500,- (99,37%)
- Capaian/Hasil :

Adanya 1 (satu) rekomendasi yang disepakati bersama pada Dialog Kebudayaan (Dialog para pewaris kerajaan, pemangku adat, tokoh masyarakat, budayawan, akademisi dan pemerhati budaya sedaratan Timor, Sikka, Sumba Timur dan Lembata) yang dilaksanakan di Kota Kupang dengan peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari unsur Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pimpinan OPD terkait), Pemangku Adat, Akademisi dan Budayawan.

8) Kegiatan Upaya Peningkatan Pengembangan Keragaman Budaya.

- Alokasi Anggaran : Rp.3.070.724.000,-
- Realisasi : Rp.3.018.216.500,- (98,29%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi dan Pekan Budaya di Taman Budaya Gerson Poyk Kota Kupang, yang diikuti oleh 22 grup Kesenian dari Kab./Kota se-NTT dengan hasil Penyaji terbaik I Kota Kupang, Penyaji terbaik II Kab. TTS, Penyaji terbaik III Kab. Rote Ndao, Penyaji IV terbaik Kab. Belu, Penyaji terbaikV Kabupaten Lembata dan Penyaji terbaik VI Kabupaten Nagekeo;



- Terlaksananya Temu Karya Taman Budaya Tingkat Nasional yang dilaksanakan dari tanggal 11 - 15 September 2018 bertempat di Alun-alun Kota Palangkaraya dan Taman Budaya Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta terdiri dari 10 orang penari, 7 orang pemusik, 1 orang penata tari, 1 orang penata rias busana dan 1 orang penata musik dengan menyajikan tarian garapan baru “Blebuk Waebuang Tibolameng” berasal dari Kabupaten Sikka;
- Adanya 2 (dua) buah penghargaan (Penata Gerak Terbaik dan Penyaji Unggulan) untuk kontingen NTT pada Pawai Budaya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Peserta terdiri dari 25 orang penari, 7 orang pemusik, 3 orang penata rias/busana, dengan judul Tari “Hodi Kotek” berasal dari etnis Flores Timur;
- Adanya 2 (dua) buah penghargaan sebagai penyaji terbaik untuk kontingen NTT pada Pagelaran Festival Budaya Daerah (Parade Tari) yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 21 Agustus 2018 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Peserta terdiri dari 10 orang penari, 8 orang pemusik, 1 orang penata tari, 1 orang penata rias busana dengan menyajikan tarian garapan baru “Moko Nona”;
- Terlaksananya Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi (Pameran Lukis) yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 20 Oktober 2018 bertempat di Galeri Oko Mama Taman Budaya Kota Kupang yang diikuti 20 perupa dengan menampilkan lukisan sebanyak 45 buah;
- Terpilihnya terpilihnya 4 orang perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Peserta Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dalam rangka HUT RI ke-73 di Jakarta;
- Diperolehnya penghargaan sebagai Penyaji Terbaik (salah satu dari 5 Provinsi yang masuk dalam kategori Penyaji Terbaik) dari 22 Provinsi pada Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional (Konser Kerawitan Muda Indonesia) bertempat di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, dengan membawakan musik berjudul Karya Kita Indonesia dari kabupaten Sikka;



- Adanya 4 (empat) penghargaan (salah satu dari 10 Penampil Terbaik, 5 Penyanyi Unggulan, 5 Penata Musik Unggulan dan 5 Pencipta Lagu Unggulan) pada Parade Musik Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Desember 2018 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Peserta terdiri dari 3 orang Penyanyi, 2 orang penari latar, 10 orang Pemusik, 2 orang penata rias busana, 1 orang penata artistik dan 2 orang official dengan menyajikan Tema lagu : tentang cinta damai / kerukunan beragama berjudul *Indonesia Ma Mbeda Leo* Karya : Izoe Nisnoni, S.Art;
- Peserta mendapatkan wawasan dalam merancang dan membuat tenun ikat menjadi sebuah fashion sehingga dapat bersaing dengan perkembangan jaman;
- Memperkenalkan kepada masyarakat kesenian, budaya, kain tenun, dan hasil karya pakaian tenun desainer muda Provinsi NTT dengan kegiatan, Paduan suara dan musik ansambel, workshop tenun ikat (fashion dan model), demo make up, lomba NTT next top model 2018, tarian dari 15 kabupaten/kota, seni instalasi tenun (pembuatan tenun ikat), tenun fashion carnival eksotika alor.

b) Program Pengembangan Nilai Budaya.

- Alokasi Anggaran : Rp.1.185.225.300,-
- Realisasi : Rp.1.148.507.861,- (99,16%)

1) Kegiatan Peningkatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

- Alokasi Anggaran : Rp.256.339.800,-
- Realisasi : Rp.255.363.740,- (99,60%)
- Capaian/Hasil :
 - Revitalisasi/Pemugaran Rumah Adat/Gendang Kaca, Desa Wae Ajang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;
 - Revitalisasi/Pemugaran Rumah Adat/Gendang Wol, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Kab. Manggarai Barat;
 - Revitalisasi/Pemugaran Rumah Adat/Gendang Kotok, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.;



- Terdatanya aliran-aliran Kepercayaan di beberapa etnis di Desa Bangpolo Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Probur dan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Suku Abui yang meliputi Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Mataru, sebagian Kecamatan Alor Barat Daya dan sebagian Kecamatan Alor Selatan dan bagian utara Kecamatan Teluk Mutiara, Etnis Kamang yang meliputi wilayah Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Lembur, Etnis Kamang yang meliputi wilayah Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor selatan dan Inventarisir Komunitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Belu dengan lokasi dikampung Adat Matabesi dan Desa Naekasa.

2) Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.

- Alokasi Anggaran : Rp.901.825.500,-
- Realisasi : Rp.893.144.121,- (99,04%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksanannya Penganugerahan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 untuk para budayawan dengan 5 kategori yaitu pelestari, komunitas, pemerintahan daerah, pelopor pecinta dan pembaru, anak dan remaja;
 - Terlaksananya pemberian insentif bagi juru pelihara Cagar Budaya yang berjumlah 73 orang mengelola/menjaga 71 Cagar Budaya di 22 kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Hasilnya adalah Terpeliharanya Cagar Budaya yang terletak di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi NTT.

3. **Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.**

Jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pertanggal 31 Desember 2018 sebanyak 119 orang yang terdiri dari 70 orang ASN, 2 orang CPNS, dan 47 orang Tenaga Kontrak (Honorar) dengan kualifikasi ASN dan CPNS sebagai berikut :



- a) Latar belakang pendidikan :
SD = 3 orang; SLTP = 2 orang; SLTA = 33 orang; Diploma = 2 orang;
Sarjana = 28 orang; Magister = 4 orang.
- b) Pangkat/Golongan :
Golongan IV/a = 4 orang, Golongan IV/b = 2 orang, Golongan IV/c = - orang, Golongan IV/d = 1 orang, Golongan III/a = 6 orang, Golongan III/b = 24 orang, Golongan III/c = 4 orang, Golongan III/d = 16 orang, Golongan II/a = 2 orang, Golongan II/b = 6 orang, Golongan II/c = 4 orang, Golongan II/d = - orang, Golongan I/a = - orang, Golongan I/b = 2 orang, Golongan I/c = 1 orang, Golongan I/d = - orang.
- c) Pejabat Stuktural : 15 orang
Eselon II = 1 orang, Eselon III = 4 orang, Eselon IV = 10 orang
- d) Pejabat Fungsional : - orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Sesuai Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi NTT untuk Urusan Kebudayaan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1.	-	Program Pendidikan Non Formal
2.	-	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
3.	-	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan
4.	-	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6.	-	Program Hibah Pendidikan
7.	-	Program Bantuan Sosial Kependidikan
8.	Program Pengembangan Nilai Budaya	-

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:

Sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk menopang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan belum memadai, sehingga perlu menjadi perhatian serius yaitu : komputer, laptop, meja rapat, sound sistem, tempat penyimpanan koleksi museum, alat pemadam kebakaran dan panggung budaya.



6. Permasalahan dan Solusi:

Terhadap program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berjalan dengan baik, meski masih terdapat hambatan/masalah sebagai berikut :

- a) Kemampuan Sumber daya manusia masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan.

Solusi:

- 1) Perlu mengikuti Bimtek dalam peningkatan kapasitas aparatur;
 - 2) Perlunya penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan keahlian.
- b) Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana bagi pemajuan kebudayaan.

Solusi:

- 1) Perlu dukungan anggaran guna melaksanakan program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan generasi muda agar dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
 - 2) Terbatasnya sarana prasarana kerja berupa komputer, Laptop dan sarana penunjang yang lain untuk masing-masing bidang.
- c) Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda telah terbentuk namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak didukung anggaran, sarana dan prasarana.

Solusi:

Tim ahli yang terbentuk agar dapat didukung dengan anggaran dan sarana prasarana agar segera melakukan tupoksinya.

- d) Belum terbentuknya lembaga kebudayaan yaitu Dewan Kebudayaan Daerah

Solusi:

Membentuk Dewan Kebudayaan Daerah untuk memajukan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.1.693.140.720,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.1.688.522.986,- (99,73%)



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.556.778.218,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.556.679.500,- (99,98%).
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.26.000.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.26.000.000,- (100%).

URUSAN PERPUSTAKAAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.594.053.400,-
 - Realisasi : Rp.1.515.649.780,- (95,08 %)
 - 1) Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
 - Alokasi Anggaran : Rp.872.118.000,-
 - Realisasi : Rp.833.375.480,- (95,56 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersosialisasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 14 tahun 2014 tentang pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno tahun 2018 di laksanakan di Kab.Manggarai pada tanggal, 10 Agustus 2018 dengan hasil kegiatan berupa pendaftaran pemberian penghargaan naskah kuno kepada 25 orang peserta;
 - Meningkatnya Pemustaka/masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan koleksi bahan pustaka, layanan intern (layanan dalam perpustakaan) dan internet gratis selama Bulan Januari - Desember 2018.



- Terhimpunya 41 judul = 49 eksemplar karya cetak karya rekam hasil hunting, yang terdiri dari 34 judul = 42 eksemplar karya cetak dan 7 judul = 7 eksemplar karya rekam;
- Tersusun dan diterbitkannya 1 naskah “Cerita Rakyat Kabupaten Manggarai Barat” dalam 2 (dua) bahasa yang berisikan 7 (tujuh) cerita;
- Telah dientri 500 eksemplar koleksi deposit kedalam data base Koleksi;
- Terlatihnya 20 (dua puluh) orang pustakawan dan pengelola Perpustakaan se-kabupaten dan kota kupang dalam hal pengelolaan karya cetak dan karya rekam;
- Tersedianya Koleksi Umum untuk Dinas Perpustakaan Provinsi NTT: 350 judul = 1050 eksemplar;
- Terseleksinya 850 judul : 2.450 eksemplar;
- Telah dilakukan workshop klasifikasi dan katalogisasi selama 3 hari, yaitu dari tanggal 24 s/d 26 Juli 2018, dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari sekolah Menengah Atas se-kota kupang;
- Terlaksananya gemar dan budaya baca masyarakat didik (Pelajar, Guru dan Pegawai) dengan pengunjung sebanyak: Laki-Laki 1.308 orang, Perempuan 1.693 orang, Total Pengunjung 3.001 Orang;
- Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi masyarakat didik pada Perguruan tinggi dan SLTA melalui Layanan Mobil Perpustakaan Keliling;
- Melayani 50 KK Miskin yang tersebar di 5 (lima) Kelurahan dalam Kota Kupang, dimana tiap kelurahan mendapat jatah 10 KK Miskin dengan tiap- tiap KK Miskin mendapat 5 (lima) Judul / Eksemplar koleksi bahan pustaka yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu 1 bulan dan dilakukan selama 2 kali dalam setahun melalui Layanan Perpustakaan Kunjung;
- Terlaksananya Penagihan keterlambatan pengembalian buku secara langsung ke pemustaka dengan rincian Petugas dapat menagih pada 89 Orang Pemustaka dan

Buku yang berhasil di tagih sebanyak : 97 Judul / 97 Ekspir;

- Tersedianya Jejaring Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi di kota Kupang dengan menghasilkan 22 MOU dan beberapa kerja sama;
- Terpilihnya pemenang/juara lomba cerdas cermat siswa SD/MI tahun 2018 juara I SDK Don Bosco 1 Kota Kupang, Juara II SDN Naikoten 1 Kota Kupang, Juara III SDI Bertingkat Kelapa Lima 1 Kota Kupang, Juara harapan I SDN Bonipoi 1 Kota Kupang, juara Harapan II SDK Santa Maria Asumpta Kota Kupang dan juara Harapan III SDI Naikoten 1 Kota Kupang.
- Terpilihnya Pemenang/Juara Pemilihan Duta Baca Anak dan Remaja siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas peringkat 1 sampai dengan 5 Tingkat Provinsi NTT tahun 2018;
- Terpilihnya 6 (enam) orang pemenang pada lomba pidato bagi siswa SLTA dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang;
- Penilaian dan Pemberian hasil angka kredit kepada 18 Pustakawan terdiri dari Dinas Perpustakaan Prov. NTT 14 orang, Perpustakaan Kab. Manggarai Timur 1 orang, Politeknik Undana 2 orang, Humas Prov. NTT 1 orang;
- Terbinanya 50 orang tenaga pustakawan dan calon pustakawan di Provinsi NTT;
- Terbina dan tertatanya 24 (Dua Puluh Empat) buah Perpustakaan Sekolah tingkat SLTA, dan 1 Perpustakaan Desa pada 11 Kabupaten/Kota se - NTT yang menjadi sasaran pembinaan Provinsi;
- Terdatanya perpustakaan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) buah perpustakaan sekolah, dan 1 buah perpustakaan Desa di Kabupaten Kupang yang telah dibina dan ditata sesuai standar pelayanan perpustakaan, serta siap untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.;



- Dihilangkannya Koleksi SMA Swasta 100 judul = 200 eksemplar;
- Terlatihnya Peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah di 43 SMU dan 10 SKM di setiap kabupaten;
- Adanya pemahaman dan kebijakan untuk mewujudkan otomasi di setiap perpustakaan sekolah;

2) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/ Kelurahan.

- Alokasi Anggaran : Rp.351.670.000,-
- Realisasi : Rp.330.634.960,-(94,02%)
- Capaian/Hasil :
 - Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka sebanyak 21 orang Pengelola Perpustakaan Sekolah, Guru, Instansi, dan Perpustakaan Umum sederatan Sumba, namun hanya 2 (dua) kabupaten yang mengirim peserta yaitu: Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya (Kab. Sumba Tengah dan Sumba Barat) tidak mengirimkan peserta;
 - Adanya 1 (satu) buah rekomendasi hasil rapat Koordinasi Perpustakaan dilaksanakan di Kab Sikka melibatkan seluruh perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kab/Kota;
 - Adanya 1.500 koleksi/buku yang rusak telah diperbaiki dan diserahkan kepada Bidang Layanan untuk dilayankan kepada pemustaka;
 - Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah sebanyak 48 bundel koran, yang telah dipajang untuk kepentingan pemustaka;
 - Tersedianya 1500 koleksi perpustakaan (buku) telah difumigasi dan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Layanan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka;
 - Terwujudnya SDM bagi 5 orang dalam mengikuti magang dan pembelajaran (Paket Pelatihan Aplikasi : SIM Berbasis MARC, Website, Interoperabilitas, Operator Networking, Operator Server Administration, Developer Web Programming, Developer Database Programming, Chief Information Officer (CIO).



3) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan.

- Alokasi Anggaran : Rp. 339.929.000,-
- Realisasi : Rp. 324.289.340,- (95,40%)
- Capaian/Hasil :
 - Meningkatnya pemahaman dan keterampilan bagi 150 orang pengelola perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kab. Sumba Timur, dan Kab. Lembata;
 - Meningkatnya pemanfaatan bahan pustaka sebanyak 140%;
 - Terlaksananya penyampaian informasi/postingan berita/artikel sebanyak 50 (lima puluh) halaman;
 - Tercapainya kunjungan online sebanyak 36.073 user;
 - Adanya pemahaman dan kebijakan penganggaran untuk penyediaan infrastruktur otomasi untuk terwujudnya otomasi di setiap Perpustakaan Pemerintah Daerah menuju interoperabilitas menuju Connect NTT;
 - Terlaksananya peluncuran Otomasi Perpustakaan oleh 2 (Dua) Kabupaten yaitu: Manggarai Barat dan Manggarai;
 - Terlaksananya magang dan pembelajaran sebanyak 1 org;
 - Terpeliharanya printer keanggotaan;
 - Terpenuhinya standar layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas;
 - Terpenuhinya standar layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas;
 - Tercapainya pemeliharaan hardware pada 6 unit komputer server dan 30 unit komputer client selama 1 tahun;
 - Tercapainya pemeliharaan software aplikasi perpustakaan berbasis MARC selama 1 tahun;
 - Tercapainya pemeliharaan sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi , website, dan android;
 - Terlaksananya Lembur pelayanan internet gratis sebanyak 5 orang selama 12 bulan;
 - Meningkatnya pemahaman terlaksananya Lembur pelayanan internet gratis sebanyak 5 orang selama 12 bulan;

- Terlaksananya Koordinasi/Evaluasi Program dan kegiatan dalam rangka alih media koleksi perpustakaan sebanyak 2 paket kegiatan di Jakarta;
- Terkumpulnya Bahan Alih Media Non Buku di Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Timur, dengan hasil memperoleh koleksi-koleksi non buku yang bernilai sejarah dalam bentuk foto dan video tentang kebudayaan daerah setempat;

4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

- Alokasi Anggaran : Rp. 30.336.400,-
- Realisasi : Rp 27.350.000,- (90,16%)
- Capaian/Hasil :

Adanya 1 (satu) Dokumen Profil Perpustakaan (11 Kab/Kota)

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 73 orang, dengan kualifikasi :

a) Latar belakang pendidikan :

SD = 1 orang; SLTP = 0 Orang; SLTA = 29 orang; Diploma = 6 orang; Sarjana = 32 orang; Magister = 3 Orang..

b) Pangkat/Golongan :

Golongan IV = 13 orang; Golongan III = 43 orang; Golongan II = 16 orang; Golongan I = 1 Orang.

c) Pejabat Stuktural : 14 orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 8 orang

d) Pejabat Fungsional : 14 orang

13 orang (Pustakawan) dan 1 Orang (Pranata Humas)

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Perpustakaan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/ Masyarakat Minat Dan Kebiasaan Membaca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/ Masyarakat Minat Dan Kebiasaan Membaca

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** Kurang mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:**

Permasalahan:

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana, pengelola dan pustakawan;
- b) Alokasi anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan pelayan dan untuk mencapai target yang ditetapkan pada Renstra;
- c) Kurangnya apresiasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d) Pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi perpustakaan masih terbatas;
- e) Minat dan kebiasaan membaca masyarakat masih rendah.

Solusi:

- a) Terus mengupayakan peningkatan sarana / prasarana melalui Perpunas maupun Pemda dan mengupayakan kesempatan kepada para pengelola perpustakaan dan pustakawan untuk meningkatkan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
- b) Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan mutu pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyelenggarakan berbagai lomba dan even untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat;
- d) Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota dalam rangka sinergitas program/ kegiatan;
- e) Melakukan publikasi dan sosialisasi kepustakawanan melalui berbagai media;

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:.**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.700.611.300,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.599.974.720,- (85,64%)



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.225.573.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.216.885.316,- (96,15%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.22.528.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.21.017.000,- (93,29%)-

URUSAN KEARSIPAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib adalah Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Per Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Program Peningkatan Sistim Informasi Administrasi dan Kearsipan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.1.447.008.976,-,-
 - Realisasi : Rp.1.381.908.370,- (95,50%)
- 1) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kearsipan.
 - Alokasi Anggaran : Rp.240.559.000,-,-
 - Realisasi : Rp.223.670.370,- (92,98 %)
 - Capaian/Hasil :
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara/Arsiparis yang profesional (1 orang Fungsional Arsiparis dan 2 orang Fungsional Umum dari Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip);
 - Tersedianya Panduan Kerja seksi Sistim Informasi Kearsipan Dinas Kearsipan Provinsi NTT;
 - Tersedianya E Arsip di 13 Kabupaten (Kabupaten Sikka, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Ende, Negekeo, Lembata, Sabu Rai Jua dan Malaka);
 - Tersedianya 18 orang jabatan Fungsional Arsiparis dan 7 orang Fungsional Umum tenaga Admin SIKS Tingkat Prov.NTT dan Instruktur SIKS menuju E Arsip Prov. NTT;



- Pameran Arsip Citra Budaya Daerah NTT dalam rangka HUT RI ke 73 bertempat di NTT FAIR, Jln. Timor Raya depan ex Restoran Teluk Kupang-Kota Kupang NTT;
- Tersebar nya informasi akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam bentuk (Foto-foto bersejarah, Foto Gubernur dan Wakil Gubernur dari masa ke masa, Kegiatan Dinas Kearsipan Provinsi NTT Tahun 2017) dan Pameran Internal Kearsipan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Aula El Tari Kupang;
- Terlaksananya Dialog Interaktif bertempat di Aula RRI, Jl. Tompelo Kupang dengan Tema Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
- Tersebar nya informasi kearsipan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kearsipan.

2) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Kearsipan.

- Alokasi Anggaran : Rp.996.449.976,-
- Realisasi : Rp.948.238.000,- (95,16 %).
- Capaian/Hasil :
 - Terseleksinya 3 SKPD (Juara I: Dinas PU dan Tata Ruang Prov.i NTT, Juara II: Dinas Sosial Prov. NTT, Juara III: Badan Penanggulangan Bencana Prov. NTT) sebagai SKPD pengelolaan arsip terbaik di Lingkup Pemprov NTT;
 - Tersedianya data dan informasi serta literatur terkait pengelolaan Ormas/Orpol, Perusahaan dan Lembaga Pendidikan;
 - Terselenggaranya temu konsultasi mekanisme kerja unit kearsipan;
 - Bertambahnya data arsip tentang Ormas/Orpol/ Perusahaan dan Lembaga Pendidikan;
 - Diperolehnya Informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT di Bidang Kearsipan, Informasi dari ANRI terkait Regulasi, Kebijakan dan Strategis bidang kearsipan oleh Pemerintah Pusat, dan 13 (tiga belas) kesepakatan rumusan rekomendasi laporan hasil sinkronisasi Program dan kegiatan kearsipan;



- Dilakukan pemusnahan arsip di tempat pencacahan kertas, milik CV. Valentine Jln. Tuak Daun Merah Oebufu- Kupang sebanyak 213 box dihadiri 3 saksi dari Biro Hukum Sekda Provinsi NTT, Inspektorat Provinsi NTT dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing 1 orang;
- Meningkatkan pengetahuan kesadaran Pengelola arsip, untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Provinsi NTT sebanyak 50 (lima puluh) orang dari Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Tersedianya layanan informasi dan fisik arsip yang outentik dan terpercaya, dan tersedianya E- Arsip
- Adanya Informasi tentang kebijakan Pemerintah Provinsi NTT di Bidang Kearsipan, Regulasi, kebijakan dan strategi bidang kearsipan oleh Pemerintah Pusat dan terbangunnya kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota se NTT dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kearsipan.

3) Kegiatan Penelusuran Citra Budaya Daerah tentang Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

- Alokasi Anggaran : Rp.210.000.000,-
- Realisasi : Rp.210.000.000 (100%)
- Capaian/Hasil :
 - Tertatanya arsip Inaktif 12 boks, arsip siap dimusnahkan 2ML, yang belum dibuatkan daftar 200 boks, dan arsip statis, Provinsi 22 boks, kabupaten 17 boks dan arsip foto 20 boks;
 - Terlaksananya Penarikan Arsip Statis pada triwulan II Bulan April sampai dengan triwulan IV bulan Oktober Tahun 2018 pada 42 Perangkat Daerah yang dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap;



- Preservasi Arsip Statis dilaksanakan pada minggu ke II bulan Nopember dengan hasil 400 lembar arsip statisalihmedia, terdiri dari : 250 lembar arsip tekstual dan 150 lembar arsip foto (yang ada pada Depot Arsip) dan Reproduksi arsip statis foto 150 lembar, hasil penarikan dari Perangkat Daerah Provinsi NTT.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 50 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a) Latar belakang pendidikan :
SLTA = 20 orang; Diploma (D3) = 1 orang; Sarjana (S1) = 27 orang; Magister = 2 orang.
- b) Pangkat/Golongan :
Golongan IV = 6 orang; golongan III = 35 orang; Golongan II = 9 orang.
- c) Pejabat Stuktural : 13 orang
Eselon II = - orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 8 orang.
- d) Pejabat Fungsional : 12 orang
Pejabatatan fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian = 3 orang dan Tingkat Terampil = 9 orang.

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Urusan Kearsipan yang di akomodir dalam RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Program dan RKPD	Program pada APBD
1.	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** Tidak memadai.

6. **Permasalahan dan Solusi:**

Permasalahan:

Dalam pengelolaan arsip statis, keberadaan Depot yang belum memenuhi standar yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Depot.

Depot Arsip sebagai tempat penyimpanan arsip dibutuhkan untuk menjamin arsip-arsip yang disimpan itu dapat terawat , terjaga, terpelihara fisik dan informasi dari arsip itu sendiri secara utuh, autentik dan terpercaya.

Solusi:

- Dinas Kearsipan Provinsi NTT terus menerus memperjuangkan kebutuhan aka Depot Arsip yang sesuai standar aturan yang berlaku melalui telaah staf ke Gubernur, Proposal Depot ke Pemerintah Pusat, namun hingga kini belum ada jawaban;
- Dinas Kearsipan Provinsi NTT dengan kondisi yang ada tetap menjalankan tugas penyelenggaraan kearsipan itu sendiri dengan tetap berpedoman pada aturan kearsipan yang berlaku.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:.**

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.382.341.824,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.347.292.464,-(90,83%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.307.229.400,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.303.653.000,- (98,84%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Alokasi Anggaran : Rp.16.734.800,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp.16.565.800,- (98,99%)



II. URUSAN PILIHAN

URUSAN PERTANIAN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani

- Alokasi Anggaran Rp.2.528.824.736,-
- Realisasi Rp.2.241.373.010,- (88,63%)

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis

- Alokasi Anggaran Rp.2.031.254.736,-
- Realisasi Rp.1.901.048.115,- (93,59%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya pelatihan teknis budidaya pertanian bagi tenaga penyuluh swadaya di 2 rayon, Rayon 1 daratan Flores di Hotel Nusantara 1 Bajawa Kabupaten Ngada tanggal 30 Mei 2018 s/d 1 Juni 2018 jumlah penyuluh 25 orang, Rayon 2 Daratan Sumba di Susteran ADM Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 30 Mei 2018 s/d 1 Juni 2018 jumlah penyuluh 19 orang.
- Terpilihnya pemenang lomba Penyuluh Pertanian PNS teladan dan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan tingkat Provinsi NTT Tahun 2018: **Penyuluh Pertanian PNS Teladan** Nama Penyuluh :Bernadus Belawa Koten, SST BPP: Rim Lema, Asal Kabupaten : Flores Timur: **Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan:** Nama Penyuluh : Agustina Dua Nona, BPP: Mego, Asal Kabupaten : Sikka

2) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

- Alokasi Anggaran Rp.497.570.000,-
- Realisasi Rp.340.324.895,- (68,40%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Bimtek Penyusunan Data Base BP3K di Hotel Naka – Kupang, tanggal 13 s/d 15 Maret 2018; tersedianya data base kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang valid hasil verifikasi dan updating dari 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur secara elektronik melalui Sistem Manajemen

Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP), terdiri dari Webside Cyber Extension, Program Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (SIMLUH) dan Program Sistem Informasi Pertanian Petani dan Kelompok Tani (SIMPOKTAN)

- Terlaksananya penyuluhan peningkatan peran dan fungsi Gapoktan di 16 Kabupaten Tahun 2018: Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.
- Terlaksananya pelatihan penyegaran bagi penyuluh pendamping kegiatan IPDMIP (*Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project*).
- Terlaksananya pelatihan bagi 7 orang tenaga penyuluh kontrak pada tanggal 1 s/d 6 Desember 2018 bertempat di Paroki Rangga, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dari Kabupaten Manggarai Barat 2 orang dan Kabupaten Manggarai Timur 5 orang.

b. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan

- Alokasi Anggaran Rp.9.713.127.100,-
- Realisasi Rp.8.888.550.216,- (91,51%)

1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu

- Alokasi anggaran Rp.3.554.871.100,-
- Realisasi Rp.3.435.596.161,- (96,64%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya perluasan/peremajaan kopi arabika seluas 100 Ha di Kabupaten Ngada 30 Ha, Manggarai Timur 30 Ha dan Alor 40 Ha.
- Tersalurnya bantuan bibit tanaman kopi arabika untuk kabupaten Ngada 30.000 anakan, Manggarai Timur 30.000 anakan dan Alor 40.000 anakan serta tersalurnya pupuk organik untuk kabupaten Ngada 30.000 kg, Manggarai Timur 30.000 kg dan Alor 40.000 kg.
- Bertambahnya luasan areal pertanaman kopi arabika dan jumlah populasi tanaman kopi arabika.



- Terlaksananya perluasan/peremajaan kakao seluas 100 Ha masing-masing di Kabupaten Ende 40 Ha, Sikka 30 Ha dan Flores Timur 30 Ha.
- Tersalurnya benih tanaman kakao untuk kabupaten Ende 40.000 anakan, Sikka 30.000 anakan dan Flores Timur 30.000 anakan serta pupuk NPK untuk kabupaten Ende 4.000 kg, Sikka 3.000 kg dan Flores Timur 3.000 kg.
- Bertambahnya luasan areal pertanaman kakao dan jumlah populasi tanaman kakao.
- Terlaksananya perluasan/peremajaan tanaman cengkeh seluas 200 Ha di Kabupaten Ende 50 Ha, Nagekeo 50 Ha, Ngada 50 Ha dan Alor 50 Ha.
- Tersalurnya benih tanaman cengkeh di kabupaten Ende 5000 anakan, Nagekeo 5000 anakan, Ngada 5000 anakan dan Alor 5000 anakan.
- Terlaksananya pengembangan tanaman tembakau seluas 200 Ha di kabupaten TTS 20 Ha, TTU 20 Ha, Belu 20 Ha, Malaka 20 Ha, Rote Ndao 20 Ha, Sabu Raijua 20 Ha, Flores Timur 20 Ha, Sumba Timur 20 Ha, Sumba Barat 20 Ha dan Sumba Barat Daya 20 Ha.
- Tersalurnya sarana produksi berupa 4.000 gr benih tembakau, 20.000 kg pupuk organik dan 100 liter herbisida.
- Terlatihnya 150 orang petani tembakau dalam upaya budidaya tembakau dari 6 Kabupaten di NTT.
- TERLAKSANANYA rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelola DBH-CHT di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pengguna anggaran DBH-CHT, TAPD kabupaten/kota dan provinsi, Dirjen DBK Kemenkeu RI dan Ditjenbun untuk menyamakan persepsi terkait rencana, alokasi, dan penggunaan serta monev dan pelaporan DBH-CHT.

2) Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian Unggulan Daerah.

- Alokasi Anggaran Rp.200.000.000,-
- Realisasi Rp.161.289.700,- (80,64%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Promosi atas Produksi Komoditi Unggulan Daerah melalui Soropadan Agro Expo di Semarang–Jawa Tengah pada tanggal 26 s/d 30 Juli 2018 di Pusat Pelayanan



Agribisnis Petani (PPAP) Agro Center Soropadan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Peserta dari Dinas Pertanian Provinsi NTT, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten TTS, pelaku usaha / petani jeruk keprok Kabupaten TTS;

- Terlaksananya Sistem Informasi Pasar, melalui penyediaan data/informasi harga pasar berlaku/harga bulanan lewat media elektronik (siaran pers radio), media massa, bulletin dan papan informasi pasar;
- Terlaksananya Festival Kopi di Alun-Alun Sasando Kantor Gubernur NTT pada tanggal 22 Desember 2018, bertempat di Jalan Raya El Tari depan Kantor Gubernur NTT, sebagai event untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah Kopi FLOBAMORA. Peserta dalam festival berasal dari SKPD lingkup Pemprov NTT, Ketua/Anggota DPRD Provinsi NTT, Forkopimda, Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Dharma Wanita Pemprov NTT, Pihak Swasta / Perbankan / BUMD / BUMN, Perguruan Tinggi / SMK / SMA se-Kota Kupang, Pelaku Usaha Kopi dan Masyarakat Kota Kupang.

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi.

- Alokasi Anggaran Rp.238.696.000,-
- Realisasi Rp.231.713.570,- (97,07%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) padi, kedelei, jeruk, bawang merah dan kakao guna meningkatkan pengetahuan petani dalam penggunaan pestisida kimia pada lahan usaha taninya;
- Terlatihnya 20 orang petani padi di Kelompok Tani Idola II Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, 20 orang petani kedelei di Kelompok Komponepa, Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, 20 orang petani jeruk di Kelompok Tani Kolsa Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, 20 orang petani bawang merah di Kelompok Tani Sehati Desa Kuli Aoseli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan 25 orang petani kakao di Kelompok Tani Nuran Human Desa Aibura Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka;

- Tersedianya bahan guna pembiakan/perbanyakkan parasit Chellonus,sp di sub lab Ndona, Nangaroro dan Mauponggo kab. Nagekeo dan Waebela; terlaksananya sosialisasi pemanfaatan Agens Pengendali Hayati di kabupaten TTS, TTU, Ende, Nagekeo dan Manggarai.

4) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.

- Alokasi Anggaran Rp.4.898.400.000,-
- Realisasi Rp.4.352.943.810,- (88,86%)

Capaian/hasil :

- Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian Pengadaan Traktor Roda 2 Tahun 2018: Kota Kupang 2 unit, Kabupaten Kupang 14 unit, TTS 10 unit, TTU 8 unit, Belu 6 unit, Malaka 4 unit, Rote Ndao 2 unit, Sabu Raijua 3 unit, Alor 10 unit, Lembata 2 unit, Flores Timur 4 unit, Sikka 7 unit, Ende 3 unit, Nagekeo 8 unit, Ngada 7 unit, Manggarai 3 unit, Manggarai Timur 7 unit, Manggarai Barat 10 unit, Sumba Timur 6 unit, Sumba Barat 4 unit dan Sumba Barat Daya 10 unit;
- Tersedianya 3 unit Traktor Roda 4 dan 130 unit Traktor Roda Dua (80 unit sedang Merk Quick, model/tipe G 3000 ZEVA dan 50 unit kecil Merk Quick, model/tipe Capung Metal) bagi Kelompok Tani, gapoktan maupun UPJA Alsintan melalui belanja hibah barang/jasa diserahkan kepada masyarakat di 22 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 355.a/KEP/HK/2018 tanggal 8 November 2018;
- Terlaksananya pertemuan aspek alsintan, di Hotel Neo By Aston, Jln. Piet A. Tallo, Oesapa Kupang dari tanggal 5 s/d 7 Desember 2018 peserta 25 orang terdiri dari 22 Kabupaten/kota dan Dinas Pertanian Provinsi NTT dan yang hadir 23 orang sedangkan 2 Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka tidak hadir.

5) Kegiatan Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian.

- Alokasi Anggaran Rp.696.160.000,-
- Realisasi Rp.596.159.830,- (85,64%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 07 s/d



09 Februari 2018 di Hotel Sasando International Kupang dihadiri 100 orang peserta rapat, terdiri atas para pejabat lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Bidang Kepala UPT, Kepala Seksi/Kasubag dan Staf lingkup Dinas Pertanian Provinsi NTT, Kepala Dinas dan Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kasubag Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian se-Provinsi NTT.

6) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- Alokasi Anggaran Rp.125.000.000,-
- Realisasi Rp.110.847.145,- (88,68%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan program / kegiatan di 22 (dua puluh dua) kabupaten / kota sebanyak 10 (sepuluh) buah buku;
- Tersedianya data aset milik pemerintah daerah 10 buah buku dan terlaksanannya pembinaan administrasi kepegawaian di balai-balai benih dan kebun dinas.

c. Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan/ Hortikultura.

- Alokasi Anggaran Rp.10.560.811.800,-
- Realisasi Rp.9.953.582.571,- (94,25%)

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis

- Alokasi Anggaran Rp.280.200.000,-
- Realisasi Rp.248.329.900,- (88,63%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya pelatihan manajer UPJA pada tanggal 19 s/d 22 September 2018 di Hotel Sinar Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, bagi 25 orang petugas/pendamping dan kelompok tani/ manajer UPJA;
- Terlaksananya bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura pada tanggal 19 s/d 21 April 2018 bertempat di Hotel Ande Ate Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dan tanggal 26 s/d 28 April 2018 bertempat di Hotel Jati Asih Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peserta terdiri dari petani sebagai pelaku usaha, PPL sebagai pendamping dan staf dinas Kabupaten;
- Terlaksananya pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan komoditi padi, jagung dan kedelai: komoditi

padi, di Kabupaten Manggarai tanggal 24 s/d 25 Mei 2018. Lokasi di Kelompok Tani Maria Fatima, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, komoditi jagung, di Kabupaten Belu tanggal 6 s/d 7 Juni 2018. Lokasi di Kelompok Tani We Moru, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kelompok Tani Halileon, Kelurahan Fatubeneo, Kecamatan Kota Atambua dan komoditi kedelai, di Kabupaten Ngada tanggal 16 s/d 17 Mei 2018. Lokasi di KWT Niu Woe, Desa Watunai, Kecamatan Golewa Barat;

- Terlaksananya bimbingan teknis dan manajemen pengolahan hasil tanaman bagi 20 orang petani peserta pengolahan VCO dan Nata de Coco dan bertambahnya kelompok penghasil VCO, Nata de Coco dan minyak curah dari bantuan peralatan yang diberikan pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018 di Gapoktan Setia Kawan, Desa Woewutu Kecamatan Nangaroro;
- Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi, legalitas dan pemanfaatan usaha tani, di Kabupaten Sikka dalam penerapan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani berkelanjutan. pada tanggal 22 s/d 23 November 2018 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

2) Kegiatan Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- Alokasi Anggaran Rp.99.520.000,-
- Realisasi Rp.96.039.200,- (96,50%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Angka Sementara (ASEM) Tahun 2017 dan Angka Prognosa Tahun 2018 Produksi Tanaman Pangan Tingkat Provinsi NTT, pada tanggal 20 s/d 22 Februari 2018 di Aula UPT PKDLH Kupang, peserta 30 orang.

3) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung dan Padi.

- Alokasi Anggaran Rp.7.754.185.700,-
- Realisasi Rp.7.403.156.171,- (95,47%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya intensifikasi padi sawah, dengan capaian/hasil terealisasinya penanaman padi seluas 5.000 Ha di 17 Kabupaten 52 Kecamatan, 167 Desa, 345 Kelompok Tani.



Bantuan saprodi diberikan kepada petani berupa benih 125.000 Kg (25 Kg/Ha) dan bantuan pupuk NPK 250.000 Kg (50 Kg/Ha) dan Pupuk organik cair 6.000 liter (2 liter/ha). pada bulan November s/d Desember 2018 dengan perkiraan panen Maret s/d April 2019;

- Terealisasinya pertanaman jagung non kawasan seluas 6.000 Ha : (1) Kabupaten Kupang seluas 500 hektar, tersebar di 25 kelompok tani penerima jumlah petani di 15 desa pada 9 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (2) Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 500 hektar, tersebar di 43 kelompok tani penerima, jumlah petani di 17 desa pada 5 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (3) Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 500 hektar, tersebar di 20 kelompok tani penerima, jumlah petani di 8 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (4) Kabupaten Belu seluas 500 hektar, tersebar di 62 kelompok tani penerima, jumlah petani di 18 desa pada 9 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (5) Kabupaten Malaka seluas 500 hektar, tersebar di 36 kelompok tani penerima, jumlah petani di 5 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (6) Kabupaten Alor seluas 400 hektar, tersebar di 23 kelompok tani penerima, d jumlah petani di 23 desa pada 7 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 10 ton. Realisasi tanam 400 Ha; (7) Kabupaten Lembata seluas 400 hektar, tersebar di 36 kelompok tani penerima, jumlah petani di 36 desa pada 8 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 10 ton. Realisasi tanam 400 Ha; (8) Kabupaten Ende seluas 800 hektar, Alokasi awal 400 ha, peralihan dari Kabupaten Nagekeo 400 ha. Kelompok Tani penerima tersebar di 68 kelompok, jumlah petani di 67 desa pada 10 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke

kelompok tani adalah varietas lamuru, 20 ton. Realisasi tanam 800 Ha; (9) Kabupaten Ngada seluas 400 hektar, tersebar di 6 kelompok tani penerima, jumlah petani di 1 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 10 ton. Realisasi tanam 400 Ha; (10) Kabupaten Manggarai seluas 400 hektar, tersebar di 47 kelompok tani penerima, jumlah petani di 38 desa pada 13 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 10 ton. Realisasi tanam 400 Ha; (11) Kabupaten Manggarai Barat seluas 400 hektar, tersebar di 30 kelompok tani penerima, jumlah petani di 12 desa pada 3 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru. Realisasi tanam 400 Ha; (12) Kabupaten Sumba Tengah seluas 300 hektar, tersebar di 13 kelompok tani penerima, jumlah petani di 2 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 7.5 ton. Realisasi tanam 300 Ha; (13) Kabupaten Sumba Barat seluas 400 hektar, tersebar di 42 kelompok tani penerima, jumlah petani di 15 desa pada 2 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 10 ton. Realisasi tanam 400 Ha;

- Terealisasinya pertanaman jagung kawasan seluas 6.000 Ha Kabupaten Kupang seluas 500 Ha, tersebar di 25 kelompok tani penerima, jumlah petani di 4 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru. Realisasi tanam seluas 500 Ha; (2) Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 500 Ha, tersebar di 34 kelompok tani penerima, jumlah petani di 10 desa pada 1 kecamatan, realisasi penyaluran benih 12.5 ton, realisasi tanam 500 Ha. (3) Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 500 Ha, tersebar di 49 kelompok tani penerima, jumlah petani di 6 desa pada 1 kecamatan, realisasi penyaluran benih 12.5 ton, realisasi tanam 500 Ha; (4) Kabupaten Belu seluas 500 Ha, tersebar di 35 kelompok tani penerima, jumlah petani di 11 desa pada 1 kecamatan. Realisasi tanam 500 Ha; (5) Kabupaten Malaka seluas 500 Ha, tersebar di 22 kelompok tani penerima, dengan jumlah petani di 10 desa pada 1 kecamatan. Realisasi tanam

500 Ha; (6) Kabupaten Flores Timur seluas 1000 Ha, Alokasi awal 500 Ha sedangkan tambahan 500 Ha adalah peralihan dari Kabupaten Nagekeo. Sebaran kelompok tani penerima di 97 kelompok tani, jumlah petani pada 48 desa di 2 kecamatan. Realisasi tanam 1000 Ha. Benih jagung bantuan pemerintah yang disalurkan 25 ton; (7) Kabupaten Sikka seluas 500 Ha, tersebar di 7 kelompok tani penerima, jumlah petani di 7 desa pada 2 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (8) Kabupaten Manggarai Timur seluas 500 Ha, tersebar di 20 kelompok tani penerima, jumlah petani di 6 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (9) Kabupaten Sumba Timur seluas 500 Ha, tersebar di 34 kelompok tani penerima, jumlah petani di 9 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (10) Kabupaten Sumba Barat seluas 500 Ha, tersebar di 62 kelompok tani penerima, jumlah petani di 14 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha; (11) Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 500 Ha, tersebar di 27 kelompok tani penerima, jumlah petani di 4 desa pada 1 kecamatan. Benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas lamuru, 12.5 ton. Realisasi tanam 500 Ha;

- Terealisasinya pertanaman kacang hijau seluas 50 Ha di 21 Poktan, 16 Desa, 13 Kecamatan dan 5 Kabupaten (Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka) pada minggu I dan II bulan Desember 2018, rencana panen bulan Maret dan April 2019;
- Terealisasinya penanaman kedelai seluas 100 Ha, pada Minggu ke IV November dan Minggu ke II Desember 2018 dengan rincian: (1) Kelompok Tani Mae Rebho, Desa Pigha, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada seluas 15 Ha; (2) Kelompok Tani Sembeng Lengge, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur seluas 15 Ha; (3) Kelompok Tani Kaung Mentari seluas 5 Ha, Kelompok Tani Benteng Cucak (5 Ha), Kelompok Tani Watu Dari (10 Ha), Desa

Wudi, Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai; (4) Kelompok Tani Momang Koe, Desa Lewat, Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat seluas 20 Ha; (5) Kelompok Tani Padammu Djawa, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah seluas 15 Ha; (6) Kelompok Tani Deta Ate, Desa Kalaki Kambe, Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 15 Ha.

4) Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura.

- Alokasi Anggaran Rp.2.426.906.100,-
- Realisasi Rp.2.206.057.300,- (90,90%)

Capaian/hasil :

- Terealisasinya pengembangan kawasan jeruk jeruk keprok soe seluas 15 Ha dan tertanamnya 6000 anakan jeruk keprok soe bagi 4 kelompok tani di 3 Desa, 4 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Terealisasinya pengembangan kawasan tanaman mangga seluas 15 ha dan tertanamnya 1.500 anakan mangga di 15 Kelompok tani, 11 Desa, 7 Kecamatan di Kabupaten Belu dan 1.500 anakan di 3 kelompok tani, 3 desa dan 2 kecamatan di Kabupaten Malaka.

d. Program Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan.

- Alokasi Anggaran Rp.4.117.074.300,-
- Realisasi Rp.3.968.199.569,- (96,38%)

1) Pengembangan Pusat Perbenihan.

- Alokasi Anggaran Rp.4.117.074.300,-
- Realisasi Rp.3.968.199.569,- (96,38%)

Capaian/hasil :

- Terealisasinya perbanyak benih sebar padi dengan realisasi tanam 180 Ha di 21 poktan, 21 desa, 12 kabupaten dan realisasi panen 150 Ha di dengan hasil yang dicapai 419,5 ton benih sebar (BR) padi;
- Terealisasinya perbanyak benih sebar jagung dengan realisasi tanam 490,5 Ha di 82 poktan, 62 desa, 17 Kabupaten realisasi tanam 490,5 Ha, panen 414 Ha dengan hasil dicapai 434.55 ton benih sebar (BR) jagung;
- Terealisasinya perbanyak benih sebar kedelai dengan realisasi tanam 40 Ha, realisasi panen 25 Ha di 2 Kabupaten,

dengan hasil yang dicapai 13,68 ton benih sebar (BR) kedelei dengan provitas 5,4 ku/ha;

- Terealisasinya perbanyakkan benih sebar kacang hijau dengan realisasi tanam 50 Ha, realisasi panen 50 Ha, dengan hasil yang dicapai 31,8 ton benih sebar (BR) kacang hijau dengan provitas 6,4 ku/ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Kabupaten Malaka.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 360 orang dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 10 orang; SLTP = 5 orang; SLTA = 113 orang; Diploma/Sarjana Muda = 21 orang; S1= 199 orang; S2 = 12 orang
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 16 orang; Golongan III = 239 orang; Golongan II = 111 orang; Golongan I = 7 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 36 orang.
EselonII = 1 orang; Eselon III = 9 orang; Eselon IV = 26 Orang.
- d. Pejabat Fungsional : 20 orang
Penyuluh Madya = 6 orang, Penyuluh Penyelia = 3 Orang, Sertifikasi Benih = 1 Orang, Pengawas Mutu benih = 6 orang,Perencana = 1 Orang dan Analis Pasar Hasil Pertanian = 3 Orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Program Pengembangan Benih dan Pembibitan	Program Pengembangan Benih dan Pembibitan

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan didukung program SKPD (non urusan), yaitu:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. Rp.1.426.613.364,- realisasi Rp.1.363.550.975,- (95,58%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.193.379.900,- realisasi Rp.156.767.750,- (81,07%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.17.975.000,- realisasi Rp.15.516.000,- (91,88%),.

PETERNAKAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

- Alokasi anggaran Rp. 13.031.213.800,-
- Realisasi Rp. 12.186.150.568,- (93,52%)

1) Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak.

- Alokasi anggaran Rp. 1.885.374.000,-
- Realisasi Rp. 1.884.910.900,- (99,98%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya 1 paket obat-obatan, vitamin dan perlengkapan medik veteriner untuk ternak di 7 instalasi;
- Tersedianya 312.740 kg pakan ternak babi untuk di konsumsi selama 1 tahun di UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak (Instalasi Tarus 1.577 dan Instalasi Boawae 472 ekor);
- Tersedianya 19.920 kg pakan ternak dedak dan mineral untuk di konsumsi ternak sapi selama 1 tahun di UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak (Instalasi: Lili 186 ekor, Besipae 139 ekor, Boawae 42 ekor, Kabar 229 ekor, Waihibur/Kondamaloba 84 ekor dan Loura 40 ekor ternak kerbau);
- Tersedianya 10.000 kg pakan konsentrat untuk di konsumsi ternak kambing selama 1 tahun di UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak (Instalasi Sumlili 82 ekor kambing PE);

- Tersedianya Bahan pakan Jerami Olahan 150 Ton untuk konsumsi ternak ruminansia di UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak (Instalasi : Lili 186 ekor, Besipae 139 ekor, Boawae 42 ekor, Kabar 229 ekor, Waihibur/Kondamaloba 84 ekor dan Loura 40 ekor kerbau).
- 2) Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak.
- Alokasi Anggaran Rp. 11.145.839.800,-
 - Realisasi Rp. 10.301.239.668,- (92,42%)
 - Capaian/hasil :
 - Pengadaan 325 ekor ternak sapi (bali dan ongole), 1.104 ekor
 - Pengadaan ternak kambing local, 1.134 ekor
 - Pengadaan ternak babi, 704 ekor
 - Pengadaan ternak kambing PE.
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- Alokasi anggaran Rp. 2.845.370.000,-
 - Realisasi Rp. 2.843.728.810,- (99,94%)
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
- Alokasi anggaran Rp. 2.280.250.000,-
 - Realisasi Rp. 2.280.250.000,- (100%)
 - Capaian/hasil :
 - Tersosialisasinya informasi tentang Peternakan serta terlaksananya kegiatan Vaksinasi dan Inseminasi Buatan (IB) di 22 Kab/Kota oleh 152 Tenaga Lapangan Lepas (TLL)
- 2) Kegiatan Peningkatan kualitas kader kesehatan hewan dalam pelayanan vaksinasi dan pengobatan.
- Alokasi anggaran Rp. 565.120.000,-
 - Realisasi Rp. 563.478.810,- (99,71%)
 - Capaian/hasil :
 - Tervaksin dan terobatinya ternak sapi, kerbau dan kuda, kambing, babi, domba dan unggas di 22 kab/kota;
 - Adanya Pelatihan Bedah bagi 1 orang Petugas pada Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner Provinsi NTT di Rumah Sakit Hewan di Jakarta;
 - Terlatihnya Data Base dan Manajemen Rumah Sakit bagi 1 orang Petugas pada Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner Provinsi NTT di Bogor;

- Adanya Pelatihan Pengujian Laboratorium Kesmavet/ Manajemen Laboratorim bagi 5 orang Petugas pada Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner Provinsi NTT di Bogor;
- Tersedianya Alat-alat Kedokteran Hewan 1 Paket, peralatan Rumah Sakit Hewan 1 Paket.

c. Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan

- Alokasi Anggaran Rp. 1.938.039.000,-
- Realisasi Rp. 1.933.862.605,- (99,78 %)

1) Kegiatan Peningkatan Surveillance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan

- Alokasi Anggaran Rp. 698.350.000,-
- Realisasi Rp. 695.261.969,- (99,56%)

Capaian/hasil :

- Terujinya 13.186 sampel di laboratorium Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner; Tervaksinasi 3.978 ekor ternak di Rumah Sakit Hewan Oesapa;
- Terlayaninya pengobatan 4.610 ekor ternak, Grooming 35 ekor ternak, dioperasi 14 ekor ternak dan rawat inap 9 ekor ternak di Rumah Sakit Hewan Oesapa; adanya Pelatihan kader kesehatan hewan dan kesmavet sebanyak 50 orang di 5 Kabupaten; Terakreditasinya ISO/IEC 17025:2008 Laboratorium UPT Veteriner dari Komite Akreditasi Nasional.

2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

- Alokasi Anggaran Rp. 290.926.000,-
- Realisasi Rp. 290.146.950,- (99,73%)

Capaian/hasil :

- Pengeluaran ternak besar sapi 67.454 ekor, kerbau 3.857 ekor dan kuda 5.388 ekor serta daerah tujuan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan Sulawesi Selatan, Pengeluaran ternak 4.350 ekor ternak kambing dengan tujuan Sulawesi Selatan;
- Pemasukan 704 ekor ternak kambing dan 740 ekor ternak babi dari Bali dan NTB, Pemasukan hasil ternak yaitu 2.407.896,6 kg (166.794,4 kg telur ayam konsumsi, 2.241.000 kg telur ayam tetas, 102,2 kg telur puyuh), 2.575 kg karkas sapi olahan, 336.100 kg karkas ayam olahan dan 154.364 ekor DOC.

3) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

- Alokasi Anggaran Rp. 749.900.000,-
- Realisasi Rp. 749.772.686,- (99,98%)

Capaian/hasil :

- Tersosialisasinya informasi/pengetahuan tentang penerapan teknologi tepat guna bagi 66 kelompok tani yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT;
- Tersedianya informasi melalui siaran peternakan sebanyak 100 naskah. penyiaran dilaksanakan lewat kerjasama dengan Radio RRI Kupang;
- Tersebaranya informasi harga komoditi peternakan kepada peternak dan stakeholders melalui radio RRI Kupang;
- Terlaksananya Lomba Kontes Ternak Sapi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Wisata Oetune, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS;
- Terlaksananya Lomba Kelompok Ternak Sapi Bali dan Sapi Ongole serta Petugas Berprestasi Daratan Timor, Daratan Sumba dan Rote Ndao 2018, yang diikuti oleh 22 kelompok ternak sapi bali dan sapi ongole dan 22 orang Petugas Pendamping di 22 Kabupaten/Kota.

4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi Anggaran Rp. 198.863.00,-
- Realisasi Rp. 195.861.000,- (99,91%),

Capaian/hasil :

- Tersedia laporan kegiatan tahunan pengembangan peternakan di Kabupaten/Kota se- NTT 1 dokumen;
- Tersedianya data statistik peternakan (Populasi, Pemasukan, Pengeluaran, pemotongan ternak dan data pendukung lainnya) Provinsi NTT 2017 1 dokumen;
- Tersedianya 1 buku data inventaris aset Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi NTT Per 31 Desember 2018 sebanyak 171 Orang, dengan kualifikasi:



- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 22 orang; SLTP = 4 orang; SLTA = 32 orang; Diploma = 15 orang;
Sarjana = 68 orang; Dokter Hewan = 15 orang; Magister = 15 orang; Doktor = - orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 19 orang; Golongan III = 108 orang; Golongan II = 43 orang;
Golongan I = 14 orang;
- c. Pejabat Stuktural: 27 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 20 orang.
- d. Pejabat Fungsional: 49 orang
Pengawas Bibit Ternak = 14 orang; Perencana = 1 orang; Arsiparis = 1 orang;
Medik Veteriner = 17 orang; Penyuluh Pertanian = 1 orang;
Pengawas Mutu Pakan = 10 Orang; Para Medik Veteriner = 3 orang;

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3	Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan	Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** kurang mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 1.197.063.000,- realisasi Rp. 1.187.431.069,- (99,19%);
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 268.980.000,- realisasi Rp. 268.741.959,- (99,91%);
- 3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 11.155.200,- realisasi Rp. 10.929.900,- (97,98%).



URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

- Alokasi Anggaran Rp. 3.454.145.038,-
- Realisasi Rp. 3.113.515.050,- (90,14%)

1) Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut

- Alokasi Anggaran Rp. 1.223.485.000,-
- Realisasi Rp. 1.208.115.050. (98,74%)

Capaian/hasil :

- Adanya pemberian bantuan paket rumput laut di Kabupaten Sumba Timur (2 Kelompok), Sumba Barat Daya (2 Kelompok) dan Sabu Raijua (2 Kelompok). Bantuan berupa bibit rumput laut dan menghasilkan Produksi Rumput Laut di Sumba Timur 990 kg, Sumba Barat Daya 735 kg dan Sabu Raijua 2.200 kg;
- Persiapan rekomendasi SIUP dan SIKPI Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Manggarai Barat, Ende dan Nagekeo dengan sasaran kawasan budidaya perairan pesisir dan pulau – pulau kecil di kabupaten Manggarai Barat, Ende dan Nagekeo menghasilkan Penerbitnya 3 rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan budidaya.

2) Pengembangan Perbenihan dan Budidaya Perikanan.

- Alokasi Anggaran Rp. 2.230.660.038,-
- Realisasi Rp. 1.905.400.000,- (85,42%)

Capaian/hasil :

Adanya Pengadaan benur Vaname 400.000 ekor, Nener bandeng 1.600.000 ekor, Artemiah cyst 2 paket dan Bahan Aditif 5 paket.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

- Alokasi anggaran Rp. 28.067.617.570.-
- Realisasi Rp. 27.747.567.150,- (98,86%)

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan PPI Oeba.

- Alokasi anggaran Rp. 543.115.000,-
- Realisasi Rp. 538.015.000,- (99,06%)

Capaian/hasil :

Adanya pelayanan kebutuhan air bersih bagi nelayan PPI Oeba.

- 2) Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap.
 - Alokasi anggaran Rp. 27.461.962.570,-
 - Realisasi Rp. 27.147.012.150,- (98,86%)
 - Capaian/hasil :
 - Adanya bantuan kapal tangkap :3 GT 65 Unit untuk Kabupaten/Kota : Kota Kupang 6 unit, TTU 3 Unit, Lembata 2 Unit, Ende 2 Unit, Sumba Barat Daya 3 Unit, Nagekeo 4 unit, Ngada 2 Unit, Flores Timur 6 Unit, Sikka 3 Unit, Alor 4 Unit, Sumba Barat 3 Unit, Kab. Kupang 1 Unit, TTS 2 unit, Belu 2 Unit, Malaka 1 Unit, Manggarai Timur 4 Unit, Manggarai 1 unit, Manggarai Barat 4 unit, Sumba Timur 5 unit, Sabu Raijua 3 unit dan Rote Ndao 4 unit. 27 unit ketinting.
- 3) Kegiatan Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan.
 - Alokasi anggaran Rp.169.324.000,-
 - Realisasi Rp.134.464.000,- (87.35%)
 - Capaian/hasil :
 - Tersedianya 4 buah pakaian kerja satu paket bahan baku bengkel.
- c. Program Pengembangan Penyuluhan,Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
 - Alokasi anggaran Rp. 4.594.761.154,-
 - Realisasi Rp. 4.274.109.286,- (93,02%)
- 1) Kegiatan Peningkatan Peformance dan Kompetensi Laboratorium dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
 - Alokasi Anggaran Rp. 167.960.000,-
 - Realisasi Rp. 141.324.000,- (84,14%)
 - Capaian/hasil :
 - Tersedianya 60 Media reagensia, 58 Media reagensia, 1 jenis biakan murni, Terlaksananya 1 jenis uji profisiensi, pelatihan Tenaga ISO/IEC, Magang Penerima dan Penanganan sampel.
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu dan keragaman produk hasil perikanan.
 - Alokasi anggaran Rp. 111.884.000,-
 - Realisasi Rp. 111.268.000,- (99,45%)
 - Capaian/hasil :
 - Tersediannya bahan percontohan/ pameran (makanan serba ikan), Operasional RUN;
 - Adanya 500 lembar leaflet stop penggunaan formalin;

- Terlaksananya Monitoring di 3 lokasi produk yang dipasarkan di supermarket;
 - Terpantaunya mutu wilayah produk perikanan di 7 lokasi;
 - Terlaksananya pelatihan 1 orang magang kaji terap.
- 3) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPTD PPP Tenau Kupang.
- Alokasi anggaran Rp. 365.592..000,-
 - Realisasi Rp. 364.965..600,- (99,83%)
- Capaian/hasil :
- tercapainya PAD Rp. 137.900.350 atau melebihi target 129,83 %
- 4) Kegiatan Pengembangan Pasar dalam negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (GEMARIKAN).
- Alokasi anggaran Rp. 559.748..332,-
 - Realisasi Rp. 378.722.000,- (67,66%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya lomba Masak serba ikan di SUMKN 3 Kota Kupang.
 - Terlaksananya iklan dan dialog interaktif di RRI dan TVRI.
 - Adanya pemberian makanan tambahan yang iberikan kepada peserta PAUD binaan Darmawanita Prov. NTT, persekututuan Doa di Naikoten I, Sekolah Tinnggi Teologia di Belo.
 - Adanya keikutsertaan pada Rakor forikan TK Nasional di Jakarta, pameran di pusat Jakarta Convention Center dan Pameran 17 Agustus di Kupang.
 - Adanya pembinaan pasar di 5 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Sumba Timur, Manggarai Barat, Flores Timur dan Lembata).
- 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.
- Alokasi anggaran Rp. 391.522.922,-
 - Realisasi Rp. 390.802.600,- (99,08%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya Rapat Kerja Perikanan oleh 22 Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - Adanya Penyaluran bantuan kepada Kab/Kota tetap melibatkan DKP Kab/Kota kepada kelompok penerima bantuan.
 - Adanya rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2019 di Kabupaten Sikka dengan sharing dana DKP Provinsi dan UPT Pusat.

6) Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh /Pendamping perikanan dan Pengembangan SDM Perikanan.

- Alokasi anggaran Rp.385.260.000,-
- Realisasi Rp.382.557.086,- (99,30%)

Capaian/hasil :

- Terbitnya rekomendasi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) 146 dokumen, rekomendasi SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) 528 dokumen, SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) 39 dokumen, BPKP (bukti Pemilik Kapal Perikanan) 385 dokumen, BPKP (Bukti Pemilik Kapal Perikanan) Andon 6 dokumen, rekomendasi SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Andon 45 dokumen, STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) 28 Dokumen, SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) 39 Dokumen untuk Pengumpul, pemasar dan Pengolah dan Kelayakan Pengolahan 56 dokumen.
- Sosialisasi pelayanan Usaha Perijinan yang di ikut oleh 50 orang nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kupang dan kota Kupang.

7) Pelayanan Perijinan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) untuk kelayakan Kualitas Pengolahan.

- Alokasi anggaran Rp. 2.612.793.900,-
- Realisasi Rp. 2.504.470.000 (95.85%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya 1 (satu) unit kapal pengawas.
- Terlaksananya Penanaman 6.000 anakan mangrove di Kabupaten Sikka (desa Reroroja).
- Transplatasi terumbu karang di Kabupaten Alor.
- Tersosialisasinya Peraturan Daerah Renacana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 13 Kabupaten (Kota Kupang, Kab. Kupang, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Sumba Timur dan Sumba Barat).
- 30 orang peserta mengikuti Diklat Pengawas Perikanan.
- Terlaksananya Penerbitan 31 rekomendasi perizinan pengelolaan ruang laut.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 142 orang, dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 5 orang; SLTP = 6 orang; SLTA = 38 orang; Diploma = 4 orang; Sarjana = 76 orang; Magister = 13 orang; Doctor = - orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV= 16 orang; Golongan III = 91 orang; Golongan II = 31 orang; Golongan I = 4 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 33 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 8 orang; Eselon IV = 24 orang.
- d. Pejabat Fungsional = - orang.

4. Proses perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3	Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 1.922.879.238,- realisasi Rp.1.796.115.036,- (93,41%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 709.159.000,- realisasi Rp.708.620.750,- (99,92%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.23.000.000,- realisasi Rp.23.000.000,- (100%).

URUSAN KEHUTANAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana.

Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Pengembangan, Pemanfaatan dan Penertiban SDH

- Alokasi anggaran Rp. 1.224.700.000,-
- Realisasi Rp. 1.081.852.420,- (88,34%)

1) Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

- Alokasi anggaran Rp. 249.040.000,-
- Realisasi Rp. 245.420.849,- (98,55%)

Capaian/hasil :

- Terbentuk dan terbinanya 6 kelompok tani hutan (KTH) melalui dukungan pengembangan hasil hutan bukan kayu.
- Terlaksananya pengembangan budidaya lebah madu 60 stup pada Kab. Kupang 20 stup (pengelola KTH Bangun Hidup, Kec. Semau, Desa Uiasa), Kab. TTS 20 stup (pengelola KTH Familia, Kec. Mollo Tengah, Desa Binaus) dan Kab. Mabar 20 stup (pengelola KTH Soa, Kec. Kuwus Pengella, Kel. Nantai).
- Terlaksananya budidaya jenis tanaman obat-obatan seluas 30 ha pada Kab. Sikka jenis tanaman Porang seluas 10 ha, (pengelola KTH Watutena, Kec. Doreng, Desa Wolomotong), Kab. Ngada jenis tanaman berupa Jahe seluas 10 ha, (pengelola KTH Gue, Kec. Bajawa Utara, Desa Inelike Doi) dan Kab. Sumba Barat Daya jenis tanaman porang seluas 10 ha (pengelola KTH Olegeile, Kecamatan Wewewa Selatan, Desa Mandunga).
- Terlaksananya fasilitasi pasca panen pengembangan budidaya Lebah Madu T.1, oleh Kelompok Tani Hutan Pelita Baru, Desa Kuanheun, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Kelompok Tani Hutan Bolbers, Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kelompok Tani Hutan Kamboja, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur.

2) Kegiatan Pembinaan Potensi Kehutanan.

- Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,-
- Realisasi Rp. 241.839.022,- (80,61%)



Capaian/hasil :

- Terfasilitasinya 3 pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUP-HTR), Kawasan Hutan Laob Tumbesi (RTK 186) dengan luas 395 ha, pemegang IUP-HTR Gabungan Kelompok Tani Hutan Patron, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti, Desa Bijeli dan Nifuboke. Pemegang IUP-HTR Koperasi Aboak, pada Kawasan Hutan Ile Padung Nedot (RTK 127) dengan luas 175 ha, Desa Lewobede, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur dan Pemegang IUP-HTR Koperasi Mute Lestari pada Kawasan Hutan Manus Mbengan (RTK 110) dengan Luas 238,77 ha, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Terevaluasinya 2 Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUP-HTR), pemegang IUP-HTR Koperasi Aboak dengan luas 175 ha pada Kawasan Hutan Ile Padung Nedot (RTK 127), Desa Lewobede, Kec. Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Pemegang IUP-HTR Koperasi Mute Lestari dengan Luas 238,77 ha, pada Kawasan Hutan Manus Mbengan (RTK 110), Desa Gunung, Kec. Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
- Terbentuknya kelompok kerja (Pokja) percepatan perhutanan sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 159/KEP/HK/2018, tanggal 14 Mei 2018 dan terlaksana rapat kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadiri 40 peserta dengan agenda rapat Pembentukan Pokja Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Terlaksananya pendidikan dan latihan penyusunan RKU/RKT untuk 9 kelompok tani hutan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan 5 kelompok tani hutan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara 4 kelompok tani hutan
- Terfasilitasinya permohonan IUP-HTR untuk 5 kelompok tani hutan: Kabupaten Sumba Timur 2 kelompok tani hutan dan Kabupaten Flores Timur 3 kelompok tani hutan; Terverifikasinya permohonan IUP-HTR Pada 1 kelompok tani hutan di Kabupaten Sumba Timur.

3) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.

- Alokasi anggaran Rp. 174.040.000,-
- Realisasi Rp. 162.205.959,- (93,20%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya rapat sinkronisasi perencanaan dan pengembangan HKm tingkat Provinsi selama 2 hari bertempat di Kupang peserta 30 orang dari 9 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya pendampingan kelompok masyarakat/KTH tingkat desa di 9 kelompok IUP-HKm: Kabupaten Ngada, Sikka, Sumba Timur, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Manggarai, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara
- Terasilitasinya penyusunan RKU/RKT (HKm) untuk 4 kelompok tani hutan; Kabupaten Timor Tengah Selatan 1 kelompok tani hutan dan Kab TTU 3 kelompok tani hutan.
- Terverifikasinya 35 permohonan IUP-HKm dari 7 Kabupaten: Flores Timur 13 pemohon, Ende 10 pemohon, Timor Tengah Selatan 2 permohonan, Timor Tengah Utara 2 pemohon, Sumba Timur 4 pemohon dan Ngada 4 pemohon.
- Terasilitasinya usulan/permohonan 4 dokumen IUP-HKm dari Kabupaten Flores Timur 3 permohonan dan Kabupaten Sumba Timur 1 permohonan.

4) Kegiatan Koordinasi Kerjasama Kemitraan Usaha Kehutanan

- Alokasi anggaran Rp. 301.620.000,-
- Realisasi Rp. 276.629.300,- (91,71%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang kehutanan pada 50 orang pelaku usaha hasil hutan kayu (HHK) maupun bukan kayu di 15 Kabupaten: Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
- Terlaksananya kegiatan lacak balak dalam rangka tertib peredaran hasil hutan di 22 wilayah UPT KPH: Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;

- Adanya Pengambilan sample awal oleh 3 perusahaan/TPKRT/ UIIPHHK.
- 5) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya.
- Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,-
 - Realisasi Rp. 155.757.290,- (77,88%)
- Capaian/hasil :
- Tersedianya 1 dokumen data base potensi hasil hutan/ pembangunan kehutanan
 - Tersedianya 1 unit barang modal berupa mesin cetak peta, *plotter*
- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Alokasi anggaran Rp. 15.956.253.635,-
 - Realisasi Rp. 10.613.685.018,- (66,52%)
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.
- alokasi anggaran Rp.14.214.624.560,-
 - realisasi Rp.11.134.973.296,- (78,33%)
- Capaian/hasil :
- Terpeliharanya batas luar kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole di Kabupaten TTU sepanjang 20 km. 27 pal yang diperiksa, kondisi pal yang baik 15 dan yang pal yang hilang 12 pal batas
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cendana Lestari
- alokasi anggaran Rp.1.102.028.000,-
 - realisasi Rp.1.035.317.950,- (93,95%)
- Capaian/hasil :
- Terbangunnya Hutan Tanaman Cendana (HTC) lanjutan Tahun Jamak (*multi-years*), Tahun Anggaran 2016 – 2018 dengan luas 100 ha di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;
 - Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC), kegiatan tahun jamak pengelolaan cendana lestari, pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan tahun anggaran. 2016-2017-2018 seluas 20 ha, pada kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185), lokasi Tuamnanu, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, oleh kontraktor pelaksana CV. Berkat Bersama, seluas 20 ha pada kelompok hutan Mutis Timau (RTK.183), lokasi Noenbila, Desa Noenbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh kontraktor pelaksana

- CV. Cahaya Putra, seluas 20 ha pada kelompok hutan Gunung Besar (RTK.2), lokasi Tapunfui, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, oleh kontraktor pelaksana CV. Nurvita Alam Raya, seluas 20 ha pada kelompok hutan Kenunggara (RTK.52), lokasi Bina Kasih, Desa Lakori'i, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, oleh kontraktor pelaksana CV.Ole Milla dan seluas 20 ha pada kelompok hutan Matakapore (RTk.163), lokasi Matakapore, Desa Matakapore, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, oleh kontraktor pelaksana CV. Sinar Tani;
- Terpeliharanya tanaman cendana, pemeliharaan tahun ke-III, di Kabupaten Flores Timur, Alor dan Sumba Timur, dengan luas 30 hektar;
 - Terpeliharanya tanaman cendana tahun ke-III (PT-III), kawasan hutan Kumorado Ilenubi (RTK 128), dengan luas 10 hektar, lokasi Kawohoanatani, Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, oleh kontraktor pelaksana CV.Silvana, kawasan hutan Praipaha Mandas (RTK 46), dengan luas 10 hektar, lokasi Pinu Hambangilu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, oleh kontraktor pelaksana CV.Prima Karya Sejahtera;
 - Terbangunnya potensi cendana masyarakat melalui kegiatan gerakan cendana keluarga (GCK), dengan jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 31.500 batang, pada 9 Kabupaten/Kota;
 - Tersedianya 50.000 anakan bibit tanaman kehutanan di Mapoli, Kota Kupang: Cendana 25.000 anakan, Mahoni 5.000 anakan, Gmelina 5.000 anakan, Angsana 5.000 anakan dan Glodokan 5.000 anakan. Permohonan bibit tanaman kehutanan dari masyarakat sebanyak 11.955 bibit tanaman: bibit Cendana 480 batang, Mahoni 2.740 batang, Sengon 2.740 batang, Glodok Tiang 1.975 batang, Gmelina 2.335 batang, Angsana 120 batang, dan tanaman lainnya 230 batang. Semua permintaan bibit tanaman kehutanan terpenuhi dari persemaian Mapoli.

3) Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Lintas Wilayah Terpadu

- Alokasi anggaran Rp.1.102.028.000,-
- Realisasi Rp.1.035.317.950,- (93,95%)



Capaian/hasil :

- Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada 7 lokasi: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Ngada dan Sikka;
- Terlaksananya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) sebanyak 4 kasus;
- Terbentuknya Pamhut Swakarsa atau Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) di Kabupaten Manggarai, Ngada dan Malaka sebanyak 3 kelompok dengan anggota kelompok sebanyak 90 orang. Pamhut Swakarsa/MMP Kabupaten Manggarai berlokasi di Desa Satarlende, Kecamatan Satarmese Barat dengan jumlah anggota 30 orang. Pamhut Swakarsa/MMP Kabupaten Ngada berlokasi di Desa Inelike, Kecamatan Bajawa Utara yang berjumlah 30 orang. Pamhut Swakarsa/MMP Kabupaten Malaka, kelompok masyarakat mitra polhut dari Desa Uabau, Kecamatan Lain Manen, Desa Nanin, Kecamatan Rinhat, dan Desa Uabau dengan anggota 30 orang;

4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.

- Alokasi anggaran Rp.1.102.028.000,-
- Realisasi Rp.1.035.317.950,- (93,95%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di 22 Kabupaten/Kota; Monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan tahun anggaran 2018 di 22 Kab./Kota.

c. Program Pengelolaan DAS Terpadu.

- Alokasi anggaran Rp. 298.560.000,-
- Realisasi Rp. 256.405.867,- (85,88%)

1) Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS.

- Alokasi anggaran Rp. 298.560.000,-
- Realisasi Rp. 256.405.867,- (85,88%)

Capaian/hasil :

- Terbangunnya demplot agroforestri seluas 25 hektar. Pengembangan demplot agroforestry di Kabupaten Kupang, Kec. Kupang Tengah, Desa Penfui Timur seluas 5 Ha, Malaka Kec. Kobalima, Desa Babulu seluas 5 Ha, Lembata, Kec. Nubatukan, Desa Lite Ulumado seluas 5 Ha, Ngada, Kec.

Golewa, Be'a Pawe seluas 5 Ha dan Flores Timur, Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Lewooking, Sinamalaka seluas 5 Ha;

- Terpeliharanya tanaman seluas 20 hektar pada hutan Flobamora, Fatukoa, Kota Kupang;
- Tersedianya 1 unit *profil tank* yang digunakan pada hutan Flomamora, Fatukoa, Kota Kupang; Tersedianya 1 unit mesin potong rumput yang digunakan pada hutan flobamora.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 812 orang, dengan kualifikasi:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = 8 orang; SLTP = 11 orang; SLTA = 315 orang; Diploma = 61 orang; Sarjana = 398 orang; Magister = 19 orang; Doktoral = - orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 57 orang; Golongan III = 555 orang; Golongan II = 183 orang; Golongan I = 17 orang.

c. Pejabat Stuktural: 20 orang.

Eselon II = - orang; Eselon III = 21 orang; Eselon IV = 80 Orang;

d. Pejabat Fungsional: 125 orang.

4. Proses perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban SDH	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban SDH
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	Program Pengelolaan DAS Terpadu	Program Pengelolaan DAS Terpadu

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 6.503.404.365,- realisasi Rp. 4.866.014.053,- (74,82%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 10.465.779.000,- realisasi Rp. 8.124.615.818,- (77,63%);



3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp. 110.025.000,- realisasi Rp. 100.425.000,- (91,27%).

URUSAN PARIWISATA.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Pengembangan Kemitraan Kebudayaan Destinasi dan Promosi Pariwisata

- alokasi anggaran Rp. 11.732.548.276,-
- realisasi Rp. 10.224.267.933,- (88,41%)

1) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata

- Alokasi anggaran Rp. 385.024.000,-
- Realisasi Rp. 307.327.400,- (79,82%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Temu Pengembangan Pasar Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Syifa Ende pada tanggal 01 - 03 Juni 2018 bersamaan dengan pelaksanaan Bulan Soekarno, dengan peserta 50 Orang dari Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta para pelaku pariwisata (ASITA, PHRI dan HPI); Terselenggaranya Lomba Blog dan Vlog Pariwisata di Kupang dari tanggal 28 Oktober - 08 Desember 2018 bertujuan mendorong kreatifitas generasi muda NTT khususnya netizen untuk mempromosikan spot-spot wisata NTT ke masyarakat luas melalui media online. Lomba Blog dan Vlog mengusung Thema : **"EXOTIC NTT"** dengan peserta 104 Orang terdiri dari Lomba Blog 71 Orang dan Lomba Vlog 33 Orang. **Kategori Lomba Blog:** Juara I. Risma Dewi Puswita Judul Menikmati Eksotis Pantai Mananga-Aba, Juara II. Petrus Ola Keda Judul Ritual Sakral Menyambut Air Pulau Adonara, Juara III. Simon Nany Judul Gereja Batu Alam Nan Exotic St. Antonius Padua Kefamenanu, Juara Hiburan Yohanes K. Pesau Judul Eksotik Puncak Lelak, Bukit "Instagramable" di Kota Dingin Manggarai, Yuven A.P. Nitano Judul Gunung Api Batu Tara Jadi Tujuan Wisata Batu NTT, Maria Pankratia Mete Seda Judul Padang Kaca dan Hutan Hujan Tropis di Tiwu Sora, Theresia Dema Judul Beautiful Sunrise in Kelimutu Lake, Hubertus Thomas Fallo Judul

Bukit Nambuas, Nifu Malelat Kolaborasi Wisata Baru, Unik dan Keren. Siapa Yang Tidak Tergoda. **Kategori Vlog:** Juara I Indolines/Rudolf J. Mandato Judul Pulau Rote, Juara II Brotherhood/Fichtor S. Missa Judul Pantai Boisae, Juara III Ruang Dia/Rafael Miku Beding Judul Dari Langit Kodi, Juara Harapan Jholand MC Hzk Judul Langkah di Kupang, Rajib Binseff Judul Explore Sumba Air Terjun Matayangu, Najib BSA Judul Explore Bukit Tenau – Sumba NTT, Ishak Christian Judul The Most Epic Sema Journey, Eltji Pratama Judul Air Terjun Oehala.

2) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

- Alokasi anggaran Rp. 7.063.750.576,-
- Realisasi Rp. 6.109.025.093,- (86,48%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya NTT Expo di Kalabahi - Alor tanggal 14 s/d 16 September 2018 di Lapangan Mini Kalabahi – Alor peserta dari instansi pemerintah daerah dan swasta; Terlaksananya Event Bulan Soekarno dari tanggal 30 Mei s/d 09 Juni 2018 di Ende sebagai napak tilas sejarah lahirnya Pancasila sekaligus mengangkat branding Ende sebagai Kota Pancasila dan Kota Soekarno dalam perspektif wisata sejarah dan budaya;
- Terlaksananya Lomba Pidato antar pelajar Tingkat SLTA pada tanggal 31 Mei 2018 di Gedung Imaculata Ende, diikuti 10 Orang peserta Putra dan 12 Orang peserta Puteri dengan Thema " Bung Karno dan Pancasila ", hasil **Kategori Putra:** Juara I : Samuel Aquinaldo R. Djingi (SMAK Frateran Ndao), Juara II: Gilang Adi Prakarsa (SMAN 1 Ende) dan Juara III: Flady Faliyenco F.A. Pae (SMAK Suryadikara). **Kategori Putri :** Juara I : Maria G. Guna Putri (SMAKSuryadikara), Juara II: Andini Bellandina Mira (SMAK Frateran Ndao) dan Juara III: Theresia AvilaDelvintina Wandy (SMANI Bajawa);
- Terlaksananya Lomba Paduan Suara antar Etnis se-NTT diikuti 7 kelompok Paduan Suara: Juara I : PS Etnis Lio, Juara II: PS Etnis Rote dan Juara III: PS Etnis Ende;
- Terselenggaranya Festival Tenun Ikat Sedaratan Sumba Tahun 2018 tahun ke 2, dalam rangka promosi serta membangun branding Pulau Sumba melalui Tenun Ikat yang sudah cukup dikenal dan mendunia dengan harapan Pulau Sumba semakin

dikenal pasar global pariwisata di Waingapu pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2018. diikuti 43 stand dari daratan Sumba serta stand Dekranasda Kabupaten Malaka, atraksi Tenun ikat diikuti 500 orang penenun sedaratan Sumba, Fashion Show busana daerah kategori anak-anak, Pelajar, Dewasa, lomba perancang busana tenun ikat serta sharring design dan modelling bersama Levico Boutik pimpinan Ibu Julie Laiskodat. Festival Tenun Ikat Sedaratan Sumba ini dibuka secara resmi oleh Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata, Bapak I Gede Pitana beserta rombongan yang meninjau langsung proses tenun ikat di Lapangan Pahlawan-Waingapu. Kategori Lomba Fashion Show Anak-anak (Putra) : Juara I Farel Maison A, Juara II Savior Ngini Njuka dan Juara III Rizaldi Kalikit Bara. Kategori Lomba Fashion Show Anak-anak (Putri) : Juara I Gabriela Ivanovic R. Mbani, Juara II Cherya Denata Pattledy dan Juara III Gianina Melanda Meok. Kategori Lomba Fashion Show Pelajar (Putra) : Juara I Yeriski K. Ndama Yelu, Juara II Firdaus Berliano N. D dan Juara III Mohammad Nazib. Kategori Lomba Fashion Show Pelajar (Putri) : Juara I Konnie A. Ndapa Roka, Juara II Kezia Nandini R.T dan Juara III Chesya D.A. Rambu K.R. Kategori Lomba Fashion Show Profesional Dewasa (Putra) : Juara I Stefanus K. Windi, Juara II Morelius dan Juara III Umbu Yabbu Hukapati. Kategori Lomba Fashion Show Profesional Dewasa (Putri) : Juara I Gresela Nadya Lay Rihi, Juara II Ruth Mbatl Mbana dan Juara III Nadya Maimunah. Kategori Lomba Perancang Busana : Juara I Desy Kurnia Sari, Juara II Anggraini Natara dan Juara III Erni Koang;

- Terselenggaranya dukungan Event Budaya dalam dan luar daerah: Festival Budaya Sabu, Festival Budaya Manggarai Timur dan Festival Tsunami Sikka serta partisipasi pada East Nusa Tenggara Ethnic Festival (ENTEf) dengan peserta 30 Orang generasi muda pelaku seni pada tanggal 02 s/d 05 November 2018 di Lippo Plaza Denpasar-Bali; Terlaksananya Parade 1001 Kuda Sandelwood (Kuda Sumba) yang adalah salah satu dari 100 Top Event Nasional, pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2018 di Lapangan Manda Elu Kota Waikabubak dan tanggal 11 s/d 12 Juli 2018 di Lapangan Walakiri bertepatan

dengan penyelenggaraan Festival Tenun Ikat Sumba di Kota Waingapu Sumba Timur;

- Terlaksananya Rakor Sinkronisasi Program Kepariwisata di Hotel Sylvia Maumere diikuti peserta dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan narasumber. untuk menyatukan persepsi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan serta evaluasi program kepariwisataan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta sinkronisasi program pengembangan dan pembangunan pariwisata Tahun Anggaran 2018 dan 2019; Terlaksananya Kampanye Sadar Wisata di 3 (tiga) lokasi: Kefamenanu, Atambua dan Bajawa dengan sasaran kelompok sadar wisata (POKDARWIS) 8 kelompok tiap lokasi. Terlaksananya partisipasi pada Pameran Mitra Praja Utama (MPU)/ Pameran Adiwastra Nusantara 2018 dari tanggal 14-15 April 2018 di Hal A dan B Jakarta Convention Centre, Dinas Pariwisata Prov. NTT menampilkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggandeng Mitra dari Kabupaten Manggarai Timur, yakni Butik Yulisef;
- Terlaksananya penyusunan dan penggandaan bahan promosi pariwisata Calendar of events 1500 buku, Buku Pariwisata NTT Terjemahan Indonesia-Inggris 1500 buku, serta Buku Keragaman Nilai Budaya Dalam Kepariwisata sebanyak 1500 Buku.

3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata.

- Alokasi anggaran Rp.4.144.073.700,-
- Realisasi Rp.3.669.939.080,- (88,56%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya event Minat Khusus Lomba Mancing Piala Gubernur 2018, pada tanggal 28 s/d 30 September 2018 di wilayah Perairan Timor, dengan basis lomba di Pelabuhan Perikanan - Tenau. diikuti oleh 13 Tim. Hasil lomba trekking Tahun 2018 sesuai keputusan Tim Juri: Juara I Walisanga I – Ende, Juara II Mapala Unipa-Maumere, Juara III Sembur Paus-Lembata, Juara Harapan I Walisanga II-Ende, Juara Harapan II Dispora Ende dan Juara Harapan III Ende Tengah;



- Terlaksananya Bimtek Pariwisata Berkelanjutan pada tanggal 24 s/d 26 Mei 2018 di Hotel Elmylia Kupang diikuti 30 Orang peserta terdiri dari pelaku usaha pariwisata (Hotel) di Kota Kupang serta aparatur sipil Negara;
 - Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Hotel Ronita-Waikabubak dengan peserta 30 Orang berasal dari pelaku usaha bidang pariwisata di Kabupaten Sumba Barat;
 - Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Kabupaten Ende, tanggal 11 April 2018 bertempat di Hotel Syifa-Ende dengan peserta 30 Orang berasal dari pelaku usaha bidang pariwisata di Kabupaten Sumba Barat;
 - Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Usaha Pariwisata dengan peserta 6 Orang mewakili pelaku usaha pariwisata (Hotel) di Nusa Tenggara Timur berlangsung pada tanggal 25 s/d 29 April 2018 bertempat di JTTC dan Hotel Boutique- Yogyakarta;
 - Terselenggaranya Diklat Desa Wisata dari tanggal 14 s/d 17 April 2018 di Hotel Livero-Kefamenanu dengan peserta 30 orang berasal dari pengelola desa wisata, pelaku usaha pariwisata serta unsur aparatur yang membidangi usaha pariwisata;
 - Terlaksananya Analisa Pelayanan Pariwisata Berbasis Standarisasi di 20 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur pada Bulan Februari s/d Bulan Juli 2018 dengan sasaran usaha-usaha pariwisata seperti Hotel, Penginapan, Restoran, Café, Warung sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pengambilan kebijakan kepariwisataan;
- Terselenggaranya Turnamen Surfing di Pantai Bo,a Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 24 s/d 26 September 2018 peserta 65 Orang dari dalam maupun luar negeri dan team juri berasal dari ASC (Asosiasi Surfing Asia). hasil Turnament Surfing: Putra: Juara I Pudrico 9,8 (Australia), Juara II Alki Kallas 9,6 (Rote), Juara III Papi Kili 8,k3 (Nembrala). Putri: Juara I Alenxandra 8,8 (Guatemala), Juara II Candella 8 (Spanyol) dan Juara III Rebeca 7,7 (Rote).

4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terpadu

- Alokasi anggaran Rp.139.700.000,-
- Realisasi Rp.137.976.360,- (98,77%)

Capaian/hasil :

Terwujudnya Keterpaduan Program / Kegiatan dan terevaluasinya pelaksanaan program / kegiatan di Kabupaten / Kota serta tercetaknya buku data base Kepariwisata Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 berisi data obyek dan daya tarik wisata di seluruh Kabupaten/Kota se – Nusa Tenggara Timur.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

- Alokasi anggaran Rp. 2.036.782.000,-
- Realisasi Rp. 1.723.883.881,- (83,34%)

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif.

- Alokasi anggaran Rp.1.171.538.000,-
- Realisasi Rp.1.077.427.381,- (91,97%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Workshop Pembenahan Homestay dan Belanja Bahan Baku Bangunan sebagai upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Akomodasi (Homestay) di destinasi pariwisata agar memenuhi standar sebagai penginapan bagi 15 Orang wisatawan pelaku usaha Homestay di Ba'a Kabupaten Rote Ndao, tanggal 19-21April 2018; Terlaksananya Workshop Pembenahan Homestay dan Belanja Bahan Baku Bangunan sebagai upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Akomodasi (Homestay) di destinasi pariwisata agar memenuhi standar sebagai penginapan bagi 15 Orang wisatawan Homestay di Kalabahi Kabupaten Alor, tanggal 06-08Agustus 2018; Terselenggaranya Fasilitasi Destination Management Organization (DMO) / Tourism Management Organization (TMO) sedaratan Flores dari tanggal 03 s/d 05 Mei 2018 di Labuan Bajo.
- Terlaksananya Fasilitasi pengembangan wisata kuliner di Destinasi Pariwisata yang tersebar pada 22 Kab/Kota se NTT sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan di daerah-daerah dengan potensi wisata kuliner difokuskan pada 35 Orang pelaku usaha kuliner di Pantai Lasiana Kota Kupang.

2) Kegiatan Peningkatan Peran Media dan Perfilman

- Alokasi anggaran Rp.865.244.000,-
- Realisasi Rp.646.456.500,- (74,71%)

Capaian/hasil :

- Terseleggaranya Lomba Foto Bertema Pariwisata bekerjasama dengan SkolMus Enterprise berlangsung di Kupang dalam rangka HUT NTT ke 60 diikuti 165 orang peserta dari kalangan Umum, Mahasiswa, Pelajar, Profesional dan umum 435 foto. Setelah melalui tahap penjurian, terpilih 44 foto dari 44 orang sebagai pemenang: Kategori Umum: Juara I Hendrik A. Mau Judul Foto Hutan Pinus Bukit Nuam (UM-76), Juara II Andi Sadewo Judul Foto Pantai Oetune (UM-103) dan Juara III Naldo Mitang Judul Foto Pantai Kenanga (UM-14). Kategori Pelajar: Juara I Izulhaq Ramadhan Judul Foto Bahu Membahu (PE-4), Juara II Mela Nabila Judul Foto Pantai Perawan Yang Memikat Hati (PE-8) dan Juara III Maria G. Kedang Judul Foto Fulan Fehan (PE-12). Kategori Profesional: Juara I Kornelis Kaha Judul Foto Menjaga Kebudayaan Agar Tidak Punah (PRO-12), Juara II Heindrich Dominggus Dengi Judul Foto Keluar dari Gate (PRO-5) dan Juara III Naldo Mitang Judul Foto Sadok Nonga (PRO-3). Kategori Mahasiswa: Juara I Meysiliani Bata Judul Foto Deturia (MA-48), Juara II Anastasia L. Fricintya Judul Foto Ritual Congko Lokap (MA-59) dan Juara III Ari Yudanto Judul Foto Surga Tersembunyi (MA-38)
- Terlaksananya Partisipasi pada event pariwisata dunia World Travel Mart (WTM) 2018 di London-Inggris merupakan event tahunan mempertemukan para pelaku industri perjalanan professional dengan calon pembeli paket perjalanan.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 82 orang, dengan kualifikasi:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = 2 orang; SLTP = 2 orang; SLTA = 22 orang; D III = 12 orang; Sarjana = 31 orang; Magister = 12 orang; Doktor = 1 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 10 Orang; Gol. III = 48 org; Gol. II = 21 org; Gol. I = 3 orang;



- c. Pejabat Stuktural: 21 orang.
 - Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV= 15 orang
- d. Pejabat Fungsional: 1 orang.

4. Proses perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	-	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata
2	-	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
3	Program pembangunan industri pariwisata	-
4	Program pembangunan kelembagaan	-
5	Program pembangunan destinasi pariwisata	-
6	Program Pengembangan Pariwisata	-

- 5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 1.264.102.724,- realisasi Rp. 1.170.895.039,- (86,22%);
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 174.000.000,- realisasi Rp. 169.472.000,- (91,61%);
- 3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 30.707.000,- realisasi Rp. 29.870.500,- (97,28%).

URUSAN PERINDUSTRIAN.

- 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - Alokasi anggaran Rp. 3.870.808.800,-
 - Realisasi Rp. 3.552.396.750,- (91,77%)



1) Kegiatan Sertifikasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk IKM.

- Alokasi anggaran Rp. 834.707.500,-
- Realisasi Rp. 802.378.250,- (96,13%)

Capaian/hasil :

- Pemberian bantuan pengurusan Sertifikat Halal bagi 4 IKM di Kabupaten Belu dan Malaka untuk mendapatkan 10 (sepuluh) Sertifikat Halal;
- Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif bagi Pelaku Usaha Industri dan Bantuan Peralatan; diberikan bantuan 9 unit peralatan/mesin kepada 30 orang/pelaku IKM pada 3 kelompok IKM di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat;
- Adanya Keikutsertaan 2 pelaku usaha IKM dari Kabupaten Sabu Raijua dan Rote Ndao pada Pameran tingkat Nasional pada tanggal 25 s/d 30 April 2018 di Lokasi Pameran di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta;
- Terlaksananya Identifikasi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di 7 Kabupaten: Kabupaten Manggarai Barat, Ende, Sikka, Alor, Sumba Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Kecil

- Alokasi anggaran Rp.2.827.719.300,-
- Realisasi Rp.2.571.850.500,- (90,95%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya bimtek Tenun Gedogan dan Pencelupan Pewarnaan bagi kelompok usaha tenun di Kabupaten Ngada pada tanggal 23 s/d 27 Juli 2018 di Kampung Bena/ Desa Tiworiru Kecamatan Jerebuu dan diikuti 10 orang peserta dari Kelompok Bena Wisata;
- Pelatihan Menjahit Busana Modifikasi dan Aneka Produk dari Kain Tenun di Kabupaten Ngada pada Bulan Juni;
- Adanya Pembangunan Industri Kecil (PIK) Kampung Tenun di Kabupaten Ngada, Desa Tiworiru Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada;
- Adanya Kajian Business Plan Industri Tepung Kakao menjadi tepung dan lemak kakao di kabupaten Sikka, di mana Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama

dengan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang beranggotakan dua 2 orang Marthen Robinson Pelokila dan Johana Windy Gradiforiana;

- Terlaksananya bimtek pengolahan pisang pada tanggal 24 s/d 28 April 2018 di Desa Rainawe Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Peserta merupakan masyarakat atau kelompok industri kecil rumah tangga (IKRT) yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan terutama pengolahan dengan bahan dasar pisang yaitu Kelompok Lintas Batas Desa Rainawe kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
- Terlaksananya Bimtek Pengolahan jagung pada tanggal 6 s/d 10 Agustus 2018 bertempat di aula Kantor desa Labolewa Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo Peserta pelatihan dari Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kbaupeten Nagakeo yang berjumlah 10 orang (6 orang peserta perempuan, dan 4 orang peserta laki-laki);
- Adanya bantuan Peralatan Pengolahan Jagung kepada para peserta Bimtek terdiri dari Mixer (2 buah), Dandang (2 buah), Blender (2 buah), Oven Hock (2 buah), Celemek (15 buah), Serbet (1 lusin), Masker (15 buah), Sarung tangan (15 buah), kemasan plastic Uk 0,25 kg (2 pak), kemasan plastic Uk 0,5 kg (2 pak), kemasan dos mika Uk 0,25 kg (2 pak), kemasan dos mika Uk 0,5 kg (2 pak), Bokor stainless besar (2 buah), bokor stainless sedang (2 buah), Ember plastic besar (2 buah), ember plastic sedang (2 buah), kompor hock (2 buah), wajan (2 buah), sutel (2 buah), serokan (2 buah), hand sealer (2 buah).

3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Alokasi anggaran Rp. 208.382.000,-
- Realisasi Rp. 178.168.000,- (85,50 %)

Capaian/hasil :

- Tercapainya sasaran pembinaan yang lebih tepat dan spesifik di masa mendatang.
- Observasi langsung juga sulit dilakukan di kabupaten/kota yang mendapat beberapa kegiatan pembinaan. Pemilihan lokasi pemantauan dilakukan mengingat keterbatasan waktu dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

- Penggolongan industri sesuai dengan jenis pengolahan dan tingkatan, baik industri besar, menengah, kecil maupun industri rumah tangga di Kabupaten/Kota.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 48 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan:
SD = - Orang; SLTP = - Orang; SLTA = 12 Orang; Diploma = 4 Orang; Sarjana = 27 Orang; Magister = 5 Orang
- Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 6 Orang; Golongan III = 34 Orang; Golongan II = 8 Orang; Golongan I = - Orang
- Pejabat Stuktural: 12 orang.
Eselon II = - Orang; Eselon III = 3 Orang; Eselon IV = 9 Orang.
- Pejabat Fungsional: 36 orang.
Fungsional Umum = 32 Orang; Fungsional Tertentu = 4 Orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program dalam RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 1.167.365.700,- realisasi Rp. 1.142.246.650,- (97,85%);
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 318.150.000,- realisasi Rp. 312.383.750,- (98,19%);
- Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 20.050.500,- realisasi Rp. 20.044.500,- (99,97%).

URUSAN PERDAGANGAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

- Alokasi anggaran Rp.1.198.560.000,-
- Realisasi Rp.1.184.097.750,- (98,79%)

1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

- Alokasi anggaran Rp.950.000.000,-
- Realisasi Rp.935.861.150,- (98.51%)

Capaian/hasil :

- Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan di 22 Kabupaten/Kota; ditujukan untuk menertibkan pelaku usaha agar tidak menjual makanan dan minuman kedaluarsa dalam rangka meningkatkan keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L) bagi konsumen, dengan mengawasi masa kedaluarsa, label dan MKG (Manual Kartu Garansi) dari makanan dan minuman yang beredar di Distributor, Hypermarket, Supermarket, Toko/Kios dan pasar tradisional. Dari pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan di 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur ditemukan 79 temuan dari 479 pelaku usaha yang diawasi. Temuan-temuan tersebut terdiri dari produk makanan/ minuman dan obat-obatan kadaluarsa dan produk makanan kemasan yang tidak memiliki label. Jumlah temuan terbanyak terdapat di 2 (dua) kabupaten yaitu : Kabupaten Manggarai Timur dan Sumba Timur.
- Pengawasan Barang-barang wajib Bertanda SNI di 22 Kabupaten/Kota; terhadap 241 pelaku usaha menemukan 16 pelanggaran, dimana masih ada pelaku usaha yang menjual produk lampu LHE, sakelar yang tidak bertanda SNI. Produk yang diawasi merupakan produk-produk / barang-barang yang wajib SNI. Pengawasan dilakukan terhadap produk-produk sebagai berikut : Produk Tusuk Kontak, produk Baja Lembaran Lapis Seng, Baja Tulangan Beton, Sakelar dan lampu LHE. Pengawasan ini dilakukan di toko-toko bahan bangunan

dan alat - alat listrik di Kabupaten/Kota dan ditemukan di 7 (tujuh) kabupaten: Kota Kupang, Kabupaten Belu, Ende, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

- Adanya Pengawasan minuman beralkohol di 22 Kabupaten/Kota terhadap 232 pelaku usaha didapati 132 pelanggaran, dimana masih banyak pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin; adanya pengawasan pupuk bersubsidi terhadap 60 pelaku usaha yang terdiri dari distributor, sub distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang ada di 22 Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap 103 pelaku usaha Barang Berbahaya (Formalin) di 22 Kabupaten/Kota; ditujukan untuk mengawasi penyalahgunaan formalin untuk produk makanan.

- Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi dalam rangka **Hari Raya Idul**: Tahun 2018 dan Hari Raya Natal di 6 Lokasi: Halaman Masjid Raya Nur Sa'ada Kelurahan Fontein pada tanggal 14 Mei 2018, Lapangan Samping Rumah Sakit Angkatan Laut Kelurahan Namosain pada tanggal 15 Mei 2018, Lapangan Samping Toko Rukun Jaya Kelurahan Oeba pada tanggal 16 Mei 2018, Halaman Kantor Lurah Liliba tanggal 17 Mei 2018, Lapangan Pasir Panjang Kelurahan Pasir Panjang tanggal 18 Mei 2018, Halaman Masjid Darusalam Kelurahan Sikumana tanggal 19 Mei 2018. **Hari Raya Natal** di 6 Lokasi: Halaman Gereja Kota Kupang Kelurahan LLBK Kota Kupang tanggal 10 Desember 2018, Halaman Gereja Lahairoi Kelurahan Namosain pada tanggal 11 Desember 2018, Halaman Gereja Ebenheser Kelurahan Oeba pada tanggal 12 Desember 2018, Halaman Gereja Lanud Eltari Kelurahan Penfui pada tanggal 13 Desember 2018, Halaman Gereja Galed Kelurahan Kelapa Lima pada tanggal 14 Desember 2018, Halaman Gereja Syalom Kelurahan Airnona pada tanggal 15 Desember 2018.

2) Kegiatan Pengendalian Mutu.

- Alokasi anggaran Rp.248.560.000,-
- Realisasi Rp.248.236.600,- (99,87%)

Capaian/hasil :

- Adanya Pendataan dan Evaluasi Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur pada 5 Pasar di 4 (empat) Kabupaten: Timor



Tengah Selatan (Pasar Inpres Soe), Kabupaten Rote Ndao (Pasar Metina), Kabupaten Malaka (Pasar Be'i Abu) dan Kota Kupang (Pasar Kuanino dan Pasar Penfui) dan terdapat 2 pasar di 2 Kabupaten/Kota yang dapat diusulkan sebagai pasar tertib ukur karena memiliki peralatan UTTP yang telah bertanda terasah di atas 80%: Pasar Metina di Kabupaten Rote Ndao dan Pasar Penfui di Kota Kupang.

- Teridentifikasinya Pelaku Usaha dalam rangka inventarisir komoditi untuk pengendalian mutu di 7 Kabupaten/Kota: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka dan Rote Ndao.
- Verifikasi/Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium di Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain : Pengujian Timbangan Elektronik, Pengujian Anak Timbangan dan Pengujian Gelas Ukur dan Labu Ukur.

b. Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- Alokasi anggaran Rp.1.212.184.500,-
- Realisasi Rp.1.168.565.050,- (96,40%)

1) Kegiatan Pemasaran Produk Ekonomi Daerah

- Alokasi anggaran Rp.238.970.000,-
- Realisasi Rp.216.205.700,- (90,47%)

Capaian/hasil :

- Misi dagang lokal di Surabaya melibatkan 100 orang peserta terdiri dari 10 orang Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 20 orang Pelaku Usaha dari NTT dan 70 orang Pelaku Usaha, Instansi terkait dan konsumen dari Provinsi Jawa Timur, di Aula Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 9 Mei 2018; adanya kontak dagang antar pelaku usaha dari NTT dan Jawa Timur.

2) Kegiatan Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar.

- Alokasi anggaran Rp. 264.840.000,-
- Realisasi Rp. 261.697.550,- (98,81%)

Capaian/hasil :

- Pengumpulan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri; ditujukan untuk melakukan pengumpulan data prognosa (estimasi) untuk 19 komoditi bahan kebutuhan pokok, yaitu : Beras, Terigu, Gula Pasir, Minyak Goreng, Mentega, Daging Sapi, Daging Ayam, Susu, Jagung Pipil, Minyak Tanah, Garam

Beryodium, Telur Ayam, Cabai Merah, Bawang Merah, Ikan Mentah, Ikan Kering, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu agar menjadi acuan dalam pengadaan dan penyaluran stok bahan kebutuhan pokok masyarakat dan data SIUP/TDP di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT agar menjadi acuan dalam pembinaan untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib niaga bagi pelaku usaha. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Prognosa Kebutuhan Masyarakat selama 1 semester.

- Pemantauan Harga Kebutuhan pokok Masyarakat yang dipantau yaitu : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging sapi, Daging ayam, telur ayam, susu, jagung, garam, tepung terigu, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, cabe merah besar, cabe kecil, bawang, ikan dan ketela pohon, untuk mengidentifikasi secara baik dan teratur data harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan diatas/dibawah batas normal, melalui pemantauan pada setiap hari kerja di 3 (tiga) pasar tradisional di Kota Kupang yaitu Pasar Kuanino, Pasar Oesapa dan Pasar Penfui dari Bulan Januari – Desember 2018.

3) Kegiatan Promosi Produk Ekspor NTT

- Alokasi anggaran Rp. 167.200.000,-
- Realisasi Rp. 154.495.900,- (92,40%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Pameran Inacraft dari tanggal 26 – 30 April 2018 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan – Jakarta, diikuti 34 Provinsi di Indonesia, Dinas Perdagangan Provinsi NTT mengikutsertakan 2 (dua) UKM : Tenun Ikat Lokekeli dan Pengrajin Sasando Dalek Esa di dampingi 3 (tiga) orang dari Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di **Kabupaten Timor Tengah Selatan** pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Aula Hotel Timor Megah, Jln. Gajah Mada No. 56 – Kota Soe diikuti 50 (lima puluh) orang, terdiri dari : aparaturnya Dinas dan Instansi terkait, KADIN, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM

potensial di Kota Soe dan sekitarnya, **Kabupaten Timor Tengah Utara** pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Aula Hotel Ariesta, Jln. Basuki Rachmad No. 29 – Kota Kefamenanu, diikuti 50 (lima puluh) orang, terdiri dari : aparatur Dinas dan Instansi terkait, KADIN, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM potensial di Kota Kefamenanu dan sekitarnya, **Kabupaten Alor** pada tanggal 22 November 2018 bertempat di Aula Hotel Adi Dharma, Kalabahi, diikuti 50 (lima puluh) orang, terdiri dari : aparatur Dinas dan Instansi terkait, KADIN, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM potensial di Kota Kalabahi dan sekitarnya.

- Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional di 4 (empat) kabupaten: Kabupaten Kupang bertempat di Aula Alfa Omega Jl. Timor Raya, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah diikuti 50 orang dari : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten TTS, Instansi teknis terkait dan pelaku usaha di Kab. Kupang, Kab. TTS bertempat di Aula Hotel Timor Megah – Soe, diikuti 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari : aparatur dinas/instansi terkait, Asosiasi, Perbankan, Akademisi dan Pelaku Usaha (Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM Potensial) di Kota Soe dan sekitarnya, Kabupaten Belu bertempat di Aula Timor Hotel - Kabupaten Belu diikuti 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari : aparatur dinas/instansi terkait, Asosiasi, Perbankan, Akademisi dan Pelaku Usaha (Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM Potensial) di Kota Atambua dan sekitarnya.

4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lintas Batas.

- Alokasi anggaran Rp.84.010.000,-
- Realisasi Rp.83.210.000,- (99,05%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas di Kota Kupang, Kabupaten Belu, TTU dan Malaka pada triwulan I (Bulan April) dan triwulan II (Juni) Triwulan III (Bulan Oktober) dan Triwulan IV (bulan Desember); untuk mendapatkan data dan informasi terkait kinerja ekspor dan impor di daerah serta

informasi pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur dengan melakukan pemantauan ke daerah kabupaten yang tinggi aktifitas ekspor dan impornya.

5) Kegiatan Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

- Alokasi anggaran Rp.95.482.500,-
- Realisasi Rp.94.202.500,- (98,66%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di 3 Kabupaten: Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Aula Hotel Timor Megah, Jln. Gajah Mada No. 56 – Kota Soe peserta 50 (lima puluh) orang, terdiri dari : aparatur Dinas dan Instansi terkait, KADIN, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM potensial di Kota Soe dan sekitarnya, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Aula Hotel Ariesta, Jln. Basuki Rachmad No. 29 – Kota Kefamenanu peserta 50 (lima puluh) orang, terdiri dari : aparatur Dinas dan Instansi terkait, KADIN, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM potensial di Kota Kefa dan sekitarnya dan Kabupaten Alor pada tanggal 22 November 2018 bertempat di Aula Hotel Adi Dharma, Kalabahi peserta 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari: aparatur Dinas dan Instansi terkait, Perbankan, Akademisi, Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM potensial di Kota Kalabahi dan sekitarnya.

6) Kegiatan Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional.

- Alokasi anggaran Rp.134.130.000,-
- Realisasi Rp.132.430.000,- (98,73%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional di 4 (empat) kabupaten: Kabupaten Kupang pada tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di Aula Alfa Omega Jl. Timor Raya, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah peserta 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Timor Tengah Selatan, Instansi teknis terkait dan pelaku usaha di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada

tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Aula Hotel Timor Megah – Soe peserta 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari : aparaturn dinas/instansi terkait, Asosiasi, Perbankan, Akademisi dan Pelaku Usaha (Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM Potensial) di Kota Soe dan sekitarnya, Kabupaten Belu pada tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Aula Timor Hotel - Kabupaten Belu peserta 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari : aparaturn dinas/instansi terkait, Asosiasi, Perbankan, Akademisi dan Pelaku Usaha (Eksportir, Importir dan Pimpinan UKM Potensial) di Kota Atambua dan sekitarnya.

7) Kegiatan Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor.

- Alokasi anggaran Rp. 105.052.000,-
- Realisasi Rp. 104.145.300,- (99,14%)

Capaian/hasil :

- Adanya Forum Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor di Kota Kupang pada tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Aula Hotel Sylvia Primer Kupang, Kota Kupang peserta 20 orang terdiri dari eksportir, calon eksportir dan UKM potensial ekspor di Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 22 s/d 23 November 2018 bertempat di Aula Hotel Sinar Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya peserta 20 orang terdiri dari eksportir, calon eksportir dan UKM potensial ekspor di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 20 s/d 21 Maret 2018 bertempat di Aula Hotel Fortuna 2, Kabupaten Flores Timur peserta 20 orang terdiri dari eksportir, calon eksportir dan UKM potensial ekspor di Kabupaten Flores Timur.

8) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Perdagangan

- alokasi anggaran Rp. 122.500.000,-
- realisasi Rp. 122.178.100,- (99,74%)

Capaian/hasil :

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Perdagangan pada Sub Kegiatan Penyusunan Data Perdagangan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota dengan hasil tersedianya sebuah *database* yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan sektor perdagangan di Nusa Tenggara Timur

meliputi: Sarana Perdagangan : Pasar, Hotel, Rumah Makan, Rumah Potong Hewan (RPH) di Nusa Tenggara Timur, Pengawasan Barang Beredar di Nusa Tenggara Timur, Pelaku Importir di Nusa Tenggara Timur, Volume dan Nilai Ekspor dan Impor di Nusa Tenggara Timur Eksportir di Nusa Tenggara Timur dan Importir di Nusa Tenggara Timur.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 51 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 15 orang; Diploma = 1 orang; Sarjana (S1) = 32 orang; Magister = 3 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 5 orang; Golongan III = 41 orang; Golongan II = 5 orang; Golongan I = - orang.
- c. Pejabat Stuktural: 14 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 10 orang
- d. Pejabat Fungsional: 2 orang.
Fungsional tertentu = 2 orang

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program dalam RENJA Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:



1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 838.833.100,- realisasi Rp. 828.362.273,- (98,75%);
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 223.083.600,- realisasi Rp. 214.327.850,- (96,08%);
3. **Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 16.970.000,- realisasi Rp. 16.970.000,- (100%).

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi.
 - Alokasi anggaran Rp.1.601.937.050,-
 - Realisasi Rp.1.374.374.500,- (85,79%)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral
 - Alokasi anggaran Rp.750.454.300,-
 - Realisasi Rp.594.338.700,- (79,20%)

Capaian/hasil :

 - Terlaksananya pembinaan dan penertiban usaha pertambangan di 22 Kabupaten/Kota.
 - Terlaksananya sosialisasi perpajakan untuk pemegang IUP.
 - Terlaksananya sosialisasi usaha pertambangan Penghentian sementara pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral logam dan bukan logam kecuali batuan jenis batu dan pasir untuk pembangunan.
 - Terlaksananya kegiatan pengawasan mineral logam di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Ende, Nagekeo, Ngada, Matim, Manggarai, Mabar, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Malaka.
 - Tersedianya 70 rektek data rekomendasi teknis: 29 Rektek IUP baru (eksplorasi), 28 Rektek IUP perpanjangan dan 13 Rektek untuk peningkatan IUP menjadi IUP OP.
 - Terlaksananya inspeksi 73 IUP dari 321 IUP di 22 Kabupaten/Kota, Kota Kupang 1 IUP, TTS 12 IUP, TTU 7 IUP, Belu 9 IUP, Manggarai 6 IUP, Manggarai Barat 2 IUP,

Manggarai Timur 3 IUP, Ngada 2 IUP, Nagekeo 1 IUP, Ende 2 IUP, Flotim 1 IUP, Sikka 1 IUP, Lembata 1 IUP, Alor 3 IUP, Kupang 7 IUP, Malaka 5 IUP, Sabu Raijua 1 IUP, Sumba Barat Daya 2 IUP, Sumba Barat 1 IUP, Rote Ndao 4 IUP, Sumba Timur 1 IUP, Sumba Tengah 1 IUP.

2) Kegiatan Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam

- Alokasi anggaran Rp. 75.433.600,-
- Realisasi Rp. 45.380.750,- (60,16%)

Capaian/hasil :

Terlaksanannya kegiatan pengawasan PETI di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Malaka.

3) Kegiatan Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Alokasi anggaran Rp. 114.472.250,-
- Realisasi Rp. 97.505.600,- (85,18%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya perhitungan dan penetapan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Negekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sabu Raijua.

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah.

- Alokasi anggaran Rp.661.576.900,-
- Realisasi Rp.637.149.450,- (96,31%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya perhitungan, penetapan dan optimalisasi pajak air permukaan di 22 Kab/Kota.
- Tersedianya Obyek Pajak PDAM 94 dan Obyek pajak swasta 23 dan wajib pajak 35.
- Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018.

- Tersusunnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Nilai Perolehan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 48 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.
- b. Program Pembinaan Dan Pembangunan Sarana Prasarana Energi Dan Ketenagalistrikan.
- Alokasi anggaran Rp.41.475.693.945,-
 - Realisasi Rp.24.352.727.125,- (58,72%)
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pegawasan Usaha Pertambangan Mineral
- Alokasi anggaran Rp.595.849.000,-
 - Realisasi Rp.557.900.250,- (93,63%)
 - Capaian/hasil :
 - Terbangunnya 5 (lima) unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kabupaten Sumba Barat dan Manggarai Timur.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan
- Alokasi anggaran Rp.40.729.826,745,-
 - Realisasi Rp.23.653.719.675,- (58,07%)
 - Capaian/hasil :
 - Terbangunnya 5 (lima) unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kabupaten Sumba Barat (desa Waelibo, Horona Kala, Lolowano) dan Sumba Tengah (desa Susu Wandewa, Bondosula).
 - Terbangunnya 292 unit PLTS Sehen di Kabupaten Flotim, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Mabar, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Kupang.
- 3) Kegiatan Pelatihan dan Pembuatan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah (RUKD) dan Sosialisasi RUKD.
- Alokasi anggaran Rp.150.018.200,-
 - Realisasi Rp.141.107.200,- (94,06%)
 - Capaian/hasil :
 - Tersedianya 5 orang SDM yang terlatih tentang tata cara pembuatan RUKD.
 - Tersedianya data inventarisasi ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
 - Tersedianya data Captive Power/Genset di Kab. Kupang, TTU, Belu, Sikka, Ende, Sumbar, Sumba Timur dan Kota Kupang.

- Tersedianya data belum berlistrik 5 dokumen di Kab. Alor (5 desa), Sikka (8 Desa), Ende (10 Desa), Sumba Timur (5 desa) dan Sumba Barat Daya (18 desa).

c. Program Pengembangan Pertambangan.

- Alokasi anggaran Rp.18.512.351.818,-
- Realisasi Rp.14.422.161.315,- (77,91%)

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- Alokasi anggaran Rp.250.000.000,-
- Realisasi Rp.218.694.500,- (87,48%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di 22 Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah.

- Alokasi anggaran Rp.18.262.351.818,-
- Realisasi Rp.14.203.466.815,- (77,77%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya data teknis hasil survey potensi air tanah (Geolistrik) di 22 Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya Pelaksanaan perencanaan optimalisasi dan Survey Potensi Air Tanah 16 Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya optimalisasi sumur bor Tahun 2018 di 18 Kab/Kota: Kabupaten TTS, Belu, Malaka, TTU, Sikka, Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Rote Ndao, Manggarai Barat, Lembata, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Alor dan Kab. Kupang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 121 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 33 orang; D3 = 2 orang; Sarjana = 70 orang; Magister = 16 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 16 orang; Golongan III = 91 orang; Golongan II = 14 orang; Golongan I = - orang.



- c. Pejabat Stuktural: 39 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 10 orang; Eselon IV = 27 orang.
- d. Pejabat Fungsional: = 1 orang Arsiparis.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi NTT yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi	Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
2	Program Pengembangan Pertambangan	Program Pengembangan Pertambangan
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

- 5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** kurang mencukupi.
- 6. Permasalahan dan Solusi :** tidak ada.
- 7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan Pilihan di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 1.946.480.987,- realisasi Rp. 1.633.993.224,- (83,95%);
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 603.407.200.- realisasi Rp. 501.601.350,- (83,11%);
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp.22.000.000,- realisasi Rp. 20.598.000,- (93,63%).

URUSAN KETRANSMIGRASIAN.

- 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi
 - Alokasi anggaran Rp.861.000.000,-
 - Realisasi Rp.807.609.668,- (93,80%)
 - 1) Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Alokasi anggaran Rp.411.000.000,-
 - Realisasi Rp.380.243.700,- (92,52%)



Capaian/hasil :

- Terlaksananya penyerahan Bantuan Perlengkapan Sekolah anak-anak SD/SMP/SMA di UPT Walandimu Kab. Sumba Barat Daya dan UPT Elopore Kab. Sumba Barat.
- Adanya bantuan sarana dan prasarana peribadatan Kapela di UPT Longge Manggarai Barat, UPT Uluwae Kab.Ngada, UPT Maronggela Kab.Ngada dan UPT Elopore Kab. Sumba Barat.
- Pengambilan Data Kelembagaan Ekonomi di UPT Laibaru Kab.Sumba Timur dan UPT Kolikapa Kab. Ende.
- Bantuan untuk peningkatan kapasitas SDM perempuan dibidang tenun ikat tradisional (alat tenun tradisional) di UPT elopore Kab. Sumba Barat.
- Adanya Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di UPT Hobajongi Kab. Sumba Barat 25 Unit.

2) Kegiatan Pembangunan Transmigrasi Baru.

- Alokasi anggaran Rp.250.000.000,-
- Realisasi Rp.231.710.068,- (92,68%)

Capaian/hasil :

- Adanya sosialisasi Informasi Ketransmigrasian (Pendataan Animo Masyarakat) di Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Barat, pada akhir Desember 2018.
- Adanya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Daerah Tujuan dan Pengecekan Kesiapan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Daerah Tujuan di Provinsi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Desember 2018.

3) Kegiatan Pelatihan Imposomo dan Pelatihan Integrasi Sos.

- Alokasi anggaran Rp.200.000.000,-
- Realisasi Rp.195.655.900,- (97,83%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Pelatihan Intensifikasi, Komposisi, Hama (Inposma) 2 paket / 40 orang di UPT Laimbaru Kab.Sumba Timur 1 paket / 20 orang dan UPT Longge Kab. Manggarai Barat 1 paket / 20 orang.
- Terlaksananya Pelatihan Integrasi Sosial (PIS) 2 paket / 40 orang di UPT Lidor Kab. Rote Ndao 1 paket / 20 orang dan UPT Sanabibi Kab. Belu 1 paket / 20 orang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai dilingkungan Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 166 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 52 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 101 orang; Magister = 6 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 15 orang; Gol. III = 127 org; Gol. II = 24 org; Gol. I = - org.

c. Pejabat Stuktural: 26 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 20 orang.

d. Pejabat Fungsional: 21 orang.

Pengantar Kerja = 5 orang, Arsiparis = 4 orang, Pemberdayaan Swakarsa Mandiri (PSM) = 4 orang, Instruktur Latihan Kerja = 4 orang, Instruktur Produktifitas = 4 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Program dalam RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD adalah:

a. Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: lengkap.

6. Permasalahan dan Solusi : tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

B URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA.

PENUNJANG URUSAN

URUSAN PENGAWASAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- alokasi anggaran Rp.8.074.202.348,-
- realisasi Rp.7.863.541.216,- (97,39%)

1) Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal

- alokasi anggaran Rp. 5.905.473.174,-
- realisasi Rp. 5.741.445.119,- (97,22%)

Capaian Kegiatan :

- Pemeriksaan Kinerja tingkat Provinsi yang dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 pada 48 SKPD dan menghasilkan 48 LHP.
- Pemeriksaan Kinerja tingkat Kabupaten/Kota dengan masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan terhadap 4 (tiga) SKPD jumlah keseluruhan 88 SKPD dari bulan April sampai November 2018 dan menghasilkan 88LHP.
- Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT bulan Maret 2018 menghasilkan 1 Laporan Hasil Review,
- Pemeriksaan Kinerja pada 22 Inspektorat Kabupaten/Kota pada bulan April s/d bulan Desember 2018 menghasilkan 22 LHP.
- Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi di 22 Kabupaten pada bulan Februari 2018 menghasilkan 22 Laporan kepada Inspektur Provinsi NTT dan dirangkumkan dalam 1 Laporan kepada Gubernur NTT.



- Evaluasi Monitoring Pendampingan terhadap 49 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dilakukan 2 tahap, Tahap I pada bulan Juni 2018 dan Tahap II bulan Desember 2018 menghasilkan 49 Surat Penegasan hasil evaluasi kepada masing-masing SKPD dan 1 (satu) buah Laporan kepada Gubernur NTT.
- Pelaksanaan Rapat Regional Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Itjen Kementrian Dalam Negeri dan Itjen Kementrian Teknis di Ruangan Rapat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, peserta perwakilan dari Kabupaten/Kota dan Provinsi, pada Bulan Desember 2018 menghasilkan 1 laporan Perkembangan Tindaklanjuti.
- Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan tingkat Provinsi di Neo By Hotel Kupang, peserta dari 22 Kabupaten/Kota dan perwakilan masing-masing Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, pada bulan Oktober 2018, peserta hadir 150 orang dan menghasilkan 1 laporan dan Nota Kesepakatan antara Inspektur Provinsi dan para Inspektur Kabupaten/Kota tentang jadwal dan Perangkat Daerah yang akan diperiksa di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Pengawasan dengan Itjen Kemendagri di Bengkulu, pada bulan Nopember Tahun 2018, dua Orang menghasilkan Kesepakatan penjadwalan pemeriksaan Itjen Kementerian dalam melakukan pemeriksaan di Provinsi NTT.

2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- alokasi anggaran Rp. 1.402.059.000,-
- realisasi Rp. 1.380.298.197,- (98,44%)

Capaian Kegiatan :

evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BPKP Perwakilan NTT pada bulan Agustus s/d September 2018 di 22 Kabupaten/Kota menghasilkan 22 LHP dengan Skor peringkat kinerja per Pemerintah Kabupaten/Kota.



- 3) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - alokasi anggaran Rp. 635.947.374,-
 - realisasi Rp. 612.875.250,- (96,37%)

Capaian Kegiatan :

jumlah kasus ditangani di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sejumlah 28 kasus sepanjang Tahun Anggaran 2018:25 buah kasus untuk menangani pengaduan di tingkat Provinsi dan 3 buah kasus untuk menangani pengaduan kasus di tingkat Kabupaten/Kota, 28 Nota Dinas Hasil Pemeriksaan.
 - 4) Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah
 - alokasi anggaran Rp. 130.722.800,-
 - realisasi Rp. 128.922.650,- (98,62%)

Capaian Kegiatan :

 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2018 dari 22 Kabupaten/Kota dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan juga dirangkumkan dalam 1 (satu) Laporan untuk Gubernur NTT dan Menteri Dalam Negeri.
 - Adanya pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli yang terlibat dari Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Unsur Polda NTT (Irwasda NTT), Inspektorat Provinsi NTT, Kejaksaan Tinggi, TNI, Kesbangpol, dan Biro Hukum, serta unsur akademisi
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- alokasi anggaran Rp. 293.912.400,-
 - realisasi Rp. 293.230.000,- (99,76%)
- 1) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pusdiklat
 - alokasi anggaran Rp. 293.912.400,-
 - realisasi Rp. 293.230.000,- (99,76%)

Capaian Kegiatan :

 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada bulan Januari s/d Desember 2018, peserta 16 orang (Auditor 9 selama 25 hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Keementarian Dalam Negeri - Depok menghasilkan 1Sertifikat,Bimbingan Teknis Subtantif Peningkatan Kualitas Pengawasan Aparatur Pengawas 7 orang, pada bulan Desember 2018 menghasilkan 7 buah sertifikat Bimtek Subtantif).

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi NTT per 31 Desember 2018sebanyak 110orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 9 orang; Diploma = 9 orang; Sarjana = 50 orang; Magister = 29 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 23 orang; Golongan III = 71orang; Golongan II = 2 orang; Golongan I = - orang.
- c. Pejabat Stuktural: 8 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 3 orang
- d. Pejabat Fungsional: 47orang.
(Auditor = 34 orang;P2UPD = 13 orang).

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi (Tidak ada)**
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.
Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:



1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 661.615.152,- realisasi Rp.587.692.101,- (88,82%);
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 172.402.000,- realisasi Rp. 169.938.025,- (98,57%);
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
Dana: Rp. 12.335.100,- realisasi Rp. 12.098.300,- (98,08%).

URUSAN PERENCANAAN

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - alokasi anggaran Rp. 8.423.036.100,-
 - realisasi Rp. 7.892.766.244,- (93,70%)
 - 1) Monev Terpadu Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - alokasi anggaran Rp. 549.999.800,-
 - realisasi Rp. 491.811.010,- (89,42%)

Capaian Kegiatan :

 - 2 kali proses monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan
 - Penggunaan data hasil monev dalam perencanaan pembangunan
 - 60 buku laporan hasil monitoring dan 50 buku evaluasi hasil RKPD provinsi dan Kab/Kota
 - 2). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
 - alokasi anggaran Rp. 5.786.997.300,-
 - realisasi Rp. 5.557.250.404,- (96,03%),

Capaian Kegiatan :

 - Tersedianya dokumen pembangunan daerah, melalui :
Penyusunan: 1) Dokumen Peraturan Gubernur No . 28 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTT tahun 2019, 150 buku; dan 2) dokumen Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, 100 buku

- Tersedia Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 masing masing 150 buku serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2018 masing-masing 100 buku
- Terlaksananya Forum SKPD, Pra-Musrenbang dan Musrenbang Provinsi NTT; keikutsertaan pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, Musrenbang Pusat, Rakortek Kepala Bappeda se Indonesia, pra-Musrenbangnas dan Musrenbangnas tahun 2018 serta terlaksananya Musrenbang RPJMD Tahun 2018-2023
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
- Tersedia Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD untuk kementerian/lembaga TA 2019; Renja Bappeda Provinsi NTT TA. 2019 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT TA. 2018, masing-masing 8 buku
- Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang bermutu, terpadu, terarah dan berkelanjutan serta selaras antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dengan dilandasi pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

3). Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah

- alokasi anggaran Rp. 527.000.000,-
- realisasi Rp. 501.934.500,- (95,24%),

Capaian Kegiatan :

Tersedianya dokumen Kondisi Sosial Budaya pada wilayah desa dengan kategori desa berkembang; Analisis tingkat kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2015; kajian Daya Dukung Peningkatan



Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di NTT; buku capaian kinerja enam tekad pembangunan daerah NTT; buku Selayang Pandang Perekonomian NTT; buku database ekonomi tahun 2016; kajian Kebijakan Pembangunan Wilayah berbasis pengelolaan DAS Terpadu dan berkelanjutan; kajian Analisis kebijakan pemerintah dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh perkotaan, air minum dan sanitasi serta Masterplan perencanaan ekonomi inclusive NTT Bangkit; masing-masing 5 buku.

4). Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

- alokasi anggaran Rp. 548.077.000,-
- realisasi Rp. 489.667.700,- (89,34%),

Capaian Kegiatan :

- Adanya 1 Laporan Dokumen RAD SDGs, 2 kali Rapat koordinasi penanggulagn Kemiskinan diikuti 100 orang
- Tersosialisasinya Pangan dan Gizi dalam mendukung Penanganan Stunting Terintegrasi, 7 kabupaten, 40 orang, 1 laporan, 1 laporan

5). Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Enam Tekat Pembangunan

- alokasi anggaran Rp. 910.962.000,-
- realisasi Rp. 852.102.630,- (93,5410%),

Capaian Kegiatan :

tersedianya Pedoman Integrasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa, 25 buku; Masterplan Penurunan Penduduk Miskin untuk mewujudkan NTT Sejahtera, 10 buku; buku Kajian Garam, 5 buku; Kajian pengaruh daya dukung infrastruktur dan akomodasi pengembangan destinasi wisata, 5 buku; kajian calon lokasi kawasan sakura Sumba, 5 buku; pariwisata estate dan pemetaan ruang of beauty , 5 buku; dokumen Indeks 5 A pariwisata (Atraction, Accessibility, Acomodation, Amenity, Awareness), 5 buku; forum ekonomi dan bisnis, 1 laporan, 10 buku; Dialog Publik ekonomi dan bisnis antara pemerintah dan swasta (Gubernur dan pihak swasta), 50 orang, 2 kali; Koordinasi pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan pariwisata, 1 laporan, 10 buku;



seminar daya tarik wisata budaya dalam rangka pengembangan destinasi wisata NTT, 70 orang, 1 kali, 1 laporan, 15 buku; koordinasi pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan NTT, 1 laporan, 10 buku; Rapat Evaluasi pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan NTT, 100 orang, 1 kali, 1 laporan, 10 buku

- 6). Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta
- alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
 - realisasi Rp.-, (-%),
- Capaian Kegiatan : ***Tidak dilaksanakan***

b. Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional

- alokasi anggaran Rp. 1.660.000.000,-
- realisasi Rp. 1.527.206.419,-(92,00%),

1). Kerjasama Luar Negeri dalam Pengelolaan Irigasi Partisipatif

- alokasi anggaran Rp. 1.500.000.000,-
- realisasi Rp. 1.378.069.389,- (91,87%),

Capaian Kegiatan :

- Adanya 1 laporan reorganisasi dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat, tersosialisasinya peraturan/ pedoman teknis di Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat, 1 laporan
- tersedianya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), 28 orang dan Koordinator TPM, 2 orang serta tersosialisasinya Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi

2). Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL (Air Minum dan Penyehatan lingkungan)

- alokasi anggaran Rp. 160.000.000,-
- realisasi Rp. 149.137.030,-(93,21%),

Capaian/hasil :

adanya dokumen profil AMPL, 1 (satu) buku dan Rapat Koordinasi AMPL Provinsi, 25 orang, 2 kali, 1 laporan; Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas berbagai kebijakan/program dalam rangka pengembangan AMPL BM dan DAS.



c. Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah

- alokasi anggaran Rp. 1.342.356.100,-
- realisasi Rp. 1.186.873.540,- (88,42%),

1). Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN

- alokasi anggaran Rp. 1.342.356.100,-
- realisasi Rp. 1.186.873.540,- (88,42%),

Capaian/hasil :

a) Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan Dana APBD Provinsi NTT, APBN (Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama) di Provinsi NTT TA. 2018, 260 buku; b) Buku Alokasi Belanja APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama) di Provinsi NTT TA. 2018, 30 buku; c) Buku Laporan Bulanan, 300 buku, Triwulanan 100 buku dan Tahunan 25 buku Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT; d) sosialisasi Pergub No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, 77 buku;e)koordinasi,monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, 1 laporan;f) Laporan Pelaksanaan Bimtek TEPRRA, 20 buku; g) Laporan Pelaksanaan Rapat Evaluasi Tengah Tahun dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, 2 buku; h) Sosialisasi Pergub kegiatan DK, TP,KD,KP, UB (APBN) Provinsi NTT, 10 buku. Dengan hasil meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana APBN Prov. NTT T.A. 2018 dan meningkatnya fungsi manajerial dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan Dana APBN Provinsi NTT TA. 2018

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 98 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 24 orang; Diploma = 6 orang; Sarjana = 47 orang; Magister = 19 orang; Doktor = 1 orang.



- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 14 orang; Golongan III = 69 orang; Golongan II = 14 orang; Golongan I = 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 21 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 15 orang;
- d. Pejabat Fungsional: 13 orang.
Penata Humas = 1 orang; Pustakawan = 1 orang; Arsiparis = 1 orang; Perencana = 10 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional	Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
4	Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

- 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 1.191.455.600,- realisasiRp. 975.297.846,- (81,86%);
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 407.889.400,- realisasiRp. 402.056.404,-(98,57%);
- 3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 147.568.800,- realisasi Rp. 146.177.800,- (99,06%).



URUSAN KEUANGAN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- alokasi anggaran Rp. 47.051.647.900,-
- realisasi Rp. 42.787.206.796,- (90,93%)

1) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja

- alokasi anggaran Rp. 546.562.500,-
- realisasi Rp. 479.210.200,- (87,68%)

Capaian/hasil :

meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah melalui penyediaan pedoman standar harga barang

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- alokasi anggaran Rp. 2.596.836.000,-
- realisasi Rp. 2.374.495.300,- (91,44%)

Capaian/hasil :

meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan APBD Provinsi NTT tahun 2018

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- alokasi anggaran Rp. 2.053.089.000,-
- realisasi Rp. 2.006.786.995,- (97,74%)

Capaian/hasil :

meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan peraturan tentang perubahan APBD TA. 2018 dan tepat waktu

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- alokasi anggaran Rp. 1.338.731.800,-
- realisasi Rp. 1.318.038.700,- (98,45%)

Capaian/hasil :



meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018 serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018

5) Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- alokasi anggaran Rp. 1.149.008.000,-
- realisasi Rp. 1.107.936.529,- (96,43%)

Capaian/hasil :

meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tersusunnya Rancangan LKPD dan LKPD TA. 2018, tersusunnya Laporan Triwulan I TA. 2018, Laporan Semester I TA. 2018 dan Laporan Triwulan III TA. 2018.

6) Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA

- alokasi anggaran Rp. 596.604.000,-
- realisasi Rp. 576.200.631 (96,58%)

Capaian/hasil :

meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan melalui penyediaan dokumen DPA dan DPPA SKPD Tahun 2018.

7) Pengendalian dan Pengawasan Pengelola Keuangan Daerah

- alokasi anggaran Rp. 705.100.000,-
- realisasi Rp. 679.812.040,- (96,41%)

Capaian/hasil :

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan melalui pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

8) Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah

- alokasi anggaran Rp. 1.729.550.000,-
- realisasi Rp. 1.679.269.625 (97,09%)

Capaian/hasil :

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan melalui pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui pembinaan pengelolaan kas Bendaharawan OPD dan kas BUD, integrasi SIPKDD dari penganggaran sampai pelaporan serta penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 9) Pentausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- alokasi anggaran Rp. 1.029.874.600,-
 - realisasi Rp.972.491.175,- (94.43%)
- Capaian/hasil :
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui koordinasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan daerah
- 10) Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- alokasi anggaran Rp. 488.220.000,-
 - realisasi Rp. 456.248.400,- (93,45%)
- Capaian/hasil :
meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPKD.
- 11) Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan keuangan daerah
- alokasi anggaran Rp. 161.468.800',-
 - realisasi Rp. 160.294.700'- (99,27%)
- Capaian/hasil :
Terlaksanannya Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
- 12) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- alokasi anggaran Rp. 18.149.275.500,-
 - realisasi Rp. 17.369.564.646,- (95.70%)
- Capaian/hasil :
terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, terlaksananya koordinasi pemungutan PKB dan BBN-KB, terlaksananya Rakor Samsat dan Rakor Pajak PPh 21 dan PBB, terlaksananya kegiatan Koordinasi dan penerimaan retribusi lain-lain PD yang sah, Pajak Rokok dan PPh 21 serta pendataan obyek dan subyek PKB di 22 Kabupaten/Kota.
- 13) Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD tahun 2019
- alokasi anggaran Rp. 123.800.000',-
 - realisasi Rp. 123.800.000',- (100%)
- Capaian/hasil :

terlaksanannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD serta meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui RKA-SKPD TA.2019 Terlaksana tepat waktu

14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah

- alokasi anggaran Rp. 15.777.871.700,-
- realisasi Rp. 13.035.632.505,- (82,62%)

Capaian/hasil :

terdata dan tertatanya administrasi barang daerah secara tertib melalui analisa kebutuhan dan pengadaan aset, penatausahaan aset, penetapan dan penilaian aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, pengamanan dan pengendalian aset, penyelesaian sengketa aset dan asuransi aset

15) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah

- alokasi anggaran Rp. 605.656.800,-
- realisasi Rp. 571.225.350,- (94,32%)

Capaian/hasil :

terdata dan tertatanya administrasi barang daerah secara tertib melalui analisa kebutuhan dan pengadaan aset, penatausahaan aset, penetapan dan penilaian aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, pengamanan dan pengendalian aset, penyelesaian sengketa aset dan asuransi aset

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- alokasi anggaran Rp. 2.259.466.000,-
- realisasi Rp. 2.158.747.820,- (95,54%)

1) Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

- alokasi anggaran Rp. 250.000.000,-
- realisasi Rp. 222.547.840 (89,02%)

Capaian/hasil :

Meningkatnya Kualitas Keuangan Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel melalui intensifikasi pengelolaan keuangan Daerah.



- 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Penjabaran APBD Kab/Kota dan Perubahan APBD Kab/Kota
 - alokasi anggaran Rp. 375.000000,-
 - realisasi Rp. 364.149.500,- (97,11%)
 - Capaian/hasil :
meningkatnya pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel melalui APBD kabupaten/Kota dan perubahan APBD kabupaten/Kota
- 3) Penyusunan Statistik Kaeuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - alokasi anggaran Rp. 202.098.000,-
 - realisasi Rp. 200.570.000,- (99,24%)
 - Capaian/hasil :
meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui penyediaan statistik keuangan Daerah yang Akuntabel
- 4) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota
 - alokasi anggaran Rp. 682.368.000,-
 - realisasi Rp. 644.868.530,- (94,50%)
 - Capaian/hasil :
terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel
- 5) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - alokasi anggaran Rp. 750.000.000,-
 - realisasi Rp. 726.611.140,- (96,88%)
 - Capaian/hasil :
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel melalui pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota TA. 2018

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 347 orang dengan perincian sebagai berikut:



- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 2 orang; SLTP = 5 orang; SLTA = 100 orang; Diploma = 27 orang; Sarjana = 193 orang; Magister = 20 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 26 orang; Golongan III = 254 orang; Golongan II = 66 orang Golongan I = 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 117 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 26 orang; Eselon IV = 81 orang.
- d. Pejabat Fungsional: 3 orang

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** kurang mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** Tidak Ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp.17.755.844.720,- realisasi Rp. 16.261.480.589,- (91,58%);
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp.18.914.497.500,- realisasi Rp. 15.354.920.573,- (81,18%);
- 3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp.389.010.980,- realisasi Rp 388.038,530,- (99,75%).

URUSAN KEPEGAWAIAN.

- 1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**



a. Program Pendidikan Kedinasan

- alokasi anggaran Rp. 1.254.092.000,-
- realisasi Rp. 1.129.455,593,- (90,06%),

1) Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

- alokasi anggaran Rp. 1.254.092.000,-
- realisasi Rp. 1.129.455,593,- (90,06%),

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Rakoornis Tata Kelola Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional 79 orang peserta.
- Terlaksananya Bimtek Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA/SMK di Kabupaten Sikka target 20 orang peserta dan realisasi 21 orang. di Kabupaten Sumba Timur target 20 orang peserta dan realisasi 25 orang.
- Bimtek Penyusunan Angka Kredit (PAK) bagi Guru SMA/SMK di Kabupaten Alor 20 orang peserta dan Kabupaten Manggarai Barat 20 orang peserta.
Adanya Workshop penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional bagi 48 Pejabat Administrator dan pengawas lingkup pemerintah Provinsi NTT di Hotel Swiss bellin Kupang pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 2018.
- Terlaksananya Sosialisasi Jabatan fungsional perencana bagi pejabat/ pengelola kepegawaian dan Pejabat Fungsional perencana di Lingkup Pemprov. pada tanggal 3 Juli 2018 di Aula Fernandez Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT dan bekerja sama dengan Bappenas RI.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- alokasi anggaran Rp. 9.362.747.100,-
- realisasi Rp. 7.996.487.562,- (85,40%)

1) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.

- alokasi anggaran Rp. 2.426.920.300,-
- realisasi Rp. 2.030.408.071,- (83,66%)

Capaian/hasil :

- Terselenggaranya uji kompetensi dalam 2 kloter pada bulan Mei 2018 bekerja sama dengan Administrator/ Assessor dari UPENKOM ASN BKD Prov. Jawa Tengah: untuk pejabat administrasi di Lingkup



Pemprov target peserta 30 orang realisasi 28 orang. untuk pejabat pengawas di Lingkup Pemprov; Target peserta 30 orang teralisasi 30 orang.

- Terlaksananya 1 kali seleksi Terbuka dan Pemetaan JPTP(Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) pada tahun 2018 untuk 7 jabatan lowong : inspektur, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Kerja sama; terlaksananya pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terhadap 25 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada bulan Desember 2018.
- Terlaksananya 3 kali pelantikan pajabat struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT tahun 2018: Tanggal 19 Maret 2018; Administrator 55 orang dan Pengawas 121 orang, Tanggal 21 Mei 2018, pejabat Pimpinan Tinggi pratama 10 orang pejabat: 7 orang pejabat promosi dan 3 orang pejabat roling, Tanggal 21 Desember 2018 pelantikan bagi 5 orang pejabat Administrator.
- Terlaksananya Pembinaan karir PNS di 22 Kab/ Kota, Pengawasan dan pengendalian Seleksi JPT Lingkup Kab/ Kota, Proses administrasi dan teknis pengukuhan/pelantikan kepala sekolah SMA/SMK di 22 Kab/ Kota.

2) Seleksi Penerimaan Calon PNS

- alokasi anggaran Rp. 3.557.254.700,-
- realisasi Rp. 2.840.598.835,- (79,85%)

Capaian/hasil :

- 7.934 orang. Pesertapelamar melalui website www.bkd.nttprov.go.id dan 7.243 orang yang selanjutnya dapat mengikuti tes SKD dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 5 November 2018 bertempat di Polteknik Negeri Kupang dan Sekolah keberbakatan Olahraga Flobamorata selanjutnya peserta yang lolos SKD 1.064 orang dan berhak mengikuti tes SKB. Tes SKB dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2018 di



Politeknik Negeri Kupang, hasil integrasi nilai SKD- SKB CPNS pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019 menyatakan 556 orang peserta yang dinyatakan lulus CPNS Guru 473 orang, Tenaga kesehatan 53 orang dan Tenaga teknis 30 orang, Dari data tersebut maka terdapat 31 formasi yang tidak terisi sesuai dengan kuota yang ditetapkan, Guru Agama Katolik 5 orang. Guru IPS (Antropologi) 20 orang. Guru seni budaya 1 orang, Guru TIK 1 orang, Dokter Gigi 2 orang, Dokter spesialis THT 1 orang dan Dokter spesialis Anestesi 1 orang.

- Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN bagi 78 orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dengan melalui beberapa tahapan: Seleksi administrasi secara *on-line* Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) melalui website: spcp.ipdn.ac.id dengan jumlah pendaftar 2.300 orang dan 1.998 orang lulus seleksi administrasi elektronik SPCP IPDN tahun 2018 selanjutnya mengikuti Kompetensi Dasar (TKD) pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2018 bertempat di SMA Katolik Giovani Kupang hasilnya 234 orang peserta yang memenuhi passing grade seterusnya mengikuti tes kesehatan pada tanggal, 3 s/d 5 Juli 2018 dengan hasil 106 orang peserta dinyatakan lulus untuk selanjutnya di sertakan dalam tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran dan peserta 54 orang dinyatakan lulus Pantuhkir dan berhak untuk melaksanakan pendidikan lanjutan sebagai Praja IPDN pada tahun ajaran 2018/2019.

3) Penataan Sistem Administrasi, Penempatan PNS dan Pensiun PNS

- alokasi anggaran Rp. 1.698.818.500,-
- realisasi Rp. 1.561.833.201,- (91,93%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat, Penempatan dan Pensiunan: Tersedianya 1.427 SK: 162 SK pindah antar Kab/Kota se- prov NTT, 179 SK Pindah Masuk Pemprov, 36 SK Pindah keluar dari Pemprov, 63 SK persetujuan pindah ke pemprov, 240 surat persetujuan pindah (SPP) masuk dan keluar



dari/ke instansi di Provinsi lain dari/ke instansi pusat, 301 SK pindah antar SKPD di lingkungan pemerintah Prov. NTT, 22 SK penempatan (PNS pindahmasuk, IPDN, setelah TUBEL, setelah penitipan, setelah perbantuan, dan setelah dipekerjakan di luar instansi induk), 2 SK diperbantukan PNS pemprov di luar instansi, 22 SK dipekerjakan PNS Pemprov NTT pada instansi lain, 21 SK Pensiun yang menjadi kewenangan Gub. NTT (Pensiun dini), 20 pengentrian data pada e-surat, 612 pengentrian data BUP PNS di SAPK, 76 pengentrian data pension duda/janda pada SAPK dll.

4) Penataan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

- alokasi anggaran Rp. 296.428.100,-
- realisasi Rp. 275.187.541,- (92,83%),

Capaian/hasil :

- Termutakhirnya data dan menyiapkan laporan rekapitulasi PNS 22 Kab/Kota se-NTT
- Terlaksananya 12 Kegiatan fungsi administrator SAPK BKD Prov. NTT; Tersinkronisasi data PNS pada SIMPEG dan SAPK bagi 30 PNS yang masuk dan keluar Prov. NTT; Terentri 91 unor baru pada SAPK; Terfasilitasinya proses 15 SK usulan perbaikan dan pendistribusian SK Konversi NIP baru; Terentri arsip 2.568 PNS Pemprov. NTT; Terentri/terupdatenya 604 data PNS Pensiun/ meninggal dunia pada simpeg; Terentri/terupdatenya 139 PNS data PNS mutasi antar SKPD lingkup Pemerintah Prov. NTT pada SAPK.
- Terentri/terupdatenya data 145 PNS Mutasi antar PD Lingkup pemprov di data simpeg, data 157 PNS mutasi masuk dan keluar dari unit kerja di SAPK, data 209 PNS mutasi masuk dan keluar dari unit kerja di Simpeg, data riwayat jabatan 109 PNS pada SAPK, data riwayat jabatan 1.013 PNS pada SIMPEG, data kenaikan pangkat 2.437 PNS pada Simpeg, biodata 1.191 PNS pada Simpeg.
- Tersinkronisasinya data 8.566 PNS pada Simpeg dan



SAPK, Terfasilitasinya proses usulan perbaikan dan pendistribusian KPE 2 buah, Terinstalasinya jaringan dan server Simpeg 1 kegiatan.

5) Proses Penanganan Pelanggaran Kasus-kasus Disiplin PNS.

- alokasi anggaran Rp. 372.670.100,-
- realisasi Rp. 328.479.420,- (97,39%),

Capaian/hasil :

- Terlaksananya 4 kali sidak kehadiran PNS pada OPD lingkup Pemprov NTT, 20 kali Sidak Kehadiran PNS di UPTD lingkup Pemprov NTT

Terlaksananya 3 kali Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat Pemprov NTT, 2 kali Presentasi kehadiran PNS Pemprov. NTT dan 2 kali Sidak PNS di Kantor Penghubung Jakarta.

6) Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah PNS.

- alokasi anggaran Rp. 181.562.100,-
- realisasi Rp. 173.461.697,- (95,53%),

Capaian/hasil :

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dalam 2 tahap, di Provinsi NTT 2 kali dengan peserta 120 orang: Peserta Ujian Dinas Tingkat I : 37 orang, Tingkat II : 12 orang dan Peserta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah : 71 Orang dan di Kabupaten/ Kota se Provinsi NTT 2 kali dengan peserta 1.011 orang : Peserta Ujian Dinas Tingkat I : 262 orang, Tingkat II : 189 orang dan Peserta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah : 560 Orang.

7) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

- alokasi anggaran Rp. 379.093.300,-
- realisasi Rp. 366.636.736,- (96,71%),

Capaian/hasil :

- Terlaksananya pengusulan KARIS/KARSU bagi 297 orang PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- Terlaksananya proses pengusulan Cuti Luar Tanggungan Negara (CTLN) bagi 2 orang PNS, Cuti tahunan 1.182 orang, Cuti Besar 11 orang, Cuti alasan penting 154 orang, Cuti sakit 75 orang, dan Cuti bersalin 122 orang.
- Terlaksananya proses usulan pemberian SLKS bagi 343



PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Aula El Tari pada tanggal 13 Agustus 2018: tahap I 250 peserta : penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya X, XX, dan XXX untuk 200 orang PNS dengan rincian: SLKS X Tahun 71 orang, SLKS 74 Tahun 105 orang, dan SLKS XXX Tahun 105 orang, tahap II pada tanggal 14 Desember 2018 sebanyak 183 orang: SLKS X Tahun 147 orang, SLKS XX tahun 18 orang, dan SLKS XXX Tahun 18 orang.

- Tersedianya penerima penghargaan bagi 301 orang PNS yang memasuki Masa Purna Bhakti: PNS Golongan IV : 97 orang, PNS Golongan III : 83 orang, PNS Golongan II : 13 orang, dan PNS Golongan I : 2 orang.

8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- alokasi anggaran Rp. 300.000.000,-
- realisasi Rp. 277.053.200,- (92,35%),
- Capaian/hasil :

Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi PNS Tubel/Ibel dan Praja IPDN asal NTT; Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan bidang kepegawaian pada Kementerian terkait.

9) Pelayanan dan Rekonsiliasi Bantuan Perumahan Bagi PNS.

- alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-
- realisasi Rp. 142.828.861,- (95,21%),
- Capaian/hasil :

Terlaksananya Rekonsiliasi Bantuan Perumahan bagi PNS dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan Juni 2018, tahap kedua bulan November 2018; adanya Berita acara Rekonsiliasi Taperum berisikan pemotongan anggaran perumahan bagi ASN dirincikan berdasarkan golongan Ruang setiap ASN Pemprov dan Kab/Kota; tersedianya data setoran iuran tabungan perumahan tahun 2018 dan laporan.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat Struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 84 orang dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:



SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 17 orang; Diploma = 3 orang; Sarjana = 54 orang; S2 = 8 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 6 orang; Golongan III = 72 orang; Golongan II = 5 orang, Golongan I = -orang.

c. Pejabat Struktural: 17 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 11 orang.

d. Pejabat Fungsional: 10 orang.

Arsiparis= 1 orang, Analisis Kepegawaian= 7 orang, Pranata Komputer= 2 orang

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Program dalam RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp.662.434.700,- realisasi Rp.620.589.930,- (90,06%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.565.847.400,-realisasi Rp.550,309.737,- (97,25%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.44.400.000,-realisasi Rp.44.377.600,- (99,94%);

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT

2. Program,Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Pendidikan Kedinasan



- alokasi anggaran Rp.17.288.753.000,-
- realisasi Rp.15.487.605.586,- (89,58%)

1) Pendidikan dan Pelatihan CPNS

- alokasi anggaran Rp.5.719.931.000,-
- realisasi Rp.5.096.420.536,- (89,10%)

Capaian/hasil :

Terlatihnya 1.897 orang CPNS Golongan I, II dan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 2 dan Kategori Pengangkatan Khusus yang berasal dari Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT

2) Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS

- alokasi anggaran Rp.11.568.882.000,-
- realisasi Rp.10.391.185.050,- (89,82%)

Capaian/hasil :

725 orang mengikuti Pendidikan penjurangan dan peningkatan kompetensi PNS. Yang terdiri dari 157 orang Alumni Diklatpim III, 174 orang Alumni Diklatpim IV, 124 orang Alumni Diklat Teknis Fungsional, 150 orang alumni Diklat Manajemen Pemerintahan, 60 orang alumni Bimtek SKP dan Penilaian Angka Kredit bagi Widyaiswara, 30 orang alumni Workshop Siperkom, 30 orang alumni Workshop LSP-PDN.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 101 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 2 orang; SMP = 2 orang; SMA = 25 orang; Diploma = 3 orang; Sarjana = 41 orang; Magister = 30 orang; Doktor = 1 orang
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 20 orang; Golongan III = 68 orang; Golongan II = 14 orang; Golongan I = 1 orang
- c. Pejabat Struktural: 17 orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 9 orang
- d. Pejabat Struktural: 17 orang
Widyaiswara = 26 orang, Arsiparis = 1 orang.



4. Kesesuaian perencanaan pembangunan

Program dalam RENJA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Dana: Rp. 1.818.132.200,-realisasi Rp. 1.490.897.328,- (82,00%);

2. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.**

Dana: Rp. 7.570.090.000,-realisasi Rp.7.066.735.222,- (93,35%);

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dana:Rp. 189.892.800,- realisasi Rp.163.300.000,- (86,00%).

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

2. **Program,Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**

a. Program Penelitian Pengembangan, Ekonomi, Sosial budaya, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Lingkungan hidup, Politik, Pemerintahan

➤ alokasi anggaran Rp. 1.902.508.400,-

➤ realisasi Rp. 1.859.360.150,- (97.73%)

1) Penelitian Pengembangan, Ekonomi, Sosial budaya, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Lingkungan hidup, Politik, Pemerintahan

• alokasi anggaran Rp. 1.811.230.200,-

• realisasi Rp. 1.768.126.650,- (97.62%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya 20 judul laporan hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian dan penerapan).



- Terlaksananya pola karir PNS Pemprov NTT belum dapat memaksimalkan peranan pegawai sesuai prinsip “*The right Man in the right place and time*”, menganut pola karir yang paternalis sehingga lebih dominan menjadi penentu karir PNS.
- Adanya Proses penatausahaan aset belum maksimal, kurangnya SDM pengelola aset yang berlatar belakang akuntansi pemerintah, legal audit belum berjalan dengan baik serta pengawasan dan pengendalian masih lemah.
- Preferensi publik lebih menyoroti agenda pembangunan infrastruktur dan pariwisata dari 6 agenda lainnya; Daerah induk belum atau enggan menyerahkan aset tidak bergerak mereka kepada daerah otonom baru
- Politik Anggaran dan Kapasitas SDM signifikan mempengaruhi proses penyusunan anggaran
- Adanya Kontribusi PAD Provinsi NTT terhadap pendapatan daerah masih rendah karena kurangnya inovasi dalam sistem dan budaya kerja
- Permasalahan data yang belum akurat serta aksesibilitas sertifikasi tanah yang kurang baik karena kondisi geografis NTT serta Tanah dan gedung *idle* membutuhkan analisis *highhest* dan *based use*.
- Implementasi kebijakan pangan lokal di Provinsi NTT belum melingkupi keseluruhan aspek ketahanan pangan: cadangan pangan pemerintah; Penganekaragaman Pangan; Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan; Distribusi, Perdagangan dan Bantuan Pangan; Pengawasan; Sistem Informasi Pangan dan peran serta masyarakat, dengan berbasis pada potensi sumber daya dan kearifan lokal.

2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu

- alokasi anggaran Rp. 91.278.200,-
- realisasi Rp. 91.233.500- (99.95%)

Capaian/hasil :

Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu di 18 kabupaten/kota se provinsi NTT, yaitu : Kota Kupang, Kabupeten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat.

- unit pelaksana litbang di Kabupaten/Kota sudah merencanakan program/kegiatan dan melaksanakan program/kegiatan kelitbangan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2016. Pelaksanaan Program/Kegiatan Litbang Daerah Kabupaten/Kota yang unit pelaksanan litbangnya bergabung dengan Bappeda, program/kegiatan litbang dilaksanakan bersama program/kegiatan lain atau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang memiliki anggaran.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Serta Penyebarluasan Data Dan Informasi Penelitian

- alokasi anggaran Rp. 460.011.100,-
- realisasi Rp. 434.604.850,- (94.48%)

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah

- alokasi anggaran Rp. 320.011.100,-
- realisasi Rp. 311.478.450,- (97.33%)

Capaian/hasil :

Tersedianya dokumen Road Map Birokrasi Kelitbangan Provinsi NTT, dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi NTT, dokumen Renstra Kelitbangan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja Kelitbangan dan Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi NTT.

2) Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan

- alokasi anggaran Rp. 140.000.000,-
- realisasi Rp. 123.126.400,- (87.95%)

Capaian/hasil :

Tersedianya jurnal Flobamora sebanyak 2 (dua) edisi, e-jurnal dan web site Balitbangda Provinsi NTT.



3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 49orang dengan kualifikasi

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = - Orang, SLTP = 1 Orang, SLTA = 5 Orang, Diploma = - Orang, Sarjana = 27 Orang, Pasca Sarjana = 16 Orang
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 10 Orang, Golongan III = 36 Orang, Golongan II = 3 Orang , Golongan I = - Orang.
- c. Pejabat Stuktural: 15 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 10 orang;
- d. Pejabat Fungsional: 34 orang.
Fungsional Peneliti = 17 orang, Fungsional Umum = 17 orang

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 501.313.800,- realisasi Rp. 494.983.400,- (98,33 %);



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 66.795.000,- realisasi Rp. 66.457.200,- (99,49%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp. 39.759.700,- realisasi Rp. 39.758.500,- (99,99 %);

URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT PERBATASAN.

1. Perangkat Daerah Pelaksana.

Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- alokasi anggaran Rp.490.312.000,-
- realisasi Rp. 490.211.600,- (100%)

1) Dialog/Audiens dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan, Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

- alokasi anggaran Rp.135.032.000 , -
- realisasi Rp.135.031.600 , - (100%)

Capaian/hasil :

- Terjalin rasa kebersamaan antara unsur Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat diaspora NTT
- Terjalin hubungan dan komunikasi yang erat antara unsur Pemerintah Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan/anggota Ormas dan Orsos yang hadir.
- Adanya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah.

2) Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Pers Asal NTT se Jabodetabek

- alokasi anggaran Rp.298.320.000,-
- realisasi Rp.298.320.000,- (100%)

Capaian/hasil :

- Adanya pemahaman tentang program kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.



- Memahami kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam melakukan upaya percepatan pembangunan baik melalui investasi pemerintah maupun investasi swasta.
 - Adanya kesepakatan untuk mengupayakan solusi dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan keinginan tokoh – tokoh masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan fasilitasi investasi ke daerah.
- 3) Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- alokasi anggaran Rp.56.960.000 ,-
 - realisasi Rp.56.860.000 ,- (99,82%)
- Capaian/hasil :
- Adanya rencana pembangunan dan renovasi wisma NTT (Asrama Mahasiswa) NTT di Yogyakarta sehingga dianggap perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY sehingga perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan PERDA yang berlaku di Pemerintah Provinsi DIY yaitu PERDA DIY No.1 th.2017 tentang Arsitektur Bangunan berciri khas DIY (ketentuan untuk bangunan asrama provinsi lain).
 - Yogyakarta dianggap berhasil mengembangkan destinasi wisata alam dengan pesat sehingga Pemerintah Provinsi NTT menganggap perlu melakukan koordinasi maupun shering dan konsultasi mengenai keberhasilan DIY sehingga dapat diterapkan dalam pengembangan destinasi wisata Alam di NTT.
- b. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
- alokasi anggaran Rp.131.960.000,-
 - realisasi Rp.131.292.500,- (99,49%)
- 1) Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya
- alokasi anggaran Rp.131.960.000,-
 - realisasi Rp.131.292.500,- (99,49%)
- Capaian/hasil :
- Terfasilitasinya Kegiatan Mitra Praja Utama tanggal 14-15 Maret 2018 di Lampung, Rapat Kerja APPSI (Asosiasi

Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia) pada tanggal 21-23 Pebruari 2018 di Hotel Luxury Bandung.

- Adanya Rapat Koordinasi persiapan kunjungan Presiden RI ke NTT pada tanggal 11 Januari 2018, Rapat Koordinasi persiapan kegiatan penyampaian saran kebijakan ekonomi ASEAN kebeberapa daerah tahun anggaran 2018 pada tanggal 18 Januari 2018, Memfasilitasi Pertemuan Sekda seluruh Indonesia dengan Menteri PAN-RB pada tanggal 24 Januari 2018 di Kementerian PAN-RB dalam kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan, Memfasilitasi kegiatan Rapat Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 1 Februari 2018 di Kemendagri, Memfasilitasi kegiatan Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 6 Februari 2018 di Istana Negara, Memfasilitasi kegiatan Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 6 Februari 2018 di Istana Negara, Memfasilitasi kegiatan Rapat Kerja Para Gubernur dengan Presiden RI pada tanggal 7 Februari 2018 di Hotel Bidakara.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Kantor Penghubung Provinsi NTT per 31 Desember 2018 sebanyak 37orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 14 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 14 orang; Magister = 1 orang. Doktor = - orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 1 orang; Golongan III = 23 orang; Golongan II = 12orang; Golongan I = 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 5 orang.
Eselon III = 1 orang; Eselon IV = 4 orang.
- d. Pejabat Fungsional: - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Dana: Rp.1.339.802.200,- realisasi Rp.1.275.692.393,- (95,23);

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Dana: Rp.1.214.902.800,- realisasi Rp.1.203.168.818,- (99,03%).

3 **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Dana : Rp.16.000.000,-realisasi Rp.15.998.000,- (100%)

URUSAN PERBATASAN

1. **Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**

a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

➤ alokasi anggaran Rp.1.555.653.550,-

➤ realisasi Rp.1.493.930.250,- (96,03%),-

1) Peningkatan Management Garda Batas Kawasan Perbatasan

• alokasi anggaran Rp.189.857.000,-

• realisasi Rp.186.300.100,- (98,13),-

Capaian/hasil :

40 orangpeserta terdiri dari aparat pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di kecamatan perbatasanmengikuti Bimbingan Teknis Pelatihan Peningkatan Manajemen Garda BatasKawasan Perbatasan RI-RDTLdi Hotel Sylvia Premeire Kupangterdiri dari Aparat Pemerintah Kabupaten Kupang 3 orang, TTU 9 orang, Belu 15 orang, Malaka 6 orang dan BPP Provinsi 13 Provinsi orang.



2) Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan.

- alokasi anggaran Rp. 120.485.600,-
- realisasi Rp. 118.342.400,- (98,21%),
- Capaian/hasil :

Terlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan antar Negara di Kabupaten Alor 50 orang, Kabupaten Belu 50 orang dan Kabupaten Kupang 50 orang menghasilkan beberapa rekomendasi. Semua usulan kegiatan harus diinput melalui e-planning di Bappeda, Usulan pemasangan listrik ke kecamatan harus didukung dengan inventarisasi jumlah calon pengguna listrik. Peserta terdiri dari Camat Perbatasan, SKPD Teknis Pengelola Perbatasan.

3) Identifikasi Potensi unggulan Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan

- alokasi anggaran Rp. 154.236.600,-
- realisasi Rp. 145.572.200,- (94,38%),
- Capaian/hasil :

Terlaksananya Kajian Potensi di Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu dan Malaka dari bulan Maret s/d Agustus 2018 menghasilkan suatu gambaran dan informasi mengenai potensi daerah, dan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang ada serta rumusan strategi pengembangan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan daerah.

4). Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kab/Kota

- alokasi anggaran Rp. 342.751.500,-
- realisasi Rp. 313.115.250,- (91,75%),
- Capaian/hasil :

terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa dan Penegasan batas Daerah (Kabupaten Ngada – Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah – Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat – Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Belu – Kabupaten Malaka dan Kabupaten Malaka – Kabupaten TTU).

5). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

- alokasi anggaran Rp. 270.668.700,-
- realisasi Rp. 256.934.900,- (93,94%),
- Capaian/hasil :



- Adanya koordinasi yang intensif dan koperhensif baik lintas kewenangan maupun lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
 - adanya Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di maritaing kec Alor Timur kabupaten Alor dan penyelesaian batas laut dengan RDTL, serta pembangunan infrastruktur jalan sabuk darat di wilayah Alor selatan.
- 6). Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin dan Wini
- alokasi anggaran Rp. 99.032.950,-
 - realisasi Rp. 97.574.500,- (98,53%),
 - Capaian/hasil :
 - Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin dan Wini.
 - Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan aparatur dan masyarakat dalam pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
 - Meningkatnya ketentraman dan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
- 7). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah
- alokasi anggaran Rp. 57.677.200,-
 - realisasi Rp. 57.648.900,- (99,95%),
 - Capaian/hasil :
- Adanya Bedah Peta RBI dan Peta Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2007, Pemaparan data-data batas daerah oleh tim penegasan batas daerah kabupaten Ngada dan Nagekeo, Teridentifikasinya titik-titik batas bermasalah oleh kedua kabupaten serta Terbangunya komitmen pemerintah dan masyarakat kabupaten Nagekeo dan Ngada untuk mendukung penyelesaian penegasan batas wilayah kedua Kabupaten.
- 8). Pelacakan dan Penentuan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah
- alokasi anggaran Rp. 70.944.000,-
 - realisasi Rp. 70.942.000,- (100%),
 - Capaian/hasil :

Adanya penentuan 14 (empat belas) titik koordinat batas yang terdiri dari: PBA 12 A, PBA 12 B, PBA 12 C, PBA 12 D, PBA 12 E, PBA 12 F, PBA 12 G, PBU 13, PBA 13 A, PBA 13 B, PBA 13 C, PBA 13 D, PBA 13 E dan PBA 13 F, yang terletak diantara Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dengan Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

9). Dialog Gubernur dengan Masyarakat Perbatasan

- alokasi anggaran Rp. 250.000.000,-
- realisasi Rp. 247.500.000,- (99,04%),
- Capaian/hasil :
- Meningkatnya peran dan fungsi tokoh masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam memperlancar tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atau sosial budaya
- Terbangunnya komunikasi antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Perbatasan dalam memberikan pemikiran dan masukan untuk penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan
- Meningkatnya hubungan kemitraan dan kerjasama serta kebersamaan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Perbatasan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah perbatasan

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 44 orang, dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 8 orang; Diploma = 1 orang; Sarjana = 23 orang; Magister = 11 orang.
- b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 9 orang; Golongan III = 30 orang; Golongan II = 5 orang; Golongan I = - orang.
- c. Pejabat Stuktural: 17 orang

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 4 orang; Eselon IV = 10 orang.
- d. Pejabat Fungsional: 1 Orang (Fungsional Analisis kepegawaian)



4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi : tidak ada

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan) yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana: Rp.663.765.950,- realisasi Rp.638.998.850,- (96,27%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dana: Rp.81.729.500,- realisasi Rp.81.035.700,- (99,15%).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

Dana: Rp.4.500.000,- realisasi Rp. 4.379.200,- (97,32%).

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI.

1. Perangkat Daerah Pelaksana;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Pembinaan, Pengembangandan Perlindungan KORPRI

➤ alokasi anggaran Rp.1.284.486.000,-

➤ realisasi Rp.1.246.893.790,-(97,07%)

1) Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI

• alokasi anggaran Rp.88.129.400,-

• realisasi Rp.87.106.240,- (98,84%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Rakor bidang Kekorprian di Dewan Pengurus KORPRI Nasional, RAKER Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumba Tengah, Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belu dan Alor.



Koordinasi Pelaksanaan Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kupang, Koordinasi pelaksanaan Musyawarah Kabupaten KORPRI di Kabupaten TTS, Belu, Ende, Alor dan Sumba Timur, Musyawarah Kabupaten KORPRI serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belu dan Alor

- Terlaksananya kegiatan RAKER Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumba Tengah, Koordinasi pelaksanaan Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kupang, Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten KORPRI di Kabupaten TTS, Belu, Alor, Ende dan Sumba Timur, Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belu dan Alor. Adanya 5 buah laporan pelaksanaan kegiatan

2) Pelaksanaan Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi

- alokasi anggaran Rp.612.657.600,-
- realisasi Rp.602.757.000,- (98,38%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke XIV selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 s/d 28 Oktober 2018 bertempat di Kupang di ikuti 60 orang ASN dari Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terpilih sebagai Atlit, pelatih 5 orang dan official 5 orang, Adanya 6 buah laporan pelaksanaan kegiatan.

3) Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum PNS

- alokasi anggaran Rp.100.800.000,-
- realisasi Rp. 99.793.900,- (99,00%)

Capaian/hasil :

Adanya 5 (lima) buah laporan Pelayanan Konsultasi bantuan hukum bagi Anggota KORPRI yang bermasalah Hukum di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penanganan kasus atau bantuan Hukum sebanyak 3 (tiga) Kasus.

4) Pembinaan Rohani PNS

- alokasi anggaran Rp.102.934.000,-
- realisasi Rp.101.957.000,- (99,05%)

Capaian/hasil :



- Terlaksananya Pembinaan Rohani Gabungan setiap bulan selama 1 Tahun atau 12 kali pertemuan di Aula El Tari dihadiri seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Tersedianya 5 (lima) buah laporan hasil kegiatan pembinaan Rohani.
- 5) Pengumpulan dan Updating Data Anggota KORPRI
- alokasi anggaran Rp.64.514.960,-
 - realisasi Rp.53.230.500,- (82,51%)
- Capaian/hasil :
- Tersedianya data anggota KORPRI di 12 Kabupaten/Kota dalam bentuk 20 buku Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Alor, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat dan telah di Update datanya setiap tahun dan tersedianya 5 buah laporan hasil kegiatan.
- 6) Fasilitas Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI
- alokasi anggaran Rp.74.800.000,-
 - realisasi Rp.74.799.850,- (100%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI sebanyak 50 orang kegiatan di laksanakan selama 12 (dua belas) kali penampilan dalam se Tahun
- 7) Bimtek Kewirausahaan Bagi Anggota Korpri Yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun
- alokasi anggaran Rp.55.250.000,-
 - realisasi Rp.51.718.000,- (93,61%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi 30 orang ASN dalam berwirausaha pada saat memasuki masa persiapan pensiun serta tersedianya 5 buah laporan pelaksanaan kegiatan.
- 8) Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Provinsi NTT
- alokasi anggaran Rp.101.400.000,-
 - realisasi Rp.96.649.300,- (95,31%)
- Capaian/hasil :
- adanya laporan pelaksanaan kegiatan Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Tingkat Provinsi Nusa

Tenggara Timur ke 47 Tahun 2018 dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara ± 2.000 orang ASN.

9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

- alokasi anggaran Rp.84.000.000,-
- realisasi Rp.78.882.000,- (93,31%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di 11 Kabupaten/Kota : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Flores Timur, Sikka, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya serta Adanya 5 buah laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di 11 Kabupaten/Kota.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 23 orang dengan perincian, sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 10 orang; Diploma = - orang; Sarjana = 10 orang; Magister = 3 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 4 orang; Golongan III = 15 orang; Golongan II = 4 orang; Golongan I = - orang.

c. Pejabat Stuktural: 9 orang;

Eselon II = 1 orang, Eselon III = 2 orang, Eselon IV = 6 orang.

d. Pejabat Fungsional: 14 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI	Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI



5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
6. **Permasalahan dan Solusi:** Tidak ada.
7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp.473.967.000,-realisasi Rp.464.598.629,- (98,02%).
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp.60.090.000,- realisasi Rp. 60.090.000,- (100%).
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp.5.000.000,- realisasi Rp. 5.000.000,- (100%).

PENDUKUNG URUSAN

SEKRETARIAT DAERAH.

BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. **Perangkat Daerah Pelaksana;**
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Peningkatan Kerja sama antar Pemerintah Daerah
 - alokasi anggaran Rp. 2.979.263.850,-
 - realisasi Rp. 2.115.970.270,- (71,02%)
 - 1) Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - alokasi anggaran Rp. 2.072.216.450,-
 - realisasi Rp. 1.633.713.300,- (78,83%)
 Capaian/hasil :
 - Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur dengan Para Bupati/Walikota serta Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 24 Mei 2018 di Kupang
 - Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur dengan para Camat se Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 April 2018 di Kupang
 - Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur dengan Para Bupati, Walikota Kupang, Para Pimpinan DPRD, Para



Ketua Komisi DPRD dan Para Camat serta Kepala Desa/Lurah di 6 (enam) region: Region Ende pada tanggal 20 Oktober 2018, Region Maumere pada tanggal 24 Nopember 2018, Region Labuan Bajo pada tanggal 30 Nopember 2018, Region Kota Kupang pada tanggal 4 Desember 2018, Region Waingapu pada tanggal 6 Desember 2018 dan Region Kefamenanu pada tanggal 12 Desember 2018

2) Kegiatan Fasilitas Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru

- alokasi anggaran Rp. 174.999.000,-
- realisasi Rp. 49.081.000,- (28,04 %)

Capaian/hasil :

- Tidak terlaksananya penyampaian kelengkapan dokumen usulan 9 CDP sesuai ketentuan perundangan
- Tidak terakomodir dan terbentuknya 4 CDP baruPelaksanaan kegiatan fasilitas Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan karena kendala

3) Kegiatan Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten/ Kota se Provinsi NTT

- alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
- realisasi Rp. 73.617.753,- (73,61%)

Capaian/hasil :

- Terevaluasinya pelaksanaan penyerahan P3D di 3 Daerah persiapan: Kabupaten Amfoang, Kabupaten Adonara dan Kota Maumere (1 Laporan)
- Tersedianya data dan informasi di 10 Kabupaten: Kabupaten TTU, Belu, Manggarai, Nagekeo, Ende, Lembata, Sumba Timur, Sumba Barat, Rote Ndao dan Kabupaten Alor guna mendukung penyelesaian pengalihan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1 Laporan)



4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi Usulan Pemekaran Kecamatan Se- Provinsi NTT.

- alokasi anggaran Rp. 360.570.000,-
- realisasi Rp. 115.393.770,- (32,00 %)

Capaian/hasil :

- Terkoordinasi, Terfasilitasi dan Terevaluasinya kelengkapan Dokumen Usulan Pembentukan Kecamatan Dan Kelurahan di **Kabupaten Rote Ndao**: Calon Kecamatan Loaholumekar dari kecamatan Rote Barat Laut, Calon Kecamatan Thie Maumekar dari kecamatan Rote Barat Daya, Calon Kecamatan Pantai Baru Selatan mekar dari kecamatan Pantai Baru, Calon Kecamatan Heti Lole mekar dari kecamatan Lobalain. **Kabupaten Lembata** : Calon Kecamatan Suriwula mekar dari kecamatan Omesuri, Calon Kecamatan Loyobuya mekar dari kecamatan Buyasuri. **Kabupaten Alor**: Calon Kecamatan Abad Selatan mekar dari kecamatan Alor Barat Daya. **Kabupaten Sumba Tengah**: Calon Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah mekar dari kecamatan Umbu Ratu Nggay. **Kabupaten Sumba Timur**: Calon Kelurahan Padadita mekar dari Kelurahan Prailiu dan Kambaniru kecamatan Kambera. **Kabupaten Belu**: Calon Kelurahan Nitasren, Calon Kelurahan Lalei dan Calon Kelurahan Haliulun mekar dari Kelurahan Fatubenao.
- Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan pembentukan kecamatan pada bulan akhir tahun 2018 sehingga proses verifikasi dokumen kelengkapan syarat jatuh pada bulan berikut/awal tahun 2019
- Terdapat 2 (dua) usulan pembentukan kecamatan di Kabupaten Lembata yang persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Provinsi namun berdasarkan aspirasi warga masyarakat yang menginginkan agar nama calon kecamatan dirubah maka Pemerintah Provinsi mengembalikan kepada pemerintah kabupaten Lembata untuk disesuaikan dokumen usulannya berdasarkan nama kecamatan.



- Terdapat persoalan penyerahan tanah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lembata dan Kabupaten Rote Ndao untuk dijadikan sebagai asset pembanguna sarana dan prasarana calon kecamatan baru
- 5) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Elemen Dasar Pemerintahan Koordinasi dan Konsultasi Teknis
- alokasi anggaran Rp. 232.800.000,-
 - realisasi Rp. 210.283.342,- (90,32%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Otda di ikuti 44 orang peserta dari 22 kab/kota dan Bimbingan Teknis Elemen Dasar Pemerintahan di Daerah Persiapan Pemekaran di ikuti 14 orang peserta dari 7 Kabupaten.
- 6) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu Wilayah Kecamatan di Kab/Kota se- Provinsi NTT
- alokasi anggaran Rp. 38.678.400,-
 - realisasi Rp.33.881.105,- (87,59%)
- Capaian/hasil :
- Terkoordinasi, Terfasilitasi, terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah
- alokasi anggaran Rp. 1.312.400.750,-
 - realisasi Rp. 867.185.314,- (66,07 %)
- 1) Kegiatan Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- alokasi anggaran Rp. 106.200.000,-
 - realisasi Rp. 30.153.600 (28,39%)
- Capaian/hasil :
- tersedianya 52 SK Penggantian Antar Waktu:7 SK PAW (pemberhentian dan Pengangkatan) DPRD Provinsi, serta 1 (satu) Usulan masih berproses, 43 SK PAW DPRD

(pemberhentian dan Pengangkatan) Kab./Kota serta 1 (satu) Usulan masih berproses.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (LPPD dan LKPJ)

- alokasi anggaran Rp. 471.379.500,-
- realisasi Rp. 408.544.194,- (86,66%)

Capaian/hasil :

- Tersedianya 20 buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 20 buku Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan 2 buku Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) publikasi di media masa.
- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- Terlaksananya penyampaian LKPJ Gubernur NTT dan LKPJ AMJ Gubernur NTT kepada DPRD Provinsi NTT: Dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2017 sebanyak 120 (seratus dua puluh) buku dan Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur NTT Tahun Anggaran 2013-2016 sebanyak 120 buku.

3) Kegiatan Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan Pelantikan Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih

- alokasi anggaran Rp. 684.821.250,-
- realisasi Rp. 397.407.420 (58,03%)

Capaian/hasil :

- Adanya SK Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018, SK dan pelantikan Penjabat Gubernur NTT, SK Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- Terlaksananya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Masa Jabatan Tahun 2019-2023 oleh Presiden RI di Jakarta.
- Terlaksananya pelantikan Pjs. Bupati Alor, Ende dan Nagekeo di Kupang oleh Gubernur NTT pada tanggal 14 Februari 2018 dan pelantikan Penjabat Bupati Sikka oleh Gubernur NTT pada tanggal 20 Juli 2018.



- Terlaksananya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Masa Jabatan Tahun 2018-2023 oleh Gubernur NTT pada tanggal 20 September 2018.
- Terlaksananya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023 oleh Gubernur NTT pada tanggal 12 November 2018.
- Terlaksananya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Masa Jabatan Tahun 2018-2023 oleh Gubernur NTT pada tanggal 23 Desember 2018.

- 4) Kegiatan Fasilitas Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara ke Dalam Daerah
- alokasi anggaran Rp. 50.000.000,-
 - realisasi Rp. 31.080.100,-(62,16 %)
- Capaian/hasil :
- Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara di Provinsi NTT.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro PemerintahanSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018sebanyak42orang dengan perincian, sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD= 1 orang; SLTP= 1 orang; SLTA= 8orang; Diploma= - orang; Sarjana= 25 orang; Magister= 7 orang;
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV= 8 orang, Golongan III= 29 orang, Golongan II= 4orang Golongan I= 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 13 orang.
Eselon II= 1 orang, Eselon III= 3 orang, Eselon IV=9 orang.
- d. Pejabat Fungsional Arsiparis: 4 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunandaerah.

Program dalam RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
2	Program Peningkatan Tata Kelola	Program Peningkatan Tata Kelola



	Pemerintahan Kependudukan dan Otda	Pemerintahan Kependudukan dan Otda

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 404.666.000,- realisasi Rp.268.110.196,- (66,25%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 61.585.000,- realisasi Rp.49.043.294,- (79,63%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Dana: Rp. 5.447.000,-realisasi Rp. 0,- (0%);

BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

➤ alokasi anggaran Rp. 13.768.920.000,-

➤ realisasi Rp. 12.465.248.487,- (90,53%)

1) Koordinasi FORKOMPIMDA Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

• alokasi anggaran Rp. 2.708.000.000,-

• realisasi Rp. 2.667.363.000,- (98.50%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya 108 kali rapat dengan unsur FORKOPIMDA. tentang kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pembukaan Trans Mart Carrefour Kupang diselenggarakan oleh Trans Retail, Konferensi PWI Provinsi NTT, Pembangunan Gedung Ibadah GKS Bidi Prain di Kec.Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur, Grand Opening Garuda Indonesia Travel Fair 2018, Peresmian Sumur Bor dan Pembangkit EBT di NTT, Panen raya



perdana Jagung hasil program revolusi pertanian Malaka, Membuka acara Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia NTT ke V Tahun 2018, Pelatihan Vokasi Persatuan Wartawan Indonesia, Rapat Forum Koordinasi Potensi pencarian dan pertolongan tingkat daerah (FKP3D) dan Program Kerja kantor pencarian dan pertolongan kupang Tahun 2018, Rakorda Program KKBPK Tahun 2018, Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa (PISMA) Tahun 2018 Universitas Katholik Widya Mandira Kupang, Musrenbang Provinsi NTT Tahun 2018, Peletakan batu pertama Pabrik Gula PT. MSM, Meresmikan Rumah Susun Ponpes Ende, RAT XXXIV KSP Obor Mas Tahun Buku 2017.

2) Peningkatan kerja sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- alokasi anggaran Rp. 3.302.000.000,-
- realisasi Rp. 2.371.747.097,- (71,83%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya 24 kali fasilitasi kerja sama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan Provinsi NTT dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya: Menteri BUMN RI ke Kabupaten Flores Timur, Menteri ESDM RI ke Kabupaten Alor, Gubernur NTT ke Sumba Timur, Gubernur NTT ke Kabupaten Belu, Gubernur NTT ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, Gubernur NTT ke Kabupaten Sikka, Gubernur NTT ke Kabupaten Ende, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ke Kota Kupang.

3) Penguatan Fungsi Keprotokoleran

- alokasi anggaran Rp. 833.920.000,-
- realisasi Rp. 588,131,000,- (70.53%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya 246 kali tugas keprotokolan dalam memfasilitasi dan mendampingi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan tamu protokoler: Pertemuan antara Badan PENGDA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTT, Pertemuan antara Sulta Sepuh XIV Keraton Kesepuhan



Cirebon (YM Pangeran Adipati Natadiningrat), Pertemuan antara Wakil Duta besar Australia untuk Indonesia, Pertemuan antara Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pertemuan antara Perwakilan PT. Garam (persero), Peretmuan antara Perwakilan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PERPARANI Katholik, Pertemuan antara Pengurus Pemuda GMIT GBM dan Anggota PGI, Pertemuan antara Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana.

4) Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat/Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan/Pemerintah

- alokasi anggaran Rp. 5.235.000.000,-
- realisasi Rp. 5.195.489.500,- (99.25%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya 115 kali dialog/audiens selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka membangun komunikasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Organisasi Sosial, Pemuda, Mahasiswa serta komponen masyarakat : Audiens dengan bapak Peter Simojoki Sekretaris II Bidang Ekonomi Kedutaan Australia di Kota Kupang Provinsi NTT, Audiens dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang, Audiens dengan pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi NTT di Kupang, Audiens dengan pengurus Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim di Kupang, Audiens dengan Jenisha Dance Center di Kupang, Audiens dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera di Kupang, Audiens dengan masa penerima anggota baru dan masa bimbingan GPR-MKS di Kupang, Audiens dengan National Paralympic committe Indonesia (NPCI) Provinsi NTT di Kupang, Audiens Asosiasi Guru Penulis Indonesia di Kupang, Audiens dengan Panitia Pentabisan Rumah Tuhan Klasik Amarasi Timur di Kupang.

5) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- alokasi anggaran Rp. 1.690.000.000,-
- realisasi Rp. 1.642.517.890,- (97,19%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya 75 kali Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah berserta ajudan dan protokol ke luar daerah dan dalam daerah di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur: Kunjungan Kerja Gubernur Ke Kabupaten Sikka, Ke Kabupaten Manggarai Barat, Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kota Kupang Provinsi NTT, Kunjungan Kerja dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Kota kupang Provinsi NTT, Kunjungan Kerja Gubernur NTT ke Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Maumere, Kab. Lembata dan ke Kab. Ende.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat Struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro Umum setda Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018sebanyak 136orang dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 3 orang; SLTP = - orang; SLTA = 85 orang; Diploma = 5 orang; Sarjana = 38 orang; Magister = 5 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 3orang; Golongan III = 65 orang; Golongan II = 65 orang; Golongan I = 3 orang.
- c. Pejabat Struktural: 12 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 8 orang.
- d. Pejabat Fungsional: 3 orang
Arsiparis = 3 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan.

Program dalam RENJA Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.



Dana: Rp.35.656.953.680,- realisasi Rp.31.321.087.730,-(87.84%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.17.744.947.350,- realisasiRp.11.650.912.657,- (65.66%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Dana: Rp. 18.000.000,- realisasi Rp.10.780.000,- (59.89%).

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. OrganisasiPerangkat Daerah Pelaksana;

Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- alokasi anggaran Rp. 985.152.700,-
- realisasi Rp. 903.182.550,- (91,68%)

1) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

- alokasi anggaran Rp. 157.617.500,-
- realisasi Rp. 132.904.500,- (84,32%),

Capaian/hasil :

Terfasilitasi/Terevaluasinya 119 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 20 Rancangan Peraturan DPRD Kab./Kota, terpenuhinya pemberian 179 Nomor Register Peraturan Daerah Kab./Kota, terkajinya 107 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 28 Peraturan Bupati/Walikota dan 3 Peraturan DPRD Kab./Kota.

2) Legislasi Daerah.

- alokasi anggaran Rp. 672.994.000,-
- realisasi Rp. 622.850.850,- (92,55%),

Capaian/hasil :

adanya 16 Perda Provinsi, 42 Pergub, 376 Kepgub, 1 Ingub, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebanyak 117 buah dan Konsultasi Publik Ranperda Provinsi di 9 Kabupaten/Kota.

3) Rapat Koordinasi Bidang Hukum.

- alokasi anggaran Rp. 54.541.200,-
- realisasi Rp. 47.889.200,- (87,80%),

Capaian/hasil :

Terlaksananya 1 kali Rapat koordinasi para Asisten yang



membidangi urusan Hukum dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota.

4). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.

- alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
- realisasi Rp. 99.538.000,- (99,54%),

Capaian/hasil :

terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Ranperda serta Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota di 13 Kabupaten/Kota, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 6Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

- alokasi anggaran Rp. 1.132.064.115,-
- realisasi Rp. 1.028.004.000,- (90,81%),

1) Kegiatan Penanganan Kasus di Dalam dan Luar Pengadilan.

- alokasi anggaran Rp. 574.093.099,-
- realisasi Rp. 503.039.000,- (87,62%),

Capaian/hasil :

- adanya Penanganan perkara di pengadilan yang masuk tahun 2018 sebanyak4 perkara terdiri dari4 perkara perdata di Pengadilan Negeri dan lanjutan perkara dari tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 7 perkara.
- adanya Penanganan 9 Kasus di luar pengadilan (Penyelesaian Masalah Stadion Merdeka Kupang, Fasilitasi Masalah Tanah Pemerintah Provinsi yang terletak depan SMA I Kupang dengan keluarga almarhum Lukas Manobe, adanyadugaanpelanggaran terhadap hak anak-anak yatim piatu yang menyebabkan putus sekolah dan menimbulkan kematian yang terjadi di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Fasilitasi penyelesaian Ganti Rugi tanah keluarga Konay, Permintaan Penjelasan atas Pemberhentian Kepala Desa Laranwutun yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, proses administrasi tukar guling tanah dengan saudara Yohanes Tanur. Sudah ditanggapi dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Status Tanah Warisan



yang menjadi sumber Sengketa berkepanjangan dan Peristiwa Penganiayaan dan Perampokan atas diri Pelapor. saudara Pdt. Drs. Agustinus Saingo, SM dan Fasilitasi Pengambilan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Bupati Sabu Raijua Non Aktif, Ir. Marthen Luther Dira Tome dan Bupati Ngada Non Aktif, Marianus Sae di Pengadilan Tipikor Surabaya.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

- alokasi anggaran Rp. 187.853.416,-
- realisasi Rp. 183.812.400,- (97,85%),

Capaian/hasil :

adanya 2 produk hukum yang disosialisasikan secara langsung di 10 Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT.

3) Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten/Kota.

- alokasi anggaran Rp. 73.468.800,-
- realisasi Rp. 72.786.800 -(99,07 %),

Capaian/hasil :

- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sepakat membangun website JDIH berbasis TIK di masing-masing Kabupaten/Kota; Perlu segera meninjau kembali/memperbaharui kebijakan JDIH; Perlunya membentuk JDIH pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi selaku Anggota JDIH
- Perlu dilakukan Inventarisasi Produk Hukum Pusat maupun daerah yang dikelola di daerah; Kerjasama pembangunan dan pengelolaan website JDIH di masing-masing Kabupaten Kota se-Provinsi NTT dan Perlu dilakukan Kerjasama peningkatan kemampuan pengelola JDIH

4) Advokasi Pengisian LHKPN.

- alokasi anggaran Rp. 97.880.000,-
- realisasi Rp. 90.998.000,-(92,97%),

Capaian/hasil :

- Tersosialisasinya teknik pengisian LHKPN; terdatanya



perkembangan penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN baik di Provinsi maupun di 7 Kab/Kota.

- adanya 144 Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN TK Provinsi dan Pejabat Penyelenggara Negara di 7 Kab/Kota.
- 22 Kab/kota telah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Wajib LHKPN dan Keputusan Pengelola LHKPN.
- Tersedianya data wajib LHKPN dan data perkembangan penyampaian LHKPN TK Provinsi dan 22 Kab/Kota se-NTT.

5) Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Perumusan Kebijakan Hukum.

- alokasi anggaran Rp. 83.184.800,-
- realisasi Rp. 78.127.800,- (93,92%),

Capaian/hasil :

- Terlaksananya 4 kali Rapat Koordinasi Aksi RANHAM Provinsi NTT Tahun 2018 di 3 Kabupaten/Kota dan 1 kali di Provinsi.
- Meningkatnya pemahaman anggota Sekber RANHAM Kabupaten Belu, TTU dan TTS tentang pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan, dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembangunan.
- Terlaksananya Bimtek HAM Provinsi NTT yang dilaksanakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT.
- Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan di Provinsi yang melibatkan 20 Peserta terdiri dari anggota Sekber RANHAM yaitu DPRD Prov. NTT, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, Kanwil Hukum dan HAM NTT, PT, NGO/LSM yang peduli HAM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

6) Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kab./Kota.

- alokasi anggaran Rp. 115.584.000,-
- realisasi Rp. 99.240.000 - (85,86%),

Capaian/hasil :

terlaksananya 2 (dua) kali Rakor Aksi PPK di Provinsi NTT



dan Rakor Aksi PPK di 7 (tujuh) kab/kota.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 42 orang dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 1 orang; SLTP = - orang; SLTA = 7 orang; Diploma = 2 orang;
Sarjana = 26 orang; Magister = 6 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 5 orang; Golongan III = 35 orang; Golongan II = 2 orang;
Golongan I = - orang.
- c. Pejabat Struktural: 12 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 2 orang; Eselon IV = 9 orang.
- d. Pejabat Fungsional: - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;

Program dalam RENJA Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
2	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: Tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program Perangkat Daerah (non urusan), yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 331.360.185,- realisasi Rp. 317.311.150,- (95,76%);
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 68.300.000,- realisasi Rp. 68.300.000,- (100%);
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 12.000.000,- realisasi Rp. 12.000.000,- (100%).

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- alokasi anggaran Rp. 1.564.603.900,-
- realisasi Rp. 1.492.873.350,- (95,42%),

1) Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten/Kota

- alokasi anggaran Rp. 104.000.000,-
 - realisasi Rp. 97.697.300,- (93,94%),
- Capaian/hasil :

Tersusunnya 1 (satu) dokumen LKIP Gubernur NTT Tahun 2017, 1 buku Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 dan 1 buku Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 serta terlaksananya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 49 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Bagian Organisasi Kabupaten/Kota.

2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT

- alokasi anggaran Rp. 939.166.800,-
 - realisasi Rp. 894.617.100,- (95,26%),
- Capaian/hasil :

Terlatihnya 100 ASN penyusun LKIP, RKT dan PK Perangkat Daerah; terlaksananya pengumpulan data base SAKIP di 49 Perangkat Daerah; terlaksananya pemberian penghargaan predikat SAKIP terbaik bagi 3 Perangkat Daerah Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota; terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

3) Pelaksanaan ABK pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT

- alokasi anggaran Rp. 521.437.100,-
 - realisasi Rp. 500.558.950,- (96%),
- Capaian/hasil :

Terlaksananya Bimtek Penyusunan PMPRB bagi 80 orang



dan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 1 dokumen; terlaksananya internalisasi pelaksanaan program RB dan penancangan Zona Integritas bagi 120 orang.

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

- alokasi anggaran Rp.1.733.934.300,-
- realisasi Rp.1.677.426.050,-(96,74%)

1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi

- alokasi anggaran Rp. 273.000.000,-
- realisasi Rp. 262.294.400,-(96,08%)

Capaian/hasil :

- Tersusunnya 1 (satu) dokumen LKIP Gubernur NTT Tahun 2017, 1 buku Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 dan 1 buku Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 serta terlaksananya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 49 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Bagian Organisasi Kabupaten/Kota; informasi kinerja pemerintah yang dapat diakses oleh stakeholders dan data tentang indikator kinerja pemerintah daerah yang muktahir dan terukur.

2) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-
- realisasi Rp. 132.033.800,- (88,02%)

Capaian/hasil :

Terlatihnya 100 ASN penyusun LKIP, RKT dan PK Perangkat Daerah; terlaksananya pengumpulan data base SAKIP di 49 Perangkat Daerah, terlaksananya pemberian penghargaan predikat SAKIP terbaik bagi 3 Perangkat Daerah Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota.

3) Pembinaan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi

- alokasi anggaran Rp. 200.000.000,-
- realisasi Rp. 190.844.300,-(95,42%)



Capaian/hasil :

- Terlaksananya Bimtek Penyusunan PMPRB bagi 80 orang dan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 1 dokumen.
- terlaksananya internalisasi pelaksanaan program RB dan penancangan Zona Integritas bagi 120 orang.

4) Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan

- alokasi anggaran Rp. 292.375.000,-
- realisasi Rp. 288.902.800,- (98,81%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Bimtek SOP Administrasi Pemerintahan bagi 60 Orang (ASN Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota) dan terlaksananya evaluasi penerapan SPBE dengan hasil Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

5) Pengendalian Budaya Kerja.

- alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
- realisasi Rp. 99.063.850,- (99,06%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya pengembangan budaya kerja bagi 500 ASN dengan capaian hasil meningkatnya budaya kerja aparatur dan kepuasan publik atas perilaku dan pelayanan aparatur.

6) Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)

- alokasi anggaran Rp. 159.368.000,-
- realisasi Rp. 158.496.100,- (99,45%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di 4 Perangkat Daerah Provinsi NTT dan terlaksananya BIMTEK Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- tersedianya data hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan terlatihnya 95 orang ASN Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT.



- tersedianya data hasil Survei Kepuasan Masyarakat antara lain dan terlatihnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se NTT.

7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- alokasi anggaran Rp. 468.888.300,-
- realisasi Rp. 462.264.800,- (98,59%),

Capaian/hasil :

- Terlaksananya coaching clinic kompetisi inovasi pelayanan publik 95 orang, terlaksananya bimtek penyusunan Standar Pelayanan Publik 85 orang.
- terlaksananya Bimtek Lapor SP4N! bagi perangkat daerah 95 orang; terlaksananya rakor pengelolaan pengaduan masyarakat bagi 50 orang.
- terlatihnya perangkat daerah lingkup Pemerintahan Provinsi dalam Lapor SP4N! 55 orang.

8) Penerapan SAKIP dan Pengelola e-SAKIP

- alokasi anggaran Rp. 90.303.000,-
- realisasi Rp. 83.526.000,- (92,50%),

Capaian/hasil :

Terlaksananya penerapan SAKIP dan e SAKIP on line dan meningkatnya kinerja SKPD dan kinerja Pemerintah Provinsi NTT.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 37 orang dengan kualifikasi:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 12 orang; Diploma = - orang; Sarjana = 18 orang; Magister = 10 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 9 orang; Golongan III = 29 orang; Golongan II = 2 orang; Golongan I = - orang;

c. Pejabat Struktural: 13 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 9 orang.

d. Pejabat Fungsional: - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;

Program dalam RENJA Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik

5. **Kondisisarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** tidakada.

7. **Hal lain yang dianggapperluuntukdilaporkan:** tidakada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program Perangkat Daerah (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp.315.395.500,- realisasiRp.307.675.400,-(97,55%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.79.512.000,-realisasiRp.79.005.425,- (99,36%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.4.585.300,- realisasiRp.4.564.200,- (99,54%).

BIRO PEREKONOMIAN.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. KoordinasiPembinaan PembangunanPerekonomian dan SDA

➤ alokasi anggaran Rp. 915.921.100,-

➤ realisasi Rp. 907.950.500,-(99,13%)

1) PemberdayaanKawasanIndustri

BolokdanKawasanPengembanganEkonomiTerpadu Mbay

• alokasi anggaran Rp. 450.247.100,-

• realisasi Rp. 446.881.300,- (99,25%)

Capaian/hasil :

Adanya Pembahasan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rapat ini melibatkan Biro Perekonomian, Akademisi (UNWIRA, Universita Muhamadiyah, dan UNDANA), Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan



Kabupaten Ngada serta Pengelola KAPET Mbay (*ex officio*). Sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum dapat menentukan lokasi defenitif yang akan dijadikan sebagai pusat Kawasan Ekonomi Khusus Mbay.

- 2) Peningkatan Pengendalian Produktivitas SDA dan Energi
- alokasi anggaran Rp. 208.298.000,-
 - realisasi Rp. 208.291.800,- (100%)

Capaian/hasil :

- Kurangnya koordinasi dan integrasi berbagai sektor di Kabupaten/Kota yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan peningkatan sumber daya alam secara berkelanjutan perlu meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi antara SKPD di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten/Kota.
 - Belum optimalnya persamaan persepsi tentang peningkatan produksi dan produktivitas SDA secara berkelanjutan, sehingga diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka penyamaan persepsi bagi peningkatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 3) Pengembangan Energi Listrik, Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Air Bawah Tanah
- alokasi anggaran Rp. 89.896.000,-
 - realisasi Rp. 89.393.000,- (99,44%)

Capaian/hasil :

Perlu adanya Peraturan Gubernur NTT tentang pemanfaatan potensi Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di daerah, adanya survey kondisi potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah, Perlunya pemantauan, pengawasan terhadap pengolahan potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah dan Perlunya sinergitas antar instansi di wilayah Provinsi NTT terkait pengolahan potensi ESDM.
- 4) Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- alokasi anggaran Rp. 41.240.000,-
 - realisasi Rp. 41.240.000,- (100%)

Capaian/hasil :

Adanya *Focus Group Discussion* (FGD)

tentang Infrastruktur Transportasi (Darat, Laut, Udara) bertempat



di RuangRapatAsistenSekdaProvinsi NTT pada tanggal 05 November 2018 dengan peserta60 orang dengan hasil : Aksesibilitas darat, laut dan udara; Angkutan darat, laut dan udara; Moda transportasi jalan, laut dan udara; Angkutan Pedesaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan; Ketertiban berlalu lintas; Peningkatan SDM teknik perhubungan bagi PNS.

5) Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk Kawasan/Obyek Wisata

- alokasi anggaran Rp. 88.740.000,-
- realisasi Rp. 88.340.400,- (99,55%)

Capaian/hasil :

- Adanya pembangunan Infrastruktur yang berbasis tata ruang, tertib ruang dan memanfaatkan momentum event-event yang dilakukan di Provinsi NTT melalui usulan program dan kegiatan.
- Perlunya kerjasama antar daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata.

6) Koordinasi/Pemantauan/Pengendalian dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

- alokasi anggaran Rp. 37.500.000,-
- realisasi Rp. 33.804.000,- (90,14%)

Capaian/hasil :

Perluadanyapeningkatankoordinasi yang baikantaraBagianAdministrasiPerekonomian/ BagianEkonomidengan OPD teknisdalamkaitandenganpengelolaan data pengendaliansectorketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehinggadapatdijadikansebagiaibahanacuanataupedomandalam perencanaan program kerjadi tahunanggaranmendatang.

b. Program FasilitasiKerjasamaEkonomi dan PembinaanBadan Usaha

- alokasi anggaran Rp. 1.151.260.000,-
- realisasi Rp. 1.137.553.000,-(98,81%)

1) Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi

- alokasi anggaran Rp. 300.000.000,-
- realisasi Rp. 298.251.400,- (99,42%)

Capaian/hasil :



- Terlaksananya Rapat Koordinasi Beras Sejahtera (Rastra) dan Launching Rastra Tahun 2018 merekomendasikan Penanganan Bansos Rastra Tahun 2019 di Kabupaten/Kota ditangani oleh Dinas Sosial di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bansos Pangan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Bansos Pangan, Kebijakan terkait stabilitas harga koordinasi kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT.
- Terlaksananya Rapat Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merekomendasi Pembentukan Satgas Waspada Inflasi Pangan Akhir Tahun, Melakukan pengaturan jadwal tanam (Manajemen Pola Tanam) untuk komoditas hortikultura, Akan dilakukan *benchmarking* ke luar daerah terkait inovasi-inovasi TPID.

2) Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha

- alokasi anggaran Rp. 851.260.000,-
- realisasi Rp. 839.301.600,- (98,60%)

Capaian/hasil :

Adanya Rekomendasi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Rekomendasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 42 orang dengan kualifikasi:

- a. Latar belakang pendidikan:

SD= - orang; SLTP= 1 orang; SLTA= 13 orang; Diploma= 1 orang; Sarjana= 22 orang; Magister= 5 orang; Doktor = - orang.
- b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV= 6 orang; Golongan III= 28 orang; Golongan II= 7 orang; Golongan I= 1 orang.
- c. Pejabat Struktural: 12 orang.

Eselon II = - orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 9 orang.
- d. Pejabat Fungsional: - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.



Program dalam RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha	Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

- 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Dana: Rp. 333.200.000,-realisasiRp. 332.779.900,- (99,87%);
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Dana: Rp. 87.478.000,-realisasiRp. 87.478.000,- (100%);
- 3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**
Dana: Rp.15.000.000,-realisasiRp. 14.980.000,- (99,87%);

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT.

- 1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**
 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - alokasi anggaran Rp.2.081.825.167,-
 - realisasi Rp.2.060.312.800,- (98,97%)
 - 1) Pelaksanaan Hari – hari Besar Keagamaan
 - alokasi anggaran Rp. 1.861.586.800,-
 - realisasi Rp. 1.840.074.800,- (98,84%)
 - Capaian/hasil :
 - Terfasilitasinya 400 orang peserta untuk mengikuti acara halal bihalal, 400 orang peserta Pawai Takbiran dari Remaja Masjid Kota Kupang.
 - Adanya pemberian bantuan hewan kurban7 ekor sapi



kepada Masjid Agung Baiturrahman Perumnas Kota Kupang, Masjid Al Multazam Kelurahan Namosain Kota Kupang, Masjid Baiturrahman Bakunase Kota Kupang, Masjid Al Qalam Belle Waiwerang Flores Timur, Masjid Nurul Huda Pu'u Pui, Kelurahan Tetandara Ende, Masjid Nurul Hidayah, Nangalili Manggarai Barat dan Masjid Ar Rahman Batuputih Timor Tengah Selatan.

- Terkirimnya 800 orang peserta ziarah rohani dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua dan Umat Kristen lainnya pada kegiatan Pekan Suci Larantuka.
- Terfasilitasinya 2.000 orang peserta Pawai Paskah dari Klasis GMIT sedaratan Timor dan denominasi gereja serta rombongan lintas agama, OKP, dan yayasan-yayasan.
- Terfasilitasinya 1.100 orang untuk mengikuti kegiatan Natal Oikumene atas kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dengan Majelis Sinode GMIT dan Keuskupan Agung Kupang di GMIT Kaisarea BTN Kupang

2) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

- alokasi anggaran Rp. 220.238.367,-
- realisasi Rp. 220.238.367,- (100%)

Capaian/hasil :

- Adanya pemahaman yang sama tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama demi terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera dan harmonis.
- Meningkatnya kerjasama Kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan serta Terwujudnya masyarakat NTT yang rukun, damai dan harmonis.

b. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- alokasi anggaran Rp. 1.717.199.500,-
- realisasi Rp. 1.585.657.450,- (92,34%)

1) Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita

- alokasi anggaran Rp. 400.000.000,-
- realisasi Rp. 400.000.000,- (100%)

Capaian/hasil :

- Terfasilitasinya perayaan Hari Kartini dan Rakerda DWP



Provinsi NTT dan HUT DWP Provinsi NTT.

- Adanya Pemberian bantuan pendidikan bagi 10 oranganak-anak anggota DWP golongan I, II dan III yang berprestasi, Pemberian bantuan kepada 4 panti asuhan yaitu Panti Asuhan Alma Baumata, Panti Asuhan Bhakti Luhur, Panti Asuhan Alma Sikumana dan Panti Asuhan Petra Kristen.
- Adanya Pemberian bantuan kepada Posyandu Binaan Dharma Wanita Provinsi NTT di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang dan Posyandu Lestari Perumnas Kota Kupang.
- Terlaksananya penanaman 200 anakan pohon/anakan kelor dan mangga di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang.

2) Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

- alokasi anggaran Rp. 617.199.500,-
- realisasi Rp. 570.657.450,- (92,46%)

Capaian/hasil :

- Tersusunnya Draft Pergub, Juklak, Juknis Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran di Provinsi NTT.
- Terlaksananya sosialisasi Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP.UKS/M)di Kabupaten Sumba Tengah, Rote Ndao, Lembata, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua.
- Terkoordinasinya Pendirian Kopertis NTT / Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Nusa Tenggara Timurtahun 2018 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor : 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

3) Fasilitas Hari Besar Nasional dan Daerah

- alokasi anggaran Rp. 700.000.000,-
- realisasi Rp. 615.000.000,- (87,86%)

Capaian/hasil :

- terfasilitasinya 1.000 orang peserta untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Lahir Pancasila terdiri dari unsur TNI/POLRI, PNS, Mahasiswa, Pelajar,



Organisasi Kepemudaan/ Kemasyarakatan Provinsi NTT.

- terfasilitasinya 2.000 orang peserta untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun RI terdiri dari unsur TNI/POLRI, PNS, Mahasiswa, Pelajar, Organisasi Kepemudaan/ Kemasyarakatan Provinsi NTT.
- 2.000 orang mengikuti Perayaan puncak HUT NTT dengan berbagai kegiatan dari tanggal 26 November 2018 dan puncak perayaan pada tanggal 20 Desember 2018 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 32 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD= - orang; SLTP= - orang; SLTA= 8 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana (S1) = 20 orang; Magister (S2) = 2 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV= 5 orang; Golongan III = 22 orang; Golongan II = 5 orang; Golongan I = - orang.

c. Pejabat Stuktural: 12 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 8 orang;

d. Pejabat Fungsional: - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Kurang Mencukupi

6. Permasalahan dan Solusi: Tidak Ada.

7. Hal lain yang dilaporkan: Tidak Ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non



urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp. 192.688.673,- realisasi Rp. 181.580.175,- (94,24%);
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp. 40.400.000,- realisasi Rp. 40.359.400,- (99,90%);
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp. 12.039.760,- realisasi Rp.12.035.300,- (99,96%).

BIRO HUMAS SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Perangkat Daerah Pelaksana;

Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah

- alokasi anggaran Rp. 613.000.000,-
- realisasi Rp. 595.296.862,-(97,11%)

1) Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- alokasi anggaran Rp. 613.000.000,-
- realisasi Rp. 595.296.862,-(97,11%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian pada kegiatan/aktivitas Gubernur/Wakil Gubernur dalam daerah dan ke luar daerah sebanyak 402 kali selama Tahun 2018 dengan rekapitulasi hasil peliputan dokumentasi 55.472 file foto dan 103 file video.
- Terlaksananya Pendampingan kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam daerah dan ke luar daerah, serta Pejabat Biro Humas oleh 55 orang.
- 4 kali pembinaan pengelolaan dokumentasi foto, lukisan dan audiovisual di Kabupaten Sikka, Alor, Flores Timur dan Sumba Barat, 1 kali pengelolaan arsip foto, lukisan dan audiovisual, cuci cetak 34 Album foto kegiatan/aktivitas Gubernur dan Wakil Gubernur selama Tahun 2018, pembuatan 800 lembar katalogisasi, 152 kartu anggota perpustakaan, penjajaran dan penomoran buku-buku perpustakaan, pencetakan 750 lembar Kartu



Buku yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan apabila buku dipinjam keluar, 2 kali Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Ende dan Lembata dan 1 kali Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan di Kabupaten Ende.

b. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

- alokasi anggaran Rp. 2.747.672.800,-
- realisasi Rp. 2.583.503.702,- (94,03%)

1) Publikasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- alokasi anggaran Rp. 2.747.672.800,-
 - realisasi Rp. 2.583.503.702,- (94,03%)
- Capaian/hasil :
- Terlaksananya penerbitan Buletin Warta Nusa Tenggara Timur 4 Edisi dan digandakan 7000 Eksemplar.
 - Terlaksananya Pemasangan 191 Iklan di Media cetak, Media Elektronik, Media Online Lokal dalam tahun 2018, 5 kali Jumpa Pers dalam tahun 2018
 - Terlaksananya Publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi NTT berupa pemasangan 11 buah Baliho
 - Terlaksananya Publikasi Advertorial Media Cetak, Media Elektronik, Media Online lokal sebanyak 70 berita pada 49 Media.
 - Terlaksananya Publikasi Berita Pembangunan Provinsi NTT pada 3 Media Cetak Lokal (Victory News, Timex dan pos Kupang) sebanyak 58 berita.
 - Terlaksananya 1 Paket kerja sama Publikasi dengan Media Cetak Nasional (Media Indonesia) berupa 1 Advertorial, 3 halaman, 60 eksemplar.
 - Terlaksananya 1 Paket kerja sama Publikasi dengan Media Nasional iNews TV, yang meliputi kegiatan : Penayangan 1 kali Talkshow tentang Pelaksanaan Program Prioritas Provinsi NTT yakni 6 Tekad, 8 Agenda dalam bentuk narasi dan visualisasi.
 - Terlaksananya 3 kali pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan peserta 100 orang/kegiatan, Tanggal 28 Mei 2018, di Aula Hotel Naka – Kupang dengan Tema " Peran Humas



Pemerintah dalam Menghadapi Paham Radikalisme dan Terorisme ",NarasumberKomisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, S.Ik, Tanggal 31 Juli 2018, di Aula Hotel Naka – Kupang Tema " Sinergitas Peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tanggal 25Oktober 2018, tempat pelaksanaan di Aula Raffa Hotel Ima Kupang dengan Tema " Reformasi Birokrasi di *Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur* ",Narasumber Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur: Bapak Ir. Ferdy J. Kapitan, M. Si.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat Struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai Biro HumasSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018 sebanyak 33 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 13 orang; Diploma = 1 orang; Sarjana = 11 orang; Magister = 7 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 5 orang; Golongan III = 23 orang; Golongan II = 4 orang, Golongan I = 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 12 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 8 orang.
- d. Pejabat Fungsional: 4 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;

Program dalam RENJA Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan, Komunikasi dan Informasi Daerah	Program Peningkatan, Komunikasi dan Informasi Daerah
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa



5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** Kurang mencukupi.
6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp.463.858.600,- realisasi Rp. 425.077.013,- (91,64%);
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp.198.790.600,- realisasi Rp.192.618.000,- (96,89 %);
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana:Rp.11.400.000,- realisasi Rp. 11.400.000,- (100 %);

BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSINTT.

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**
Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT.
2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**
 - a. Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah
 - alokasi anggaran Rp.1.947.797.530,-
 - realisasi Rp.1.908.400.850,- (97,98%)
 - 1) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se Provinsi NTT.
 - alokasi anggaran Rp.1.012.128.800,-
 - realisasi Rp. 995.609.300,- (98,37%)

Capaian/hasil :

 - Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah pengadaan barang/ jasa di Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/ Kota selama 12 bulan.
 - Terlaksananya mentoring dan pendampingan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kabupaten Sikka; Kabupaten Sumba Barat Daya; Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka.



- Terlaksananya klarifikasi dan pembuktian lapangan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa selama 12 bulan.
- Tersedianya laporan/ data pengadaan barang/ jasa se-Provinsi NTT selama 12 bulan; Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Resiko PBJ bagi PPK, Pejabat Pengadaan, Pengelola serta POKJA Pengadaan diikuti 100 orang peserta di Kupang.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi pengadaan barang/ jasa se-Provinsi NTT di Larantuka-Kabupaten Flores Timur diikuti 100 orang peserta.
- Terlaksananya Sosialisasi dan Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ bagi Pokja dan Calon Pokja Penuh Waktu di Kupang.
- Terlaksananya 1 kali Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Monev Elektronik PBJ.
- Terlaksananya 1 kali ikut serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi teknis pengadaan barang/ jasa di LKPP.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis terkait perkembangan regulasi dan penyelesaian masalah pengadaan barang dan jasa di LKPP RI selama 12 bulan
- Terlaksananya 1 kali ikut serta pada Bimbingan Teknis SPSE Versi 4.3 dan Implementasi Cloud Server di LKPP RI – Jakarta.

2) Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/ Kota

- alokasi anggaran Rp.326.480.000,-
- realisasi Rp.317.439.350,- (97,23%).

Capaian/hasil :

- Terlaksananya 1 kali Pra Forum Jasa Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab./Kota se-NTT dan Rakor Tim Pembina Jasa konstruksi Provinsi dan Kab./Kota di Kupang diikuti 125 orang.
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (Bimtek SIPJAKI) untuk 22 Kab./Kota diikuti 50 orang.
- Terlaksananya Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait kepada 100 orang selama 1 hari di Kupang.



- Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Jasa konstruksi se-Provinsi NTT selama 1 tahun.

3) Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan LPSE Kab/Kota

- alokasi anggaran Rp.609.188.730,-
- realisasi Rp.595.352.200,- (97,73%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) bagi 49 SKPD lingkup Pemprov NTT.
- Terlaksananya Rakornas LPSE seluruh Indonesia di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.
- Terselenggaranya Bimtek SPSE v4 bagi Pengguna SPSE dan 1 kali Bimtek Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- Terlaksananya Konsultasi Teknis terkait SPSE di LKPP RI Jakarta.
- Terlaksananya ikut serta pada Workshop MOT Upgrade SPSE v4 serta Pengembangan System Report.
- Terlaksananya magang bagi unit kerja PBJ Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT bagi 10 orang.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, per 31 Desember 2018 sebanyak 44orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan:
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 12orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 24 orang; Magister = 6 orang.
- Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 8 orang; Golongan III = 31 orang; Golongan II = 5 orang; Golongan I = - orang.
- Pejabat Stuktural: 13 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3orang; Eselon IV = 9 orang.
- Pejabat Fungsional : 4 orang.
Analisis Kepegawaian = 1 orang; Pranata Komputer = 1 orang; Statistisi = 1 orang; Arsiparis = 1 orang.



4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Tidak Mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp.1.172.590.470,- realisasi Rp. 1.163.264.700, (99,20%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.155.775.000,- realisasi Rp. 155.775.000,- (100%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.21.400.000,- realisasi Rp. 21.400.000,- (100%).

BIRO KERJASAMA SETDA PROVINSINTT.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Lembaga Internasional

➤ alokasi anggaran Rp. 417.480.000,-

➤ realisasi Rp. 391.286,100,- (93.73%)

1) PengendalianKerjasama Pembangunan Lembaga Internasional

• alokasi anggaran Rp. 417.480.000,-

• realisasi Rp. 391.286,100,- (93.73%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya 1 kali Rapat Koordinasi dan evaluasi Lembaga mitra Internasional tanggal 23 November 2019



- Terlaksananya Rapat Senior Official Meeting (SOM) Trilateral Economic Cooperation Between Australia, Timor Leste and Indonesia pada tanggal 11 s/d 13 April 2018.
- Termuktahirnya Data Base Kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO selama 12 bulan.
- Monitoring dan Evaluasi Lembaga Mitra Internasional dan adanya Laporan evaluasi Kinerja Lembaga Mitra Internasional.

b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

- alokasi anggaran Rp. 823.026.000,-
- realisasi Rp. 796.640.896,- (96,79%)

1) Penguatankelembagaankesekretariatan MPU, APPSI, TripatitdankerjasamaProvinsiKepulauan

- alokasi anggaran Rp. 483.456.000,-
- realisasi Rp. 469.891.700,- (97,19%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya RapatGabungan Forum Kerjasama Daerah MitraPraja Utama Tahun 2018 di Provinsi Lampung tanggal 27 s/d 29 Maret 2018, Provinsi Jawa Timur tanggal19 s/d 21 April 2018 dan Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 November 2018.
- Terlaksananya Rapatkerjanasional APPSI di Provinsi Jawa Barat tanggal, 21 s/d 23 Februari 2018
- Terlaksananya rapatkoordinasiteknisKerjasamaKawasanSunda Kecil dan Terlaksananya pertemuan koordinasi Tim BKS ProvinsiKepulauan.

2) PeningkatanKoordinasidankerjasamaAntarPemerintahProvinsi

- alokasi anggaran Rp. 339.570.000,-
- realisasi Rp.326.749.196,- (96.22%)

Capaian/hasil :

- Terlaksananya Rakor Sinergitas dan Sinkronisasi antara Pemerintah Prov NTT, NTB dan Bali dalam rangka antisipasi dan penanganan ancaman radikalisme secara regional di Kupang tanggal 17 s/d 18 Oktober 2018
- Terlaksananya koordinasi dengan 22 Kab/kota dan Kerja Sama dengan pemerintah Provinsi lainnya



c. Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha

- alokasi anggaran Rp. 166.387.000,-
- realisasi Rp. 157.391.000,- (94.59%)

1) Peningkatan kerjasama Ekonomi

- alokasi anggaran Rp. 166.387.000,-
- realisasi Rp. 157.391.000,- (94.59%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya rapat Pengembangan Investasi dan Pengendalian Kerjasama Ekonomi Daerah Tingkat Provinsi dan Kab/Kota pada tanggal 16 November 2018; adanya 5 Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pihak Ketiga

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, per 31 Desember 2018 sebanyak 30 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = - orang, SLTP = - orang, SLTA = 4 orang, Diploma = - orang, Sarjana = 20 orang, Magister = 3 orang, Doktor = 3 Orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 7 orang; Golongan III = 22 orang; Golongan II = 1 orang; Golongan I = - orang.

c. Pejabat Struktural: 11 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 7 orang.

d. Pejabat Fungsional : - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Program dalam RENJA Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program:

- a. Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
- b. Program Kerjasama Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
- c. Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Tidak Mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.



7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 221.320.000,-realisasiRp. 213.876.112,- (96,64%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 272.800.000,- realisasiRp. 236.365.945,- (86,64%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp. 16.400.000,-realisasiRp. 16.390.000,- (100%);

SEKRETARIAT DPRD dan DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

➤ alokasi anggaran Rp. 55.971.036.200,-

➤ realisasi Rp. 54.523.014.951,- (98,83%)

1) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

• alokasi anggaran Rp. 7.992.510.000.-

• realisasi Rp. 7.923.025.384.- (99,13%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya 3 (tiga) kali kunjungan kerja kelembagaan DPRD diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD beserta staf pendamping ke 22 Kabupaten/Kota se-NTT : terjaringnya aspirasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/proyek yang dibiayai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Laporan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termuat dalam bentuk Rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- terjaringnya aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai oleh APBD



Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 dan telah disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Laporan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk Rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

2) Peningkatan Fungsi Pembuatan Perda Provinsi NTT

- alokasi anggaran Rp. 28.803.606.000.-
- realisasi Rp. 28.260.566.647,- (98,11%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya kegiatan pembahasan Ranperda 11 buah sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 oleh Pemerintah 6 buah dan DPRD dan 5 buah Ranperda merupakan Usul Prakarsa DPRD dan telah mendapat Persetujuan DPRD selanjutnya di tetapkan menjadi Perda Prov.NTT oleh Kepala Daerah.
- Terlaksananya 2 kali sosialisasi Perda ke 22 Kab/Kota se-NTT dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan.Masa Persidangan I (Bulan April 2018)Pimpinan dan Anggota DPRD : 62 orang bersama Staf Pendamping dari Setwan, Masa Persidangan III (Bulan Oktober 2018)Pimpinan dan Anggota DPRD .
- Terlaksananya 2 (dua) kali Hearing/dialog ke 22 Kab/Kota se- NTT dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan: Masa Persidangan II (Bulan Juli 2018) Anggota DPRD : 65 orang bersama Staf Pendamping dari Setwan, Masa Persidangan III (Bulan Oktober 2018) Anggota DPRD : 61 orang bersama Staf Pendamping dari Setwan.
- Terlaksananya 3 (tiga) kali kegiatan RESES setiap tahun sesuai masa persidangan ke dapilnya masing-masing.

3) Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT

- alokasi anggaran Rp. 2.814.915.000,-
- realisasi Rp. 2.688.522.086,- (95,50%)

Capaian Kegiatan :

Terlaksananya 240 kaliRapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD di Tahun 2018: Rapat Pimpinan 33 kali, Rapat Badan Musyawarah 13 kali, Rapat Badan Anggaran 23 kali, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah 35 kali, Rapat Komisi



38 kali, Rapat Gabungan Komisi 6 kali.

4) Peningkatan Fungsi koordinasi/konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD

- alokasi anggaran Rp. 16.360.005.200.-
- realisasi Rp. 15.650.900.834.- (95,40%)

Capaian Kegiatan :

Bimtek 1 kali, rapat ADPSI 1 kali, konsultasi ke Mendagri 14 kali, konsultasi ke Kementerian lainnya 5 kali, konsultasi ke daerah lainnya 7 kali, konsultasi/koordinasi dengan DPR RI 3 kali, menghadiri undangan mitra 1 kali, pendistribusian hasil-hasil sidang ke 22 Kab/Kota 1 kali, peliputan dalam daerah 1 kali, peliputan luar daerah 1 kali, pendampingan protokoler 2 kali, siaran langsung RRI 10 kali, siaran tunda televisi 9 kali, dialog interaktif : RRI dan media televisi 1 paket, pameran pembangunan 1 kali, penerbitan Buletin 6 edisi, penanganan unjuk rasa 15 kali dan fasilitasi pertemuan 25 kali.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2018, sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
SD = 6 orang; SLTP = 2 orang; SLTA = 53 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 37 orang; Magister = 7 orang.
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 5 orang; Golongan III = 56 orang; Golongan II = 44 orang; Golongan I = 7 orang.
- c. Pejabat Struktural: 13 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 9 orang.
- d. Pejabat Fungsional: - orang
Arsiparis = - orang; Pustakawan = - orang dan Analisis Kepegawaian = - orang, dan Perencana Muda = - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat



	Daerah	Daerah

5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.

6. **Permasalahan dan Solusi:** Tidak ada.

7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Dana: Rp.7.775.672.200 ,-realisasi Rp. 7.201.062.753,- (92,61%);

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Dana: Rp.5.364.082.600 -realisasi Rp. 5.006.078.743 ,-(93,33%);

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Dana: Rp.19.200.000,-realisasi Rp. 19.000.000,- (98,96%).

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. **Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;**

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

➤ alokasi anggaran Rp.3.374.852.287,-

➤ realisasi Rp.3.042.653.632,- (90,16%)

1) Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan.

• alokasi anggaran Rp. 1.282.993.500,-

• realisasi Rp. 1.120.470.784,- (87,33%)

Capaian Kegiatan :

-

-

2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana

• alokasi anggaran Rp. 92500000,-

• realisasi Rp. 67962890,- (73,47%)

Capaian Kegiatan :

-

-



-
-
- 3) Bimbingan Teknis Managemen Penanggulangan Bencana Berbasis Gender
- alokasi anggaran Rp. 136.325.000,-
 - realisasi Rp. 113.505.000,- (83,26%)
- Capaian Kegiatan :
-
- 4) Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT
- alokasi anggaran Rp. 130.180.000,-
 - realisasi Rp. 129.034.800,- (99,12%)
- Capaian Kegiatan :
-
-
- 5) Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
- alokasi anggaran Rp. 141221300,-
 - realisasi Rp. 131422600,- (93,06%)
- Capaian Kegiatan :
-
-
- 6) Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini Lokasi Rawan Bencana
- alokasi anggaran Rp. 173.400.000,-
 - realisasi Rp. 170.741.000,- (98,47%)
- Capaian Kegiatan :
-
-
- 7) Workshop Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Sarana dan Prasarana Peralatan Logistik Penanggulangan Bencana
- alokasi anggaran Rp. 72.909.000,-
 - realisasi Rp. 53.107.400,- (72,84%)
- Capaian Kegiatan :
-
-
- 8) Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- alokasi anggaran Rp.100.000.000,-
 - realisasi Rp. 82.391.800,- (82,39%)



Capaian Kegiatan :

-
-

9) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (Jitu-PB)

- alokasi anggaran Rp. 425.475.000,-
- realisasi Rp. 392.601.740,- (92,27%)

Capaian Kegiatan :

-
-

10) Posko Penanggulangan Bencana BPBD NTT

- alokasi anggaran Rp. 415.090.487,-
- realisasi Rp. 391.188.192,- (94,24%)

Capaian Kegiatan :

-
-

11) Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian Bantuan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana

- alokasi anggaran Rp. 93.100.000,-
- realisasi Rp. 86.918.026,- (93,36%)

Capaian Kegiatan :

-
-

12) Pengadaan Dukungan Stok Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana

- alokasi anggaran Rp. 200000000,-
- realisasi Rp. 199683000,- (99,84%)

Capaian Kegiatan :

-
-

13) Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Benvana

- alokasi anggaran Rp. 80.458.000,-
- realisasi Rp. 72.426.400,- (90,02%)

Capaian Kegiatan :

-
-

14) Penyebarluasan Informasi Pencegahan Bencana Melalui Media



Informasi

- alokasi anggaran Rp. 31.200.000,-
- realisasi Rp. 31.200.000,- (100%)

Capaian Kegiatan :

-

-

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2019, sebanyak 112 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan:

SD = 6 orang; SLTP = 2 orang; SLTA = 53 orang; Diploma = 7 orang; Sarjana = 37 orang; Magister = 7 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 5 orang; Golongan III = 56 orang; Golongan II = 44 orang; Golongan I = 7 orang.

c. Pejabat Stuktural: 13 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 9 orang.

d. Pejabat Fungsional: -orang

Arsiparis = - orang; Pustakawan = - orang dan Analisis Kepegawaian = - orang, dan Perencana Muda = - orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: Tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.



Dana: Rp.7.775.672.200 ,-realisasi Rp. 7.201.062.753,- (92,61%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp.5.364.082.600 -realisasi Rp. 5.006.078.743 ,-(93,33%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp.19.200.000,-realisasi Rp. 19.000.000,- (98,96%).



C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Pencapaian Kegiatan;

a. Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- alokasi anggaran Rp. 2.657.136.650,-
- realisasi Rp. 2.502.876.322,- (94,19%)

1) Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik

- alokasi anggaran Rp. 466.218.800,-
- realisasi Rp. 443.375.640,- (95,10%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan stabilitas Politik bagi 60 orang, pada tanggal 30 Juli 2018, di aula Hotel Naka Jln Frans Seda Kupang. Peserta terdiri dari Kesbangpol Kab/Kota se Provinsi NTT : 13 Orang, Pengurus Partai Politik : 6 Orang, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM : 11 Orang, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan : 5 Orang, Tokoh Agama 5 Orang, Mahasiswa/Pelajar : 9 Orang.
- Terlaksananya Pemantauan Dinamika Budaya Politik di 22 kabupaten/kota tentang isu-isu politik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 22 Kabupaten/ Kota serta di 10 Kabupaten penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan ini menghasilkan perkembangan dinamika sosial politik secara umum/ rata-rata berjalan kondusif, dinamis, aman dan tertib. Isu-isu politik awal tentang politik parokial atau SARA yang mengarah pada distabilitas di daerah.
- Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2018 di Hotel Aston bagi 100 orang terdiri dari 30 orang siswa SMA/SMK, 30 orang Mahasiswa/wi, dan 40 orang Pengurus/anggota Partai Politik, Peserta sebagai kader

politik cerdas dianggap mampu menyebarkan semangat, tingkah laku, kebenaran, keadilan baik melalui kehidupan di lingkungannya maupun media sosial lainnya. Peserta kegiatan telah dianggap mampu untuk menjadi user perubahan sesuai prinsip demokrasi yang lebih bersih, jujur, transparansi, dan Bebas Korupsi.

2) Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

- alokasi anggaran Rp. 131.706.500,-
- realisasi Rp. 121.687.300,- (92,39%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya rapat pokja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahap II pada tanggal, 18 Juli 2018. Waktu bertempat di: Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Peserta rapat: Tim Pokja IDI NTT, Sekretariat IDI Provinsi. adanya Peningkatan Peran DPRD tentang rekomendasi kepada Pemerintah, Peran DPRD dalam pembentukan Perda, Peningkatan angka prosentasi keterwakilan perempuan dalam pengurusan parpol dan Peningkatan aspek informasi APBD kepada masyarakat.
- Terlaksananya rapat pokja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahap III pada tanggal, 10 Desember 2018. bertempat di: Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Peserta: Unsur Pokja IDI NTT dan unsur Sekretariat IDI Provinsi NTT. adanya prosentase Hasil IDI Tahun 2017 menjadi tolak ukur di tahun 2018. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kerja dari BPS dan semua Tim Pokja secara aktif. Gambaran IDI NTT harus benar-benar terbaca dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTT.
- Terlaksananya Seminar Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT - Kupang jln. Basuki Rahmat No.1 Naikolan, peserta 60 (Enam puluh orang) terdiri dari : Unsur Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Organisasi Pemuda, Pimpinan Media Masa Cetak dan

Elektronik, Mahasiswa dan Pelajar, LSM, Anggota Pokja IDI serta Instansi terkait lingkup Pemerintah Daerah.

- Terlaksananya Ekspose Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 Provinsi NTT Tahun 2018 pada tanggal 17 Oktober 2018, bertempat di Aula Badan Kesbangpol – Kupang Jln. Basuki Rahmat No. 1, peserta 60 (enam puluh) orang terdiri dari : Unsur Tim Pokja IDI NTT 9 Orang, Mahasiswa 8 orang, Tokoh Masyarakat 8 orang, Tokoh Perempuan 9 orang, Organisasi Pemuda 6 Orang, Pimpinan Media Masa Cetak 4 orang , Wartawan Media Elektronik 5 orang, Wartawan Radio 5 orang, dan Aparatur Humas Provinsi NTT 2 orang; Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT menunjukkan bahwa hasil IDI tahun 2017 Angka IDI NUSA TENGGARA TIMUR 2017 sebesar 75,51 turun 6,98 poin dibandingkan tahun 2016, dengan seluruh aspek masuk dalam kategori sedang. Penurunan angka IDI 2017 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil (-16,56 poin), turunnya aspek hak-hak politik (-11,93 poin) dan perbaikan aspek lembaga demokrasi (10,44 poin). Meski secara umum variabel dalam aspek kebebasan sipil mengalami penurunan, tetapi variable kebebasan berkeyakinan justru meningkat. Penurunan aspek hak-hak politik di Nusa Tenggara Timur, terutama karena meningkatnya jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan sepanjang tahun 2017.

3) Peningkatan Wawasan Kebangsaan

- alokasi anggaran Rp. 328.611.350,-
- realisasi Rp. 311.647.500,- (94,83%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya lomba Pidato Empat Pilar Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada tanggal 12 s/d 13 Agustus 2018, di Hotel Naka Jalan Frans Seda 21 Kupang-Nusa Tenggara Timur dengan hasil : Juara I Katarina A. Kabe SMAK Regina Pacis Bajawa-Ngada, Juara II Febrianti Putri Diana Bire/ SMA Anugrah Kasih Lewoleba-Lembata, Juara III Afifah Putri Mandar/ SMA

Madrasah Aliyah Tambolaka- Sumba Barat Daya, Juara harapan I Cici Clardian Paji Jeara/ SMA 3 Waingapu- Sumba Timur, Juara harapan II Ana Maria Benga Menge/ SMA St. Fransiskus Xaverius Boawae- Nagekeo dan Juara harapan III Aurelia S. Naisanit/ SMA 1 Kefamenanu- TTU.

- Terlaksananya Dialog Radio lokal pada tanggal 25 Pebruari 2018 di LPP RRI Kupang, dengan Thema Wawasan Kebangsaan dan Persiapan Pemilu 2018. tersosialisasinya informasi tentang persiapan pemerintah menuju Pilkada Serentak 2018
- Terlaksananya Dialog Radio lokal pada tanggal 12 Maret 2018 Radio Swara Timur Kupang, dengan thema Wawasan Kebangsaan dan toleransi beragama, pada tanggal 10 April 2018 di Radio Trilok Kupang, dengan thema radikalisme di NTT, pada tanggal 16 Mei 2018 Radio Swara Timur dengan Thema Wawasan Kebangsaan dan pengaruh globalisasi, pada tanggal 10 Juni 2018 LPP TV-RI, dengan thema Wawasan Kebangsaan.
- Terlaksananya Dialog TV lokal yang dilaksanakan pada 19 Mei 2018 LPP TV-RI, dengan Thema wawasan Kebangsaan; tersosialisasinya informasi tentang kesiapan pemerintah dalam menyongsong Penyelenggraan Pilgub dan Pilkada 10 Kabupaten 2018, pada tanggal 10 Desember 2018 LPP TV-RI, dengan Thema wawasan Kebangsaan, tersosialisasinya informasi tentang kesiapan pemerintah serta masyarakat dalam menyongsong Natal 25 Desember 2018.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada tanggal : 26 s/d 27 februari 2018 bertempat Aula Hotel T-More, Jl. Piet A. Tallo Kelurahan Oesapa-Kupang. Peserta 70 orang orang terdiri dari : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-NTT, Aparatur Kesbangpol Provinsi NTT dan Unsur Instansi Terkait.

- Tersosialisasinya Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Borong - Kabupaten Manggarai Timur. peserta 50 (lima puluh orang) terdiri atas: Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Pengurus Parpol, Ormas/LSM, Guru, Mahasiswa, Pelajar dan Instansi terkait lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur., Tersosialisasinya Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 30 mei 2018 di Borong Mangarai Timur. Peserta 60 orang adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus parpol, Ormas/LSM, pelajar, mahasiswa dan instansi terkait.
 - Terlaksananya kegiatan Pemahaman Idiologi Kebangsaan bagi Mahasiswa/i. pada tanggal 17 Mei 2018, di aula Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 60 orang dari 37 Perguruan Tinggi di Kota Kupang
- 4) Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM
- alokasi anggaran Rp. 500.000.000,-
 - realisasi Rp. 489.438.440,- (97,88%)
- Capaian Kegiatan :
- Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tanggal, 19 April 2018, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, Jln. El Tari-Kota Kupang, Acara: Penyampaian tentang susunan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Persiapan Pilkada Serentak . Peserta 25 orang.
 - Terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tanggal 9 November 2018, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, Jln. El Tari I - Kota Kupang, peserta rapat 24 orang terdiri dari: Unsur FKUB Provinsi NTT.
 - Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTT pada tanggal, 6 Desember 2018 , bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, Jln. El Tary I-Kota Kupang. Peserta 22 Orang dari unsur FKUB Provinsi NTT.

- Terlaksananya Rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi NTT pada tanggal 12 April 2018 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT, dihadiri 25 Peserta terdiri dari unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan aparatur Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada tanggal, 30 Januari 2018 bertempat di: Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung c Lantai 2-Kelurahan Naikolan-Kota Kupang-NTT. Peserta rapat reguler kedua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dihadiri oleh : Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kepala Sub Bidang Bina Ideologi. hasilnya adalah FPK menyarankan kepada pemerintah agar memprioritaskan nilai-nilai luhur bangsa dalam Kebijakan Publik dalam rangka pembangunan watak dan karakter bangsa masyarakat NTT.

5) Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik

- alokasi anggaran Rp. 1.050.000.000,-
- realisasi Rp. 970.634.342,- (92,44%)

Capaian Kegiatan :

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Alor pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di Aula Kopdit Citra Hidup Lipa Kabupaten Alor. Bidang Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 di Kabupaten Lembata pada tanggal 22 Maret 2018, bertempat di Aula Hotel Olympic Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di Aula Hotel Pelangi Labuan Bajo, Kabupaten Ende pada tanggal 16 Maret 2018, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 25 Mei 2018, bertempat di Aula Hotel

Pelita Sumba Barat, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 28 Mei 2018, bertempat di Aula Hotel Kasih Sayang Manggarai Timur, Kabupaten Sikka dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018, bertempat di Aula FKUB Sikka, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 April 2018, bertempat di Koperasi Sehati – Ba'a – Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Aula Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 11 April 2018, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 24 Mei 2018, bertempat di Aula Kantor Camat-Katikutana, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 April 2018, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kabupaten Ngada pada tanggal 30 April 2018, bertempat di Aula Hotel Nusantara 1 Bajawa, Kabupaten Belu pada tanggal 28 Pebruari 2018, bertempat di Aula Hotel Nusantara II-Atambua, Kabupaten TTU pada tanggal 28 Pebruari 2018, bertempat di Aula Rumah Makan Litani Kefa, Kabupaten TTS pada tanggal 6 Maret 2018, bertempat di Aula Hotel Roda Pedati Soe, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 8 Juni 2018, bertempat di Aula Gedung Forkopimda Larantuka, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 18 April 2018, bertempat di Aula Hotel Sinar Kasih Mbay, Kabupaten Malaka pada tanggal 06 Maret 2018, bertempat di Aula Susteran SSPS Betun, Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 April 2018, bertempat di Aula Susteran Gembala Baik, Kabupaten Kupang pada tanggal 11 April 2018, bertempat di Aula Gereja Oesao dan Kota Kupang pada tanggal 10 April 2018, bertempat di Aula Hotel Rhomita peserta di setiap Kabupaten/Kota masing-masing 80 orang terdiri dari Partai Politik Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Masyarakat, Aparatur Badan KesbangPol, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Pemilih Pemula (Pelajar tingkat SLTA), Instansi Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten.

6) Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

- alokasi anggaran Rp. 30.600.000,-
- realisasi Rp. 26.165.000,- (85,51%)



Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya Rapat Tim Verifikasi pada tanggal, 05 Pebruari 2018, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT, dengan Peserta Rapat 26 orang terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol, Kesimpulan hasil rapat : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Parpol Tahun 2018:dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, PDIP, Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- Rapat Pembahasan masalah Laporan Hasil Pembahasan Keuangan Partai Hanura pada tanggal, 22 Juni 2018, bertempat; Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT, Peserta Rapat 12 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov.NTT.
- Rapat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Parpol Tahun 2017:dari 9 Partai Politik yang telah ditransfer bantuan keuangan Parpol. Partai Demokrat hingga Bulan September 2018 belum mendapat bantuan keuangan,karena Partai tersebut terlambat mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan pada tanggal, 18 September 2018, bertempat; Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT, Peserta Rapat 18 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol
- Rapat Pembahsana mengenai nilai bantuan keuangan kepada parpol yang telah ditetapkan secara nasional sesuai Permendaagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 pada tanggal, , 20 September 2018, Tempat; Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT,. Peserta Rapat 26 orang terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol.

7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

- alokasi anggaran Rp.150.000.000,-
- realisasi Rp. 139.928.100,- (93,28%)

Capaian Kegiatan :



Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Tahun 2018, tersinkronisasinya program dan kegiatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT; adanya penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota sesuai Bulan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari Badan Kesbangpol Provinsi di Kabupaten/Kota dimaksud; adanya konsolidasi awal terhadap kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Pemilukada serentak; adanya perolehan data awal terhadap potensi-potensi konflik, serta masalah aktual lainnya.

b. Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional

- alokasi anggaran Rp. 430.385.050,-
- realisasi Rp. 403.665.950,- (93,79%)

1) Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

- alokasi anggaran Rp. 144.000.000,-
- realisasi Rp. 139.143.770,- (96,62%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi NTT pada tanggal 07 maret 2018 bertempat di Aula Hotel roda pedati SOE, Kabupaten TTS, dengan peserta 50 (lima puluh) orang terdiri dari: Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi Pemerintah.
- Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi NTT pada tanggal 19 maret 2018 bertempat di Aula restoran litany kota kefamenanu, dengan peserta 50 (lima puluh) orang terdiri dari: Bagian Pemerintahan Setda Kab kefamenanu , Badan PMP , Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Perindustrian , Dinas Sosial , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Tersosialisasinya Seni Budaya dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Tahun 2018 pada tanggal 15 februari 2018 di aula Hotel Roda Pedati-Kabupaten Timor Tengah Selatan,

peserta 50 orang antara Aparat Pemerintah Instansi terkait Kabupaten TTS, Toko Agama, Toko Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Ormas dan LSM.

- Tersosialisasinya Seni Budaya dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Tahun 2018 pada tanggal 25 April 2018 di aula Koperasi Sehati Ba'a Kabupaten Rote Ndao, peserta 50 orang antara lain Aparat Pemerintah Instansi terkait Kabupaten Rote Ndao, Toko Agama, Toko Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Ormas dan LSM, Kesbang Pol Kab, Rote Ndao, Kodim 1621/Rote Ndao, Guru/Sekolah, Kejari Rote Ndao
- Terlaksananya Dialog antar Umat Beragama pada tanggal 23 Juli 2018, di Hotel Naka, Jln. Frans seda No. 21 Kota Kupang. Peserta 50 orang terdiri dari perwakilan setiap agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Lintas Agama, Organisasi Wanita

2) Peningkatan Kewaspadaan Nasional

- alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-
- realisasi Rp. 133.238.800,- (88,82%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya 4 (empat) kali Rapat Tim Terpadu Rencana Aksi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kupang. Peserta 30 orang terdiri dari: Kaban/Kakan, TNI, POLDA, Kejati, Kemenkum HAM. Hasil kegiatan berupa Pelaporan Rencana aksi Penanganan Konflik sosial Provinsi NTT Periode B04, B08 dan B12 serta 1 (satu) laporan Evaluasi Rencana Aksi 2018
- Terlaksananya 4 kali rapat kontigensi masalah strategis/masalah aktual pada tahun 2018 dihadiri unsur dari Polda, Korem, BIN, KPU, Bawaslu dan Instansi terkait lainnya hasilnya adalah Laporan Masalah strategis yang aktual pada Triwulan I, II, III, dan IV di Provinsi NTT, peserta 80 orang Tahap I dan 52 orang pada Tahap 2,3,4
- Terlaksananya Dialog pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Rote Ndao, di Aula Koperasi

Sehati pada tanggal 25 April 2018 dan Kabupaten TTU tanggal 18 Mei 2018 di aula Hotel Viktory- Kefa, dengan peserta 60 orang setiap kabupaten, terdiri dari unsur aparatur Pemda TNI/ POLRI , FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Pelajar dan pengurus Ormas/LSM.

- Terlaksananya Rapat Terpadu Rencana aksi Tingkat Provinsi NTT, pada tanggal 14 Pebruari 2018 bertempat di ruang Rapat Badan Kesbangpol Povinsi NTT, JL.Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang peserta 30 orang terdiri dari Dir Intel Polda, Karo Ops Polda NTT, Perwakilan Korem 161, Perwakilan Lanud Eltari Kupang, Perwakilan Binda NTT, Koordinator Kejati NTT, Perwakilan lain terdiri dari Biro Hukum, BPSDM, Kanwil Kemenhumham, Dinas Perindustrian

3) Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- alokasi anggaran Rp. 43.315.800,-
- realisasi Rp. 43.025.800,- (99,33%)

Capaian Kegiatan :

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kabupaten Belu dengan hasil mencermati kejadian situasi dan kondisi Nasional, khusus tentang peristiwa kerusuhan di Mako Brimob pada hari Selasa `8 Mei 2018 dan aksi bom bunuh diri pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 di Surabaya Jawa Timur. Kepada masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/di Nusa Tenggara Timur di himbau agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh semua hal-hal yang mengandung unsur SARA, tetap menjaga situasi yang aman dan damai ; Mendukung aparat keamanan untuk mengusut tuntas kejadian tersebut; Peristiwa bom bunuh diri di Surabaya merupakan tindakan terorisme, bukan tindakan dari satu agama untuk memecahkan persatuan dan kesatuan NKRI; Mendesak DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan UU Anti Terorisme, dan atau Presiden menerbitkan Perpu Anti Terorisme; Menghimbau awak media massa baik elektronik

maupun cetak ,agar menyajikan berita kejadian tersebut secara proposional dan tidak provokatif

4) Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktifitas Orang Asing dan Lembaga Asing

- alokasi anggaran Rp. 44.198.500,-
- realisasi Rp. 42.239.500,- (95,56%)

Capaian Kegiatan :

- Terlaksananya Rapat Tanggal 2 Agustus 2018 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang. diikuti 32 orang peserta terdiri dari : Polda NTT, Korem 161/WS Kupang, Lamtamal VII Kupang, Binda NTT, Lanud EL Tari Kupang Imigrasi Kupang, Kakanwil Kementerian Agama, Dinas Pariwisata dan Kreatif, Biro Pemerintahan, Bappeda NTT, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Rudenim Kupang. Terkait rencana datangnya relawan berasal dari Korea Utara dan Inggris kita tetap memantau keberadaan mereka nanti.Imigran 320 orang kita harapkan terus berkurang dari waktu ke waktu. Rencana pemindahan Imigran dari rudenim,kita menunggu sampai Gubernur terpilih di lantik.Kita perlu waspada agar Imigran jangan ada yang lolos masuk ke wilayah kita, mengingat Pebruari 2019 Imigran tidak lagi di biyai oleh IOM
- Terlaksananya Rapat Tanggal 18 september 2018 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang. diikuti, Anggota Tim Koordinasi pemantauan orang asing NGO,Lembaga Asin,Tenaga Kerja Asing Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Pimpinan IOM dan UNHCR Kupang. dengan hasil Peserta rapat menolak pemindahan pengungsi ke Pulau Ndana, sebaiknya pengusi yang ada di pindahkan ke Provinsi lain yang mau menerima mereka.
- Terlaksananya Rapat pada tanggal, 7 Nopemper 2018 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang . Peserta 23 orang terdiri dari : Danrem161/Wira Sakti, Dan Lantamal VII Kupang, Dir. Reskrim Polda NTT, BINDA NTT, Kaban Kesbangpol

Provinsi NTT, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Kejati NTT, IOM, UNHCR, Rudenim Kupang, Bappeda Provinsi NTT, Ka. Intel Lanud Eltari Kupang, Kepala Imigrasi Klas 1 Kupang. dengan hasil Peserta rapat setuju dan siap mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi kaitannya dengan pemindahan pengungsi Luar Negri ke Pulau Ndana. Untuk pelaksanaan serah terima pengungsi Luar Negri dari Rudenim kepada Pemerintah daerah mangacu pada aturan yang berlaku dan diperlukan adanya koodinasi yang baik menyangkut pembiayaannya

5) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

- alokasi anggaran Rp. 48.843.750,-
- realisasi Rp. 46.018.080,- (94,21%)

Capaian Kegiatan :

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan di Kabupaten Kupang tanggal 24 September 2018. Peserta 70 orang terdiri dari: Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/Kota se-NTT, Unsur TNI, Unsur Polri, Komunitas Intelijen Daerah, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat , Tokoh Perempuan. dengan hasil data aktual potensi konflik: Konflik dan bentrok yang terjadi antara warga baru asal Timor Timur dengan warga lokal hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) kali. Untuk melakukan proses perdamaian pada saat itu adalah melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Kupang. Konflik terakhir tanggal 23 Agustus 2018. Bentrokan antara pemuda warga desa tanah merah denagn warga baru asal Timor Timur yang menempati perumahan Griya Permai, Desa Oebelo ,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal, belasan orang lainnya luka berat dari kedua belah pihak. Potensi kejadian tersebut bakal menjadi potensi konflik unsur SARA. Kepolisian Resort Kabupaten Kupang meminta bantuan Kepolisian Daerah, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut untuk menolong warga sekitar

mengungsi ke tempat yang aman, menjaga di dua tempat pertikaian, menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku dan provokator kejadian. Sampai dengan laporan ini di buat proses perdamaian masih berlangsung

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 41 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang Pendidikan.
SD = - orang; SMP = 1 orang; SMA = 17 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 29 orang, Magister = 3 orang;
- b. Pangkat/golongan:
Golongan IV = 6 orang, Golongan III = 43 orang, Golongan II = 3 orang; Golongan I = - orang
- c. Struktural : 16 orang.
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 5 orang; Eselon IV = 10 orang.
- d. Fungsional : 1 orang. (Arsiparis)

4. Proses perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1.	Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional	Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional
2.	Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- 5. **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan:** mencukupi.
- 6. **Permasalahan dan Solusi:** tidak ada.
- 7. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** tidak ada.
Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
Dana: Rp.375.359.300,- realisasi Rp.365.143.577,- (97,28%);
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
Dana: Rp.226.738.000,- realisasi Rp.223.056.787,- (98,38%);
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
Dana: Rp.26.928.000,- realisasi Rp.26.960.000,- (100%);

URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2. **Program, Kegiatan, Alokasi Realisasi Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);**
 - a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - alokasi anggaran Rp. 3.895.252.320,-
 - realisasi Rp. 3.634.326.507,- (93,30%)
 - 1) Pencegahan dini masalah kebencanaan
 - alokasi anggaran Rp. 1.340.113.800,-
 - realisasi Rp. 1.237.830.390,- (92,37%)
- Capaian Kegiatan :
- Sistem aplikasi yang sangat membantu aksesibilitas kepada masyarakat sebagai salah satu sarana informasi dalam mengurangi dampak risiko bencana yang terjadi secara cepat, tepat dan lengkap pada tiga tahap yaitu sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana
 - Meningkatnya pemahaman kaum gender tentang manajemen penanggulangan bencana dalam menanggapi masalah, kebutuhan dan nilai kelompok rentan
 - Tersosialisasinya ancaman bencana kepada masyarakat tentang pencegahan dini dan terpublikasinya aturan dan informasi kebencanaan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui beberapa pendekatan yaitu media cetak, elektronik dan kampanye media Baliho PB
 - Adanya peningkatan pemahaman SDM aparatur BPBD se-NTT dalam membuat data dasar untuk penilaian, menilai keadaan pasca bencana, menaksir kerugian

secara sektoral, menaksir total nilai kerusakan dan kerugian, menilai dampak makro ekonomi dari kerusakan dan kerugian serta pentingnya penilaian ekonomis kerusakan dan kerugian

- Terlaksananya gladi simulasi evakuasi mandiri bagi komunitas sekolah terhadap ancaman bencana gempa bumi dan terpasangnya rambu evakuasi bencana serta teridentifikasinya titik-titik rawan bencana di lingkup SMA Negeri 1 Kupang

2) Penanganan Korban Pasca Bencana

- alokasi anggaran Rp. 1.367.057.720,-
- realisasi Rp. 1.330.290.917,- (97,31%)

Capaian Kegiatan :

- Data bencana di 16 Kabupaten/Kota Yaitu Kabupaten Manggarai Timur terjadi Banjir dan Tanah longsor. Kabupaten Rote Ndao terjadi Banjir dan Kekeringan. Kabupaten Sumba Tengah terjadi Banjir dan Tanah Longsor. Kabupaten Sumba Timur terjadi Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan dan Gempa Bumi. Kabupaten Ngada terjadi Kebakaran Rumah dan Kekeringan. Kabupaten Manggarai Barat terjadi Angin Putting Beliung/Angin Kencang dan Kekeringan. Kabupaten Manggrai terjadi Banjir dan Tanah Longsor. Kabupaten Nagekeo terjadi Tanah Longsor. Sementara itu khusus untuk Kekeringan terjadi di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur dan Sikka. Data ini digunakan sebagai dasar untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Stok logistik pada Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 Kabupaten/Kota berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh celup, susu bubuk, tikar plastik, terpal, dan kompor minyak tanah yang akan digunakan untuk penanganan korban bencana pada saat tanggap darurat, pada Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 15.000 kg beras (nona kupang), 250 liter minyak goreng (bimoli), 250 kg Gula Pasir (Piramid Kristal/Instan Kristal), 250 Renteng Teh Celup (Sariwangi),

200 Renteng Susu Bubuk (Dancow), 150 Lembar Tikar Plastik, 150 Lembar Terpal, dan 150 Buah Kompor Minyak Tanah (Hock 16 sumbu)

- Tersedianya alat menghani panjang 200 cm, lebar 100 cm, tingginya 25 cm dan terbuat dari kayu jati, Pemidang Ikat panjang 220 cm, lebar 40 cm, tingginya 25 cm dan terbuat dari kayu jati, Panggung Tenun panjang 220 cm, lebar 100 cm, tingginya 50 dan terbuat dari kayu jati, Penahan Belakang dan alat kerja lainnya (aksesories) yaitu kayu penjepit 2 buah panjang 100 cm terbuat dari kayu bayam, Besi Gun 2 buah panjang 100 cm, paralon belakang gun 1 buah panjangnya 100 cm, Penahan Lungsi panjang 110 cm terbuat dari kayu jati, Kinjora terbuat dari kayu jati, bahan baku berupa benang sutera/rayon 125 kg, Benang katun 125 kg dan Obat pewarna 100 paket

3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana

- alokasi anggaran Rp. 129.500.800,-
- realisasi Rp. 112.200.000,- (86.64%)

Capaian Kegiatan :

- Adanya kesepakatan dokumen perencanaan dan kegiatan penanggulangan bencana terpadu
- Meningkatnya kapasitas ASN BPBD dalam membangun sinergitas di bidang perencanaan penanggulangan bencana

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

- alokasi anggaran Rp. 1.058.580.000,-
- realisasi Rp. 954.005.200,- (90.12%)

Capaian Kegiatan :

- adanya informasi penanganan kebencanaan (upaya, tindak lanjut dan kendala), adanya informasi sarana dan prasarana serta tercapainya keselarasan Program/ Kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- adanya informasi penanganan kebencanaan (upaya, tindak lanjut dan kendala), adanya informasi sarana dan prasarana serta tercapainya keselarasan Program/ Kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

terehabilitasinya dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2018 di Kabupaten Manggarai, Ende, Flores Timur dan Alor.

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 47 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang Pendidikan;
SD = 1 orang; SLTP = 0 orang; SLTA = 16 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 26 orang; Magister = 2 orang.
- b. Pangkat/golongan:
Golongan IV = 6 orang; Golongan III = 29 orang; Golongan II = 11 orang; Golongan I = 1 orang.
- c. Pejabat Stuktural: 12 orang
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 3 orang; Eselon IV = 8 orang.
- d. Fungsional: 1 orang.

4. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah.

Program dalam RENJA Badan Penangulungan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Rencana Kerja	Program RKPD
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam

5. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: belum mencukupi.

6. Permasalahan dan Solusi: tidak ada.

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: tidak ada.

Pelaksanaan urusan wajib di atas didukung pula oleh program SKPD (non urusan), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dana: Rp. 901.972.680,- realisasi Rp. 833.509.206,- (92,41%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dana: Rp. 192.500.000,- realisasi Rp. 159.330.141,- (82,77%);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana: Rp. 6.900.000,- realisasi Rp. 6.890.000,- (99,86%).





Program dan Kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk mendukung program Nasional yang diseleraskan dengan RKP Tahun 2018. Kebijakan program dan kegiatan telah menjadi pendekatan pada RPJMD 2013-2018 dan sejalan perubahan kebijakan penganggaran dari *“money follow function”* menjadi *“money follow programme”* dengan holistik-tematik, integratif dan spasial mulai tahun 2018. Pelaksanaan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 juga memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Fokus pada pengembangan sektor unggulan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, berdampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, merupakan program prioritas di tingkat OPD, berhubungan dengan program unggulan OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan ini tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD penanggung jawab sesuai tupoksi, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.
3. Mewujudkan 6 Tekad Pembangunan, yang merupakan potensi unggulan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dari 6 tekad dua diantaranya yaitu pariwisata serta perikanan dan kelautan ditingkatkan pembangunannya dalam mendukung pembangun ekonomi daerah. Pembangunan pariwisata tahun 2018 disinergikan dengan kebijakan Pusat yang menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Utama di Indonesia. Pembangunan rantai jar/ingan destinasi dunia dilaksanakan melalui peningkatan integrasi KSPN Labuan Bajo dengan destinasi budaya, bahari, religius, kuliner dan lainnya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
4. Sebagai Provinsi kepulauan dengan basis perikanan dan kelautan akan didukung melalui peningkatan ekonomi, aksesibilitas wilayah dengan pengembangan Tol laut dan pengembangan ekonomi maritim melalui; (i) mengoptimalkan pengelolaan kawasan strategis Taman Nasional Perairan Laut Sawu seluas 3,2 Juta Ha, (ii) Pengembangan 8 Satuan Wilayah Pengembangan Laut Terpadu (SW-PLT),

- (iii) Peningkatan pengelolaan Kawasan budaya rumput laut, mutiara dan kawasan pengembangan garam serta (vi) Peningkatan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan melalui peningkatan pengelolaan potensi tangkap dan budidaya.
5. Mendukung dan mengawal hasil rapat Terbatas bersama Presiden untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Usulan saat rapat terbatas adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo;
 - b. Pembangunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores;
 - c. Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan;
 - d. Pengembangan jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor;
 - e. Pengembangan industri garam.
 6. Sehubungan dengan keterbatasan APBD, harus mulai serius berpikir tentang upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, mendukung kegiatan-kegiatan investasi yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah, dan lebih intensif berjuang memperoleh anggaran dari APBN, serta menggandeng berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik swasta, BUMD/BUMN, maupun lembaga mitra pembangunan yang ada di NTT.
 7. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama – sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Rincian Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 baik program pembangunan daerah maupun program penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggung jawab

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
A	URUSAN UMUM		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan - Terlaporkannya kinerja dan keuangan SKPD secara berkala dan tepat waktu	Semua SKPD



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua SKPD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik	Semua SKPD
B.	URUSAN WAJIB		
1.	PENDIDIKAN		
1.1	Program Manajemen Pelayanan	Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa	- Rasio Guru-Siswa SLB setiap jenjang; - Rasio Kelas-Siswa SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	- Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK) - Persentase kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan; - Proporsi guru bersertifikat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	KESEHATAN		
2.1	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan RSUD	Dinas Kesehatan
2.2	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	- Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi - Meningkatnya jumlah dan kualitas posyandu, desa siaga, UKS dan desa yang melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan
2.3	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Menurunnya angka kejadian penyakit pada penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan
2.4	Program Peningkatan Gizi	Meningkatnya status gizi balita	Dinas Kesehatan
2.5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas maupun pemerataan penyebaran	Dinas Kesehatan
2.6	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik - Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi dibidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan	Dinas Kesehatan
2.7	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Rujukan	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
2.8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Mutu BLUD	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
2.9	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Pengembangan Administrasi Kependudukan dan mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum
3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya proporsi masyarakat yg mendapat pelayanan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum
3.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	- Meningkatkan luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan embung - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan embung	Dinas Pekerjaan Umum
3.4	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur PU	- Meningkatkan ketersediaan data PU yang termuktahir - Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium pengujian - Pembinaan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
4.1	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
5.1	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang	- Meningkatkan ketersediaan data perencanaan pembangunan; - Meningkatkan pembinaan tata ruang wilayah provinsi	Bappeda
5.2	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat	Bappeda
5.3	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunnn antara daerah dan lembaga donor	Bappeda
5.4	Program Desa Mandiri Anggur Merah	Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif	Bappeda
5.5	Program Hibah Ekonomi Produktif	Menigkatnya proporsi desa yang menerima Hibah Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	PPKD
5.6	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	- Meningkatkan ketahanan, kapabilitas, potensi dan infrastruktur di wilayah perbatasan - Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
6.	PERHUBUNGAN		
6.1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya tingkat keamanan pelayanan perhubungan di daerah	Dinas Perhubungan
6.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya tingkat keselamatan lalulintas darat, laut dan udara	Dinas Perhubungan
7.	LINGKUNGAN HIDUP		
7.1	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganann dampak perubahan iklim wilayah Provinsi NTT	Badan Lingkungan Hidup Daerah
7.2	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya luas lahan kritis yang ditangani	Badan Lingkungan Hidup Daerah
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
8.1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
8.2	Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pengaras utamaan gender	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
9.	SOSIAL		
9.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kessos (PMKS) Lainnya	Meningkatnya pelayanan sosial untuk masyarakat miskin, terpencil dan penyandang masalah kesra	Dinas Sosial
9.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah social	Dinas Sosial
9.3	Program Penyandang Penyakit Sosial	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan penanganan deportan dan orang terlanter	Dinas Sosial
9.4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kessos	Dinas Sosial
10.	KETENAGAKERJAAN		
10.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan	- Meningkatkan jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan kerja - Meningkatkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.2	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.3	Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan wilayah transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
11.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi	Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
11.2	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya aktifitas usaha UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
12.	PENANAMAN MODAL		
12.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP
12.2	Program Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP
12.3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Meningkatnya pelayanan perijinan	Dinas Penanaman Modal & PTSP
12.4	Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi	Tersedianya data perijinan dan investasi	Dinas Penanaman Modal & PTSP
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
13.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	- Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina - Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina - Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina - Menurunnya prosentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja	Dinas Pemuda & Olah Raga
13.2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	- Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olah raga - Jumlah bantuan untuk klub yang berprestasi - Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pembudayaan olah raga - Jumlah fasilitas olah raga yang dikembangkan dan direhabilitasi	Dinas Pemuda & Olah Raga
14.	KEBUDAYAAN		
14.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Dinas Kebudayaan
14.2	Pengembangan Nilai Budaya		Dinas Kebudayaan
15.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
15.1	Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional	- Meningkatkan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi - Meningkatkan peran aparatur pemerintah dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
15.2	Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi - Meningkatkan ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional - Meningkatkan dukungan administrasi pelaksanaan program-program Badan Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
16.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	- Meningkatkan peran dan fungsi anggota Pol. PP dan masyarakat umum dalam menjaga trantibun	Satuan Polisi Pamong Praja



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
		- Meningkatkan peran anggota Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	
16.2	Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya peran PPNS dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
17.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya agenda kegiatan Gub & Wagub	Biro Umum
17.2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku	Biro Keuangan
17.3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota	Biro Keuangan
17.4	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya ketersediaan perangkat aturan perundangan yang dibutuhkan	Biro Hukum
17.5	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	- Meningkatkan penyebaran informasi tentang Perda baru; - Meningkatkan penyebaran informasi tentang perundangan yang baru	Biro Hukum
17.6	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah	Biro Organisasi
17.7	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Tersedianya perangkat penilaian kinerja organisasi daerah	Biro Organisasi
17.8	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya pengelolaan program dan kegiatan SKPD	Biro Administrasi Pembangunan
17.9	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan Lembaga Keuangan) - Pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus dan Kapet Mbay menjadi kawasan ekonomi dan industri	Biro Perekonomian
17.10	Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha	Meningkatnya fasilitasi kerjasama ekonomi dan pembinaan badan usaha	Biro Perekonomian
17.11	Program Hibah Organisasi Kemasyaralatan Bidang Perekonomian	Hibah organisasi kemasyarakatan dan lembaga perekonomian daerah	PPKD
17.12	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang kesejahteraan masyarakat	Biro Kesejahteraan Rakyat



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
17.13	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan hidup beragama di daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat
17.14	Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan	Hibah keagamaan dan kesejahteraan social	PPKD
17.15	Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan	Bantuan sosial pendidikan	PPKD
17.16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	- Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah - Terasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan - Terkoordinasinya pengelolaan data pembinaan ketentraman dan ketertiban umum baik di provinsi dan kabupaten/kota	Biro Pemerintahan
17.17	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otda	- Terasilitasinya semua kebutuhan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan administrasi kependudukan - Terbentuknya daerah otonomi baru prov, kab, kota	Biro Pemerintahan
17.18	Program Peningkatan, Komunikasi dan Informasi Daerah	Publikasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Hubungan Masyarakat
17.19	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kerjasama informasi dan media massa	Biro Hubungan Masyarakat
17.20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya peran DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17.21	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah	Inspektorat
17.22	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa	Inspektorat
17.23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah di Jakarta	Kantor Penghubung
17.24	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Meningkatnya fasilitasi koordinasi daerah dengan K/L	Kantor Penghubung
17.25	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Penataan Aset	Meningkatnya pendapatan daerah dan penataanusahaan asset	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah
17.26	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	Badan Pendidikan & Pelatihan
17.27	Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi	Tersedianya data perijinan danb investasi	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
17.28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Meningkatnya pelayanan perijinan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
17.29	Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI	Terfasilitasinya pembinaan KORPRI	Sekretariat Dewan KORPRI
17.30	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan	- Meningkatnya jumlah klaster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah - Tersedianya hasil penelitian bidang pemerintahan dan politik dalam rangka pengembangan demokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.31	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian	- Terwujudnya komunikasi intensif antara para peneliti dengan Dewan Riset Daerah - Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan public - Pengembangan daerah melalui DOB	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.32	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional PNS	Badan Kepegawaian Daerah
17.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur melalui pembinaan bidang kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
18.	KETAHANAN PANGAN		
18.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan	- Meningkatnya cadangan ketahanan pangan masyarakat - Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan - Meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses pangan - Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kemandirian pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
19.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
19.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan	Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa
19.2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa	- Jumlah Kader/Aparatur Desa yang dilatih - Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa - Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa
19.3	Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan	Jumlah kelompok UKM/Kelompok Usaha perempuan dengan penggunaan TTG	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
20.	KEARSIPAN		
20.1	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan	Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini	Badan Arsip
21.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
21.1	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya peran media massa dalam pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.3	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya persebaran informasi pembangunan di media masa	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.4	Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	PERPUSTAKAAN		
22.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/ Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca	Persentase pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan
C.	URUSAN PILIHAN		
23.	PERTANIAN		
23.1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	Meingkatnya luas lahan komoditi perkebunan yang menghasilkan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
23.2	Program Peningkatan rProduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian dan Perkebunan
23.3	Program Pengembangan Benih dan Pembibitan	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit sesuai kebutuhan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
23.4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi, produksi dan produktifitas ternak	Dinas Peternakan
23.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya tingkat penanganan penyakit ternak	Dinas Peternakan
23.6	Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan	Meningkatnya pengawasan lalu lintas ternak antar pulau	Dinas Peternakan
24.	KEHUTANAN		
24.1	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan	- Meningkatnya potensi hasil hutan - Meningkatnya pemantapan pengelolaan kawasan hutan - Menurunnya persentase kerusakan hutan 50 %	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)
24.2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Terbangunnya tanaman kehutanan - Meningkatnya potensi tanaman cendana	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)
24.3	Program Pengelolaan DAS Terpadu	Meningkatnya luas rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)
25.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
25.1	Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi	- Meningkatnya pengelolaan pertambangan - Meningkatnya kompetensi SDM pengelolaan pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
25.2	Program Pengembangan Pertambangan	Meningkatkan pengembangan pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi
25.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Tingkat elektrifikasi desa	Dinas Pertambangan dan Energi
26.	PARIWISATA		
26.1	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata	- Meningkatnya kerjasama promosi wisata antar daerah - Meningkatnya cakupan promosi obyek wisata daerah - Meningkatnya kerjasama (promosi) pemasaran pariwisata (antar daerah dalam - Meningkatnya cakupan (promosi) pemasaran objek, daya tarik dan atraksi wisata daerah - Meningkatnya event seni dan budaya - Pemanfaatan media desain dan Iptek	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
26.2	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	- Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatnya event seni dan budaya serta pemanfaatan media, desain dan iptek	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
27.	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
27.1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
27.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
27.3	Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
28.	PERINDUSTRIAN		
28.1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	- Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang - Terjaminnya keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28.2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Meningkatnya omzet penjualan industri kecil menengah yang dibina - Meningkatkan kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi industri - Meningkatkan omset industri kecil menengah dengan fokus pada komoditi unggulan daerah di bidang agro - Peningkatan hak paten produk UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penanggung Jawab
28.3	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	- Jumlah promosi produk unggulan daerah untuk ekspor - Tersedianya stok dan kelancaran distribusi serta dukungan pemasaran perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Demikian program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang mendukung Program Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.



A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.**I. DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.****1. Dasar Hukum.**

- SP DIPA - 018.03.4.249158/2018
- SP DIPA - 018.04.4.249159/2018
- SP DIPA - 018.04.4.249160/2018
- SP DIPA - 018.04.4.249165/2018

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Direktorat Jendral Perkebunan;
- Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.

3. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.**a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.**

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

- Alokasi anggaran Rp. 111.010.900.000,-
- Realisasi Rp. 102.024.702.946,-(91,91%)

1) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.

- Alokasi anggaran Rp. 11.582.149.000,-
- Realisasi Rp.10.974.823.680,-(94.76%)

- Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai

Alokasi anggaran Rp.10.967.149.000,-

Realisasi Rp.10.359.823.680,-(94,46%)

Capaian/hasil:

- Terlaksananya Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelei di 20 Kabupaten se- Nusa Tenggara

Timur.

Tabel.5.1
Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Kedelai
Tahun 2018

Kabupaten	Alokasi (Ha)	Realisasi (Ha)		Produk si (Ton)	Ket.
		Tanam	Panen		
Kupang	1.380	1.380			Tanam bulan Nov – Des 2018
TTS	345	345			Tanam bulan Nov – Des 2018
Belu	500	500			Tanam bulan Nov – Des 2018
Malaka	890	890			Tanam bulan Nov – Des 2018
Rote Ndao	1.281	1.281			Tanam bulan Nov – Des 2018
Ende	215	215	30	18,00	Sisa ditanam pada Nov-Des 2018
Ngada	230	230			Tanam bulan Nov – Des 2018
Manggarai Timur	550	550	33	18,74	Sisa ditanam pada Des 2018
Manggarai	1.508	1.508	225	185,00	Sisa ditanam pada Des 2018
Manggarai Barat	1.019	1.019	23	38,64	Tanam bulan Nov – Des 2018
Sumba Timur	500	500			Tanam bulan Nov – Des 2018
Sumba Barat	117	117			Tanam bulan Nov – Des 2018
Jumlah	8.535	8.535	308	260,38	

- Alokasi sarana produksi kedelai melalui APBN seluas 8.535 Ha baru terrealisasi 308 Ha (luas tanam), realisasi panen 308 Ha di Ende (30 Ha), Manggarai Timur (33 Ha), Manggarai Barat (23 Ha), dan Manggarai (225 Ha) dengan total produksi 260,38 Ton. Terjadi keterlambatan pemberkasan CPCL sehingga proses pengiriman benih terlambat menyebabkan proses penanaman baru dilakukan pada bulan Nopember dan Desember 2018

- Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau

Alokasi anggaran Rp.615.000.000,-

Realisasi Rp.615.000.000,-(100%)

Capaian/hasil :

Terlaksananya Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau di 2 Kabupaten (Malaka dan Sikka) dengan realisasi tanam 1.000 Ha pada bulan Desember 2018, diperkirakan panen pada awal April 2019.



Tabel. 5.2.
Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau
Tahun 2018

Kabupaten	Alokasi (Ha)	Realisasi (Ha)		Produksi (Ton)	Ket.
		Tanam	Panen		
Kupang	500	500			Tanam
TTS	500	500			
Jumlah	1.000	1.000			

2) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.

Alokasi anggaran Rp.84.611.712.000,- Realisasi Anggaran Rp.78.756.371.950,- (93,08%), melalui kegiatan :

- Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi

Alokasi anggaran Rp.29.515.117.000,- Realisasi Anggaran Rp.27.109.971.845,- (91,85%) dengan capaian / hasil :

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Padi Inbrida seluas 5.000 Ha (319 Kelompok Tani, 151 Desa, 51 Kecamatan, 12 Kabupaten) dengan realisasi tanam 3.140 Ha, realisasi panen 412 Ha dan produksi 2.031 ton. Sisanya 1.860 Ha rencana akan ditanam pada Januari 2019 dan rencana panen April 2019.
- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah seluas 300 Ha (12 Unit di 12 kabupaten), realisasi bantuan dilakukan melalui transfer uang ke rekening masing-masing kelompok tani guna pembelian benih padi bersertifikat, pupuk urea dan pupuk organik. Adapun kabupaten sasaran sebagai berikut : **(1) Kupang** : Kecamatan Kupang Timur Desa Nunkurus Poktan Tunggadea (35 Ha realisasi tanam desember 2018 dan rencana panen april 2019); **(2) TTS** : Kecamatan Amanuban Selatan Desa Pollo Poktan Imanuel (10 Ha realisasi tanam desember 2018) dan Desa Bena Poktan Kua Feu (15 Ha realisasi tanam desember 2018); **(3) TTU**: Kecamatan Insana Desa Bitauri Poktan Sua Sosa Tenu (25 Ha realisasi tanam desember 2018); **(4) Malaka** : Kecamatan Weliman Desa



Wederok Poktan Morishamutuk (25 Ha rencana tanam januari 2019); **(5) Rote Ndao** : Kecamatan Rote Tengah Desa Lamakoli Poktan Kasih Karunia (15 Ha, realisasi tanam 10 Ha dan 5 Ha rencana tanam Januari 2019); **(6) Sabu Raijua** : Kecamatan Raenyale Desa Mira Li (7 Ha), Desa Do Gahara (7 Ha), Desa Mata Ruba (6 Ha) dan Desa Tutu Manu (5 Ha) rencana tanam januari 2019; **(7) Flores Timur** : Kecamatan Wulanggintang Desa Hewa Poktan Ri'i (25 Ha realisasi tanam desember 2018); **(8) Manggarai Timur** : Kecamatan Elar Desa Golo Lipan Poktan Mekar Tani (25 Ha: realisasi tanam I mei 2018 seluas 20 ha dengan produksi 72 ton dan 5 ha realisasi tanam November 2018) **(9) Manggarai** : Kecamatan Reok Barat Desa Nggalak Poktan Sinar Ruteng (6 Ha), Poktan Sambor I (5 Ha) dan Kasiasi Munta (6 Ha); Kecamatan Wae Ri'i Desa Bangka Kenda Poktan Suka Maju (4 Ha) dan Poktan Longko Rembung (4 Ha) realiasi tanam bulan desember 2018 dan rencana januari 2019; **(10) Manggarai Barat** : Kecamatan Lembor Desa Tanggi Poktan Lelo Tain (25 Ha realisasi tanam desember 2018); **(11) Sumba Timur** : Kecamatan Pinu Pahar Desa Wangga Mbewa Poktan Mau Luri (15 Ha rencana tanam januari 2019) dan Kecamatan Tabundung Desa Pindu Hurani Poktan Lata Luri (10 Ha rencana tanam januari 2019); **(12) Sumba Barat**: Kecamatan Loli Desa Tana Rara Poktan Pawo Kuta (12,5 ha rencana tanam januari 2019) dan Desa Ubu Raya Poktan Gari Tana (12,5 ha rencana tanam januari 2019).

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Minapadi seluas 130 Ha di 6 kabupaten, masing-masing: **(1) Ende** : Kecamatan Wolojita Desa Nuamula Poktan Tau Tambu (5 Ha), Kecamatan Detukeli Desa Kanganara Poktan Merpati (5 Ha), Kecamatan Kelimutu Desa Koanara Poktan Kemasama I (5 Ha); Kecamatan Detusoko Desa Wolotolo Poktan Ulu Ae Rano (5 Ha), Desa Sipijine Poktan Tunas Harapan (5 Ha realisasi panen Oktober 2018 produksi 37 ton) dan Poktan Gantex (5 Ha realisasi panen Oktober 2018, produksi 36 ton) Sisa 20



Ha realisasi tanam desember 2018; **(2) Ngada** : Kecamatan Bajawa Desa Faobata Poktan Wonga Wali (5 Ha) Kecamatan Soa Desa Libunio Poktan Au Waku (5 Ha) realisasi tanam November 2018; **(3) Manggarai Timur** : Kecamatan Poco Ranaka Desa Colol Poktan Lawelenggong (10 ha realisasi panen agustus 2018 produksi 38 ton), Desa Uluwea Poktan Batang Cama (10 Ha realisasi panen agustus 2018 produksi 40 ton), Desa Wejang Mali Poktan Batang Cama (5 Ha realisasi panen agustus 2018 produksi 20 ton) dan Poktan Wejang Mali (5 Ha realisasi panen agustus 2018 produksi 20 ton) Sisa 10 Ha realisasi tanam desember 2018; **(4) Manggarai** : Kecamatan Wae Ri'i Desa Longko Poktan Longko Rembung (2 Ha panen Oktober 2018 produksi 8,6 ton), Kecamatan Cibal Desa Golo Ngencung (2 Ha), Desa Barang KWT Seber Cama (2 Ha), Kecamatan Langke Rembung Desa Wali Poktan Batang Cama (2 Ha) dan Desa Tadong Poktan Wela Momang (2 Ha). Sisa 8 Ha rencana tanam januari 2019; **(5) Sumba Timur** : Kecamatan Pandawai Desa Kadumbul Poktan Mila Eti Jawu (3 Ha), Desa Palakahembi Poktan Lata Luri I (3Ha), Desa Kawangu Poktan Marangga Pandulang (4 Ha), Kecamatan Karera Desa Tandula Jangga Poktan Rinjung Malati (8 Ha), Kecamatan Umalulu Desa Mutunggeding Poktan Usaha Bersama (3 Ha panen November 2018, produksi 3,8 ton), Desa Watu Hadang Poktan Malakata Hadang II (3 Ha), Desa Watupuda Poktan Londa Lima (1 Ha), Kecamatan Lewa Desa Pada Njarahamu Poktan Akasia (2 Ha), Desa Tanarara Poktan Bina Jaya II (2 Ha) dan Bina Jaya III (1 Ha) Sisa 27 Ha rencana tanam januari 2019; **(6) Sumba Barat Daya** : Kecamatan Wewewa Tengah Desa Wee Kokora Poktan Ole Dewa 1 (10 ha rencana tanam januari 2019).

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Gogo/Lahan Kering seluas 63.825 Ha dengan capainhasil terealisasinya penyaluran fasilitas sarana produksi budidaya padi gogo/ padi lahan kering seluas 63.825 hektar yang tersebar di 21 kabupaten. Sarana



produksi yang dibelanjakan adalah benih padi dan pupuk urea, sebagai berikut : **(1) Kupang** : Luas lahan 9.315 Ha, Realisasi Tanam 8.950 Ha (Sisa 365 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/poktan tidak mengajukan permintaan), Jumlah Benih 223.750 Kg, Jumlah Pupuk 447.500 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(2) TTS** : Luas lahan 1.115 Ha, Realisasi Tanam 1.115 Ha, Jumlah Benih 27.875 Kg, Jumlah Pupuk 55.750 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(3) TTU** : Luas lahan 3.000 Ha, Realisasi Tanam 2.965 Ha (Sisa 35 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/poktan tidak mengajukan permintaan), Jumlah Benih 74.125 Kg, Jumlah Pupuk 148.250 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(4) Belu** : Luas lahan 1.241 Ha, Realisasi Tanam 1.241 Ha, Jumlah Benih 31.025 Kg, Jumlah Pupuk 62.050 Kg. Realisasi penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018; **(5) Malaka** : Luas lahan 2.000 Ha, Realisasi Tanam 1.810 Ha (Sisa 90 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapokta / kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 45.250 Kg, Jumlah Pupuk 90.500 Kg. Penanaman belum dilaksanakan karena menunggu curah hujan normal.; **(6) Rote Ndao** : Luas lahan 6.000 Ha, Realisasi Tanam 6.000 Ha, Jumlah Benih 150.000 Kg, Jumlah Pupuk 300.000Kg. Penanaman akan dilakukan setelah curah hujan normal; **(7) Sabu Raijua** : Luas lahan 2.150 Ha, Realisasi Tanam 2.150 Ha, Jumlah Benih 53.750 Kg, Jumlah Pupuk 107.500 Kg. Penanaman akan dilakukan setelah curah hujan normal; **(8) Alor** : Luas lahan 2.150 Ha, Realisasi Tanam 2.150 Ha, Jumlah Benih 53.750 Kg, Jumlah Pupuk 107.500 Kg. Realisasi penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018; **(9) Lembata** : Luas lahan 1.300 Ha, Realisasi Tanam 1.195 Ha, Jumlah Benih 29.875 Kg, Jumlah Pupuk 59.750 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan



Januari 2019; **(10) Flores Timur** : Luas lahan 1.100 Ha, Realisasi Tanam 1.044 Ha (Sisa 56 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 26.100 Kg, Jumlah Pupuk 52.200 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(11) Sikka** : Luas lahan 2.390 Ha, Realisasi Tanam 2.265 Ha (Sisa 125 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 56.625 Kg, Jumlah Pupuk 113.250 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan November 2018; **(12) Ende** : Luas lahan 1.500 Ha, Realisasi Tanam 1.500 Ha, Jumlah Benih 37.500 Kg, Jumlah Pupuk 75.000 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(13) Nagekeo** : Luas lahan 2.200 Ha, Realisasi Tanam 1.467 Ha (Sisa 733 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 36.675 Kg, Jumlah Pupuk 73.350 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(14) Ngada** : Luas lahan 6.655 Ha, Realisasi Tanam 5.800 Ha (Sisa 855 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 145.000 Kg, Jumlah Pupuk 290.000 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(15) Manggarai Timur** : Luas lahan 2.400 Ha, Realisasi Tanam 1.910 Ha (Sisa 490 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 47.750 Kg, Jumlah Pupuk 95.500 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(16) Manggarai** : Luas lahan 1.500 Ha, Realisasi Tanam 1.233 Ha (Sisa 277 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 30.825 Kg, Jumlah Pupuk 61.650 Kg. Penanaman



dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(17) Manggarai Barat** : Luas lahan 3.000 Ha, Realisasi Tanam 1.526 Ha (Sisa 1.474 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapoktan/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 38.150 Kg, Jumlah Pupuk 76.300 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(18) Sumba Timur** : Luas lahan 6.100 Ha, Realisasi Tanam 5.900 Ha (Sisa 200 Ha tidak dilaksanakan dan disetor kembali ke kas Negara dikarenakan gapokta/kelompok tani tidak mengajukan berkas), Jumlah Benih 147.500 Kg, Jumlah Pupuk 295.000 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(19) Sumba Tengah** : Luas lahan 2.604 Ha, Realisasi Tanam 2.604 Ha, Jumlah Benih 65.125 Kg, Jumlah Pupuk 130.200 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(20) Sumba Barat** : Luas lahan 2.720 Ha, Realisasi Tanam 2.720 Ha, Jumlah Benih 68.000 Kg, Jumlah Pupuk 136.000 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019; **(21) Sumba Barat Daya** : Luas lahan 4.350 Ha, Realisasi Tanam 4.350 Ha, Jumlah Benih 108.750 Kg, Jumlah Pupuk 217.500 Kg. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus Lainnya seluas 180 Ha di 4 kabupaten dengan capaian/hasil : **(1) Sabu Raijua alokasi 25 Ha** : Kecamatan Sabu Timur Desa Limanggu Poktan Miradei Hari 5 Ha, Poktan Lika Mandiri 3 Ha, Poktan Berkat Ilahi 3 Ha, Poktan Gaya Baru 5 Ha dan Poktan Kasih 5 Ha; Kecamatan Sabu Barat Desa Menia Poktan Uba Ai 2 Ha dan Poktan Napuloro 2 Ha. Penanaman akan dilakukan bulan Januari 2019; **(2) Ende alokasi 25 Ha** : Kecamatan Detusoko Desa Wologai Poktan Gapelita 10 Ha dan Poktan Bintang Timur 15 Ha. Realisasi tanam bulan Juli 2018 dengan nilai produksi 400 Ton; **(3) Mangarai Timur alokasi 80 Ha** :



Kecamatan Kota Komba Desa Rana Kolong Poktan Abitas 10 Ha, Poktan Taman Kasih 15 Ha; Desa Rana Mbata KWT Mentari Pagi 5 Ha; Desa Mokol Morid Poktan Sinar Eduk 5 Ha; Desa Rana Mbeling KWT Watu Nene; Desa Gunung Baru Poktan Sinar Haran 5 Ha dan KWT Satu Hati 5 Ha; Desa Ranga Koe Poktan Semangat Baru 10 Ha; Desa Watu Nggene Poktan Ingin Maju Waelengga 5 Ha dan Sabung Jawa 10 Ha; Kecamatan Lampa Leda Desa Setar Padut Poktan Sama Jaya 5 Ha, Desa Tengku Lawar Poktan Kembang Tani 5 Ha; **(4) Sumba Barat alokasi 50 Ha** : Kecamatan Wanukaka Desa Baliloku Poktan A'a Galu 25 Ha dan Kecamatan Lamboya Desa Laboya Bawa Poktan Setia Maju 25 Ha.

- Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Sereal Lainny.
- Alokasi anggaran Rp.47.636.250.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.621.291.530,- (93.79%), dengan capaian / hasil :
- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2, bagi 20 Kabupaten, 87 Kecamatan, 529 desa, 1.339 poktan, realisasi tanam 21.194 Ha (bantuan dilakukan melalui transfer uang langsung ke rekening kelompok tani guna pembelian benih jagung hibrida sebanyak 341.250 kg dan pupuk urea sebanyak 1.117.500 kg), rinciannya sebagai berikut : **(1) Kupang** terdiri dari 1 kecamatan, 12 desa, 77 Poktan, realisasi tanam 1.930 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 28.950 kg dan pupuk urea 96.500 kg); **(2) TTS** terdiri dari 7 kecamatan, 75 desa, 175 Poktan, realisasi tanam 1.770 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 dan Pioneer 35 sebanyak 26.550 kg dan pupuk urea 88.500 kg); **(3) TTU** terdiri dari 7 kecamatan, 34 desa, 66 Poktan, realisasi tanam 1.540 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 23.100 kg dan pupuk urea 77.000 kg); **(4) Belu** terdiri dari 4 kecamatan, 17 desa, 49 Poktan, realisasi tanam 540 Ha (benih jagung varietas Pioneer 35 sebanyak 8.100 kg dan pupuk urea 27.000 kg); **(5) Malaka** terdiri dari 5 kecamatan, 33 desa, 88 Poktan, realisasi tanam 1.540 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 dan Pioneer 35 sebanyak 23.100



kg dan pupuk urea 77.000 kg); **(6) Rote Ndao** terdiri dari 4 kecamatan, 56 desa, 111 Poktan, realisasi tanam 1.540 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 23.100 kg dan pupuk urea 77.000 kg); **(7) Sabu Raijua** terdiri dari 5 kecamatan, 25 desa, 77 Poktan, realisasi tanam 385 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 5.775 kg dan pupuk urea 19.250 kg); **(8) Alor** terdiri dari 6 kecamatan, 21 desa, 33 Poktan, realisasi tanam 825 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 12.375 kg dan pupuk urea 41.250 kg); **(9) Lembata** terdiri dari 3 kecamatan, 41 desa, 41 Poktan, realisasi tanam 690 Ha (benih jagung varietas Pioner 35 sebanyak 10.350 kg dan pupuk urea 34.500 kg); **(10) Flores Timur** terdiri dari 8 kecamatan, 31 desa, 33 Poktan, realisasi tanam 385 Ha (benih jagung varietas Pioner 35 sebanyak 62.840 kg dan pupuk urea 209.500 kg); **(11) Sikka** terdiri dari 6 kecamatan, 14 desa, 14 Poktan, realisasi tanam 500 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 7.500 kg dan pupuk urea 25.000 kg); **(12) Nagekeo** terdiri dari 2 kecamatan, 14 desa, 66 Poktan, realisasi tanam 1.140 Ha (benih jagung varietas Bioseed 54 sebanyak 23.100 kg dan pupuk urea 57.000 kg); **(13) Ngada** terdiri dari 2 kecamatan, 13 desa, 14 Poktan, realisasi tanam 1.494 Ha (benih jagung varietas Bioseed 54 sebanyak 28.950 kg dan pupuk urea 96.500 kg); **(14) Manggarai Timur** terdiri dari 3 kecamatan, 23 desa, 96 Poktan, realisasi tanam 1.540 Ha (benih jagung varietas Bissi sebanyak 23.100 kg dan pupuk urea 77.000 kg); **(15) Manggarai** terdiri dari 7 kecamatan, 18 desa, 39 Poktan, realisasi tanam 385 Ha (benih jagung varietas Bioseed 54 sebanyak 5.775 kg dan pupuk urea 19.250 kg); **(16) Manggarai Barat** terdiri dari 2 kecamatan, 17 desa, 93 Poktan, realisasi tanam 1.615 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 24.225 kg dan pupuk urea 80.750 kg); **(17) Sumba Timur** terdiri dari 3 kecamatan, 3 desa, 57 Poktan, realisasi tanam 1.030 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 15.450 kg dan pupuk urea 51.500 kg); **(18) Sumba Tengah** terdiri dari 3 kecamatan, 7 desa, 8 Poktan, realisasi



tanam 520 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 7.800 kg dan pupuk urea 26.000 kg); **(19) Sumba Barat** terdiri dari 4 kecamatan, 28 desa, 61 Poktan, realisasi tanam 1.005 Ha (benih jagung varietas Bissi 2 sebanyak 15.075 kg dan pupuk urea 50.250 kg); **(20) Sumba Barat Daya** terdiri dari 5 kecamatan, 47 desa, 142 Poktan, realisasi tanam 1.540 Ha (benih jagung varietas Pioner 35, Bioseed 54 sebanyak 23.100 kg dan pupuk urea 77.000 kg);

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Litbang / Varietas Umum 3 bagi 20 Kabupaten, 170 Kecamatan, 968 desa dan 1.982 Poktan dengan realisasi tanam 40.785 Ha (bantuan dilakukan melalui transfer uang langsung ke rekening kelompok tani guna pembelian benih jagung hibrida sebanyak 614.250 kg dan pupuk urea sebanyak 1.858.380 kg), dengan rincian sebagai berikut : **(1) Kupang** terdiri dari 16 kecamatan, 69 desa, 105 Poktan, realisasi tanam 4.190 Ha (benih jagung varietas Bima 2 sebanyak 62.850 kg dan pupuk urea 209.500 kg); **(2) TTS** terdiri dari 15 kecamatan, 83 desa, 219 Poktan, realisasi tanam 3.200 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 dan JH-27 sebanyak 48.000 kg dan pupuk urea 110.000 kg); **(3) TTU** terdiri dari 21 kecamatan, 63 desa, 140 Poktan, realisasi tanam 3.050 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 dan JH-27 sebanyak 45.750 kg dan pupuk urea 152.500 kg); **(4) Belu** terdiri dari 6 kecamatan, 36 desa, 98 Poktan, realisasi tanam 990 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 14.850 kg dan pupuk urea 49.500 kg); **(5) Malaka** terdiri dari 8 kecamatan, 60 desa, 192 Poktan, realisasi tanam 3.800 Ha (benih jagung varietas Bima 2 sebanyak 57.000 kg dan pupuk urea 190.000 kg); **(6) Rote Ndao** terdiri dari 9 kecamatan, 60 desa, 143 Poktan, realisasi tanam 2.280 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 34.200 kg dan pupuk urea 114.000 kg); **(7) Alor** terdiri dari 11 kecamatan, 28 desa, 59 Poktan, realisasi tanam 1.520 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 22.800 kg dan pupuk urea 76.000 kg); **(8) Lembata** terdiri dari 6 kecamatan, 83 desa, 84 Poktan,



realisasi tanam 1.320 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 19.800 kg dan pupuk urea 66.000 kg); **(9) Flores Timur** terdiri dari 5 kecamatan, 38 desa, 56 Poktan, realisasi tanam 625 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 9.375 kg dan pupuk urea 31.250 kg); **(10) Ende** terdiri dari 9 kecamatan, 33 desa, 35 Poktan, realisasi tanam 380 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 5.700 kg dan pupuk urea 19.000 kg); **(11) Sikka** terdiri dari 9 kecamatan, 18 desa, 19 Poktan, realisasi tanam 910 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 13.650 kg dan pupuk urea 45.500 kg); **(12) Nagekeo** terdiri dari 4 kecamatan, 43 desa, 78 Poktan, realisasi tanam 1.760 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 38.400 kg dan pupuk urea 128.000 kg); **(13) Ngada** terdiri dari 10 kecamatan, 49 desa, 52 Poktan, realisasi tanam 2.972 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 47.400 kg dan pupuk urea 158.000 kg); **(14) Mangarai Timur** terdiri dari 5 kecamatan, 85 desa, 240 Poktan, realisasi tanam 3.050 Ha (benih jagung varietas Bima 15 sebanyak 45.750 kg dan pupuk urea 152.500 kg); **(15) Manggarai** terdiri dari 4 kecamatan, 17 desa, 30 Poktan, realisasi tanam 380 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 5.700 kg dan pupuk urea 19.000 kg); **(16) Manggarai Barat** terdiri dari 8 kecamatan, 50 desa, 162 Poktan, realisasi tanam 2.960 Ha (benih jagung varietas Bima 15 sebanyak 44.400 kg dan pupuk urea 8.880 kg); **(17) Sumba Timur** terdiri dari 10 kecamatan, 47 desa, 57 Poktan, realisasi tanam 1.920 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 28.800 kg dan pupuk urea 96.000 kg); **(18) Sumba Tengah** terdiri dari 4 kecamatan, 15 desa, 15 Poktan, realisasi tanam 915 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 13.725 kg dan pupuk urea 45.750 kg); **(19) Sumba Barat** terdiri dari 5 kecamatan, 47 desa, 67 Poktan, realisasi tanam 1.513 Ha (benih jagung varietas Bissi 228 sebanyak 29.850 kg dan pupuk urea 99.500 kg); **(20) Sumba Barat Daya** terdiri dari 5 kecamatan, 43 desa, 132 Poktan, realisasi tanam 1.750 Ha (benih jagung varietas JH-27, Bima 2



sebanyak 26.250 kg dan pupuk urea 87.500 kg);

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Budidaya Jagung Komposit seluas 10.000 Ha di 9 kabupaten, dengan realisasi tanam 6.296 Ha dengan rincian : **(1) Kupang** : realisasi tanam 1.450 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 36.250 Kg dan pupuk urea 72.500 Kg; **(2) TTS** : realisasi tanam 500 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 12.500 Kg dan pupuk urea 25.000 Kg; **(3) TTU** : realisasi tanam 450 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 11.250 Kg dan pupuk urea 22.500 Kg; **(4) Lembata** : realisasi tanam 280 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 7.000 Kg dan pupuk urea 14.000 Kg; **(5) Sikka** : realisasi tanam 1.950 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 48.750 Kg dan pupuk urea 97.500 Kg; **(6) Ende** : realisasi tanam 170 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 4.250 Kg dan pupuk urea 8.500Kg; **(7) Ngada** : realisasi tanam 390 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 9.750 Kg dan pupuk urea 19.500 Kg; **(8) Manggarai Timur** : realisasi tanam 535 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 13.375 Kg dan pupuk urea 26.750; **(9) Manggarai Barat** : realisasi tanam 571 Ha, Benih jagung varietas Lamuru 14.275 Kg dan pupuk urea 28.550 Kg;
- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Shorgum seluas 250 Ha di kabupaten Flores Timur, 4 kecamatan, 24 desa dan 24 kelompok tani.
- Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.
Alokasi anggaran Rp.2.307.515.000,- realisasi anggaran Rp.1.964.219.575,- (85.12%) dengan capaian/hasil :
 - Terlaksananya Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sereal ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten (21 kabupaten).
- Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik.
Alokasi anggaran Rp.5.152.830.000,- realisasi anggaran Rp.5.004.930.000,- (97.13%) dengan capaian / hasil :
 - Terlaksananya Penyaluran Fasilitas Budidaya Padi Organik



guna Pengembangan Kawasan Perbatasan seluas 310 Ha di kabupaten Belu seluas 250 Ha; Malaka seluas 20 Ha, Ngada seluas 20 Ha dan Sumba Tengah seluas 20 Ha.

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 25 unit untuk 16 kabupaten berupa Rumah Kompos (1 unit), Kandang Komunal (1 unit), Bak Fermentasi (1 unit), Ternak (sapi jantan 2 ekor, sapi betina 8 ekor), pakan dan obat-obatan, 1 unit APPO dan 1 unit Kendaraan roda 3 bagi 25 Kelompok Tani masing-masing: **(1) Kupang**: Kec. Taebenu Desa Bokong Poktan Naomat dan Kecamatan Takari Desa Tuapanaf Poktan Baru Terbit; **(2) TTS** : Kecamatan Kuatnana Desa O'of Poktan Suka Maju; **(3) Belu** : Kecamatan Rinhat Desa Tohe Poktan We Bot; **(4) Rote Ndao** : Kecamatan Rote Timur Desa Lakamola Poktan Harapan Kasih; **(5) Alor** : Kecamatan Alor Barat Daya Desa Wolwal Barat Poktan Balenta Sama dan Kecamatan Teluk Mutiara Desa Welai Barat Poktan Anugerah; **(6) Lembata** : Kecamatan Nubatukan Desa Lewoleba Timur Poktan Mata Mandir, Desa Pada Poktan Melati Jaya dan Poktan Pemuda Mandiri; Kecamatan Buyasuri Desa Atuwalupang Poktan Upang Bating; Kecamatan Lebatukan Desa Walenga Poktan Napa Belen, Kecamatan Ile Ape Desa Laranwutun Poktan Ama Genan; Kecamatan Nagawutung Desa Babokerong Poktan Lewotana; **(7) Sikka**: Kecamatan Paga Desa Masebewa Poktan Kura Duna; **(8) Ende**: Kecamatan Ende Selatan Desa Rukun Lima Poktan Sunan Kudus; **(9) Nagekeo**: Kecamatan Boawae Desa Dhereisa Poktan Semangat Tani; **(10) Ngada**: Kecamatan Ngada Desa Golewa Selatan Poktan Wogowela; **(11) Manggarai Timur** : Kecamatan Sambu Rampas Desa Naga Mbiling Poktan Biting II; **(12) Manggarai** : Kecamatan Cibai Desa Pagal Poktan Wae Woko; **(13) Sumba Timur**; Kecamatan Lewa Desa Lewa Paku Poktan Bidi Hunga; **(14) Sumba Tengah**: Kecamatan Umbu Ratu Nggay Desa Mbilur Pengadu Poktan Tana Langga; **(15) Sumba Barat**: Kecamatan Loli Desa Weekorou Poktan Perintis **(16) Sumba**



BaratDaya : Kecamatan Kota Tambolaka Desa Kalena Wanno Poktan Mitra Usaha.

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.

Alokasi anggaran Rp.9.069.139.000,- realisasi anggaran Rp.6.640.687.476,- (73,22%), melalui kegiatan :

- Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat.

Alokasi anggaran Rp.8.075.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.697.834.326,- (70,56%) dengan capaian/hasil :

- Terlaksananya Penyaluran Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat 569.875 Kg dengan rincian :(1) Kab. Kupang sebanyak 19.375 Kg (775 Ha); (2) TTS sebanyak 25.000 Kg (1.000 Ha); (3) Belu sebanyak 19.375 Kg (775 Ha); (4) Rote Ndao sebanyak 15.000 Kg (600 Ha); (5) Sumba Timur sebanyak 169.175 Kg (6.767 Ha); (6) Sikka sebanyak 47.950 Kg (1.918 Ha); (7) Ende sebanyak 19.375 Kg (775 Ha); (8) Manggarai Timur sebanyak 62.500 Kg (2.500 Ha); (9) Manggarai Barat sebanyak 20.350 Kg (814 Ha);(10) Malaka sebanyak 19.375 Kg (775 Ha); (11)SumbaTengah sebanyak 53.125 Kg (2.125 Ha); (12) Nagekeo sebanyak 41.775 Kg (1.617 Ha); (13) Manggarai sebanyak 57.500 Kg (2.300 Ha);
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyaluran Benih Bersertifikat di provinsi dan 13 kabupaten sasaran penerima bantuan benih bersertifikat.

- Fasilitas Desa Mandiri Benih.

Alokasi anggaran Rp.994.139.000,- realisasi anggaran Rp.942.853.150,- (94,84%) dengan capaian/hasil :

Terlaksananya Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat untuk Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedelai berupa bantuan Benih Sumber Kedelai, dengan rincian :(1) Kab. Mangarai Barat (2 Unit); (2) Manggarai (1 Unit); (3) gada (1 Unit); (4) Kupang (1 Unit). Selain bantuan benih juga diberikan bantuan sarana/peralatan pengolahan dan pengemasan serta bangunan lantai jemur dan gudang 1 unit untuk masing-masing kelompok tani sasaran kegiatan.

4) KegiatanDukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.



Alokasi anggaran Rp.1.007.000.000,- realisasi anggaran Rp.966.737.300,- (96,00%) melalui kegiatan :

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen Tanaman Pangan.

Alokasi anggaran Rp.1.007.000.000,- realisasi anggaran Rp.966.737.300,- (96,00%) capaian hasil : tersedianya dokumen manajemen tanaman pangan sebanyak 3 Dokumen yaitu: (1) Dokumen Perencanaan melalui Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Tahun 2018 sesuai dengan Renstra kegiatan bidang tanaman pangan, (2) Dokumen Keuangan dan Perlengkapan melalui Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan serta Laporan Akuntansi dan Verifikasi Kegiatan Tanaman Pangan, (3) Dokumen Evaluasi dan Data Informasi Kegiatan Tanaman Pangan melalui Penyusunan Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Penyediaan Data dan Informasi Statistik Tanaman Pangan

5) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Alokasi anggaran Rp.4.740.900.000,- realisasi anggaran Rp.4.686.082.540,- (98,84%), melalui kegiatan :

- Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.

Alokasi anggaran Rp.2.339.200.000,- realisasi anggaran Rp.2.308.582.100,- (98,69 %) capaian hasil :

- Terlaksananya Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman pangan (1) Sarana Pascapanen Padi berupa Moisture tester sebanyak 6 unit yang diperuntukan bagi petugas informasi pasar (petugas PIP) di kabupaten Timor Tengah Selatan (1 unit), Manggarai Timur (1 unit), Manggarai (1 unit), Manggarai Barat (1 unit), Sumba Timur (1 unit) dan Sumba Barat Daya (1 unit); (2) Sarana pascapanen Jagung berupa Corn Sheller (alat pemipil jagung) sebanyak 65 unit, masing-masing Kabupaten Kupang (5 unit), TTS (8 unit), Belu (5 unit), Malaka (5 unit), Sabu Raijua (2 unit), Alor (5 unit), Lembata (4 unit), Flores Timur (4 unit), Negekeo (6 unit), Ngada (6 unit), Mangarai Timur (6 unit), Manggarai (2 unit), Manggarai Barat (2 unit) dan Sumba Tengah (5 unit).



- Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan capaian/hasil: terlaksananya Pengawasan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Tanaman Pangan (Provinsi), Fasilitas Pengadaan Sarana Pascapanen TP di Provinsi, Pengawasan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Pascapanen TP (4 Kab.), Pengawasan Sarana Dryer Tanaman Pangan dan Pengawasan UPSUS (upaya khusus swasembada padi, jagung dan kedelai).
- Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
Alokasi anggaran Rp. 214.000.000,- realisasi Rp.212.766.440,- (99,42%) dengan capaian/ hasil : tersalurnya fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan berupa UPH Jagung di Kabupaten Kupang yang dialokasikan ke Kelompok Tani Dalek Esa, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto dan Kelompok Tani Tunas, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu.
- Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
Alokasi anggaran Rp.158.500.000 realisasi anggaran Rp.157.079.500,- (99,10%), dengan capaian/hasil : Terlaksananya kegiatan sertifikasi pertanian organik tanaman pangan sebanyak 2 sertifikat bagi kelompok Tani P3A Tiwukwla, Desa Wogowela, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada.
- Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan.
Alokasi anggaran Rp.119.200.000realisasi Rp.99.984.500,- (83,88%), dengan capaian/hasil : Tersedianya informasi harga komoditi tanaman pangan di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten (Kota Kupang, Kupang, TTS, Belu, Ende dan Manggarai).
- Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU.
Alokasi anggaran Rp. 1.910.000.000,- realisasi anggaran Rp.1.907.670.000,- (99,88%), dengan capaian/hasil :
 - Terlaksananya Revitalisasi RMU sebanyak 4 unit dan Pembangunan RMU Non Organik sebanyak 2 Unit unit masing-masing: (1) kabupaten Kupang 1 unit Driyer Mobile di

BBI Tarus dan 1 unit Packing beras di Gapoktan Tunmoni, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah; (2) Manggarai Barat 1 unit Driyer UV di BBU Lembor; (3) Manggarai 1 unit Driyer UV di Poktan Maria Fatima, Desa Belang Turi, (4) Manggarai Poktan Golo Dopo I, Desa Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai; (5) Manggarai Barat : Poktan Crucifix, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

b. Direktorat Jenderal Hortikultura.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
Alokasi anggaran Rp. 39.343.800.000,- realisasi Rp.31.734.770.300,- (80,60 %), melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
- Alokasi anggaran sebesar Rp.39.343.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp.12.029.789.100,- (89,27%) yang meliputi :
- Kawasan Bawang Merah dengan capaian/hasil : terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 303 Ha dialokasikan di Kabupaten Kupang, Malaka, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Rote Ndao. Pengembangan kawasan bawang merah seluas 303 ha dilaksanakan melalui teknik budidaya dengan menggunakan biji (TSS) dan dengan menggunakan umbi.

Tabel. 5.3. Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Teknik Budidaya menggunakan biji (TSS)

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Jenis Bantuan		
1	Manggarai Barat	2	Bibit bawang merah (TSS)	10	Kg
			Pupuk NPK non subsidi	240	Kg
			Pupuk hayati cair	20	Liter
			Pupuk organik	16.000	Kg
			Feromon Fero bawang	40	Buah
			Perangkap Fero bawang	40	Buah
			Fungisida	4	Bungkus
			Insektisida / Nematisida	60	Kg
2	Kupang	4	Bibit bawang merah (TSS)	20	Kg
			Pupuk NPK non subsidi	480	Kg
			Pupuk hayati cair	40	Liter
			Pupuk organik	32.000	Kg
			Feromon Fero bawang	80	Buah
			Perangkap Fero bawang	80	Buah
			Fungisida	8	Bungkus



		Insektisida / Nematisida	120 Kg

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Jenis Bantuan	
3	Rote Ndao	2	Bibit bawang merah (TSS)	10 Kg
			Pupuk NPK non subsidi	240 Kg
			Pupuk hayati cair	20 Liter
			Pupuk organik	16.000 Kg
			Feromon Fero bawang	40 Buah
			Perangkap Fero bawang	40 Buah
			Fungisida	4 Bungkus
			Insektisida / Nematisida	60 Kg

Tabel. 5.4. Alokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Tahun 2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
1	Manggarai Barat	Lembor	Wae Kanta	Suka Maju	2
2	Kupang	Amarasi Timur	Pakubaun	Serangkai	0,5
		Semau Selatan	Uitiuh Ana	Dael Kolo	0,5
			Uitiu Tuan	Kasih	0,5
			Naikéan	Harapan	0,5
		Takari	Tuapanaf	Tekad Mandiri	0,5
		Kupang Timur	Oesao	Maifali	1,5
3	Rote Ndao	Pantai Baru	Oeledon	Getsemani	2
TOTAL		6	8	8	8

Tabel. 5.5. Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Teknik Budidaya Menggunakan Umbi Tahun 2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
1	Manggarai Barat	Lembor	Liang Sola	Tunas Baru	2
			Ngancar	Poco Koe II	4
			Benteng Dewa	Gelang	5
		Lembor Selatan	Kakor Nangalili	Cinta Alam	4
		Macang Pacar	Bari	KWT Mitra Karya	5
				Pakinépa	4
2	Kupang	Welak	Racang Welak	Bea Bola	4
		Komodo	Macang Tanggar	Selaras Alam	2
		Jumlah		5	8
		Kupang Timur	Manusak	Grand Island	1
			Nunkurus	Somly	1
			Kel. Naibonat	Bunga Tani Sahabat	1
		Amabi Oefeto	Fatukanutu	Hijau Makmur	1
		Fatuleu	Kuanheum	Sinar Besleu	1
			Camplong I	Tunas Muda	1
		Fatuleu	Nunsaen	Tunfeu	1



		Tengah			

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
		Kupang Tengah	Noelbaki	Tunas Muda	1
			Baumata Timur	KWT Wanita Karya	1
		Semau	Otan	Kenangan Kaemonia	1
			Uitao	Pelita	1
		Kupang Barat	Sumlili	Ora et Labora	1
				Nunleu	1
		Sulamu	Oeteta	Oeteta Indah	1
		Amarasi	Kotabes	Panah Merah	1
				Hijau Daun	1
				Taman Tani	1
		Semau Selatan	Naikean	Cahaya Alak Mias	1
				Uitiu Tuan	Tangkup Ina Cahaya Sepakat Tenang
			Akle Uitiuhana Uiboa	Firdaus	1
				Kontema	2
Ingumahake	1				
Takari	Oesusu Hoekanutu	Bina Tani Silnope	1		
Jumlah		11	21	28	30
3	Rote Ndao	Lobalain	Kuli	Ganiel Tesabela	5
		Pantai Baru	Keoen	Dalek Esa II	5
			Tungganamo	Ndene Ana	5
	Rote Timur	Pengodua	Pule Sio	5	
Jumlah		3	4	4	20
4	Malaka	Wewiku	Seserai Alkani	Teja Lawalu	10
				Taberek Jaya	5
				Kasih Sayang	5
				Sinar	5
		Waseben Lamea	Dik Oan	10	
			Tua Taforu	5	
		Malaka Timur	Wemeda	Moris Hamotu	5
		Sasitamean	Builaran	KWT Kasih Sejahtera	5
				Troy Harekaen	5
		Malaka Tengah	Bakiruk Lawalu Naimana	Hati Mulia	5
Blaka Jaya	5				
Naimana Jaya	10				
Fakluka	Manumuti	10			
	Jaya	5			
Lokufeu	Fatoin Kufeu	Pelita Lalor	5		
		Wemer	5		
	Alam Raya	5			



Jumlah	5	12	16	100

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
5	Lembata	Nubatukan	Kel. Lewoleba Tengah Kel. Lewoleba Barat Kel. Selandoro	Sehati	1
				Waibao	0,5
				Tunas Baru	1
				Bhineka	1
			Tunggal Ika	1	
			Lomblen	1	
			Manis	1	
			Ria Raja	1	
		Bour	Gogu	1	
		Lebatukan	Merdeka	Lepanbatan	0,5
Ile Ape	Laranwutun	Cahaya Murni	1		
		Setia Bersama	0,5		
		Tanah Merah	1		
		Tanah Putih	0,5		
		Sang Pelangi	1		
Nagawutun	Duawutun	Suka Maju	1		
		Arkapi	1		
		Belabaja	Komak	1,5	
Labalimut	Susteran Boto	0,5			
Jumlah		4	9	16	15
6	Flores Timur	Ile Boleng	Lewokeleng	Suku Gede Naen	4
			Helan Lango Wuyun	Wae Lolong	2
		Adonara Timur	Kiwang Ona	Tibu Tawan	5
		Ile Mandiri	Waelolon	Lombok Merah	2
			Tiwatobi	Mandiri	2
		Jumlah		3	5
7	Sikka	Alok Barat	Wuring	Kembang Lestari	1,5
			Waeliti	Bina Lingkungan	1
		Waegete	Egon	Sahabat Tani	3
		Nita	Nita Kloang	Gading Gatang II	2
		Talibura	Bangkor	Karya Ibu Wolontelon I	1
			Nebe	Sederhana	1,5
		Magepanda	Magepanda	Karya Tani Kembang Done	1,5
			Kolisia B	Usaha Baru	1
Jumlah		5	8	10	15
8	Ngada	Golewa	Saresedu	Akuares	5
		So'a	Tarawaja	Lokalodo A	2
			Tarawali	Delta Lestari	2
			Ngabeo	Ola Dea	4
	Loa		Suka Maju	2	
Jumlah		2	5	5	15



9	Manggarai	Satarmese	Tal Legu	Bhineka Nawala	5
		Satarmese Barat	Hilihintir	Welarana	2
No		Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
		Reo	Baru Salama Mata Air	Jati	2
				Diwu Lewe	1
				Poco Koe	2
				Suri Nangga	1
				Kwinda	2
				Keli	1
				Pelita	1
				Pelita II	1
Jumlah		3	6	11	20
10	Sumba Timur	Pandawai	Palakahembi	Muri Hari	4
				Ndula Luri	5
		Umalulu	Laimandar	KWT Karya Abadi	4
		Kanatang	Tanggedu	Paitang Mahammu	2
Jumlah		3	3	4	15
11	Sumba Barat	Lamboya	Bodohula	Hilu Hada	5
Jumlah		1	1	1	5
12	Sabu Raijua	Sabu Barat	Raeloro	Mira Kadi Hari	0,5
				Sekeber	5
				Ia Hari	0,5
			Nada Wawi	Tapeloro	1
				Damai	0,5
			Rae Roko	Rihi Dai	0,5
				Mira Kadi	0,5
			Rae Mude Rae Nyale	Bunga Tani	0,5
		Sabu Timur	Limanggu	Ushaa Bersama	0,5
			Eiada	Ei Le	0,5
			Huwaga Labodei	Matakera	0,5
	Naparawate	1			
	Rubadeo	0,5			
	Mira Kaddi Hari	0,5			
Sabu Liae		Hallapaji	Ie Hari	1	
Jumlah		3	11	19	15
TOTAL		48	93	127	295

Tabel. 5.6. Fasilitas Bantuan Kepada Petani Bawang Tahun 2018

Pengembangan Bawang Merah	Fasilitas Bantuan	
	Sarana Budidaya	Sarana Produksi



Umbi	• Pompa air 2 unit • Selang hisap 2 unit • Selang buang 2 unit • Pipa paralon 2 unit	• Bibit bawang merah • Pupuk NP Non subsidi • Pupuk hayati cair • Pupuk organik • Feromon fero bawang • Perangkap fero bawang • Fungisida
Pengembangan Bawang Merah	Fasilitas Bantuan	
	Sarana Budidaya	Sarana Produksi
Biji	-----	• Bibit bawang merah biji (TSS) • Pupuk NPK Non subsidi • Pupuk Hayati Cair • Pupuk organik remah • Perangkap fero bawang • Fungisida • Insektisida

- Kawasan Sayuran Lain dengan capaian/hasilTerlaksananya kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 225 Ha dialokasikan di KabupatenTTS, TTU, Malaka, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. Tetapi tiga (3) kabupaten yaitu: TTS, Manggarai Barat dan Sumba Timur menolak kegiatan karena keterlambatan waktu dalam penyediaan benih bawang putih

Tabel. 5.7. Alokasi Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
1	Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Salu	Nek Ana	2
				KWT Melati	2
			Lemon	Kuatnana	2
				Leolboko	2
			Eban	Perintis	2
				Mulatan	2
				Tubuangkae	2
				Nekmatulun	2
			Saenam	Biname	2
				Bersaudraa	2
				Karya Abadi	1,5
			Neopesu	Fatumese Jaya	2
				Oelajao	2
		Fatuneno		Sinar Bineno	2
				Matultakun	2
		Mutis	Tasinifu	Hidup baru	2
		Miomaffo Timur	Jak	Kolkase	2
				Melati	2
			Tun'noe	Kembang Nekleu	2
		Insana	Sekon	Rindu Makmur	2
				KWT Tsunae	2



				KWT Kasih Setia	2
				KWT Mandiri Bersama	2
		Insana Barat	Unini	Manuatahanab	2
		Kota Kefamenanu	Benpasi	Gembor	0,5
Jumlah		6	12	25	50

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
2	Malaka	Rinhat	Niti	Suka Biliun	5
			Tafuli I	Lestari	5
				Mawar	5
		Sasitamean	Umutnana	Kasih Cemerlang	5
		Io Kufeu	Biau	Fajar Amanas	5
Jumlah		3	4	5	25
3	Sikka	Tana Wawo	Poma	Tunas Bersama	3
			Renggarasi	Rate Rangga	3
			Buwatu Weti	Bete Boko	3
			Bu Utara	Ndae Sola	3
			Tuwa	Usaha Baru	2
		Mapitara	Egon Gahar	Wuli Lado	2
		Nita	Wolewuitik	Persani	2
			Lado Gahar	Hortikultura	3
			Riit	Waruk Matan	2
		Talibura	Timutawa	Tukan Dungan	1
			Kringa	Kringa Liwu I	2
			Hikong	Taabana	2
		Paga	Wolorega	Mudemi	2
				Wolowindi	2
		Doreng	Wogaliri	Pencinta Pala	3
			Wolomotong	Wodonwayar	3
		Waiblama	Tuabao	KWT Geruhiber	2
Jumlah		7	16	17	40
4	Ende	Ndona Timur	Sokoria	Eko Boa	1
				Ingin Maju	1
			Roga	Rendo Reri	1
			Demo Laka	Anggrek	1
		Wolowaru	Jopu	Lowo Loka	2
		Wolojita	Kel. Wolojita	Tedo tembu	2
		Kelimutu	Pemo	Ire Lura II	1
				Pere Konde	1
			Nggumbelaka	Melati II	1
			Tana Langi	Dei Sama	1
		Lepembusu Kelisoke	Kuru	Suka Maju	1
				Wanita Tani	1
				Se Ate	1
Jumlah		6	9	13	15
5	Ngada	Golewa	Sanga Deto	Mata Deke	9
		Golewa Barat	Sobo	Jaga Nama	3
				Maju Bersama	3
Jumlah		3	2	3	15
9	Sumba Barat Daya	Wewewa	Matapyawu	Maju Bersama	2
		Timur	Kadiwanno	Bina Kasih	2
			Dikira	Cahaya Bapa	2
			Tematana	Lolowinni	2
				Suka Maju	2
			Pada Eweta	Wunutamanggolo	2



			Mareda Kalada	Deta Ate	2
		Wewewa Barat	Kabaledana	Perjuangan	4
				Dua Awa	2
	Jumlah	2	7	9	20

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)
6	Manggarai Timur	Kota Komba	Golo Meni	Noktedeng	1
			Rana Mbeling	KWT Kasih Damai	1
		Borong	Poci Ri'i	Dadang Merah I	2
		Ranamese	Compang Loni	Nusa Jaya I	1
			Golo Meleng	KWT Momang Koe	2
				KWT Kasih Ibu	2
		Poco Ranaka	Melo	Waelenger	1
				Menggol	1
			Watu Lanu	KWT Lumbung Padi	1
			Bangka Arus	Pacu Wulang I	2
			Gololero	Suka Maju	1
			Wejang Mawe	KWT Calang Momang	1
			Watu Arus	Reca II	1
			Rende Nao	Wae Kolo	2
			Arus	KWT Srikandi	1
			Compang Raci	Kampung Tani	1
			Wejamali	KWT Wisma Tani	1
			Uluwae	KWT Suka Maju	1
			Colol	Lawe Lenggong	1
			Ngkio Dora	KWT Embun Pagi	1
Jumlah			4	18	20
7	Manggarai	Langke Rembong	Bangka Leda	Nderu Permai	1
				Wae Kebor	2
			Kel. Rowang	Wae Rowang	1
			Kel. Golo Dukal	Compang Ruteng	1
			Kel. Compang Carek	Harapan	1
			Kel. Pau	KWT Pionir	2
				KWT Seroja	2
			Kel. Waso	Cinta Kasih	1
				Nusa Hijau	1
				Bantang Cama	2
				Campe Saek	1
				Lase Waso	1
				KWT Mekar	2
		Kel. Watu	Benteng Tani	1	
		Satarmese	Umu	Wae Uwu	1
Jumlah		2	8	15	20
8	Sumba Barat	Loli	Doka Kaka	Mengapa Lapar	5
			Ubu Pede	Rada Koda Tana	3
		Kota Waikabubak	Tebara	Mareda Analoko	4



			Sobarade	Imanuel	3
	Jumlah	2	4	4	15
	TOTAL	35	80	111	225

Tabel. 5.8. Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
Pengembangan Bawang Putih Tahun 2018

Fasilitasi Bantuan	
Sarana Budidaya	Sarana Produksi
• Pompa air 2 unit • Selang hisap 2 unit • Selang buang 2 unit • Pipa paralon 2 unit • Terpal kolam • Handsprayer • Mesin pemotong rumput	• Benih bawang putih • Pupuk organik cair • Pupuk NPK • Fungisida

- Kawasan Aneka Cabai.

Tabel. 5.9. Pengembangan Kawasan Aneka Cabai Tahun 2018

No	Kabupaten	Jmlh Kec.	Jmlh Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota Poktan	Luas Lahan (Ha)
1	Kupang	9	15	20	342	19
2	Timor Tengah Selatan	12	18	21	339	25
3	Timor Tengah Utara	3	3	4	71	10
4	Alor	6	8	8	134	20
5	Rote Ndao	4	6	8	138	20
6	Sabu Raijua	2	5	5	97	10
7	Lembata	3	8	14	186	15
8	Flores Timur	5	5	5	119	15
9	Sikka	3	5	5	119	10
10	Ende	4	5	5	93	15
11	Nagekeo	1	1	4	62	15
12	Ngada	4	7	8	126	20
13	Manggarai Timur	5	17	20	394	25
14	Manggarai Barat	6	10	11	182	25
15	Manggarai	10	28	36	666	55
16	Sumba Timur	4	5	6	115	25
17	Sumba Tengah	4	5	5	94	20
18	Sumba Barat	6	7	7	119	25
19	Sumba Barat Daya	7	20	24	350	45
20	Kota Kupang	2	4	8	138	10
TOTAL		100	193	224	3.884	425

Terlaksananya pengembangan kawasan cabai seluas 425 Ha di 20



kabupaten, 100 kecamatan, 193 Desa dan 224 Poktan. Dua (2) kontrak yaitu sarana produksi & sarana budidaya untuk kawasan cabe besar di Kabupaten Manggarai tidak bisa dilaksanakan karena rekanan telah di PHK oleh PPK karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Fasilitas bantuan kepada petani diberikan dalam bentuk benih cabai, sarana produksi dan sarana budidaya serta stok benih sayuran. Bantuan benih yang diberikan adalah cabe rawit varietas Taruna dengan kemasan dalam bentuk sachet @10 gram dengan jumlah 10 sachet /Ha; cabe besar varietas Chilli dengan kemasan dalam bentuk sachet @10 gram dengan jumlah 12 sachet /Ha; cabe keriting PM 99 dengan kemasan dalam bentuk sachet @10 gram dengan jumlah 13 sachet /Ha.

Sarana budidaya lain yang diberikan pompa air 2 unit, selang hisap 2 unit, selang buang 2 unit, pipa paralon 2 unit, mesin potong rumput, ajir, mulsa, cultivator dan sarana produksi yang diberikan pupuk NPK non subsidi, pupuk hayati cair, pupuk organik, feromone sex, fungisida

2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.

Alokasi anggaran Rp.631.660.000,- realisasi Rp.287.419.000,- (45,50%).

3) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Hortikultura.

Alokasi anggaran Rp.1.030.000.000,- realisasi Rp. 965.495.400,- (93,74%) melalui kegiatan :

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, dengan capain/hasil : terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan berupa penyediaan ATK dan pelaporan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke kabupaten, sinkronisasi program/kegiatan ke kabupaten dan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan perencanaan pusat.
- Layanan Perkantoran, dengan capaian/hasil : terlayani administrasi kegiatan satker selama 12 Bulan berupa honor pengelola satuan kerja di tingkat provinsi, honor diberikan



kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Laporan SAK, Petugas Laporan SIMAK BMN, Staf Pengelola Satker, Petugas Verifikator SPM, Staf Pengelola Anggaran, Petugas Laporan SIMONEV, Petugas Perencanaan, Petugas Pelaporan SPM, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, Tim Pelaksana SPIP dan Tim Verifikasi Tunggakan bayar Tahun Anggaran 2017. kegiatan ini juga mengakomodasikan honor petugas di kabupaten yang mendapat alokasi kegiatan pengembangan hortikultura yang terdiri dari honor pelaksana kegiatan 1 (satu) orang dan staf pelaksana kegiatan sejumlah 2 (dua) orang sesuai yang dialokasikan dalam DIPA/POK satuan kerja tahun 2018 dan penyediaan ATK mendukung kegiatan serta perjalanan dinas petugas dalam rangka monitoring/evaluasi ke kabupaten, menghadiri undangan pusat, perjalanan dalam rangka survey harga, dan pengambilan data SP ke kabupaten.

4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Alokasi anggaran Rp.261.500.000,- realisasi Rp. 254.451.800- (97,30%) melalui kegiatan :

- Kawasan Mangga, dengan capaian/hasil: terlaksananya pengembangan kawasan mangga seluas 30 Ha di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel.5.10.
Pengembangan Kawasan Buah Mangga di Rote Ndao
Tahun 2018

Nama Kelompok	Luas Lahan (Ha)	Alamat	Sarana Budidaya		Jumlah Anakan
			Jenis	Jumlah	
Daleholu	4	Desa Daleholu Kec. Rote Selatan	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Nggalodae	4	Desa Daleholu Kec. Rote Selatan	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Tebile	4	Desa Tebole	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400



		Kec. Rote Selatan	Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	

Nama Kelompok	Luas Lahan (Ha)	Alamat	Sarana Budidaya		Jumlah Anakan
			Jenis	Jumlah	
Balokama	4	Desa Lenguselu Kec. Rote Selatan	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Kota Beuk	4	Desa Lenguselu Kec. Rote Selatan	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Sadi Sodak	4	Desa Lenguselu Kec. Rote Selatan	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Dalek Esa	2	Desa Modosinal Kec. Rote Barat Laut	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	
Saindule	4	Desa Saindule Kec. Rote BaratLaut	Pupuk Hayati Cair	60 Liter	400
			Fungisida	20 Botol	
			Insektisida	12 Botol	
			Pupuk NPK Non Subsidi	400 Kg	

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao seluas 30 Ha dengan total tanaman 3.000 anakan. Fasilitas bantuan sarana produksi untuk kegiatan pengembangan kawasan mangga yang diberikan berupa pupuk hayati cair, fungisida, insektisida, dan pupuk NPK non subsidi dan kawasan mangga di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan penyelesaian pembayaran pekerjaan fasilitas bantuan pengembangan mangga Tahun Anggaran 2017 seluas 50 Ha.

- Kawasan Pisang,tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan pembiayaan untuk pengembangan kawasan pisang mengalami refocusing/ pemotongan anggaran.

5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Alokasi anggaran Rp.89.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.950.000,- (100%) melalui kegiatan :



- Sarana dan Prasarana Pengolahan dengan capaian/hasil tersedianya dana untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan fasilitasi sarana pengolahan cabai Tahun Anggaran 2017 di kabupaten Ngada sebanyak 1 (satu) unit.

c. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
Alokasi anggaran Rp.70.482.360.000,- realisasi Rp.68.369.181.602,-
(97,00%) melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - Pengembangan Tanaman Kopi

Tabel.5.11. Perluasan Tanaman Kopi Arabika
Tahun 2018

No.	Nama Kelompok	Luas Areal (Ha)	Lokasi		Pupuk Organik	Pohon Pelindung
			Desa	Kecamatan		
Kabupaten Ende						
1.	Wonga Wea	10	Wolomasi	Detusoko	4.500	2.000
2.	Ndori	19,5	Golulada		8.775	3.900
3.	Bu'ungenda	30,5	Golulada		13.725	6.100
4.	Gapoktan Nua Pu'u	20	Wologai Tengah	Lepembusu Kelisoke	9.000	4.000
5.	Arabika Jaya	50	Mukureku		22.500	10.000
6.	Kema Sama	50	Mukureku Sa'ate		22.500	10.000
7.	Sa'ate	20	Wologai Timur		9.000	4.000
Jumlah		200	6	2	90.000	40.000
Kabupaten Manggarai Timur						
1.	Nteweng	25	Leong	Poco Ranaka	11.250	5.000
2.	Roga Rungkus	25	Wejang Mali	Poco Ranaka Timur	11.250	5.000
3.	Usaha Bersama	25	Benteng Rampas		11.250	5.000
4.	Getuk Agu Gejur	25	Compang Tenda	Borong	11.250	5.000
5.	Bagi Rasa	25	Golo Nderu	Kota Komba	11.250	5.000
6.	Nuk Tedeng	25	Golo Meni		11.250	5.000
7.	Caing Nuk	25	Golo Ngawang	Sambi Rampas	11.250	5.000
8.	Wae Bola	25	Golo Wangkung Barat		11.250	5.000
9.	Wereng III	25	Tengku Lawar	Lamba Leda	11.250	5.000
10	Wae Lewur	25	Wea Lokom	Elar	11.250	5.000
Jumlah		250	10	7	112.500	50.000
Kabupaten Ngada						
1.	VOX Alentadora	10	Wawowae	Bajawa	4.500	2.000
2.	Repo Say	20			9.000	4.000
3.	Koperasi Produsen Primavera	10			4.500	2.000
4.	Papataki	30			Langagedha	13.500
5.	KWT Sedang	8	Malanuza	Golewa	3.600	1.600



	Mekar					
6.	Papalaka I	11			4.950	2.200
7.	Karya Tani	8			3.600	1.600
8.	Watu Manu I	20			9.000	4.000
9.	Watu Manu II	20	Sarasedu I		9.000	4.000
10.	Ketilang	6			2.700	1.200
	Jumlah	200	4	2	90.000	40.000

- Terlaksananya perluasan tanaman kopi arabika dengan capaian/ hasil bertambahnya luasan lahan tanaman kopi arabika di Ende 200 Ha, Manggarai Timur 250 Ha dan Ngada200 Ha.
- Peremajaan Kopi

Tabel. 5.12. Peremajaan Kopi Tahun 2018

No.	Nama Kelompok	Luas Areal (Ha)	Lokasi		Pupuk Organik
			Desa	Kecamatan	
1.	Empu	25	Poco Lia	Poco Ranaka	11.250
2.	Lamba	30	Golo Nderu		13.500
3.	Dandu Lero	25	Golo Lero	Poco Ranaka Timur	11.250
4.	Akur Mekar	25	Kembang Mekar	Sambi Rampas	11.250
5.	Lurut	25	Benteng Riwu	Borong	11.250
6.	Tok	25	Waling		11.250
7.	Sepakat	25	Golo Lalong		11.250
8.	Maju Bersama	25	Golo Loni	Rana Mese	11.250
9.	Wae Robot	25	Lengko Namut	Elar	11.250
	Jumlah	230	9	6	103.500

- Terlaksananya peremajaan tanaman kopi seluas 230 Ha di Kabupaten Mangggarai Timur berupa pengadaan pupuk organik 103.500 kg dan APK 230 Paket.
- Terlaksananya pengawalan dan pendampingan perluasan dan peremajaan tanaman kopi di provinsi dan kabupaten sasaran kegiatan. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman kopi yaitu Integrasi Tanaman Kopi – Ternak di Kabupaten Ngada Kecamatan Golewa Desa Sarasedu Poktan Watumanu I dengan jenis bantuan yang diterima: ternak kambing 50 ekor, alat penepung 1 unit, alat pencacah limbah 1 unit, kandang 2 unit dan benih tanaman hijau ternak.Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi berupa analisis tanah dan analisis produk, pembuatan peta, konsultasi. Koordinasi dan sosialisasi serta penyusunan buku persyaratan dan peta dan pengumpulan data di Kab Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
- Pengembangan Tanaman Kakao

Tabel.5.13. Perluasan Tanaman Kakao Tahun 2018



No.	Nama Kelompok	Luas Areal (Ha)	Kecamatan / Desa	Pupuk NPK (Ha)	Pupuk Organik (Kg)	Fungisida (Liter)	Pohon Pelindung (Batang)
	Flores Timur						
1.	Rita Bala	30	Titehena / Leraboleng	3.000	7.500	30	6.000
2.	Lewomika	15	Titehena / Lamika	1.500	3.750	15	3.000
3.	Duli Tukan	15	Titehena / Tuakepa	1.500	3.750	15	3.000

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Kalvari	15	Titehena / Tanjung Bunga	1.500	3.750	15	3.000
5.	Ratu Kopo	15	Titehena / Sinar Hadigala	1.500	3.750	15	3.000
6.	Nusa Nipa	20	Titehena / Nusa Nipa	2.000	5.000	20	4.000
7.	Wai Wajon	10	Titehena / Lamatutu	1.000	2.500	10	2.000
8.	Keban Bele	10	Demon Pagong / Blepanawa	1.000	2.500	10	2.000
9.	Glekat Lewo	20	Demon Pagong / Lewokluok	2.000	5.000	20	4.000
10.	Lamalaka	10	Ile Boleng / Nelelamawangi I	1.000	2.500	10	2.000
11.	Lamenty	10	Ile Boleng / Helanlangowuyo	1.000	2.500	10	2.000
12.	Suku Rere	10	Ile Boleng / Lewopao	1.000	2.500	10	2.000
13.	Kadi Are	20	Ile Boleng / Bayuntaa	2.000	5.000	20	4.000
14.	Pili Pupu	10	Ile Mandiri / Lewohala	1.000	2.500	10	2.000
15.	Bidara	10	Adonara / Kolilanang	1.000	2.500	10	2.000
16.	Hode Glekat	20	Adonara / Kolimasang	2.000	5.000	20	4.000
17.	Nirmala Wainira	20	Adonara / Tika Tukang	2.000	5.000	20	4.000
18.	Nubun Baran	20	Adonara Timur / Lelenbala	2.000	5.000	20	4.000
19.	Tebe Wutun	10	Wulanggitang / Nawakote	1.000	2.500	10	2.000
20.	Epu Taa Tou	15	Wulanggitang / Boru Kedang	1.500	3.750	15	3.000
21.	Mamai	15	Wulanggitang / Boru Kedang	1.500	3.750	15	3.000
22.	Sehati	15	Wulanggitang / Boru	1.500	3.750	15	3.000
23.	Tugu Tego Bao Leo	20	Lewolema / Riang Kotek	2.000	5.000	20	4.000
24.	Epu Belang	15	Lewolema / Bantala	1.500	3.750	15	3.000
25.	Blido Tiwang	10	Lewolema / Bantala	1.000	2.500	10	2.000
26.	Dua Janda	20	Ile Bura / Nurri	2.000	5.000	20	4.000
Jumlah		400	22	40.000	100.000	400	80.000

II. Manggarai							
1.	Harapan Bersama	15	Lelak / Urang	1.500	3.750	15	3.000
2.	Nyata Karya	15	Lelak / Urang	1.500	3.750	15	3.000
3.	Suka Maju	20	Cibal / Bea Mese	2.000	5.000	20	6.000
4.	Caling Nai	15	Cibal / Langkas	1.500	3.750	15	3.000
5.	Rejeleleng	15	Cibal Barat / Bere	1.500	3.750	15	3.000
6.	Wae Nareng	15	Cibal Barat/Lenda	1.500	3.750	15	3.000
7.	Meda Jaya	15	Cibal Barat / Golo Woi	1.500	3.750	15	3.000
8.	Tungku Mose	15	Cibal Barat / Wae Codi	1.500	3.750	15	3.000



9.	Wae Pasat	15	Satar Mese/Langgo	1.50 0	3.750	15	3.000
10.	Karya Bersama	15	Satar Mese / Tado	1.50 0	3.750	15	3.000
11.	Dahlia	15	Satar Mese / Paka	1.50 0	3.750	15	3.000
12.	Perintis	15	Satar Mese / Satar Mese/Paka	1.50 0	3.750	15	3.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Rana Rembong	20	Satar Mese/Ulu Belang	2.00 0	5.000	20	6.000
14.	Semangat Baru	15	Satar Mese Barat/ Terong	1.50 0	3.750	15	3.000
15.	Wae Dunga	15	Satar Mese Barat/ Terong	1.50 0	3.750	15	3.000
16.	Apel	10	Satar Mese Barat/ Terong	1.00 0	2.500	10	2.000
17.	Rindang	10	Satar Mese Barat/ Terong	1.00 0	2.500	10	2.000
18.	Tungku Mose	10	Satar Mese Barat/ Terong	1.00 0	2.500	10	2.000
19.	Momang Koe	20	Satar Mese Barat / Wongka	2.00 0	5.000	20	4.000
20.	Longos II	20	Satar Mese Barat/ Bea Kondo	2.00 0	5.000	20	4.000
21.	Lumbung Pangan Harapan	20	Satar Mese Barat/ Satar Lenda	2.00 0	5.000	20	4.000
22.	Setia Kawan	20	Satar Mese Barat/ Satar Lenda	2.00 0	5.000	20	4.000
23.	Wae Togong	5	Satar Mese Utara/ Cireng	500	2.500	5	1.000
24.	Watu Barang	5	Satar Mese Utara/ Popo	500	2.500	5	1.000
25.	Kadung	15	Reok Barat/ Kajong	1.50 0	3.750	15	3.000
26.	Lantar 2	15	Reok Barat/Lante	1.50 0	3.750	15	3.000
27.	Mentari Nanu	15	Reok Barat/Sambi	1.50 0	3.750	15	3.000
Jumlah		400	27	40.00 0	100.000	400	80.000

III. Sikka

1.	Meko Tau Muri	50	Tanawawo /Tuwa	5.000	12.500	50	10.000
2.	Mula Muri	20	Tanawawo/Loke	2.000	5.000	20	4.000
3.	Tana Langi	20	Tanawawo/Renggarasi	2.000	5.000	20	4.000
4.	Pasemuri 2	20	Tanawawo/Poma	2.000	5.000	20	4.000
5.	Harum Manis	50	Koting / Koting A	5.000	12.500	50	10.000
6.	Bunga Usaha	10	Koting / Koting D	1.000	2.500	10	2.000
7.	Hiro Heling	10	Waiblama / Werang	1.000	2.500	10	2.000
8.	Kurang Dana	10	Waiblama / Natarmage	1.000	2.500	10	2.000
9.	Klapur Nawuk	10	Waiblama / Ilin Medo	1.000	2.500	10	2.000
10.	Na Mai I	10	Waiblama / Tanarawa	1.000	2.500	10	2.000
11.	Lako Lalong	10	Lela /Kolidetung	1.000	2.500	10	2.000
12.	Sudan Sogor	10	Lela /Du	1.000	2.500	10	2.000
13.	Lanan Depo	10	Lela /Iligai	1.000	2.500	10	2.000
14.	Batu Putih	10	Lela /Korowuwu	1.000	2.500	10	2.000
15.	Tanah Dueng	10	Lela /Baopaat	1.000	2.500	10	2.000
16.	Megu Nora	10	Lela /Watutedang	1.000	2.500	10	2.000



17.	Lewo None	15	Talibura / Lewomada	1.500	3.750	15	3.000
18.	Odang I	15	Talibura /Ojang	1.500	3.750	15	3.000
19.	Tana Tukan I	30	Talibura /Timutawa	3.000	7.500	30	6.000
20.	Hiro Heling	25	Talibura /Nebe	2.500	6.250	25	5.000
21.	Wesinuwa	25	Mego / Gera	2.500	6.250	25	5.000
22.	Tunas Baru II	20	Mego / Wolodhesa	2.000	5.000	20	4.000

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Meten Tion	20	Bola / Wolokoli	2.000	5.000	20	4.000
24.	Gaging Pani	10	Bola / Bola	1.000	2.500	10	2.000
25.	Bunga Nukak	20	Bola / Wolonwalu	2.000	5.000	20	4.000
26.	Mude Menik	10	Bola / Ipir	1.000	2.500	10	2.000
Jumlah		460	26	46.000	115.000	460	92.000

					Terlaksananya pengembangan kakao seluas 1.260 Ha, dengan capaian/ hasil bertambahnya luasan areal pertanaman kakao (1) kabupaten Flores Timur 400 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 40.000 kg, pupuk organik 100.000 kg, fungisida 400 liter, handsprayer 160 unit, pohon pelindung 80.000 batang; (2) Sikka 460 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 46.000 kg, pupuk organik 115.000 kg, fungisida 460 liter, handsprayer 184 unit, pohon pelindung 92.000 batang (3) Manggarai 400 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 40.000 kg, pupuk organik 100.000 kg, fungisida 400 liter, handsprayer 160 unit, pohon pelindung 80.000 batang.
					• Pengembangan Tanaman Kelapa.

Tabel. 5.14. Pengembangan Tanaman Kelapa

No.	Kelompok Tani	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Liter)
	Lembata				
1	Gapoktan Waienga	Lebatukan /Walenga	10	250	15
2	Gapoktan Tapo Langun	Lebatukan/Tapo Langun	20	500	30
3	Gapoktan Merdeka	Lebatukan /Merdeka	10	250	15
4	Gapoktan Taan Tou	Lebatukan / Tapobaran	5	125	7,5
5	Aktasi	Wulandoni /Belobao	15	375	22,5
6	Melati	Wulandoni /Wulandoni	15	375	22,5
7	Gapoktan Tanjung Raja	Wulandoni /Pantai Harapan	15	375	22,5
8	Tunas Harapan	Wulandoni /Atalili	10	250	15
9	Gapoktan Sogonaran	Wulandoni /Atakera	10	250	15
10	Gapoktan Gelekat Lewo	Wulandoni /Leworaja	20	500	30
11	Gapoktan Tawon	Wulandoni /Tapobali	10	250	15
12	Waimatan	Atadei /Ile Kimok	20	500	30



13	Suka Maju	Atadei /Ile Kimok	15	375	22,5
14	Alap Nimo	Atadei /Tubuk Rajan	20	500	30
15	Ina Kari	Atadei /Nubaatalojo	20	500	30
16	Ile Werun	Atadei /Lerek	20	500	30
17	Wainubalolon	Atadei /Lebaata	20	500	30
Jumlah			300	7.500	450

No.	Kelompok Tani	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Liter)
Sikka					
1	Usaha Bersama	Talibura /Darat Gunung	50	1.250	75
2	Tukan Dungan	Talibura /Timutawa	20	500	30
3	Kamboja	Talibura / Darat Pante	20	500	30
4	Karya Tani	Waigete / Egon	20	500	30
5	Kasi Asi	Waigete / Nangatobong	20	500	30
6	Tunas Muda	Waigete / Wairbleler	20	500	30
7	Deru Dede	Talibura / Bangkoor	20	500	30
8	Bunga Nukak	Kewapante / Waiara	20	500	30
9	Tunas Baru	Kewapante / Iantena	25	625	37,5
10	Pliping Bao	Kangae /Watuliwung	20	500	30
11	Dhera Wiro	Paga /Wolowiro	20	500	30
12	Nawuteu	Magepanda /Kolisia	25	625	37,5
13	Wesi Nuwa I	Mego /Gera	20	500	30
Jumlah			300	7.500	450
Sumba Barat Daya					
1	Kasih Sayang	Kodi /Ate Dalo	25	625	37,5
2	Wai Mahi	Kodi /Tanjung Karoso	25	625	37,5
3	Magho Linyo Bersatu	Kodi Utara /Magho Linyo	25	625	37,5
4	Dara Modu	Kodi Utara /Kadu Eta	25	625	37,5
5	Harapan Makmur	Kodi Utara /Kendu Wela	25	625	37,5
6	Bhuka Peka	Kodi Utara /Hameli Ate	25	625	37,5
7	Daha Dede	Kodi Utara /Hameli Ate	25	625	37,5
8	Guna Hari	Kodi Utara /Moro Manduyo	25	625	37,5
9	Kamba Kodi	Kodi Utara /Moro Manduyo	25	625	37,5
10	Duka Milla	Kodi Utara /Mangganipi	21	525	31,5
11	Cahaya Harapan	Kodi Bangedo /Ana Lewe	23	575	34,5
12	Milla Ate	Kodi Balaghar /Kahale	20	500	30
13	Ngindi Ate	Kota Tambolaka /Weelonda	24	600	36
14	Lede Moripa	Loura /Loko Kalada	20	500	30
15	Fajar Tani	Loura /Bondo Boghila	27	675	40,5
Jumlah			360	10.800	540
Alor					
1	Oli Merang	Pantar Barat /Leer	25	625	37,5
2	Manapa Bura	Pantar Barat /Illu	25	625	37,5
3	Amphibi	Pantar Barat /Blangmerang	25	625	37,5
4	Walyang	Pantar Barat Laut / Beangonong	25	625	37,5
5	Baru Mekar	Pantar Tengah /Muriabang	25	625	37,5
6	Suka Maju	Pantar Tengah /Bagang	25	625	37,5



7	Kita Rake	Pantar /Munasely	25	625	37,5
8	Sigogo	Pantar /Pandai	25	625	37,5
9	Nainaa	Pantar / Baolang	25	625	37,5
10	Asabuana	Pantar / Bandar	25	625	37,5

No.	Kelompok Tani	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Liter)	
11	Dolawala	Pantar / Wailawar	25	625	37,5	
12	Asaman	Pantar / Madar	25	625	37,5	
13	Hamilam	Alor Barat Daya / Manatang	25	625	37,5	
14	Ham Hamdi	Alor Barat Daya / Margreta	50	1.250	75,0	
15	Pinmamang	Alor Barat Daya /Tribur	50	1.250	75,0	
16	Ikiraka	Alor Timur / Mausamang	50	1.250	75,0	
17	Buiko	Kabola / Kel. Kabola	25	625	37,5	
Jumlah			360	10.800	540	
No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Liter)	Benih Siap Tanam (Batang)
Timor Tengah Utara						
1	Tunas Harapan	Noemuti /Popnam	25	625	37,5	120
2	Tae Nao	Noemuti /Oenak	25	625	37,5	120
3	Pahballa Nunsena	Noemuti /Noemuti	25	625	37,5	120
4	Tuatena	Noemuti /Oeperigi	25	625	37,5	120
5	KWT Nekmese Oe'nae	Noemuti /Kiuola	25	625	37,5	120
6	Fatunaek	Noemuti /Banfanu	25	625	37,5	120
7	KWT Fobaen Tuan	Noemuti /Banfanu	25	625	37,5	120
8	Tafena Monik	Noemuti /Nifuboke	25	625	37,5	120
9	Faet Moni	Noemuti /Noebaun	25	625	37,5	120
10	KWT Sehati Senfatu	Noemuti /Noebaun	25	625	37,5	120
Jumlah			250	6.283	375	30.000
Malaka						
1	Sinar Mahkota	Kobalima Timur / Alas Selatan	25	625	37,5	3.000
2	Goronto I	Kobalima / Lakekun Utara	12,5	312,5	18,75	1.500
3	Goronto II	Kobalima / Lakekun Utara	12,5	312,5	18,75	1.500
4	Sinar Manehat	Kobalima / Litamali	12,5	312,5	18,75	1.500
5	Guntur I	Kobalima / Litamali	12,5	312,5	18,75	1.500
6	Marlilu I	Malaka Tengah / Barada	10	250	15	1.200
7	Marlilu II	Malaka Tengah / Barada	10	250	15	1.200
8	Marlilu III	Malaka Tengah / Barada	10	250	15	1.200
9	Marlilu IV	Malaka Tengah / Barada	10	250	15	1.200
10	Harapan Marlilu	Malaka Tengah / Barada	10	250	15	1.200
11	Tunas Harapan	Malaka Tengah / Kletek	15	375	22,5	1.800
12	Cinta Saudara	Malaka Tengah / Bakiruk	15	375	22,5	1.800



13	Moris Hamutuk	Malaka Barat / Umatoos	10	250	15	1.200
14	Tasi Ktuik	Malaka Barat / Umatoos	10	250	15	1.200
15	Sinar Kasih Oppa	Malaka Barat / Umatoos	10	250	15	1.200

\

1	2	3	4	5	6	7
16	Sehati	Malaka Barat / Umalor	25	625	37,5	3.000
17	Usaha Tani	Malaka Barat / Rabasa Hain	15	375	22,5	1.800
18	Lazakar	Io Kuefu / Tunabesi	25	625	37,5	3.000
Jumlah			250	6.283	375	30.000

				Terlaksananya pengembangan tanaman kelapa seluas 1.960 Ha, dengan capaian/hasil peremajaan kelapa di kabupaten (1) Lembata 300 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 7.500 Kg, Herbisida 450 liter, Hand Sprayer 90 unit dan Chainsaw 27 unit; (2) Sikka 300 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 7.500 Kg, Herbisida 450 liter, Hand Sprayer 90 unit dan Chainsaw 27 unit, (3) Alor 500 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 15.870 Kg, Herbisida 750 liter, Hand Sprayer 150 unit dan Chainsaw 40 unit; (4) Sumba Barat Daya 360 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 10.800 Kg, Herbisida 540 liter, Hand Sprayer 108 unit dan Chainsaw 29 unit; (5) Timor Tengah Utara 250 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 6.283 Kg, Herbisida 375 liter, Hand Sprayer 75 unit dan Chainsaw 18 unit dan benih siap tanam 30.000 batang (6) Malaka 250 Ha dengan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 6.283 Kg, Herbisida 375 liter, Hand Sprayer 75 unit dan Chainsaw 18 unit dan benih siap tanam 30.000 batang. Terealisasinya kegiatan pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peremajaan tanaman kelapa.
				• Pengembangan Tanaman Tahunan Penyegar Lainnya. - Pengembangan Tanaman Jambu Mete.

Tabel. 5.15. Pengembangan Tanaman Jambu Mete Tahun 2018



No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Orgnk (Kg)	Insektisida (Liter)	Herbisida (Liter)
Timor Tengah Selatan						
1	Oni Maka	Boking /Meusin	20	24.000	60	60
2	Tuntauk To	Boking /Baus	20	24.000	60	60
3	Tun Am	Boking /Boking	20	24.000	60	60
4	Tunas Toibaun	Toianas / Toianas	25	30000.	75	75
5	Tabuaba Nekaf	Toianas / Toianas	25	30.000	75	75
No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Orgnk (Kg)	Insektisida (Liter)	Herbisida (Liter)
6	Tafeun	Toianas /Lobus	25	30.000	75	75
7	Baumasu	Toianas /Lobus	25	30.000	75	75
8	Hetven	Toianas /Tuataum	20	24.000	60	60
9	Tunas Baru	Toianas /Tuataum	20	24.000	60	60
10	Temkuna	Oenino /Oenino	20	24.000	60	60
11	Hau Meni	Oenino /Oenino	15	18.000	45	45
12	Tae Usapi	Oenino /Oenino	15	18.000	45	45
13	Nikis Sufan	Amanuban selatan/ Oekiu	25	30.000	75	75
14	Tunmuni	Amanuban selatan/ Oekiu	25	30.000	75	75
Jumlah			300	360.000	900	900
Alor						
1	Sabar Menanti	Pantar Barat / Leer	25	22.500	56,25	56,25
2	Kasih Sayang	Pantar Barat / Kalondama	25	22.500	56,25	56,25
3	Taume Anuku	Pantar Tengah / Aramaba	25	22.500	56,25	56,25
4	Pasti Jaya	Pantar Tengah / Eka Jaya	25	22.500	56,25	56,25
5	Noum Nuk	Pantar Tengah/Bagang	25	22.500	56,25	56,25
6	Idaman Baru	Alor Timor Laut/ Nailang	25	22.500	56,25	56,25
7	Sunlet	Alor Timor Laut/Kamot	25	22.500	56,25	56,25
8	Dolamang	Alor Tengah Utara / Likwatang	25	22.500	56,25	56,25
9	Tunas Baru	Teluk Mutiara / Fanating	25	22.500	56,25	56,25
10	Tominuku	Mataru / Mataru Selatan	25	22.500	56,25	56,25
11	Tunas Muda	Alor Timur / Kolana Selatan	25	22.500	56,25	56,25
12	They Mama Eh	Kabola / Alila Timur	25	22.500	56,25	56,25
13	Piming Nuku	Pantar / Baolang	25	22.500	56,25	56,25
14	Nokida	Pureman /Purnama	25	22.500	56,25	56,25
15	Doeta Lel	Alor Barat Laut / Oamate	25	22.500	56,25	56,25
16	Day Toh	Alor Barat Laut /Otvai	25	22.500	56,25	56,25
	Jumlah		400	360.000	900	900
Flores Timur						
1	Bedulang	Tanjung Bunga / Sinamalaka	40	48.000	120	120
2	Haba Jone	Tanjung Bunga / Gekeng Derang	40	48.000	120	120
3	Gawerato	Ile Mandiri / Wailolong	40	48.000	120	120
4	Rian Bao	Lewolema /Painapang	40	48.000	120	120
5	Berdikari	Ile Bura /Nurri	40	48.000	120	120
6	Nuhun Puken	Wulanggitang /Klatanlo	15	18.000	45	45
7	Klatanlo	Wulanggitang /Klatanlo	25	30.000	75	75



8	Suka Kerja	Wulanggitang /Klatanlo	15	18.000	45	45
9	Alo Alang	Wulanggitang /Klatanlo	15	18.000	45	45
10	Pai Taan Tou	Wulanggitang /Klatanlo	10	12.000	30	30
11	Bunga Lolon	Solor Timur /Lebao	20	24.000	60	60
12	Wai Gawe	Solor Timur /Liwo	20	24.000	60	60
13	Manu Bera	Solor Selatan /Lemanu	20	24.000	60	60

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Orgnk (Kg)	Insektisida (Liter)	Herbisida (Liter)
14	Herin Nimun	Solor Selatan /Kenere	20	24.000	60	60
15	Ratu Damai	Solor Selatan / Sulengwaseng	20	24.000	60	60
Jumlah			380	456.000	1.140	1.140
Lembata						
1	Paubokol Lestari	Nubatukan /Paobokol	10	11.000	30	30
2	Baitani	Nubatukan /Bakalerek	10	11.000	30	30
3	Lintar Abo	Nubatukan / Lewoleba Selatan	5	5.500	15	15
4	Jati Super	Nubatukan / Waijarang	25	27.500	75	75
5	Waq Uun	Omesuri / Leubatang	15	16.500	45	45
6	Gapoktan Aulesa	Ile Ape Timur /Aulesa	15	5.500	45	45
7	Gapoktan Lamau	Ile Ape Timur /Lamau	5	5.500	15	15
8	Gapoktan Lamawolo	Ile Ape Timur / Lamawolo	30	33.000	90	90
9	Gapoktan Todanara	Ile Ape Timur / Todanara	10	11.000	30	30
10	Gapoktan Jontona	Ile Ape Timur /Jontona	20	22.000	60	60
11	Gapoktan Soga Lewo	Ile Ape Timur/ Waimatan	5	5.500	15	15
12	Gapoktan Baolaliduli	Ile Ape Timur / Baolaliduli	5	5.500	15	15
13	Ena Nore	Buyasuri /Benihading I	15	16.500	45	45
14	Lorata	Buyasuri /Benihading II	20	22.000	60	60
15	Walupang I	Buyasuri /Atawalupang	20	22.000	60	60
16	Gapoktan Dulitukan	Ile Ape /Dulitukan	5	5.500	15	15
17	Belaun Gopak	Ile Ape /Kolontobo	30	33.000	90	90
18	Gapoktan Amakaka	Ile Ape /Amakaka	25	27.500	75	75
19	Pantai Baru	Wulandoni /Pantai Harapan	20	22.00	60	60
20	Balarian	Nagawutung /Bolibean	10	11.000	30	30
Jumlah			300	330.000	900	900
Ende						
1	Jati Grop	Nangapanda / Raporendu	25	30.000	75	75
2	Maurongga	Nangapanda / Raporendu	25	30.000	75	75
3	Asar I G	Nangapanda /Anaraja	25	30.000	75	75
4	Asar II G	Nangapanda /Anaraja	25	30.000	75	75
5	Peri Jogo	Nangapanda /Nggorea	30	36.000	90	90
6	Tausi I	Nangapanda / Sanggarhorho	25	30.000	75	75



7	Tausi II	Nangapanda / Sanggarhorho	25	30.000	75	75
8	To'o Oko II	Nangapanda / Zozosea	25	30.000	75	75
9	Sejati	Nangapanda / Penggajawa	20	24.000	60	60
10	Gae Pawe	Wewaria / Ekoae	30	36.000	90	90

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Orgnk (Kg)	Insektisida (Liter)	Herbisida (Liter)
11	Thosa Ramba	Wewaria / Kelitembu	20	24.000	60	60
12	Mai Sai	Maukaro / Kolikapa	20	24.000	60	60
13	Pangi	Maukaro / Kolikapa	20	24.000	60	60
14	Hasta Karya	Maurole / Aewora	40	48.000	120	120
15	Aku Percaya	Maurole / Wolowau	20	24.000	60	60
16	Araruba	Ende Selatan / Tetandara	25	30.000	75	75
Jumlah			400	480.000	1.200	1.200

Terlaksananya Pengembangan tanaman jambu mete lainnya seluas 1.780 Ha dengan capain/hasil terlaksananya peremajaan tanaman jambu mete di kabupaten : (1) TTS 300 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 17.988 kg, pupuk organik 360.000 kg, insektisida 900 liter, herbisida 900 liter, handsprayer 120 unit, chainsaw 24 unit; (2) Alor 400 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 23.984 kg, pupuk organik 480.000 kg, insektisida 1.200 liter, herbisida 1.200 liter, handsprayer 160 unit, chainsaw 32 unit; (3) Flores Timur 380 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 21.460 kg, pupuk organik 456.000 kg, insektisida 1.140 liter, herbisida 1.140 liter, handsprayer 152 unit, chainsaw 32 unit; (4) Lembata 300 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 18.363 kg, pupuk organik 330.000 kg, insektisida 900 liter, herbisida 900 liter, handsprayer 120 unit, chainsaw 24 unit; (5) Ende 400 Ha dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 23.984 kg, pupuk organik 480.000 kg, insektisida 1.200 liter, herbisida 1.200 liter, handsprayer 160 unit, chainsaw 32 unit.

Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ke kabupaten, konsultasi dan koordinasi peremajaan tanaman jambu mete.

- Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan

Tabel. 5.16. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan Tahun 2018

No	Kecamatan / Desa	Poktan	Luas Lahan (Ha)	Pupuk NPK (Kg)	Pupuk Organik (Kg)	Pesti sida (Liter)	Herbi sida (Liter)	Ajir (Btg)
Sumba Timur								
1	Paberiwai / Praimbana	Harapan Baru	20	1.000	24.000	80	80	2.000
2	Mahu / Wairara	Pahamu Nduma Luri	10	500	12.000	40	40	1.000
3	Mahu / Wairara	Bunga Mawar	10	500	12.000	40	40	1.000
4	Mahu / Lulundilu	Marengga Raing	10	500	12.000	40	40	1.000
5	Mahu / Lulundilu	Andaluri	10	500	12.000	40	40	1.000
6	Mahu / Haray	Lupa Kata Hamu	10	500	12.000	40	40	1.000
7	Mahu / Haray	Himbu Luri	10	500	12.000	40	40	1.000
Jumlah		7	80	4.000	96.000	320	320	8.000

- Terlaksananya pengembangan kemiri sunan di kabupaten Sumba Timur 80 Ha dan dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 4.000 kg, pupuk organik 96.000 kg, insektisida 320 liter, herbisida 320 liter dan ajir 8.000 batang.
- Terlaksananya pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan tanaman kemiri sunan di provinsi dan kabupaten.
- Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan di 4 Lokasi

Tabel. 5.17. Peremajaan Tanaman Jambu Mete di Wilayah PerbatasanTahun 2018

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Organik (Kg)	Insekti sida (Liter)	Herbi sida (Liter)
Belu						
1	Motasaki	Nanaet Dubesi /Nanaet	10	12.000	30	30
2	Weklalenok	Nanaet Dubesi /Dubesi	20	24.000	60	60
3	Bunda	Raihat /Maumutin	10	12.000	30	30
4	Rejeki	Raihat /Toheleten	10	12.000	30	30
5	Karunia	Raihat /Toheleten	10	12.000	30	30
6	Makmur	Raihat /Asumanu	5	6.000	15	15
7	Dadobe	Raihat /Asumanu	5	6.000	15	15
8	Sinar Lakmau	Lasiolat /Dualasi Raiulun	5	6.000	15	15
9	Haliklaran	Lasiolat /Dualasi	5	6.000	15	15
10	Haliketun	Lasiolat /Fatulotu	5	6.000	15	15
11	Klobak III	Lasiolat /Lasolat	5	6.000	15	15
12	Uhawai	Kakuluk Mesak /Jenilu	10	12.000	30	30
13	Asu Koes	Kakuluk Mesak /Leosama	20	24.000	60	60
14	Ritirai 2	Kakuluk Mesak /Dualaus	10	12.000	30	30
15	Hidup Baru	Kakuluk Mesak /Kabuna	10	12.000	30	30
16	Melati	Kakuluk Mesak /Kabuna	10	12.000	30	30
17	Sabers	Tasifeto Timur /Sadi	10	12.000	30	30



18	Sinar Weutu	Tasifeto Timur /Umklaran	10	12.000	30	30
19	Suliren	Tasifeto Timur /Tulakadi	5	6.000	15	15
20	Wekatimun	Tasifeto Timur /Tulakadi	5	6.000	15	15
21	Manukiak	Tasifeto Timur /Fatuba'a	10	12.000	30	30
22	Aitaman	Tasifeto Timur /Manleten	10	12.000	30	30
23	Kita Maju	Tasifeto Timur /Manleten	10	12.000	30	30

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Organik (Kg)	Insekti sida (Liter)	Herbi sida (Liter)
24	Oan Kiak	Tasifeto Timur /Takirin	10	12.000	30	30
25	Aufehan	Tasifeto Timur /Dafala	5	6.000	15	15
26	Dadulu Manaran	Tasifeto Timur /Dafala	5	6.000	15	15
27	Hali Kuda	Tasifeto Timur /Dafala	5	6.000	15	15
28	Trilolok	Tasifeto Timur /Dafala	5	6.000	15	15
29	Rajawali	Tasifeto Timur /Silawan	10	12.000	30	30
30	Wemoruk	Tasifeto Timur /Silawan	10	12.000	30	30
31	Fatu Loro	Tasifeto Timur /Sarabau	10	12.000	30	30
32	Manukakae	Raimanuk /Duakoran	10	12.000	30	30
33	Meun Lafua	Raimanuk /Rafae	10	12.000	30	30
34	Beda rasa	Raimanuk /Teun	10	12.000	30	30
35	Manehat	Raimanuk /Teun	10	12.000	30	30
36	Lahoan	Raimanuk /Tasain	5	6.000	15	15
37	Pelangi Desa	Raimanuk /Tasain	5	6.000	15	15
38	Halimea	Raimanuk /Faturika	10	12.000	30	30
39	Maufuas Suka Maju	Tasifeto Barat /Naekase	10	12.000	30	30
40	Moris Foun	Tasifeto Barat /Naekase	10	12.000	30	30
41	Lekilafia	Tasifeto Barat / Lawalutolus	10	12.000	30	30
42	Oan Kiak Beiloi	Tasifeto Barat / Derokfaturene	10	12.000	30	30
43	Fajar Timur	Tasifeto Barat /Lookeu	10	12.000	30	30
44	Timor Oan Bersatu	Tasifeto Barat / Bakustulama	10	12.000	30	30
45	Sukaer Naruk	Tasifeto Barat /Tukuneno	10	12.000	30	30
Jumlah			400	480.000	1.200	1.200
Kupang						
1	Usi Inmanekan	Fatuleu Barat /Nuanatus	25	30.000	75	75
2	Am Obe	Fatuleu Barat /Nitae	25	30.000	75	75
3	Setia Kasih	Semau /Huilelot	12,5	15.000	37,5	37,5
4	Dael Mesa	Semau /Huilelot	12,5	15.000	37,5	37,5
5	Sehati	Semau /Bokonusan	25	30.000	75	75
6	Harapan	Semau Selatan /Naiken	12	14.400	36	36
7	Mias	Semau Selatan /Naiken	12	14.400	36	36
8	Dalen Mesa	Semau Selatan /Uitiuhana	12	14.400	36	36
9	Langa Poke	Semau Selatan /Uitiuhana	12	14.400	36	36
10	Taleko TOP	Fatuleu /Camplong II	30	36.000	90	90
11	Taleko Monit	Fatuleu /Camplong II	20	24.000	60	60
12	Suka Maju	Nekamese /Oelomin	15	18.000	45	45
13	Usbuku	Nekamese /Tunfeu	10	12.000	30	30
14	Tapin Paku	Taebenu /Baumata Utara	12,5	15.000	37,5	37,5
15	Ikbaun	Taebenu /Baumata Utara	12,5	15.000	37,5	37,5
16	Semangat Baru	Takari /Tuapanaf	30	36.000	90	90



17	Kasih	Takari /Hueknutu	20	24.000	60	60
Jumlah			300	360.000	900	900
Malaka						
1	Troy Harekain	Sasitamen /Builaran	20	24.000	60	60
2	Bei Ida	Laen Manen /Kapitan Meo	10	12.000	30	30
3	Anggrek	Laen Manen /Kapitan Meo	10	12.000	30	30
4	Tani Mandiri	Laen Manen /Kapitan Meo	10	12.000	30	30
No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Pupuk Organik (Kg)	Insekt i sida (Liter)	Herbi sida (Liter)
5	Oenaek	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
6	Kasih Setia	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
7	Mawar	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
8	Nirmala II	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
9	Kamboja	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
10	Nirmala I	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
11	Flamboyan	Laen Manen /Oenaek	10	12.000	30	30
12	Tamusu II	Laen Manen /Tniumanu	15	18.000	45	45
13	Sangkuriang	Laen Manen /Bonibais	10	12.000	30	30
14	Maneak To	Laen Manen /Uabau	10	12.000	30	30
15	Hare Vini	Laen Manen /Uabau	10	12.000	30	30
16	Ina Ama Atuapah	Laen Manen /Uabau	10	12.000	30	30
17	Saen Bikaes B	Botin Leobebe /Babotin Maemina	15	18.000	45	45
18	Looneke	Botin Leobebe /Babotin	20	24.000	60	60
19	Mawar	lo Kufeu /Fatoin	20	24.000	60	60
20	Lian Kmesak	Rinhat /Nabutaek	10	12.000	30	30
21	Niti	Rinhat /Niti	10	12.000	30	30
22	Sinar Haslot 2	Kobalima Timur /Alas Selatan	20	24.000	60	60
23	Marlilu IV	Malaka Tengah /Barada	20	24.000	60	60
24	Tunas Baru	Malaka Tengah /Kakaniuk	10	12.000	30	30
Jumlah			400	480.000	1.200	1.200
Timor Tengah Utara						
1	Oeana	Naibenu /Bakitolas	25	30.000	75	75
2	Letebitimo	Naibenu /Bakitolas	25	30.000	75	75
3	Hidup Baru	Naibenu /Bakitolas	25	30.000	75	75
4	Sinar Kiupenu	Naibenu /Bakitolas	25	30.000	75	75
5	Amnautob	Naibenu /Manamas	25	30.000	75	75
6	Tunas Muda	Naibenu /Benus	25	30.000	75	75
7	Hidup Baru	Naibenu /Namanas	25	30.000	75	75
8	Tua Lel Mese	Insana Fatinesu/Fatinesu A	25	30.000	75	75
9	Kol Abton	Insana Fatinesu/Fatinesu A	25	30.000	75	75
10	Ingin Senang	Insana Fatinesu /Fatinesu A	25	30.000	75	75
11	Usapi Toe Mese	Insana Fatinesu /Fatinesu A	25	30.000	75	75
12	Aileu	Insana Fatinesu /Fatinesu A	25	30.000	75	75
13	Fautbano A	Insana Tengah /Maubesi	25	30.000	75	75
14	Moen Ana	Insana Tengah /Maubesi	25	30.000	75	75
15	Oe Aijao	Insana Tengah /Letmafo	25	30.000	75	75
16	Moenleu	Insana Tengah /Maubesi	25	30.000	75	75
Jumlah			300	360.000	900	900



Terlaksananya pengembangan perkebunan di wilayah perbatasan dengan capaian/hasil terlaksananya peremajaan jambu mete seluas 1.500 Ha di 4 lokasi/kabupaten : (1) Kupang 300 Ha dan dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 17.988 kg, pupuk organik 360.000 kg, insektisida 900 liter, herbisida 900 liter, handsprayer 120 unit, chainsaw 24 unit; (2) Timor Tengah Utara 300 Ha dan dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 23.984 kg, pupuk organik 480.000 kg, insektisida 1.200 liter, herbisida 1.200 liter, handsprayer 160 unit, chainsaw 32 unit; (3) Belu 400 Ha dan dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 23.984 kg, pupuk organik 480.000 kg, insektisida 1.200 liter, herbisida 1.200 liter, handsprayer 160 unit, chainsaw 32 unit; (4) Malaka 400 Ha dan dan bantuan biaya persiapan lahan, pupuk NPK 1.8363 kg, pupuk organik 330.000 kg, insektisida 900 liter, herbisida 900 liter, handsprayer 120 unit, chainsaw 24 unit.

Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ke kabupaten, konsultasi dan koordinasi peremajaan tanaman jambu mete di wilayah perbatasan.

- Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Terlaksananya fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan penyegar dengan capaian/hasil terrealisasinya bantuan pengembangan kelapa seluas 70 Ha dan pengembangan jambu mete seluas 50 Ha masing-masing sebanyak 1 paket.

Bantuan berupa biaya pendropingan/angkut benih jambu mete dari penangkar benih BPTP Litbang di Alok, Kabupaten Sikka ke lokasi pengembangan di Kabupaten Kupang dan biaya pendropingan/angkut benih kelapa dari penangkar benih di Larantuka, Kabupaten Flores Timur ke Kabupaten Lembata dan dari penangkar benih di Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ke seluruh kelompok tani di Kabupaten Sikka.

2) Dukungan Perlindungan Perkebunan

Alokasi anggaranRp. 3.265.555.000,- realisasi Rp.3.216.645.600,-



(98,50%) dengan capain hasil :

- Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan capaian/hasil (1) Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Jambu Mete (JAP) seluas 100 Ha di Kab. Sumba Barat Daya dengan bantuan fungisida 100 liter, trichoderma sp 3.000 kg, pupuk organik 8.000 kg, benih jambu mete siap tanam 1.000 batang serta biaya operasional bagi petani, petugas, aparat desa/kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan; (2) Terlaksananya Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi di Kab. Manggarai Timur seluas 100 Ha dengan bantuan Atraktan/Feromon 25 set/ha 2.500 set, Bahan dan alat pembuatan APH (1 set alat untuk 100 kg/liter) 4 set, Bahan pembuatan pupuk bokashi (dedak, pupuk kandang, molase dan EM4) 50 set dan biaya operasional bagi petani, petugas, aparat desa/kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan.

- Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun.

Penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun, dengan capaian/hasil:

1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Terlaksananya kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan capaian/hasil terealisasinya kegiatan di kelompok tani A'an Doytalel, Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat, Kabupaten Alor berupa Pembangunan embung/penampung air (volume minimal 250 m³) 1 unit, Pengadaan Kambing (22 betina dan 3 jantan) 25 ekor, Pompa air (pompa, selang hisap, selang keluar, dll) 1 set, Instalasi Pipa Air/selang 1 set, Papan Nama 1 buah, Alat lubang biopori 3 buah, Alat pencacah kompos 1 unit, Alat pengayak kompos 1 unit, Mesin diesel 1 unit, Bantuan rumah kmpos 1 unit, Kereta dorong 1 unit, Terpal untuk composting



- 1 set, Decomposer 2 set, Bantuan pembuatan kandang kambing 1 unit.
2. Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon
Terlaksananya Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon dengan capaian/hasil Terealisasinya Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perkebunan Rakyat sebanyak 1 paket di Kabupaten Ngada.
- Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

Tabel. 5.18. Desa Pertanian Organik Berbasis Perkebunan Tahun 2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani
1	Alor	Pantar Tengah	Ekajaya	Pasti jaya
			Tubbe	Biang Wali
			Aramaba	Aramaba
2	Flores Timur	Ile Mandiri	Lewohala	Onet Ehan
			Tiwatobi	Mandiri
			Halakodanuan	Pulo Bele
3	Ende	Wewaria	Wewaria	Muri Sama
		Maurole	Ngalukoja	Mawat
		Kota Baru	Loboniki	Loboniki
4	Sumba Barat Daya	Loura	Pogotena	Mananga Manis
		Kota Tambolaka	Kadipada	Ega Ate 1
5	Ngada	Golewa	Radabata	Papa Wiu
6	Kupang	Fatuleu	Camplong 2	Tithetnao
Jumlah		9	13	13

- Terealisasinya Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan untuk 13 poktan/gapoktan di 13 Desa, 9 kecamatan dan 6 kabupaten.
- Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan dengan capaian/ hasil terlaksananya pemberdayaan petugas pengamat OPT tanaman perkebunan sebanyak 42 orang berupa biaya operasional bagi petugas pengamat hama perkebunan.
 - Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan dengan capaian/ hasil terealisasinya inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan fasilitasi penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan.

- 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
 Alokasi anggaranRp.1.170.750.000,- realisasi Rp.1.169.777.600,-
 (99,92%), dengan capaian/hasil:
- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 Layanan Dukungan manajemen Eselon I dengan capaian/hasil terealisasinya pelayanan dan pembinaan manajemen teknis lainnya berupa administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (Honor operasional satuan kerja), pengelolaan keuangan dan aset pembangunan perkebunan (kegiatan SAI dan pengendalian percepatan pengembalian kredit petani), koordinasi kegiatan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen. perkebunan (operasional TKP dan PLP-TKP 33 Org).
- 4) Pengembangan Tanaman Semusim Rempah.
 Alokasi anggaranRp.9.196.360.000,- realisasi Rp.8.860.367.470,-
 (96,35%), dengan capaian :
- Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya.

Tabel. 5.19.
 Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2018

No.	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Benih Kapas (Kg)	Pupuk Majemuk (Kg)	Pupuk Urea (Kg)
Timor Tengah Selatan						
1	Mesameriba	Amanuban Selatan / Bantum	3	18	300	75
2	Tanae To	Amanuban Selatan /Bena	2	12	200	50
3	Anmanat	Mollo Tengah /Pika	5	30	500	125
4	Sehati	Mollo Tengah /Binaus	2,5	15	250	62,5
5	Saba	Amanuban Tengah /Maunum	4	24	400	100
6	Sehati	Mollo Barat /Salbait	3	18	300	75
7	Bersaudara	Mollo Utara /Netpala	3	18	300	75
8	Mekar Sari	Kie /Oenai	2,5	15	400	62,5
9	Nekemese	Kie /Boti	5	30	500	125
10	Melati	Batu Putih /Hane	2,5	15	400	62,5
11	Permata	Batu Putih /Boentuka	2,5	15	400	62,5
12	Lestari	Kuatnana /Supul	5	30	500	125
13	Musyafir	Kualin /Tuapukas	5	30	500	125
14	Tafnekan	Kolbano /Oetuke	5	30	500	125
Jumlah			50	300	5.000	1.250
Sumba Barat Daya						
1	Kahale Daha	Kodi Balaghar /Penenggo Ede	25	150	2.500	625
2	Kede Kehe	Kodi Balaghar /Tana Mete	25	150	2.500	625
Jumlah			50	300	5.000	1.250

Tabel. 5.20.
 Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2018



No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Jenis Bantuan	Jumlah
Ende					
1	Sa Ate	Lepembusu Kelisoke/ Wologai Timur	15	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida	225 Gram 7.500 Kg 2.250 Kg 750 Kg 750 Kg 15 Liter

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Jenis Bantuan	Jumlah
				Herbisida Keranjang Handsprayer	30 Liter 255 Buah 3 Buah
2	Dau Mbale	Wolokelo / Kelimutu	15	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang Handsprayer	225 Gram 7.500 Kg 2.250 Kg 750 Kg 750 Kg 15 Liter 30 Liter 255 Buah 3 Buah
Manggarai					
1	Satar Pasa	Cibal / Langkas	2	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang	30 Gram 1.000 Kg 300 Kg 100 Kg 100 Kg 2 Liter 4 Liter 34 Buah
2	Golo Lanak	Cibal Barat / Golo Lanak	2	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang	30 Gram 1.000 Kg 300 Kg 100 Kg 100 Kg 2 Liter 4 Liter 34 Buah
3	Bantang Cama	Satar Mese / Langgo	3	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang	45 Gram 1.500 Kg 450 Kg 150 Kg 150 Kg 3 Liter 6 Liter 51 Buah
4	Wejang de Kraeng	Satar Mese / Koak	5	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang	75 Gram 2.500 Kg 750 Kg 250 Kg 250 Kg 5 Liter 10 Liter 85 Buah
5	Tado Jaya	Satar Mese / Tado	5	Benih Pupuk organik ZA SP36 ZK Insektisida Herbisida Keranjang	75 Gram 2.500 Kg 750 Kg 250 Kg 250 Kg 5 Liter 10 Liter 85 Buah
6	Rejo	Satar Mese Barat / Ceka Luju	2	Benih Pupuk organik ZA SP36	30 Gram 1.000 Kg 300 Kg 100 Kg



				ZK	100	Kg
				Insektisida	2	Liter
				Herbisida	4	Liter
				Keranjang	34	Buah
7	Ruwuk Jaya	Satar Mese Barat / Satar Ruwuk	3	Benih	45	Gram
				Pupuk organik	1.500	Kg
				ZA	450	Kg
				SP36	150	Kg
				ZK	150	Kg
				Insektisida	3	Liter
				Herbisida	6	Liter
				Keranjang	51	Buah
No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	Jenis Bantuan	Jumlah	
8	Kasih	Satar Mese Barat / Satar Lenda	3	Benih	45	Gram
				Pupuk organik	1.500	Kg
				ZA	450	Kg
				SP36	150	Kg
				ZK	150	Kg
				Insektisida	3	Liter
				Herbisida	6	Liter
				Keranjang	51	Buah
9	Wae Gogang	Rahong Utara / Bangka Ruang	2	Benih	30	Gram
				Pupuk organik	1.000	Kg
				ZA	300	Kg
				SP36	100	Kg
				ZK	100	Kg
				Insektisida	2	Liter
				Herbisida	4	Liter
				Keranjang	34	Buah
10	Nisang Nai	Rahong Utara / Buar	2	Benih	30	Gram
				Pupuk organik	1.000	Kg
				ZA	300	Kg
				SP36	100	Kg
				ZK	100	Kg
				Insektisida	2	Liter
				Herbisida	4	Liter
				Keranjang	34	Buah
11	Sambe Geong	Rahong Utara / Benteng Tubi	1	Benih	15	Gram
				Pupuk organik	500	Kg
				ZA	150	Kg
				SP36	50	Kg
				ZK	50	Kg
				Insektisida	1	Liter
				Herbisida	2	Liter
				Keranjang	17	Buah

Tabel. 5.21. Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2018

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	NPK (Kg)	Pestisida (Liter)	Benih (Btg)
Manggarai Barat						
1	Kasih Sayang	Kuwus Barat /Tueng	20	2.400	20	1.300
2	Ndiuk I	Kuwus Barat /Golo Lewe	20	2.400	20	1.300
3	Ingin Maju	Kuwus Barat /Wajur	20	2.400	20	1.300
4	Lawi	Kuwus Barat /Sompang Kolang	20	2.400	20	1.300
5	Suka Maju	Kuwus Barat /Kolang	20	2.400	20	1.300
Jumlah			100	12.000	100	6.500
Manggarai Timur						
1	Weri Waso	Poco Ranaka / Kel. Mandosawu	25	3.000	25	1.625
2	Maju Bersama	Poco Ranaka / Kel. Mandosawu	25	3.000	25	1.625
3	Wela Rana	Poco Ranaka /Golo Lobos	25	3.000	25	1.625
4	Mandiri	Poco Ranaka /Golo Lobos	25	3.000	25	1.625



Jumlah			100	12.000	100	6.500
Manggarai						
1	Momang Tau	Wae Ri'i /Golo Watu	13	1.560	13	1.690
2	Gapoktan Bantang Cama	Wae Ri'i /Lalong	15	1.800	15	1.950
3	Reje Leleng	Lelak /Ndiwar	5	600	5	650
4	Nyata Karya	Lelak /Pong Umpu	2	240	2	260
5	Kamboja	Lelak /Gelong	3	360	3	390

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	NPK (Kg)	Pestisida (Liter)	Benih (Btg)
6	Kuwu Koe	Cibal /Nenu	5	600	5	650
7	Sesa	Cibal /Kel. Pagal	5	600	5	650
8	Liang Lanos	Cibal Barat /Compang Cibal	5	600	5	650
9	Bunga Rua	Satar Mese /Pongkor	5	600	5	650
10	Wae Pitu	Satar Mese /Umung	5	600	5	650
11	Ara Koe	Satar Mese /Ponggeok	5	600	5	650
12	Niang Golo	Satar Mese Utara /Kole	50	6.000	50	6.500
13	Neceng	Satar Mese Utara /Ling	15	1.800	15	1.950
14	Sadar Usaha	Satar Mese Utara /Nao	20	2.400	20	2.600
15	Ca Nai	Satar Mese Utara /Cireng	20	2.400	20	2.600
16	Wela Waso	Ruteng /Rai	5	600	5	650
17	Compang Cumbi II	Ruteng /Cumbi	5	600	5	650
18	Ca Nai	Ruteng /Compang Namut	5	600	5	650
19	Naga Renda	Ruteng /Bea Kakor	5	600	5	650
20	Bantang Cama	Ruteng /Benteng Kuwu	7	840	7	910
Jumlah			200	24.000	200	13.000
Nagekeo						
1	Sehati	Mauponggo /Kotagana	13	1.560	13	1.690
2	Jaga Sama	Mauponggo /Kotagana	25	3.000	25	3.250
3	P3A Watu Manu	Mauponggo /Keliwatulewa	12	1.440	12	1.560
4	Sama Fonga	Mauponggo /Keliwatulewa	25	3.000	25	3.250
5	Tonga Nanga	Mauponggo /Aewoe	25	3.000	25	3.250
Jumlah			100	12.000	100	6.500

Tabel. 5.22. Perluasan Tanaman Cengkeh Tahun 2018

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	NPK (Kg)	Pestisida (Liter)	Benih (Btg)
Manggarai						
1	Wela Woja	Wae Ri'i /Bangka Jong	15	1.800	15	1.950
2	Golo Ntorang	Wae Ri'i /Golo Mendo	15	1.800	15	1.950
3	Keor Kole	Wae Ri'i /Ndehes	15	1.800	15	1.950
4	Putra Ngeri	Wae Ri'i /Satar Ngkeling	10	1.200	10	1.300
5	Mekar Jaya	Wae Ri'i /Satar Ngkeling	10	1.200	10	1.300
6	Sambung Rasa	Wae Ri'i /Wae Mulu	10	1.200	10	1.300
7	Wae Wako	Wae Ri'i /Bangka Kenda	15	1.800	15	1.950
8	Gapoktan Bantang Cama	Wae Ri'i /Ranggi	20	2.400	20	2.600
9	Watu Ranggi	Wae Ri'i /Compang	10	1.200	10	1.300
10	Bengkang Indah	Wae Ri'i /Ndehes	11,50	1.380	11,50	1.495



11	Lonto Torok	Lelak /Lentang	15	1.800	15	1.950
12	Lawang	Lelak /Lentang	5,50	660	5,50	715
13	Karot Bersatu	Lelak /Bangka Tonggur	6	720	6	780
14	Ca Nai	Lelak /Ketang	7	840	7	910
15	KWT Wae Ratung	Cibal /Kentol	5	600	5	650
16	Gapoktan Ntangis Bere	Cibal Barat /Bere	10	1.200	10	1.300
17	Devisa	Cibal Barat /Bere	10	1.200	10	1.300

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	NPK (Kg)	Pestisida (Liter)	Benih (Btg)
18	Keker Caca	Cibal Barat /Compang Cibal	10	1.200	10	1.300
19	Sinar Pagi	Satar Mese /Pongkor	15	1.800	15	1.950
20	Bunga Mawar	Satar Mese /Wewo	10	1.200	10	1.300
21	Golo Mando	Sater Mese /Langgo	10	1.200	10	1.300
22	Moeng Mose	Satar Mese /Koak	10	1.200	10	1.300
23	Semangat Baru	Satar Mese /Koak	10	1.200	10	1.300
24	Wela Welu	Satar Mese /Koak	10	1.200	10	1.300
25	Bangka Putuk	Rahong Utara /Pong Lengor	20	2.400	20	1.300
26	Bantang Cama Galang	Rahong Utara /Pong Lengor	15	1.800	15	1.950
Jumlah			300	36.000	300	39.000
Manggarai Barat						
1	Maju Terus	Kuwus Barat /Compang Kules	10	1.200	10	1.300
2	Wol Maju	Kuwus Barat /Compang Kuleh	10	1.200	10	1.300
3	Kotok Maju	Kuwus Barat /Compang Kuleh	10	1.200	10	1.300
4	Ayo Maju	Kuwus Barat /Compang Kuleh	10	1.200	10	1.300
5	Maju Bersama	Kuwus Barat /Wajur	15	1.800	15	1.950
6	Bersatu Maju	Kuwus Barat /Wajur	15	1.800	15	1.950
7	Dampul	Kuwus Barat /Golo Lewe	15	1.800	15	1.950
8	Ngalo I	Kuwus Barat /Tueng	15	1.800	15	1.950
9	Kudi Keru	Ndoso /Ndoso	15	1.800	15	1.950
10	Watu Motang Maju	Ndoso /Momol	20	2.400	20	2.600
11	Watu Motang Bersatu	Ndoso /Momol	20	2.400	20	2.600
12	Momang Koe	Ndoso /Pateng Lesu	20	2.400	20	2.600
13	Melati	Ndoso /Pong Narang	10	1.200	10	1.300
14	Pajo	Ndoso /Raka	15	1.800	15	1.950
15	Waelawar	Ndoso /Tehong	10	1.200	10	1.300
16	Compang Kasong	Ndoso /Kasong	10	1.200	10	1.300
17	Tenang Mawe	Macang Pacar /Golo Lajang	5	600	5	650
18	Sahabat	Macang Pacar /Golo Lajang Bara	5	600	5	650
19	Momang Koe	Pacar / Lewat	20	2.400	20	2.600
20	Suka Maju	Sano Nggoang /Sano Nggoang	15	1.800	15	1.950
21	Suka Maju	Mbeliling /Tondong Belang	5	600	5	650
22	Bantang Cama	Mbeliling /Tondong Belang	5	600	5	650
23	Lamba Lodek	Walak /Pong Welak	10	1.200	10	1.300



24	Maju Bersama	Welak /Rehak	10	1.200	10	1.300
25	Harapan Jadi III	Lembor /Pondo	15	1.800	15	1.950
Jumlah			300	36.000	300	39.000
Nagekeo						
1	Papa Laka	Boawae /Wea Au	11	1.320	11	1.430
2	Sedang Mekar	Boawae /Wea Au	10,5	1.260	10,5	1.365
3	Molo Miu	Boawae /Mulakoli	10	1.200	10	1.300
4	Obo Tiwu	Boawae /Kelimado	5	600	5	650

No	Poktan	Kecamatan / Desa	Luas (Ha)	NPK (Kg)	Pestisida (Liter)	Benih (Btg)
5	Maju Bersama	Boawae /Wolowea Timur	5	600	5	650
6	Sama Rasa	Boawae /Wolowea Timur	9	1.080	9	1.170
7	Obo Bengi	Boawae /Wolowea Timur	7	840	7	910
8	Niko Nako	Boawae /Wolowea Timur	9	1.080	9	1.170
9	Gapoktan Raja Timur	Boawae /Raja Timur	8,9	1.068	8,9	1.157
10	Gapoktan Solo	Boawae /Solo	10	1.200	10	1.300
11	Sawoe	Boawae /Rowa	8,9	1.068	8,9	1.157
12	Ngusa Ngema	Wolowae /Natatoto	10	1.200	10	1.300
13	Pama Imu	Wolowae /Natatoto	18	2.160	18	2.340
14	Antana	Wolowae /Natatoto	7,2	864	7,2	936
15	Sama Rasa	Wolowae /Natatoto	14	1.680	14	1.820
16	Sepakat	Wolowae /Natatoto	7	840	7	910
17	Mitra	Wolowae /Natatoto	14,7	1.764	14,7	1.911
18	Mae Ghewo	Nangaroro/Pagomogo	15	1.800	15	1.950
19	Mesu Kasi	Nangaroro /Pagomogo	20,5	2.460	20,5	2.665
20	Tani Kasi	Nangaroro /Woedoa	7,5	900	7,5	975
21	Tani Abadi	Nangaroro /Kotakeo I	6,5	780	6,5	845
22	Too Jogho	Nangaroro /Woedoa Dusun	15	1.800	15	1.950
23	Nesi Susa	Nangaroro /Woedoa	20,3	2.436	20,3	2.639
Jumlah			250	30.000	250	32.500
Manggarai Timur						
1	Sinar Tani I	Borong /Compang Tenda	30	3.600	30	3.900
2	Pesi 1	Poco Ranaka /Golo Ndari	30	3.600	30	3.900
3	Mbelar	Poco Ranaka /Bangka Leleng	30	3.600	30	3.900
4	Bajar I	Poco Ranaka /Bangka Kuleng	30	3.600	30	3.900
5	Ca Nai	Poco Ranaka Timur /Golo Lero	30	3.600	30	3.900
6	Mekar Karya	Rana Mese /Lalang	30	3.600	30	3.900
7	Baeng Koe	Rana Mese /Golo Meleng	30	3.600	30	3.900
8	Wae Gio 1	Elar /Haju Ngendong	30	3.600	30	3.900
9	Sinar Pagi	Kota Komba /Golo Meni	30	3.600	30	3.900
10	Solider	Kota Komba /Rana Mbata	30	3.600	30	3.900
Jumlah			300	36.000	300	39.000

					• Pengembangan Tanaman Semusim, dengan capaian/hasil (1) terlaksananya penanaman tanaman semusim/kapas di



				kabupaten Kabupaten TTS 13 Ha dan Kabupaten Sumba Barat Daya 100 Ha (paket Bantuan : Benih 78 Kg, Pupuk majemuk 2.600 Kg, Pupuk urea 2.600 Kg); (2) terlaksananya Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Semusim/kapas sebanyak 30 orang petani; (3) tersedianya dana Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.
				• Pengembangan Tanaman Rempah, dengan capaian/hasil (1) terlaksananya Intensifikasi Tanaman Rempah/Cengkeh di Kabupaten Ngada seluas 100 Ha dan Kabupaten Manggarai seluas 100 Ha (paket bantuan Pupuk NPK 16.500 Kg, Gunting pangkas 200 buah. Pestisida 100 Liter, Knapsack Sprayer 50 unit); (2) terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Rempah di Kabupaten Alor, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur; (3) terlaksananya kegiatan Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tanaman Semusim dan Rempah.
				• Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering, dengan capaian hasil (1) terlaksananya Perluasan Tanaman Rempah/Cengkeh di Kabupaten Alor 100 Ha, Kabupaten Manggarai Timur 100 Ha dan Kabupaten Manggarai Barat 200 Ha (paket bantuan : Ajir 20.000 buah, Tanaman pelindung 11.000 batang, Benih cengkeh 11.000 batang, Pupuk organik 34.000 Kg); (2) terlaksananya kegiatan Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
				• Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan capaian/hasil tersedianya alat dan mesin berupa pengadaan pompa air 2 unit berlokasi di provinsi, traktor di Kab. Manggarai Barat 1 unit, traktor di Kabupaten SBD 1 unit.
			5)	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
				Alokasi anggaran Rp.1.223.885.000,- realisasi Rp.1.197.375.528,- (97,83%) dengan capaian/hasil :
				- Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan. - Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan.

				- Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan.
				• Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan, dengan capaian/hasil (1) tersedianya alat pascapanen kopi di Kabupaten Ngada (1 unit Huller, 1 unit pulper, 1 unit Timbangan Duduk, 20 unit Para-para, 10 unit Terpal dan 1 unit bangunan UPH); (2) alat pascapanen kopi di Kabupaten Manggarai Timur (1 unit Huller, 1 unit pulper, 1 unit Timbangan Duduk, 20 unit Para-para, 20 unit Terpal); (3) alat pascapanen kopi di Kabupaten Alor (1 unit Huller, 1 unit pulper, 1 unit Timbangan Duduk, 20 unit Para-para, 20 unit Terpal); (4) alat pascapanen kopi di Kabupaten Flores Timur (1 unit Huller, 1 unit pulper, 1 unit Timbangan Duduk, 20 unit Para-para, 20 unit Terpal). • Fasilitasi Pembinaan Teknis Pascapanen Komoditas Perkebunan, dengan capaian/hasil terlaksananya Pertemuan teknis petani kopi di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Alor dan Kabupaten Flores Timur.
				6) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
				Alokasi anggaran Rp.17.242.753.000,-dengan realisasi anggaran Rp.16.580.550.718,- (96,16%) dengan capaian/ hasil :
				• Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan, dengan capaian/hasil : (1) terlaksananya Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan kebun induk tanaman kelapa seluas 5 Ha di provinsi dan kebun induk kopi di Kabupaten Manggarai Timur seluas 2 Ha, Pembenihan tanaman kopi, Pembenihan tanaman kakao, Pembenihan tanaman kelapa dan Pembenihan tanaman jambu mente; (2) Pemeliharaan, penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan : Pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mente tahun ke 1 di Kabupaten Alor seluas 5 Ha, Pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mente tahun ke 4 di Kabupaten Sumba Tengah seluas 5 Ha, Pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke 1 di Kabupaten Sikka seluas 10 Ha, Pemeliharaan kebun induk tanaman jambu kopi di Kabupaten Ngada seluas 2 Ha, Pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke 4 di

				Kabupaten Flores Timur seluas 5 Ha, Pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke 3 di Kabupaten Flores Timur seluas 5 Ha dan Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa seluas 1 Ha di Provinsi; (3) Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan : Pengawalan pembangunan kebin induk kopi di Kabupaten Manggarai Timur, Pengawalan pembangunan kebin induk kopi di Provinsi, Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih kopi siap tanam di Provinsi, Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih kakao siap tanam, Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih kelapa siap tanam dan Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih jambu mente siap tanam.
				• Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan, dengan capaian/hasil : (1) terlaksananya Fasilitasi pembinaan, pengawasan dan sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan melalui kegiatan Sertifikasi dan pengawasan dan mutu benih tanaman perkebunan, Rapat koordinasi teknis perbenihan tanaman perkebunan dan Fasilitasi penilaian varietas tanaman perkebunan; (2) terlaksananya Pembinaan kelembagaan usaha produksi dan pengawasan benih tanaman perkebunan.
			c.	Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
				Alokasi anggaran Rp.68.072.690.000,- realisasi Rp.64.377.841.123,- (94,57%), melalui kegiatan :
				1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
				Alokasi anggaran Rp.9.453.000.000,- realisasi Rp.9.276.762.890,- (98,14%) dengan capaian/hasil :
				• Jaringan Irigasi Tersier

Tabel. 5.23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2018

Kabupaten	Kecamatan	Desa	P3A/GP3A Poktan/Gapoktan	Luas (Ha)
Timor Tengah Selatan		Bena	Tunmuni	150
			Lakpetu	150
	Amanuban	Pello	Bersama	200



	Selatan			
Rote Ndao	Rote Timur	Matasio	Nusa Dua	
			Rajawali	
		Matanaen	Pateilen	
	Pantai Baru	Tungganamo	Ndeneana	
		Edaledo	Nesuingu	
			Teik Esa	
	Lobalain	Tuanatuk	Ita Esa	
			Falioli	
		Kuli	Faifua	
Nagekeo	Aesesa	Helebeik	Namahena	
		Aeramo	P3A KM I.4 Kiri	65
		Lape	P3A KM II.2 Kanan	65
		Marapokot	Obor Baru I	45
			P3A KM II.3 Kiri	65
		Tongguramba ng	Tetus Mose I	65
			Sadar Tani III	50
	Danga		P3A KM I Kanan	50
			P3A Mia Mawe	40
Manggarai Timur	Boawae	Raja	P3A Natabhada	30
	Mauponggo	Selalejo Barat	P3A Mabhapanda	25
	Poco Ranaka	Nggalak Leleng	Pau	
		Golo Lobos	Wela Ros	
	Borong	Kota Ndora	Sepakat li	
		Rana Loba	Sinar Tani	
		Nanga Labang	Sinar Timur	
			Purnama I	
			Purnama II	
	Kota Komba	Watu Nggene	Wae Lengga II	
			Padarambu II	
Manggarai Barat	Sano Nggoang	Golo Kempo	Limbung	
		Wae Sano	Sedang Tumbuh	
	Lembor	Pong Majok	Dempol	
	Macang Pacar	Loha	Bantang Cama Cowang	
		Golo Lajang	Tuwa Nenes	
		Pong Kolong	Mawar	
			Dengka Nai	
	Welak	Semang	Wae Rotok	
	Kuwus	Tueng	Kasi Asi	
			Kasih Sayang	
		Kolang	Maju Bersama	
			Wae Poke	
		Golo Lewe	Ndiuk I	
			Muang	
		Compang Kules	Wol li	

Hasil yang dicapai : (1) terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 2.500 Ha di kabupaten TTS 500 Ha, Rote



Ndao 500 Ha, Nagekeo 500 Ha; Manggarai Timur 500 Ha dan Manggarai Barat 500 Ha.

- Pengembangan Sumber Air, hasil yang dicapai : (1) terlaksananya kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur berjumlah 14 paket (pembelian pompa air, pekerjaan bak tampung, pekerjaan rumah mesin pompa dan genset, pembelian pipa distribusi, pekerjaan galian tanah) di Kabupaten; (2) terlaksananya kegiatan Pengembangan irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur berjumlah 6 paket (paket (pembelian pompa air, pekerjaan bak tampung, pekerjaan rumah mesin pompa dan genset, pembelian pipa distribusi, pekerjaan galian tanah) di kabupaten.
- Pembangunan Embung Pertanian, hasil yang dicapai : (1) terlaksananya pembangunan Embung Pertanian dalam mendukung tanaman pangan berjumlah 25 unit, untuk Kota Kupang 1 unit, kabupaten TTS 2 unit, TTU 2 unit, Malaka 1 unit, Rote Ndao 2 unit, Sabu Raijua 1 unit, Alor 2 unit, Flores Timur 2 unit, Ende 2 unit, Nagekeo 2 unit, Manggarai Timur 2 unit, Manggarai 2 unit.

2) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Alokasi anggaran Rp.7.567.200.000,- realisasi Rp.5.841.725.000,- (77,20%), capaian/hasil :

- Cetak Sawah, dengan capaian/hasil terlaksananya kegiatan cetak sawah baru di Provinsi NTT seluas 400 Ha atau 77,22%.

Tabel. 5.24. Realisasi Cetak Sawah Baru Tahun 2018

Kabupaten	Rencana Perluasan (Ha)	Realisasi (Ha)	Realisasi Fisik (%)
Kupang	200	120	60
Alor	100	100	100
Manggarai Barat	40	40	100
Sumba Timur	60	60	100
Jumlah	400	320	77,22

- Fasilitasi Teknis Dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan Dan Perlindungan Lahan Pertanian, dengan capaian/hasil terfasilitasinya layanan operasional bagi petugas kabupaten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin



Pertanian.

Anggaran dialokasikan sebesarRp.35.987.250.000,- realisasi sebesar Rp.35.264.755.480,- (97,99%) dengan capaian/hasil:

- Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen dengan capaian/hasil :
 - Alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan sebagai berikut :

Tabel. 5.25. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Tanaman Pangan Tahun 2018

Kabupaten	TR 2	PA	Rice Transplanter	Hand Sprayer	Alat Tanam Jagung
Kota Kupang	3	16	-	28	-
Kupang	18	38	6	55	25
Timor Tengah Selatan	14	40	1	50	-
Timor Tengah Utara	15	26	2	55	28
Belu	18	26	3	46	30
Malaka	30	17	5	45	-
Rote Ndao	31	42	-	67	20
Sabu Raijua	12	29	-	55	15
Alor	13	39	-	63	14
Lembata	7	20	-	47	16
Flores Timur	13	36	7	49	22
Sikka	11	37	2	50	25
Ende	13	31	-	45	12
Nagekeo	38	33	3	48	-
Ngada	55	48	1	78	-
Manggarai Timur	40	55	-	65	21
Manggarai	28	27	-	64	-
Manggarai Barat	52	35	-	66	20
Sumba Timur	32	40	1	65	25
Sumba Tengah	14	27	6	45	-
Sumba Barat	18	32	3	48	20
Sumba Barat Daya	14	35	-	56	45
Jumlah	489	729	40	1.190	338

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedia dan tersalurnya pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan, dengan rincian Traktor Roda 2 (TR2) berjumlah 489 unit untuk poktan dan gapoktan di 22 kabupaten/kota; Pompa Air berjumlah 729 unit untuk poktan dan gapoktan di 22 kabupaten/kota; Rice Transplanter (Alat Tanam Padi) berjumlah 40 unit untuk poktan dan gapoktan di 12 kabupaten; Hand Sprayer berjumlah 1.190 unit untuk poktan dan gapoktan di 22 kabupaten/kota dan Alat tanam Jagung berjumlah 338 unit



untuk poktan dan gapoktan di 15 kabupaten.

- Alat mesin pertanian pra panen hortikultura sebagai berikut:

Tabel. 5.26. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Hortikultura Tahun 2018

Kabupaten	Cultivator (Unit)
Kupang	7
Timor Tengah Selatan	5
Belu	5
Malaka	10
Rote Ndao	15
Sabu Raijua	5
Flores Timur	10
Ende	15
Ngada	10
Manggarai Barat	10
Sumba Timur	10
Sumba Tengah	5
Sumba Barat Daya	7
Jumlah	112

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedia dan tersaluranya pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen hortikultura berupa Cultivator yang digunakan sebagai sarana pengolahan tanah berjumlah 112 unit yang diperuntukan bagi poktan dan gapoktan di 13 kabupaten.

- Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan capaian/hasil:terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasikegiatan lingkup Ditjen PSP berupa biaya operasional provinsi dan 22 kabupaten/kota selama 12 bulan layanan (2) terlaksananya bantuan biaya operasional berupa bahan bakar untuk mobilisasi alsintan bagi TNI (Kodim);
- d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Alokasi anggaran Rp.9.154.840.000,- realisasi Rp.8.560.321.082,- (93,51%) dengan capaian/hasil :

- Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan dengan hasil terlaksananya pemantauan dan evaluasi administrasi pengelola dana tugas pembantuan di provinisi dan operasional dan dukungan kegiatan lingkup PSP di 22 kab/kota selama 12 bulan layanan (honor pengelola keuangan dan administrasi satker).



- Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS dengan capaian/hasil terlaksananya pendampingan aparat mendukung UPSUS pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai berupa biaya intensif operasional aparat TNI (Danrem, Kasrem, Kasiter Korem, Pakurem, Pasi bidang Wanmil Korem, Pasi Bidang Bakti Korem) serta biaya operasional bagi Brigade Alsintan selama 12 bulan layanan.
- e. Fasilitas Pupuk dan Pestisida.
Alokasi anggaran Rp.4.631.600.000,- realisasi Rp.4.328.276.671,- (93,45%) dengan capaian/hasil :
Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani dengan capaian/hasil terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dan tersedianya data hasil proses verifikasi serta validasi RDKK Pupuk Bersubsidi di 22 kabupaten/Kota selama 12 bulan layanan
- f. Fasilitas Pembiayaan Pertanian.
Alokasi anggaran Rp.1.278.800.000,- realisasi Rp.1.106.000.000,- (86,49%) dengan capaian/hasil :
Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian dengan capaian/hasil terfasilitasinya layanan pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan dan permodalan pertanian guna membiayai kegiatan Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembiayaan Pertanian Lingkup Ditjen PSP selama 12 bulan bagi 22 kabupaten/kota.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

- Satuan Kerja 249158 (Bidang Tanaman Pangan) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Satuan Kerja 249159 (Bidang Hortikultura) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Satuan Kerja 249160 (Bidang Perkebunan) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Satuan Kerja 249165 (Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.



5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

- Satuan Kerja 249158 Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Jumlah Pegawai 24 Orang
 2. Kualifikasi Pendidikan
S2 : 2 Orang; S1 : 17 Orang; D3 : 2 Orang; SMA : 3 Orang
 3. Pangkat dan Golongan
Golongan IV/b : 1 orang; III/d : 4 orang; III/c : 3 orang; III/b : 6 orang;
III/a : 5 orang; II/d : 1 orang; Tenaga Honorer : 4 orang
- Satuan Kerja 249159 Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 1. Jumlah Pegawai 24 orang
 2. Kualifikasi Pendidikan
S2 : - orang; S1 : 17 org; D3 : - org; SMA : 6 orang; SMP : 1 orang
 3. Pangkat dan Golongan
Golongan IV/b : 1 orang; III/d : 3 orang; III/c : 3 orang; III/b : 7 orang;
III/a : 3 orang; II/c : 2 orang; II/a : 1 orang; Tenaga Honorer : 4 orang
- Satuan Kerja 249160 Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Jumlah Pegawai 21 Orang
 2. Kualifikasi Pendidikan
S2 : 1 Orang; S1 : 12 Orang; D3 : 2 Orang; SMA : 6 Orang
 3. Pangkat dan Golongan
Golongan IV/b : 1 Orang; III/d : 3 Orang; III/c : 4 Orang; III/b : 3
Orang; III/a : -Orang; II/d : 3 Orang; II/c : 3 Orang; II/a ; 1 Orang;
Tenaga Honorer : 4 Orang
- Satuan Kerja 249165 Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Jumlah Pegawai 29 Orang
 2. Kualifikasi Pendidikan
S2 : 2 Orang; S1 : 17 Orang; D3 : 2 Orang; SMA : 8 Orang
 3. Pangkat dan Golongan
Golongan IV/b : - Orang; III/d : 6 Orang; III/c : 8 Orang; III/b : 2
Orang; III/a : 3 Orang; II/d : 1 Orang; II/c : 4 Orang; Tenaga Honorer :
4 Orang

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan:Mencukupi.

7. Permasalahan dan Solusi:Tidak ada

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:Tidak ada.



II. DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Dasar Hukum.

- DIPA Nomor :SP DIPA-018.08.4.249161/2018, Tgl. 05 Desember 2017 (PSP TP)
- DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.249161/2018, Tgl. 05 Desember 2017 (PKH TP).

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI;
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

3. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- a. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.212.000.000,-realiasi Rp. 3.212.000.000,- (100%). Melalui kegiatan:
 - 1) Pengembangan Sumber Air.
Alokasi Anggaran Rp.2.688.000.000,- realiasi Rp.2.688.000.000,- (100%). Realisasi Fisik 100%.
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi.
Alokasi Anggaran sebesar Rp.524.000.000,- realiasi Rp.524.000.000 (100%), Realisasi Fisik 100%.
- b. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
Alokasi anggaran sebesar Rp11.106.787.000,-. Realisasi anggaran Rp. 11.004.915.000,-. Melalui kegiatan :
 - 1) Peningkatan produksi pakan ternak,
Alokasi Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realiasi Rp.15.000.000,- (100%).Realisasi Fisik 100%.
 - 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
Alokasi Anggaran sebesar Rp.4.940.700.000,- realiasi Rp.4.931.874.650,- (99,82%).Realisasi Fisik 100%.
 - 3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak



Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.448.052.000,- realiasi Rp.5.355.491.500,- (98,30%).Realisasi Fisik 100%.

- 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Alokasi Anggaran sebesar Rp.337.435.000,- realiasi Rp.337.435.000,- (100%).Realisasi Fisik 100%.Realisasi Fisik 100%.

- 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Alokasi Anggaran sebesar Rp.188.000.000,- realiasi Rp.187.867.750,-(99,93%).Realisasi Fisik 100%.

- 6) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak,

Alokasi Anggaran sebesar Rp.177.600.000,- realiasi Rp.177.246.100,- (99,80%). Realisasi Fisik 100%.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- 1) Dokumen laporan Pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan berupa;
- 2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui Vaksinasi Rabies 226.972 ekor anjing di daratan Flores dan lembata, Vaksinasi Brucellosis 15.849 dan vaksinasi Anthrax 73.000 pada ternak sapi 22 Kabupaten/Kota se NTT;
- 3) Penyediaan benih dan bibit untuk optimalisasi reproduksi sebanyak 25.000 akseptor;
- 4) Sosialisasi dan advokasi pengendalian pemotongan betina produktif terhadap stakeholder di Provinsi NTT berupa 1 dokumen laporan;
- 5) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berupa 1 dokumen laporan dan buku statistik peternakan;
- 6) Pengembangan sumber air sebanyak 21 unit;
- 7) Pemantauan dan evaluasi tugas pembantuan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten: Kupang, TTS, Belu, Sumba Timur, Rote Ndao, Ngada dan Manggarai Timur.

4. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur perakhir Desember 2018 sebanyak 176 orang, dengan kualifikasi:

a. Latar Belakang Pendidikan:

SD = 23orang; SLTP = 5 orang; SLTA = 36 orang; Diploma = 17 orang; Sarjana = 68 orang; Dokter Hewan = 17; Magister = 10 orang; Doktor = - orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV/d = 1 orang; Golongan IV/c = 1 orang; Golongan IV/b = 5 orang; Golongan IV/a = 12 orang; Golongan III/d = 39orang; Golongan III/c = 21 orang; Golongan III/b = 38 orang; Golongan III/a = 10 orang; Golongan II/d = 7 orang; Golongan II/c = 10 orang; Golongan II/b = 17 orang; Golongan II/a = 8 orang; Golongan I/d = 5 orang; Golongan I/c = 3 orang; Golongan I/b = 4 orang; Golongan I/a = 8orang.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan: Cukup memadai.

7. Permasalahan dan Solusi: Tidak ada.

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: Tidak ada.

III. DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Dasar Hukum.

- DIPA nomor: 027.03.4.249167/2018 tanggal 05 Desember 2017

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

- Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Alokasi anggaran: Rp.9.364.704.000,-Realisasi: Rp.7.836.219.486,- (83.68%)melalui kegiatan:

a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan alokasi anggaran dengan capaian (hasil) :

- 1) Tersedianya rumah sederhana bagi warga komunitas adat terpencil (KAT).

- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 unit bagi 30



kk.

- Lokasi di Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amjoang Barat Kabupaten Kupang sebanyak 40 unit bagi 40 kk.
- 2) Tersedianya bantuan Stimulan Peningkatan kualitas hunian,
- Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 25 unit bagi 25 kk.
 - Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU sebanyak 45 unit bagi 45 kk.
 - Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada sebanyak 50 unit bagi 50 kk.
- 3) Tersedianya bantuan stimulant Sarana/Prasarana Lingkungan,
- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 unit.
 - Lokasi Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amjoang Barat Kabupaten Kupang sebanyak 1 unit.
 - Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 unit.
 - Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU sebanyak 1 unit.
 - Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada sebanyak 1 unit.
 - Lokasi lainjung Desa Maidang Kecamatan Kambang Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1 unit.
- 4) Tersedianya bantuan jaminan hidup badai warga KAT
- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat bagi 30 kk selama 6 bulan.
 - Lokasi Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang bagi 40 kk selama 6 bulan.
 - Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya bagi 25 kk selama 6 bulan.
 - Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU bagi 45 kk selama 6 bulan.
 - Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada bagi 50 kk selama 6 bulan.
 - Lokasi Lainjung Desa maidang Kecamatan Kambata



MapambuhangKab. Sumba Timur bagi 29 kk selama 3 bulan.

- Lokasi Fatubesi Desa Maudemu Kecamatan LamaknenKabupaten Belu bagi 75 kk selama 3 bulan.

5) Tersedianya bantuan bibit tanaman bagi warga KAT

- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kec. Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 paket bagi 30 kk.
- Lokasi Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amfoang Barat DayaKabupaten Kupang sebanyak 1 paket bagi 40 kk.
- Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 paket bagi 25 kk.
- Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU sebanyak 1 paket bagi 45 kk.
- Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada sebanyak 1 paket bagi 50 kk.

6) Tersedianya bantuan peralatan kerja bagi warga KAT.

- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kecamatan Lembor SelatanKab. Manggarai Barat sebanyak 1 paket bagi 30 kk.
- Lokasi Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang sebanyak 1 paket bagi 40 kk.
- Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 paket bagi 25 kk.
- Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU sebanyak 1 paket bagi 45 kk.
- Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada sebanyak 1 paket bagi 50 kk.

7) Tersedianya bantuan peralatan rumah tangga bagi warga KAT

- Lokasi Watu Waja Desa Watu Waja Kec. Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 paket bagi 30 kk.
- Lokasi Let Kole Desa Let Kole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang sebanyak 1 paket bagi 40 kk.
- Lokasi Komikoto Desa Weemanada Kec. LauraKabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 paket bagi 25 kk.
- Lokasi Oe Nae Desa Tes Kecamatan Bimoki Utara Kabupaten TTU sebanyak 1 paket bagi 45 kk.
- Lokasi Turaloa Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze



Kabupaten Ngada sebanyak 1 paket bagi 50 kk.

- 8) Adanya laporan pelaksanaan dukungan teknis kegiatan tugas pembantuan sebanyak 1 laporan.

4. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi NTT per 31 Desember 2018 sebanyak 216 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

a. Latar belakang pendidikan:

SD = 2 orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 104 orang; DI = 3 orang; DII = 17 orang; Sarjana = 83 orang; Magister = 14 orang.

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV = 14 orang; Golongan III= 131 orang; Golongan II= 73 orang; Golongan I = 4 orang;

c. Pejabat Struktural:

Pejabat struktural 32 orang terdiri dari:Eselon II = 1 orang; Eselon III = 9 orang; Eselon IV = 26 orang.

d. Pejabat Fungsional:

Pejabat Fungsional 21 orang terdiri dari:Penyuluh Sosial = 1 orang; Arsiparis = 5 orang; Pekerja sosial = 15 orang.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan: Mencukupi.

7. Permasalahan dan Solusi: Tidak ada.

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: Tidak ada.

IV. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1. Dasar Hukum.

- DIPA No.033.06.04.249290/2017, tanggal 05 Desember 2017;
- DIPA No.003.04.4.249016/2017, tanggal 05 Desember 2017.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
- Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

➤ **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (TPOP)



Alokasi Anggaran Rp.32.332.101,- Realisasi Rp. 32.321.727,- atau sebesar 99,99% dimana Realisasi Fisik 100 %. Melalui kegiatan:

1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Alokasi anggaran Rp.30.839.746,- realisasi Rp. 30.829.372,- atau sebesar 99.99 % dimana realisasi fisik 100 % dengan hasil dari kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air di beberapa lokasi yang tersebar, yaitu:

Jaringan irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara :

- Operasi Rutin D.I. Manikin(31.73 Km) Kab. Kupang;
- Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka;
- Operasi Rutin D.I. Danau Tua (4.96 Km) di Kab. Rote Ndao;
- Operasi Rutin D.I. Lokopehapo (10.18 Km) di Kab. Sabu Raijua;
- Operasi Rutin D.I. Benleleng (12.32 Km) di Kab. Alor;
- Operasi Rutin D.I. Kambaniru (31.15 Km) di Kab. Sumba Timur;
- Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur;
- Operasi Rutin D.I. Wae Komo (16.20 Km) di Kab. Lembata;
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka;
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende;
- Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo;
- Operasi Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang;
- Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada;
- Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur;
- Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur;
- Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur;
- Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai;
- Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat;
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese,Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) di Kab. Kupang;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Oesao (35.93 Km) di Kab. Kupang;



- Operasi Rutin D.I. Oesao (35.93 Km) di Kab. Kupang;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haaekto (32.43 Km) di Kab. TTU;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Beluana/Lurasik (19.02 Km) di Kab. TTU;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Danau Tua (4.96 Km) di Kab. Rote Ndao;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lokopehapo (10.18 Km) di Kab. Sabu Raijua;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Benlelang (12.32 Km) di Kab. Alor;
- Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kambaniru (31.15 Km) di Kab. Sumba Timur;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Komo (16.20 Km) di Kab. Lembata;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay (0 Km) di Kab. Nagekeo;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa (0 Km) di Kab. Ngada;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng (0 Km) di Kabupaten Manggarai Timur;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Musur (15,55 Km) di Kab. Manggarai Timur;
- Pemeliharaan Rutin Wae Dingin/Lakur (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur;
- Operasi Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS;
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae mantar (101.32 Km) di Kabupaten Manggarai
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor (79,52 Km) di Kabupaten Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat



- Studi Indeks Kinerja 5 D.I (126 Km) di Kab. Manggarai Barat
 - Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Operasi Rutin D.I. Beluana/Lurasik (19.2) di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- 2) Layanan Internal (Overhead)
- Layanan Internal (Overhead) – 1 Layanan.
 - Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori 1 layanan.

➤ **Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.**

1) Program Penyelenggaraan Jalan.

Alokasi Anggaran Rp. 15.537.090,- dengan realisasi Rp. 14.157.893,- atau sebesar 91,12 % dimana realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan alokasi anggaran Rp. 15.537.090,- dengan realisasi Rp. 14.157.893,- atau sebesar 91.12 % dimana realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan:

a. Pemeliharaan Rutin Jalan

- Preservasi Rehabilitasi Jalan dalam Korta Kupang – Bolok – Tenau (Pemeliharaan Rutin) – 24,58 Km
- Preservasi Rehabilitasi Jalan dalam Korta Kupang – Bolok – Tenau (Pemeliharaan Rutin Kondisi) – 20,28 Km.

b. Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan

Preservasi Rehabilitasi Jalan dalam Kota Kupang - Bolok – Tenau (Rahabilitasi Mayor) – 2,17 Km

c. Layanan Internal (Overhead)

- Layanan Internal (Overhead) – 23 Layanan
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori I (jumlah paket 1-10) – 1 Thn

4. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.



Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 317 orang, dengan kualifikasi :

a. Latar belakang pendidikan:

SD= 6 orang; SLTP= 8 orang; SLTA= 114 orang; Diploma= 33 orang; Sarjana = 136 orang; Magister= 19 orang; Doktor =1 orang

b. Pangkat/Golongan:

Golongan IV= 15 orang; Golongan III = 184 orang; Golongan II = 111 orang; Golongan I = 7 orang

c. Pejabat Struktural:

Sebanyak 25 orang yang terdiri atas :Eselon II = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 18 orang.

d. Pejabat Fungsional:

Arsiparis = 2 Orang; Widyaswara = - Orang.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan: Mencukupi.

7. Permasalahan dan Solusi: Tidak ada.

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: Tidak ada.

V. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT.

1. Dasar Hukum.

- SP.DIPA.067.07.3.418274/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- SP.DIPA.067.08.4.350349/2018 tanggal 5 Desember 2017.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

3. Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

a. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T) pada Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T).

Alokasi Anggaran Rp.3.446.059.000,- realisasi anggaran Rp.3.378.345.600,- (98,04%), realisasi fisik 100 %, sedangkan sisa anggaran Rp.67.713.400,- (1,96%) kegiatan dan realisasi SPM yaitu:



1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp.370.157.000,-realisasi Rp.370.039.500,- (99,97%), realisasi fisik 100%. Yang meliputi:

a) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran,

Alokasi anggaran Rp.78,986.000,- realisasi anggaran Rp.78.976.000,- (100%), sisa anggaran Rp.10.000,- atau (0%) dengan realisasi fisik 100%, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yaitu : Pengendalian Persiapan Tahun 2020 dan Pembahasan Program Kerja / RKAKL ke Pusat Tahun 2020;

b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

Alokasi anggaran Rp.25.361.000,- realisasi anggaran Rp.25.361.000,- (100%), sisa anggaran Rp. 0,- atau (0%) dengan realisasi fisik 100 %, realisasi pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 3 paketyaitu : Laporan Bulanan, Laporan Triwulan PP.39 Tahun 2006 dan Laporan Tahunan ke Pusat (Jakarta) telah dilaksanakan.

c) Pengelolaan Data dan Informasi.

Alokasi anggaran Rp. 27.782.000,- realisasi anggaran Rp.27.771.000,- (99,96%), sisa anggaran Rp. 11.000.000,- atau (0,04%) dengan realisasi fisik 100%, realisasi pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2018 telah dilaksanakan yaitu: Penyusunan Buku Data Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T).

d) Pengelolaan Keuangan.

Alokasi anggaran Rp.63.424.000,- realisasi anggaran Rp.63.327.500,- (99,85%) dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp.96.500,- atau (0,15%), realisasi sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 2 kegiatantelah dilaksanakan terdiri dari :

- Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah sebanyak 12 bulan;
- Penyusunan Tatalaksana Pengelolaan Barang Milik



Negara (BMN) selama 12 bulan.

e) Layanan Perkantoran.

Alokasi anggaran Rp.174.604.000,- realisasi anggaran Rp.174.604.000,- (100%), sisa anggaran Rp. 0,- atau (0%) dengan realisasi fisik 100%, jumlah kegiatan yang dilaksanakan yaitu Operasional dan pemeliharaan Kantor selama 12 bulan.

2) Penataan Persebaran Penduduk.

Alokasi anggaran Rp. 944,650.000,- realisasi anggaran Rp.943.310.000,- (99,86%), sisa anggaran Rp.1.340.000,- atau (0,14%) dengan realisasi fisik 100%, jumlah kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a) Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi yaitu :

- Perbekalan Transmigran untuk 6 lokasi yaitu : UPT Uluklubuk Kab.Malaka, UPT Peibulak Kab. Belu, UPT Remangsifui Kab.Alor, UPT Palahonang Kab.Sumba Timu, UPTWaemaringi Kab. Sumba Barat dan UPT Kotakawaw SP.5 Kab. Sumba Timur;
- Sarana Penerangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) Portable untuk 6 Lokasi sebanyak 150 unit dan masing-masing 25 unit yaitu: UPT Uluklubuk Kab.Malaka, UPT Peibulak Kab. Belu, UPT Remangsifui Kab.Alor, UPT Palahonang Kab.Sumba Timu, UPTWaemaringi Kab. Sumba Barat dan UPT Kotakawaw SP.5 Kab. Sumba Timur;
- Pelaksanaan Penempatan di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat.

3) Pembangunan Permukiman Transmigrasi(Permukiman Transmigrasi yang dibangun),

Alokasi anggaran Rp.251,468.000,- realisasi anggaran Rp.250.920.100,- (99,78%), sisa anggaran Rp.547.900,- atau (0,22%) dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a) Monitoring / Evaluasi Kesiapan Pembinaan dalam rangka pembangunan permukiman di lokasi sebanyak 6 lokasi yaitu :



- UPT Uluklubuk Kab.Malaka, UPT Peibulak Kab. Belu, UPT Remangsifui Kab.Alor, UPT Palahonang Kab.Sumba Timur, UPT Waemaringi Kab. Sumba Barat dan UPT Kotakawaw SP.5 Kab. Sumba Timur;
- b) Rapat Pengendalian Pembangunan Transmigrasi sebanyak 1 kali di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Penyediaan Tanah Transmigrasi,
Alokasi anggaran Rp.94.000.000,- realisasi anggaran Rp.93.938.000,- (99,93%), sisa anggaran Rp.62.000,- atau (0,07%) dengan realisasi fisik 100%, jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
- a) Pengurusan dan Pengusulan SK Hak Pengelola,
Anggaran Rp.34.162.000,- realisasi anggaran Rp.34.100.000,- (99,82%), sisa anggaran Rp. 62.000,- atau (0,18 %) dengan realisasi fisik 100 %, jumlah yang dilaksanakan 1Lokasi yaitu : di Lokasi Kapitan Meo Kab. Malaka;
- 5) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
Alokasi anggaran Rp. 1.785,784.000,- realisasi anggaran Rp.1.720.138.000,- (96,32%), sisa anggaran Rp.65.646.000,- atau (3,68%) dengan realisasi fisik 100%, jumlah kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- a) Penyusunan Rencana Satuan Kawasan pengembangan (RSKP) sebanyak 1 paket/lokasi di Kawasan Ponu Kab. TTU;
- b) Penyusunan Perencanaan Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana teknis Jalan (RTJ) sebanyak 1 lokasi yaitu : di Kawasan Melolo Kab. Sumba Timur;
- c) Penyusunan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan sebanyak 1 lokasi di Loboaju Kab. Sabu Raijua;
- d) Penyusunan Rencana Pengembangan Masyarakat Satuan Permukiman (SP) sebanyak 1 lokasi di Sanabibi Kab. Belu.
- b. Program Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT).
Alokasi anggaran Rp.7.077.356.000,- realisasi anggaran

Rp.6.997.221.050,- (98,87%), sisa anggaran Rp.79.873.950,- (1,13%)
realisasi fisik 100%, kegiatan dan realisasi SPM sebagai berikut:

- 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp. 262.285.000,- realisasi anggaran
Rp.261.998.000,- (99,89%), dengan realisasi fisik 100%, sisa
anggaran Rp.287.000,- (0,11%), dengan kegiatan yang
dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a) Operasional Perkantoran dan Satker.

Alokasi anggaran Rp.109.640.000,- realisasi anggaran
Rp.109.640.000,- (100%) dengan realisasi fisik 100%, sisa
anggaran Rp. 0,- atau (0%), realisasi pelaksanaan sampai
dengan akhir Desember 2018 sebanyak 12 bulan di Kota
Kupang.

- b) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran.

Alokasi anggaran Rp.17.534.000,- realisasi anggaran
Rp.17.534.000,- (100%) dengan realisasi fisik 100%; sisa
anggaran Rp.0,- atau (0%), yaitu Pelaksanaan sampai
dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) paket di
Jakarta.

- c) Forkasi Bidang Permukiman Kawasan Trans Wilayah (Selektif).

Alokasi anggaran Rp.10.108.000,- realisasi anggaran
Rp.10.108.000,- (100 %) dengan realisasi fisik 100%; sisa
anggaran Rp.0,- atau (0%); yaitu Pelaksanaan sampai
dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) paket di D.I.
Yogyakarta.

- d) Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Teknis / Konsultasi / Monev.

Alokasi anggaran Rp.30.647.000,- realisasi anggaran
Rp.30.597.000,- (99,84%) dengan realisasi fisik 100%; sisa
anggaran Rp.50.000.000,- atau (0,16%); yaitu Pelaksanaan
sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu)
paket di Jakarta.

- e) Pelaporan Pelaksanaan Tugas.



Alokasi anggaran Rp.4.500.000,- realisasi anggaran Rp.4.500.000,- (100%), dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp. 0,- (0%) yaitu Pelaksanaan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 12 Bulan di Kupang.

- f) Penyusunan Laporan SAI dan Simak Barang Milik Negara (BMN).

Alokasi anggaran Rp. 89.856.000,- realisasi Rp.89.856.000,- (100%), dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp. 0,- (0%) yaitu Pelaksanaan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 12 Bulan di Kupang dan Jakarta.

- 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp. 49.304.000,- realisasi anggaran Rp. 48.638.000,- (98,65%), dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp. 666.000,- (1,35%) yaitu Pelaksanaan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 1 Kabupaten di UPT Ponu Kab. TTU.

- 3) Pengembangan Usaha Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp.1.327.800.000,- realisasi anggaran Rp.1.315.439.500,- (99,07%), dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp.12.360.500,- (0,93%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian.

Alokasi anggaran Rp. 1.282.800.000,- realisasi anggaran Rp.1.270.439.500,- (99,04%), dengan realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp. 12.360.500,- (0,96%), yaitu Pelaksanaan sampai dengan Bulan Desember 2018 dari target sebanyak 3 Paketrealisasi 3 (tiga) paket, yaitu :

- Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (T+2) yaitu: UPT Sanabibi Kab.Belu sebanyak 50 KK dan UPT Ikeso Gezu Kab. Ngada sebanyak 50 KK;
- Pengadaan Sarana Produksi Pertanian untuk 6 lokasi (T+1) sebanyak 155 KK yaitu: Lokasi Palahonang Kab.Sumba Timur sebanyak 25 KK, Lokasi Weamaringi Kab.Sumba Barat sebanyak 25 KK, Lokasi Peibulak Kab.Belu sebanyak 25 KK, Lokasi Ulu Klubuk Kab. Malaka sebanyak 25 KK, Lokasi Remasingfui sebanyak 25 KK dan



Lokasi KotaPengadaan Sarana Produksi Pertanian (T+3) untuk 2 lokasi sebanyak 100 KK yaitu: UPT Sanabibi Kab. Belu sebanyak 50 KK dan UPT Lidor Kab.Rote Ndao sebanyak 50 KK;Kab. Sumba Timur sebanyak 30 KK.

4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp. 4.435.546.000,- realisasi anggaran Rp.4.425.473.550,- (99,77 %), dengan realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp.10.072.450,- (0,237%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3(tiga) kegiatan realisasi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a) Pengendalian Catu Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 2.526.000.000,- realisasi anggaran Rp. 2.517.754.300,- (99,67 %), dengan realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp. 8.245.700,- (0,33%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan terdiri dari :

- Pengendalian Catu Pangan.

Alokasi anggaran Rp.2.526.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.517.754.300,- (99,67 %), dengan realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp. 8.245.700,- (0,33%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan terdiri dari :

- Pengadaan Bantuan Pangan Beras (T+1)untuklokasi Palahonang Kab.Sumba Timur sebanyak25 KK / 2.125Kg;
- Pengadaan Bantuan Pangan Beras (T+1) untuk Lokasi Kotakawaw Kab. Sumba Timur sebanyak30 KK / 2.550 Kg;
- Pengadaan Bantuan Pangan Beras(T+1) untuk Lokasi weamaringi Kab.Sumba Barat sebanyak 25 KK / 2.125Kg;
- Pengadaan Bantuan Pangan Beras (T+1) untuk Lokasi Ulu Klubuk Kab. Malaka sebanyak 25 KK / 2.125 Kg;
- Pengadaan Bantuan Pangan Beras(T+1) untukLokasi Remangsifui Kab.Alor sebanyak 25 KK / 2.125 Kg;
- Pengadaan Bantuan Pangan Beras(T+1) untuk Lokasi



- Peibulak Kab.Belu sebanyak 25 KK / 2.125 Kg;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Beras (T+2) untuk Lokasi Sanabibi Kab. Belu sebanyak 50 KK / 21.250 Kg;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Beras (T+2) untuk Lokasi Ikise Gezu Kab. Ngada sebanyak 50 KK / 21.250 Kg.
- Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras,
- Alokasi anggaran Rp. 1.582.250.000,- realisasi anggaran Rp. 1.581.228.000,- (99,94 %), dengan realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp. 1.022.000,- (0,06%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
- Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk lokasi Palahonang Kab.Sumba Timur sebanyak 25 KK / 50 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk Lokasi Kotakawaw Kab. Sumba Timur sebanyak 30 KK / 60 Kg;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk Lokasi weamaringi Kab.Sumba Barat sebanyak 25 KK / 50 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk Lokasi Ulu Klubuk Kab. Malaka sebanyak 25 KK / 50 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk Lokasi Remangsifui Kab.Alor sebanyak 25 KK / 50 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+1) untuk Lokasi Peibulak Kab.Belu sebanyak 25 KK / 50 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+2) untuk Lokasi Sanabibi Kab. Belu sebanyak 50 KK / 500 Pkt;
 - Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (T+2) untuk Lokasi Ikise Gezu Kab. Ngada sebanyak 50 KK / 500 Pkt.
- b) Fasilitas Layanan Sosial SP dan Kawasan Transmigrasi.
- Alokasi anggaran Rp. 1.445.689.000,- realisasi anggaran Rp. 1.443.967.250,- (99,88 %), dengan realisasi fisik 100 %, sisa



anggaran Rp. 1.721.750,- (0,12%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan realisasi 4 kegiatan terdiri dari :

- Pembinaan Mental Spiritual oleh Rohaniawan selama 12 bulan dan Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Revitalisasi Olahraga Satuan Permukiman berupa pengadaan peralatan olah raga Bola Kaki, Bola Voli, Badminton dan Tenis Meja sebanyak 7 Kabupaten Yaitu : UPT Laimbaru Kab.Sumba Timur, UPT Longge Manggarai Barat, UPT Kaipera Kab.Alor, UPT Klus Kualin TTS, UPT Lidor Rote Ndao, UPT Elopore/Gaura SP.2. Sumba Barat dan UPT Ulu Klubuk Malaka.
 - Operasional Layanan Pendidikan untuk para guru dan penjaga SD selama 12 bulan dan Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Perlengkapan dan Peralatan Mengajar Satuan Permukiman berupa pengadaan perlengkapan dan peralatan belajar mengajar sebanyak 4 Kabupaten Yaitu :UPT Kolikapa Kab. Ende, UPT Lewomada Kab.Sikka, UPT Halituku Kab.Belu dan UPT Ulu Klubuk Kab.Malaka.
 - Operasional Pelayanan Kesehatan untuk paramedis dan operasional puskesmas pembantu selama 12 bulan.
 - Operasional Layanan Kesehatan Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berupa pengadaan peralatan pustu, obat-obatan dan dukungan operasional rujukan pasien.
- c) Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya di SP dan Lembaga Pengelola Kawasan Transmigrasi.
- Alokasi anggaran Rp. 413.857.000,- realisasi anggaran Rp. 413.857.000,- (100 %), dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp. 0,- (0%), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan realisasi 4 kegiatan terdiri dari :
- Operasional Pengelola Permukiman Transmigran oleh UPT selama 12 bulan;
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa untuk



petugas keamanan Desa selama 12 bulan;

- Layanan Operasional Pendamping Permukiman Transmigrasi (Kimtrans) pada UPT Lidor Kab.Rote Ndao untuk petugas pendamping selama 12 bulan;
- Pemilihan Transmigran dan Pembina UPT Teladan untuk dikirim ke Jakarta.

4) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Alokasi anggaran Rp.1.002.160.000,-realisasi anggaran Rp.945.672.000,-(94,37%), dengan realisasi fisik 100,00%, sisa anggaran Rp.56.488.000,- (5,63 %), Pelaksanaan sampai dengan Bulan Desember 2018dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatanyaitu :

Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi

- a) Pengukuran Lahan sebanyak 6 lokasi terdiri dari :
 - Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II sebanyak 3 lokasi yaitu : Kab. NagekeoLokasi Ikiseo Gezu sebanyak 50 KK, Lokasi Longge sebanyak 50 KK, dan Lokasi Sanabibi Kab.Belu sebanyak 50 KK;
 - Pengukuran Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha (LU) I dan Blok Lahan Usaha (LU) II sebanyak 5 lokasi yaitu:untuk Lokasi Remangsifui Kab. Alor 2S KK, UPT Peibulak Kab.Belu sebanyak 25 KK, UPT Ulu Klubuk Kab. Malaka sebaanyak 25 KK, Lokasi Weamaringi Kab.Sumba Barat sebanyak 25 KK dan UPT Kotakawaw Kab. Sumba timur sebanyak 30 KK.
- b) Pendampingan Pekerjaan Inventarisasi Pemilikan Lahan(IPL) Provinsi ke Jakartasebanyak 3 Kabupaten yaitu : UPT Uluwae SP.2. Kab.Ngada, UPT Aemuri Kab. Ende dan UPT Lebewala SP.1.2. Kab.Lembata;
- c) Fasilitasi Pelayanan Pertanahan Provinsi sebanyak 4 kabupaten yaitu: UPT Remangsifui Kab.Alor, UPT Peibulak Kab.Belu, UPT Uluklubuk Kab. Malaka dan UPT Weamaringi Kab.Sumba Barat;
- d) Inventaris Kepemilikan Lahan sebanyak 3 Kabupaten, realisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 telah dilaksanakan di 3 Kabupaten terdiri dari : UPT Laimuri Kab.



Ende, UPT Uluwae SP.2 Kab. Ngada dan UPT Lebewala SP 1 dan 2 Kab. Lembata;

- e) Kegiatan Monitoring Legalitas Lahan untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 Lokasi realisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 telah dilaksanakan yaitu :Sebanyak 3 lokasi di UPT Klus Kualin Kab. TTS, UPT Uluwae SP.2 Kab.Ngada dan UPT Kolikapa Kab. Ende;
- f) Pendampingan Pekerjaan Pengukuran Bidang Tanah sebanyak ...lokasi yaitu: realisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 telah dilaksanakan yaitu: UPT Longge Kab.Manggarai Barat, UPT Ikiseo Gezu Kab.Nagekeo dan UPT Rumbu Kab.Sumba Timur.
- g) Kegiatan Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas UPT sebanyak 3 lokasi sampai dengan Desember 2018 telah dilaksanakan di UPT Longge Kab.Manggarai Barat, UPT Ikiseo Gezu Kab.Nagekeo dan UPT Rumbu Kab.umba Timur.

4. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2018 sebanyak 166 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan:
S2=6 orang ; S1= 101 orang ; Sarmud/D3 = 7orang ; SLTA= 52 orang;
SLTP= - orang; SD: - orang
- b. Pangkat/Golongan:
Golongan IV = 15 orang ; Golongan III = 127 orang; Golongan II = 24 orang; Golongan I = - orang;
- c. Pejabat Struktural :
Pejabat Struktural sebanyak 26 orang terdiri atas :Eselon II = 1 orang, Eselon III = 5 orang. Eselon IV = 20 orang.
- d. Pejabat Fungsional:
Sebanyak 21 orang terdiri dari: Pengantar Kerja = 5 orang, Arsiparis = 4 orang, Pemberdayaan Swakarsa Mandiri (PSM) = 4 orang, Instruktur Latihan Kerja = 4 orang, Instruktur Produktifitas = 3 orang, Analisis



Kepegawaian = 1 orang.

6. **Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan:** Mencukupi.
7. **Permasalahan dan Solusi:** Tidak ada.
8. **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:** Tidak ada.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.



Data dan informasi yang disajikan sehubungan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dapat dilihat dari 7 (tujuh) aspek, yakni: 1). kerjasama antar daerah, 2). kerjasama daerah dengan pihak ketiga, 3). koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, 4). pembinaan batas wilayah, 5). pencegahan dan penanggulangan bencana, 6). pengelolaan kawasan khusus 7). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana uraian dibawah ini:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH.**I. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

1. Daerah yang di ajak kerjasama.
 - a. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Provinsi Banten;
 - f. Provinsi Bengkulu;
 - g. Provinsi Jawa Timur;
 - h. Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Provinsi Jawa Barat;
 - j. Provinsi D.I Yogyakarta;
 - k. Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dasar Hukum.
 - a. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2014 Nomor HK. 1441 Tahun 2014 tentang Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Provinsi NTT.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29/KEP/HK/2017 tentang Alokasi Pengeluaran ternak potong sapi, kerbau dan kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
 - c. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 278/KEP/HK/2017 tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.



3. Bidang Kerjasama.
Bidang Peternakan.
4. Nama Kegiatan
 - a. Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Prov. Nusa Tenggara Timur.
 - b. Pengeluaran ternak sapi, kerbau, kuda serta pemasukan daging/ karkas unggas dan produk unggas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.
Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
 - a. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 176 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan
SD = 23 orang; SLTP = 5 orang; SLTA = 36 orang; Diploma = 17 orang; Sarjana = 68 orang; Dokter Hewan = 17 orang; Magister = 10 orang.
 - c. Pangkat dan golongan
Golongan IV/d = 1 orang; Golongan IV/c = 1 orang; Golongan IV/b = 3 orang; Gol IV/a = 13 orang; Golongan III/d = 27 orang; Golongan III/c= 21 orang; Golongan III/b = 38 orang; Gol. III/a = 10 orang; Gol. II/d = 7 org; Gol. II/c = 10 org; II/b = 17 org; Gol. II/a = 8 org; Gol. I/d = 5 orang; Golongan I/c = 3 orang I/b = 4 orang; Golongan I/a = 8 orang.
7. Sumber dan Jumlah anggaran.
Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi NTT Tahun 2017.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
 - a. Jangka waktu kerjasama: 10 (sepuluh) Tahun
 - b. Jangka waktu kerjasama: 1 (satu) Tahun.
9. Hasil (Output) dari Kerjasama.
 - a. Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Provinsi NTT;
 - b. Meningkatnya sistem pengawasan masuk dan keluarnya ternak dan produk hasil ternak guna mencegah penularan penyakit hewan menular;
 - c. Terkirimnya ternak sapi, kerbau, kuda keluar dari Nusa Tenggara Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D. I. Yogyakarta dan Sulawesi Selatan;



- d. Masuknya daging/karkas unggas, telur unggas dan DOC Jawa Timur ke Nusa Tenggara Timur.
- 10. Permasalahan dan Solusi -
- 11. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan -

II. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 1. Daerah yang di ajak kerjasama.
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2. Dasar Hukum
Bentuk kerjasama ketransmigrasian yang dilaksanakan adalah sifatnya antar Kabupaten, sedangkan antar Provinsi bersifat memfasilitasi kerjasama tersebut.
 - a. Kerjasama Antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : BU. 595/30/NAKERTRANS/216 dan Nomor: 049 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
 - b. Kerjasama Antara Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/447/SOSNAKERTRANS/216 dan Nomor : 4 / HK / 2016 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Bidang Kerjasama
Bidang Ketransmigrasian.
- 4. Nama Kegiatan.
Penyelenggaraan Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Angsana dengan Pola Nelayan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 KK
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
 - a. Jumlah Pegawai.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebanyak 14 orang.



- b. Kualifikasi Pendidikan.
SD = - orang; SLTP = - orang; SLTA = 2 orang; Diploma = - orang;
Sarjana = 12 orang; Magister = - orang.
 - c. Pangkat dan golongan.
Golongan IV = 1 orang; Golongan III = 14 orang; Golongan II = 1 orang;
dan Golongan I = - orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
- Sumber dana yang diterima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk 2 (dua) Program sebesar Rp. 10.523.154.000,- terdiri dari :
- a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.077.095.000,-
 - b. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.446.059.000,-
8. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama: 5 Tahun
9. Hasil (Output) dari Kerjasama
Penempatan Transmigran di UPTAngsana dengan Pola Nelayan Kecamatan Tanah Bumbu, Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 KK / 40 jiwa asal Kabupaten Sikka pada tanggal 15 Desember 2016;
10. Permasalahan dan Solusi : -
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : –

III. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 1. Daerah yang di ajak kerjasama.
 - a. Kabupaten Nagekeo.
 - b. Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2. Dasar Hukum.
 - a. Kabupaten Nagekeo.
Surat Perjanjian Kerjasama antara antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nagekeo, Nomor: 070/Bappelitbangda.Ngk/163/08/2018 dan Balitbangda. 879/I/293/2018.



- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penelitian antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten TTS, Nomor : Balitbangda. 070/V/55/ 018 dan Balitbangda. 30.02.01/716.a/V/2018.
3. Bidang Kerjasama.
Program Penelitian dan Pengembangan, Ekonomi, Sosial Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik, Pemerintahan.
4. Nama Kegiatan.
 - a. Kabupaten Nagekeo
Kajian Strategi Perencanaan dan Penganggaran yang efisien dan efektif dalam mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Nagekeo.
 - b. Kabupaten Timor Tengah Selatan
 1. Kajian Tentang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten TTS
 2. Kajian Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten TTS
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah.
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nagekeo.
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TTS.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
 - a. Kabupaten Nagekeo.
Jumlah Pegawai 5 orang.
S2 = 5 orang.
Golongan IV d = 1 orang, IV a = 2 orang, III d = 1 orang, III b = 1 orang
 - b. Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Jumlah Pegawai 3 orang.
S2 = 3 orang.
Golongan III = IV d = 1 orang, III b = 2 orang
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - a. DPA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nagekeo TA 2018, sebesar Rp.39.510.000,-
 - b. DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TTS TA 2018, sebesar Rp.38.250.000,-



8. Jangka Waktu Kerjasama.
90 (sembilan puluh) hari kalender.
9. Hasil (output) dari kerjasama.
 - a. Dokumen Laporan Hasil Penelitian di kabupaten Nagekeo tentang Kajian Strategi Perencanaan dan Penganggaran yang efisien dan efektif dalam mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Nagekeo.
 - b. Dokumen Laporan Hasil Kajian tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten TTS.
 - c. Dokumen Laporan Hasil Kajian tentang Tentang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten TTS.
10. Permasalahan dan Solusi -
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan –

IV. RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Daerah yang di ajak kerjasama.
 - a. Kabupaten Malaka.
 - b. Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Dasar Hukum
 - a. Perjanjian Kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan RSU Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun tentang Pelayanan Laboratorium dan Radiologi Nomor : 32 tahun 2018 – Nomor RSUPP.445/45/VIII/2018;
 - b. Perjanjian Kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan RSUD Soe tentang Pelayanan Laboratorium dan Patologi Anatomi Nomor : 32 Tahun 2018 tgl 4 Juli 2018;
3. Bidang Kerjasama.
Pelayanan Penunjang Laboratorium, Radiologi dan Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.
4. Nama Kegiatan.
Pelayanan Kesehatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.
RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.



- a. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang sebanyak 1.033 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan
SD= 5 orang; SLTP= 12 orang; SLTA= 158 orang; Diploma = 492 orang; Sarjana = 300 orang; Magister= 66 orang
 - c. Pangkat dan golongan.
Golongan IV= 89 orang; Golongan III = 652 orang; Golongan II = 285 orang; Golongan I = 7 orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
 8. Jangka Waktu Kerjasama.
Jangka waktu kerjasama 1 (satu) Tahun.
 9. Hasil (Output) dari Kerjasama.
Terlaksananya pelayanan yang berkualitas.
 10. Permasalahan dan Solusi : -
 11. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan : -

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

I. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Mitra yang Diajak Kerjasama.
Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTT
2. Dasar Hukum.
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Provinsi NTT TA. 2018.
Nomor: BPPKAD.IV/900.910/DPPA/39/2018, tanggal 18 Oktober 2018.
 - b. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur Nomor: 521.1.050/5954/MOU/DISTAN/IX/2018 dan Nomor: 5341/HK.230/ H.12.18/09/2018, tanggal 27 September 2018.
 - c. Surat Perjanjian Swakelola antara Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT, No: 521.1.050/7536/KUM/ XI/2018, tgl 29 Nopember 2018, tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Pertanian Lahan Kering Kepulauan Provinsi NTT.



- d. Surat Perjanjian Swakelola antara Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur, Nomor : 521.1.050/8010/Horti/XI/2018, tanggal 29 Nopember 2018, tentang Penyusunan Roadmap Kelor.
3. BidangKerjasama.
Bidang Pertanian
4. Nama Kegiatan.
 - a. Penyusunan Grand Design Pembangunan Pertanian Lahan Kering Kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Penyusunan Roadmap Kelor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.
Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a. Jumlah Pegawai.
Jumlah Pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTT sebanyak 360 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan.
SD = 10 orang; SLTP = 5 orang; SLTA = 113 orang; Diploma /Sarjana Muda = 21 orang; S1= 199 orang; S2 = 12 orang.
 - c. Pangkat dan Golongan.
Golongan IV/a = 8 org; IV/b = 7 org; IV/c = -; IV/d = 1 org; Gol III/a = 45 org; III/b = 89 org; III/c = 52 org; III/d = 53 org; Golongan II/a = 12 org; II/b = 20 org; II/c = 65 org; II/d = 14 orang; Gol. I/a = - ; I/b = 3 orang; I/c = 7 orang; I/d = - Tenaga Honorer : 155 Orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - a. Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
 - b. Jumlah Anggaran yang digunakan :
 1. Penyusunan Grand Desing Pertanian Lahan Kering Kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. Rp.485.250.000,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).



2. Road Map Kelor sebesar Rp.299.910.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
8. Jangka Waktu Kerjasama.
Kerjasama ini berlangsung dari bulan November s/d Desember 2018.

II. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - a. CV. Mandiri Konstruksi Pengadaan Pemasangan Guardrill Kab. Ende;
 - b. CV. Citra Planindo Pengawasan Pengawasan dan Pemasangan Guardrill Kab. Ende;
 - c. CV. Master Karya Pengadaan dan Pemasangan Guardrill Kab. Sumba Timur;
 - d. CV. Sinar Sejahtera Konsultan Pengawasan dan Pemasangan Guardrill Kab. Sumba Timur;
 - e. CV. Albarukh Perkasa Rehab Toroherminal Oebobo;
 - f. PT. Karya Cipta Madani Master Plan Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli;
 - g. PT. Karsa Persada Mulia FS Pelabuhan Laut Maubesi Hasan;
 - h. PT. Multi Konsulindo Mandiri FS Bandar Udara Booking;
 - i. CV. Hasta Perkasa Engineering, perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - j. CV. Mitra Perkasa, Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - k. CV. Citra Planindo, Pengawasan Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - l. CV. Hasta Perkasa Engineering, perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso);
 - m. CV. Mandiri Konstruksi, pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso);
 - n. CV. Sinar Sejahtera Konsultan, Pengawasan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - o. CV. Mitra Karya, Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun);
 - p. CV. Citra Planindo, Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun);



- q. CV. Hasari Tama, Rehab Trafic Light di Pulau Indah;
- r. CV. Sinar Sejahtera Konsultan, Pengawasan Rehab Trafic Light di Pulau Indah;
- s. CV. Banera Cipta Consultan, Perencanaan Rehab Trafic Light di Pulau Indah;
- t. CV. Belva Tamarindo, Rehab Ruang Kadis dan Sekretariat;
- u. CV. Hasta Perkasa Engineering, Pengawasan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- v. CV. Banera Cipta Consultan, Perencanaan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- w. CV. Florence, Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- x. CV. Hasta Perkasa Engineering, Pengawasan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- y. CV. Banera Cipta Consultan, Perencanaan Aplikasi Sistem GIS;
- z. CV. Kasih Bunda Mulia, Pengadaan Konstruksi Sumur Bor;
- aa. CV. Albarukh Perkasa, Pengadaan Konstruksi Bak Penampung;
- bb. CV. Timor Jaya Indah, Pembangunan Pos Jaga;
- cc. CV. Hasta Perkasa Engineering, Pengawasan Pembangunan Pos Jaga.

2. Dasar Hukum.

Dasar Hukum dengan mitra / pihak ketiga yang diajak untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pekerjaan adalah dengan berlandaskan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DISHUB.550/900.922/SK.02/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Ruas Jalan Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Selain itu juga terdapat nomor tanggal kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan pihak ketiga/mitra adalah sebagai berikut :

- a. CV. MANDIRI KONSTRUKSI, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/69/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/70/VII/2018 tanggal 16 Maret 2018;



- b. CV. CITRA PLAININDO, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.932/75/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/76/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
- c. CV. MASTER KARSA, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/72/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
- d. CV.SINAR SEJAHTERA KONSULTAN, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/77/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/74/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
- e. CV. ALBARUKH PERKASA, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/80/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : No.Dishub.550/900.932/81/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- f. PT. KARYA Cipta Madani, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.932/49/IV/2018 tanggal 19 April 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/50/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- g. PT KARSA PERSADA MULIA, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/43/IV/2018 tanggal 17 April 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/44/IV/2018 tanggal 17 April 2018;
- h. PT. MULTI KONSULINDO MANDIRI, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/38/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Nomor Tanggal SPMK/SP : Dishub.550/900.932/40/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
- i. CV. Hasta Perkasa Engineering, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub. Dishub.550/900.938/91/X/2018 tgl 18 Oktober 2018; Nomor SPMK : Dishub.550/900.932/92/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- j. CV. Mitra Perkasa, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/111/XI/2018 tanggal 18 Oktober 2018; Nomor SPMK/SP: Dishub. 550/900.932/112/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- k. CV. Citra Planindo, Nomor Tanggal Kontrak: Dishub. 550/900.938/114/XI/2018 tanggal 02 November 2018; Nomor SPMK/SP: Dishub.550/900.932/115/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- l. CV. Hasta Perkasa Engineering, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub. 550/900.938/94/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/95/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;



- m. CV. Mandiri Konstruksi, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.938/117/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/118/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- n. CV. Sinar Sejahtera Konsultan, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.938/120/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/121/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- o. CV. Mitra Karya, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.932/77/ VII/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/124/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- p. CV. Citra Planindo, Nomor tanggal Kontrak : Dishub. 550/ 900.938/126/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub. 550/900.932/127/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- q. CV. Hasari Tama, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.938/ 129/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/130/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- r. CV. Sinar Sejahtera Konsultan, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.938/132/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/133/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- s. CV. Banera Cipta Consultan, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub. 550/ 900.938/103/XI/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Nomor SPMK/SP : 550/900.932/101/XI/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- t. CV. Belva Tamarindo, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/ 900.938/ 135/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/136/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- u. CV. Hasta Perkasa Engineering, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub. Dishub.550/ 900.938/106/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/107/XI/2018 tgl 02 November 2018;
- v. CV. Banera Cipta Consultan, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/103/XI/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/104/XI/2018 tgl 18 Oktober 2018;
- w. CV. Florence, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.932/ 142/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/142/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
- x. CV. Hasta Perkasa Engineering, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub. 550/900.938/109/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub. 550/900.932/110/XI/2018 tgl 02 November 2018;



- y. CV. Banera Cipta Consultan, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/147/XI/2018 tanggal 02 November 2018. Nomor SPMK/SP : Dishub.550/900.932/148/XI/2018 tgl 02 November 2018;
 - z. CV. Kasih Bunda Mulia, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.932/26/III/2018;
 - aa. CV. Albarukh Perkasa, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/32b/IV/2018;
 - bb. CV. Timur Jaya Indah, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/33 /IV/2018;
 - cc. CV. Hasta Perkasa Engineering, Nomor Tanggal Kontrak : Dishub.550/900.938/26 /IV/2018.
3. Bidang Kerjasama.
- Bidang Kepelabuhanan, Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Perencanaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Nama Kegiatan.
- a. Pengadaan dan pemasangan guardrail;
 - b. Pengawasan pengadaan dan pemasangan guardrail;
 - c. Pengadaan dan pemasangan guardrail;
 - d. Pengawasan pengadaan dan pemasangan guardrail;
 - e. Rehab Terminal Oebobo;
 - f. Master Plan Pembangunan Laut Oepoli;
 - g. Fisibility Study (FS) Pelabuhan Laut Maubesi Hasan;
 - h. Fisibility Study (FS) Bandar Udara Boking;
 - i. Perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - j. Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - k. Pengawasan Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh);
 - l. perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso);
 - m. pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso);
 - n. Pengawasan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso);



- o. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun);
 - p. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun);
 - q. Rehab Trafic Light di Pulau Indah;
 - r. Pengawasan Rehab Trafic Light di Pulau Indah;
 - s. Rehab Ruang Kadis dan Sekretariat;
 - t. Pengawasan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
 - u. Perencanaan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
 - v. Perencanaan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
 - w. Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
 - x. Pengawasan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
 - y. Perencanaan Aplikasi Sistem GIS;
 - z. Pengadaan Konstruksi Sumur Bor;
 - aa. Pengadaan Konstruksi Bak Penampung;
 - bb. Pembangunan Pos Jaga;
 - cc. Pengawasan Pembangunan Pos Jaga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- a. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 136 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan.
SD= 1 orang; SLTP= 3 orang; SLTA= 46 orang; Diploma= 12 orang; Sarjana = 59 orang; Magister= 15 orang.
 - c. Pangkat dan Golongan.
Golongan IV/a = 4 orang; Gol. IV/b = 6 orang; Gol. IV/c = - orang; Gol. IV/d = - Gol. III/a =13 orang; Gol. III/b = 31 orang; Gol. III/c = 21 orang; Gol. III/d = 32 orang; Gol. II/a = 3 orang; Gol. II/b =6 orang; Gol. II/c =13 orang; Golongan II/d = 7 orang; Golongan I/d = 1 orang.



- d. Pejabat Stuktural: 36 orang.
Eselon II = 1orang; Eselon III = 8 orang; Eselon IV = 27 orang
 - e. Pejabat Fungsional: 2 orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
- a. Pengadaan dan Pemasangan guardrail di kabupaten Ende, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.080.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.1.045.776.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.045.766.000 (100%) sedangkan realisasi fisik 100%;
 - b. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail di kabupaten Ende, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.47.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.47.800.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - c. Pengadaan dan Pemasangan guardrail di Kabupaten Sumba Timur, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.504.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.488.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.488.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - d. Pengadaan dan Pemasangan guardrail di kabupaten Sumba Timur, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.200.000,- nilai kontrak sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - e. Rehab Terminal Oebobo di Kota Kupang, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.282.325.000,- nilai kontrak sebesar Rp.264.940.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.264.940.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - f. Master Plan Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.800.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.735.377.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.735.377.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - g. Fisibility Pelabuhan Laut Maubesi Hasan Kabupaten Malaka, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.600.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.580.140.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.580.140.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - h. Fisibility Bandar Udara Boking Kabupten TTS, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.1.033.500.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.1.033.500.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;



- i. Perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.920.000,- nilai kontrak sebesar Rp.7.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.7.900.000 (100%) sedangkan fisik 100%;
- j. Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.198.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.197.205.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.197.205.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
- k. Pengawasan Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.880.000,- nilai kontrak sebesar Rp.11.880.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.11.880.000 (100%) sedangkan fisik 100%;
- l. Perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.920.000,- nilai kontrak sebesar Rp.7.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.7.900.000 (100%) sedangkan fisik 100%;
- m. Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.198.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.195.780.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 195.780.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
- n. Pengawasan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.880.000,- nilai kontrak sebesar Rp.11.880.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 11.880.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
- o. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.200.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.199.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 199.400.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
- p. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun), sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,-



- nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
- q. Rehab Trafic Light di Pulau Indah, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.181.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.180.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - r. Pengawasan Rehab Trafic Light di Pulau Indah, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.050.000,- nilai kontrak sebesar Rp.9.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - s. Rehab Ruang Kadis dan Sekretariat, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.188.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.187.500.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 187.500.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - t. Pengawasan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 6.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - u. Perencanaan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 6.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - v. Perencanaan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 6.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - w. Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.200.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.199.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - x. Pengawasan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000,-realisasi sebesar Rp.10.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;



- y. Perencanaan Aplikasi Sistem GIS, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.76.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - z. Pengadaan Konstruksi Sumur Bor, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.80.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp.79.560.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.79.560.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - aa. Pengadaan Konstruksi Bak Penampung, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 41.680.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 41.680.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - bb. Pembangunan Pos Jaga, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 99.806.000,- nilai kontrak sebesar Rp. 99.738.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 99.738.000,- (100%) sedangkan fisik 100%;
 - cc. Pengawasan Pembangunan Pos Jaga, sumber dana dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.988.400,- nilai kontrak sebesar Rp. 5.980.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.980.000,- (100%) sedangkan fisik 100%.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
- a. Pengadaan dan pemasangan guardrail di Kabupaten Ende dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender;
 - b. Pengawasan pengadaan dan pemasangan guardrail di Kabupaten Ende dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender;
 - c. Pengadaan dan pemasangan guardrail di Kabupaten Sumba Timur dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender;
 - d. Pengawasan pengadaan dan pemasangan guardrail di KabSumba Timur dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender;
 - e. Rehab Terminal Oebobo di Kota Kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender;
 - f. Master Plan Pembangunan Laut Oepoli di Kabuapten Kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender;
 - g. Fisibility Study (FS) Pelabuhan Laut Maubesi Hasan di Kabupaten Malaka dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender;



- h. Fisibility Study (FS) Bandar Udara Boking di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender;
- i. Perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh) di kabupaten kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender;
- j. Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh) di kabupaten kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- k. Pengawasan Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (H.R Koroh) di kabupaten kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- l. Perencanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso) di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender;
- m. Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso) di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- n. Pengawasan pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan provinsi (Yos Soedarso) di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- o. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun) di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- p. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Kupang (Ekam-Baun) di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- q. Rehab Trafic Light di Pulau Indah di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- r. Pengawasan Rehab Trafic Light di Pulau Indah di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- s. Rehab Ruang Kadis dan Sekretariat di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- t. Pengawasan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;



- u. Perencanaan Gedung Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan 7 hari kalender;
- v. Perencanaan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender;
- w. Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- x. Pengawasan Rehab Fasilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- y. Perencanaan Aplikasi Sistem GIS di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- z. Pengadaan Konstruksi Sumur Bor di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- aa. Pengadaan Konstruksi Bak Penampung di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- bb. Pembangunan Pos Jaga di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender;
- cc. Pengawasan Pembangunan Pos Jaga di Kota kupang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender.

III. RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Provinsi NTT.

- 1. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
 - b. Dinas Perhubungan kota Kupang
 - c. Dinas Kesehatan Kota Kupang
 - d. BPJS Kesehatan Cabang Kupang
 - e. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
 - f. RSUD S.K. LERIK Kota Kupang
 - g. RSB DRS. TITUS ULLY Kupang
 - h. Rumah Sakit St. Carolus Borromeus kupang
 - i. Rumah Sakit Tk.IV 09.07.01 Wirasakti Kupang
 - j. PT. Taspen (Persero)
 - k. PT. Dinar Mutiara Sakti
 - l. PT. Sinar Roda Utama



- m. PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia
- n. PT. Tamara Overseas Corporindo
- o. CV. Kawan Kita
- p. CV. Sinar Agape
- q. CV. Marthon
- r. The Internasional Organization For Migration (IOM)
- s. Klinik King Care Kupang
- t. Detasemen Polisi Militer IX / Kupang
- u. Stikes Maranatha Kupang
- v. UPT.lab.kesehatan Dinkes Prov.NTT

2. Dasar Hukum.

- a. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah di RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Nomor : 08 Tahun 2018 – Nomor : Din. LHK. 974 / 6.b / I / 2018;
- b. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang tentang Pemungutan Retribusi Parkir di area RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Nomor : 04 Tahun 2018 – Nomor : Dishub. 551 . 22 / 177.0 / I / 2018;
- c. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kota Kupang Nomor : 440.441/159.9/Dinkes/ I Tahun 2018;
- d. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang tentang Penerapan Bridging System antara SIM-RS dengan Aplikasi VCLAIM Nomor : 24 Tahun 2018 – Nomor : 102 / KTR / XI – 04 / 0518;
- e. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Kejaksaan Tinggi NTT tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 16Tahun 2018 – Nomor : B – 732 / P.3 / GS / 03 / 2018;
- f. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan RSUD S.K LERIK Kota Kupang tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Nomor : 13 Tahun 2018 – Nomor : 13 Tahun 2018 – Nomor : RSUD. SKL. 007 / 40 / I / 2018;



- g. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan RSB DRS. TITUS ULLY Kupang tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Nomor : 27 Tahun 2018 – Nomor : B / 224 / VII / 2018 / RUMKIT;
- h. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang tentang Pengolahan Limbah Medis Nomor : 22 Tahun 2018 – Nomor : 21 / RSCB / PKS / MJ / V / 2018;
- i. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Rumah sakit Tk.IV 09.07.01 Wirasakti Kupang tentang Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Penunjang Nomor : 29 Tahun 2018 – Nomor : 03 /PKS / III / 2018;
- j. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan PT. Taspen (Persero) Kupang tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja Nomor : 20 Tahun 2018 – Nomor : JAN.- 07 / DIR / 2018;
- k. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan PT. Dinar Mutiara Sakti tentang Pengadaan Jasa Out Sourhcing Cleaning Service Nomor : 06 Tahun 2018 – Nomor : 001 / DMS /SPK/ I / 2018;
- l. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan PT. Sinar Roda Utama tentang Pelayanan Hemodialisa Pasien BPJS dan Pasien Umum Nomor : 01 Tahun 2018 – Nomor : 171 / SRU/ HD / KSO / I / 2018;
- m. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan PT. Asuransi Jiwa In Health Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat bagi Peserta Asuransi Jiwa InHealth Indonesia Nomor : 21 Tahun 2018 – No: 49 /AJII / KOPS-DPS / KTR / 0318;
- n. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan PT. Tamara Overseas Corporindo tentang Pinjam Pakai Alat Blood Gas Analyser Nomor : 23 Tahun 2018 – Nomor : 183 / VI / KSO / 2018;
- o. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan CV. Kawan Kita tentang Pengadaan Tabung Gas, Gas Medis Oksigen (O2) dan Nitrogen Oksida (N2O) Nomor : 26 Tahun 2018 – Nomor : 1 /KK / KSO / I / 2018;



- p. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan CV. Sinar Agape tentang pengadaan bahan makanan pasien, bahan bakar minyak tanah dan bahan bakar gas (elpiji) Nomor : 001-SA//2018;
 - q. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan CV. Marthon tentang Pelayanan Foto Copy di lahan milik Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Nomor : 001/Marthon/06/2018;
 - r. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan The International Organization For Migration (IOM) Nomor : 31 Tahun 2018 – Nomor : IDN / SERV / EC0035 /2018;
 - s. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Klinik King Care Kupang Nomor : 25 Tahun 2018 – Nomor : 05 / kkc / ks / V / 2018;
 - t. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Detasemen Polisi Militer IX/Kupang No: 21// Tahun 2018;
 - u. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Stikes Maranatha Kupang Nomor : 01/STIKES MRTH.I//2018;
 - v. Perjanjian kerjasama antara RSUD. Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang dgn UPT.LAB.KES DINKES Prov.NTT No: UPT.LABKES.890 thn 2018;
3. Bidang Kerjasama.
Bidang Kesehatan.
 4. Nama Kegiatan.
Peningkatan Mutu BLUD.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
Dengan pihak ketiga.
RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada RSUD Prof.DR. W. Z Johannes Kupang sebanyak 1.033 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan
SD= 5 orang; SLTP= 12 orang; SLTA= 158 orang; Diploma = 492 orang; Sarjana = 300 orang; Magister= 66 orang



- c. Pangkat dan golongan
Golongan IV= 89 orang; Golongan III = 652 orang; Golongan II = 285 orang; Golongan I = 7 orang.
- 7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
APBD dan BLUD Rp. 259.445.821.102
- 8. Jangka Waktu Kerjasama.
Jangka waktu kerjasama: selama 1 Tahun.

IV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1. Mitra yang diajak Kerjasama
 - a. DFAT
- 2. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. MoU : 021/Kontrak/FY.18/Plan/CO/V/2017;
- 3. Bidang Kerjasama
 - a. DFAT
Penguatan Kapasitas Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4. Nama Kegiatan
 - a. DFAT
 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kekeringan Klaster Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua.
 - Peringatan bulan PRB di NTT, Tema “TANAM AIR : KURANGI RISIKO KEKERINGAN”
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 47 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan
SD = 1 orang; SLTP = - orang; SLTA = 16 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 26 orang; Magister = 2 orang;.



- c. Pangkat dan golongan
Golongan IV= 6 org; Gol. III = 29 org; Gol. II = 11 org; Gol. I = 1 org.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber dan jumlah anggaran langsung di kelola oleh LSM
 - a. Sumber Anggaran
 - PMPB : Plan Internasional Indonesia
 - DFAT : DFAT Australia, Care Internasional, Karina Jogjakarta dan SPARC UNDP.
 - b. Jumlah Anggaran
 - PMPB : 155.629.850,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - DFAT : 524.664.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
8. Jangka Waktu Kerjasama.
 - a. PMPB/Plan Internasional Indonesia selama 2 tahun
 - b. DFAT selama 1 tahun

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

I. Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, Forum DAS.
2. Materi Koordinasi adalah Workshop revisi Perda Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Instansi vertikal yang terlibat yaitu BPDAS HL Benain Noelmina, BBKSDA Provinsi NTT, Balitbang LHK Kupang, Balai Diklat LHK Kupang, BPKH Wilayah XIV Kupang, BMKG Stasiun Klimatologi Lasiana, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.
4. Sumber dan jumlah anggaran -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai sebanyak 10 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 1 pegawai, sarjana sebanyak 7 pegawai dan SLTA sebanyak 2 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 1 pegawai, golongan III sebanyak 7 pegawai dan golongan II sebanyak 2 pegawai.
7. Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan/rapat.



8. Hasil koordinasi adalah Adanya masukan untuk revisi Perda No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Manfaat koordinasi adalah Tersusunnya revisi Perda tentang pengelolaan DAS Terpadu Provinsi NTT dan Pengintegrasian ke dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah Pembahasan Perda (Revisi) tentang pengelolaan DAS Terpadu Provinsi NTT.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

II. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dan bulan menanam pohon Indonesia (BMPI).
2. Materi Koordinasi adalah teknis pelaksanaan HMPI dan BMPI dan data rehabilitasi hutan dan lahan.
3. Instansi vertikal yang terlibat yaitu BBKSDA NTT, Litbang Kementerian LHK, Balai Diklat Kehutanan Kupang, BPDAS HL Benain Noelmina dan BUMN.
4. Sumber dan jumlah anggaran BPDAS HL Benain Noelmina.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai sebanyak 10 pegawai dengan tingkat pendidikan pasca sarjana sebanyak 1 pegawai, sarjana sebanyak 7 pegawai dan SLTA sebanyak 2 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 1 pegawai, golongan III sebanyak 7 pegawai dan golongan II sebanyak 2 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali koordinasi.
8. Hasil dan manfaat koordinasi adalah terselenggara kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan terselenggaranya kegiatan HMPI dan BMPI.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah dengan HMPI dan BMPI dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan manfaat dari hutan.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -



III. Dinas Kehutanan Provinsi NTT (UPT KPH Wilayah/Kabupaten Kota).

1. Forum Koordinasi Pengada, Pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan.
2. Materi Koordinasi adalah usulan pengada dan atau pengedar benih serta pengedar bibit.
3. Instansi vertikal yang terlibat yaitu Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II Sulawesi Selatan.
4. Sumber dan jumlah anggaran -.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT (UPT KPH Wilayah/Kabupaten Kota).
6. Jumlah pegawai sebanyak 10 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 1 pegawai, sarjana sebanyak 7 pegawai dan SLTA sebanyak 2 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 1 pegawai, golongan III sebanyak 7 pegawai dan golongan II sebanyak 2 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 4 kali.
8. Hasil koordinasi adalah benih dan/atau bibit yang beredar merupakan benih dan bibit yang berkualitas.
Manfaat koordinasi adalah adanya penetapan pengada dan/atau pengedar benih serta pengedar bibit yang berkualitas di wilayah kerja setiap UPT KPH Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah melakukan pengawasan terhadap pengada dan/atau pengedar benih serta pengedar bibit di setiap wilayah kerja UPT KPH Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tetap menjaga kualitas.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan yaitu Koordinasi yang dilakukan sering terkendala jarak karena memakan waktu yang cukup lama untuk memutuskan penetapan pengada dan/atau pengedar benih serta pengedar bibit yang diusulkan.

IV. Dinas Kehutanan Provinsi NTT dan Balai PSKL JBNT Denpasar.

1. Forum Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.
2. Materi Koordinasi adalah fasilitasi implementasi perhutanan social di Provinsi NTT.
3. Instansi vertikal yang terlibat yaitu Balai Besar KSDAE NTT, Balai PSKL JBNT Denpasar dan Balai Diklat Kehutanan Kupang.



4. Sumber dan jumlah anggaran -.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 9 pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 8 pegawai dan SLTA sebanyak 1. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 7 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali.
8. Hasil koordinasi adalah Pelaksanaan fasilitasi permohonan Perhutanan Sosial dan Verifikasi Permohonan Perhutanan Sosial.
Manfaat koordinasi adalah membantu dalam pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi permohonan Perhutanan Sosial.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah SK. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

V. Kehutanan Provinsi NTT

1. Forum Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
2. Materi Koordinasi adalah Verifikasi Lapangan.
3. Instansi vertikal yang terlibat yaitu BPKH Wilayah XIV Kupang.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 11 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 2 pegawai, sarjana sebanyak 4 pegawai dan SLTA sebanyak 5 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 8 pegawai dan golongan II sebanyak 1 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Hasil koordinasi adalah terlaksananya kegiatan verifikasi di lapangan.
Manfaat koordinasi adalah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah Rapat pembahasan hasil verifikasi.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -



VI. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Informasi Penyediaan Anakan Tanaman Kehutanan.
2. Materi Koordinasi adalah Informasi ketersediaan anakan tanaman kehutanan untuk dibagikan kepada masyarakat.
3. Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi yaitu BPDAS HL Benain Noelmina.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 10 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 1 pegawai, sarjana sebanyak 7 pegawai dan SLTA sebanyak 2 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 1 pegawai, golongan III sebanyak 7 pegawai dan golongan II sebanyak 2 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.
8. Hasil dan manfaat koordinasi adalah Pemenuhan permintaan anakan kehutanan dari Masyarakat Kota Kupang.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi : -
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

VII. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Rehabilitasi DAS.
2. Materi Koordinasi adalah Verifikasi Lokasi.
3. Instansi yang terlibat dalam koordinasi yaitu BPDAS HL Benain Noelmina.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT
6. Jumlah pegawai negeri sipil 11 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 2 pegawai, sarjana sebanyak 4 pegawai dan SLTA sebanyak 5 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 8 pegawai dan golongan II sebanyak 1 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Hasil dan manfaat koordinasi adalah terlaksananya kegiatan verifikasi lapangan.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah Presentase hasil ke Jakarta.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -



VIII. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Pengembangan Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
2. Materi Koordinasi adalah Sosialisasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan/ Wisata Alam.
3. Instansi yang terlibat dalam koordinasi yaitu BPHP Wilayah VII Denpasar.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 11 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 2 pegawai, sarjana sebanyak 4 pegawai dan SLTA sebanyak 5 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 8 pegawai dan golongan II sebanyak 1 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
8. Hasil koordinasi adalah Sosialisasi dengan KTH.
Manfaat koordinasi adalah terlaksananya sosialisasi pemanfaatan HHBK dan Jasling.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah pelaksanaan pemanfaatan HHBK dan Jasling.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

IX. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kabupaten Rote Ndao.
2. Materi Koordinasi adalah Fasilitas pengelolaan minyak kayu putih.
3. Instansi yang terlibat dalam koordinasi yaitu BPHP Wilayah VII Denpasar.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 11 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 2 pegawai, sarjana sebanyak 4 pegawai dan SLTA sebanyak 5 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 8 pegawai dan golongan II sebanyak 1 pegawai.



7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
8. Hasil koordinasi adalah Fasilitas pengelolaan minyak kayu putih di Rote Timur dengan Kelompok Tani.
Manfaat koordinasi adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan minyak kayu putih.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah pelaksanaan pengelolaan minyak kayu putih.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

X. Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

1. Forum Koordinasi Penyusunan RPHJP KPHP dan KPHL.
2. Materi Koordinasi adalah Fasilitas penyusunan RPHJP.
3. Instansi yang terlibat dalam koordinasi yaitu BPKH Wilayah XIV Kupang dan BPDAS HL Benain Noelmina.
4. Sumber dan jumlah anggaran : -
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
6. Jumlah pegawai negeri sipil 11 pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 2 pegawai, sarjana sebanyak 4 pegawai dan SLTA sebanyak 5 pegawai. Ditinjau dari pangkat dan golongan, pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 8 pegawai dan golongan II sebanyak 1 pegawai.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dilaksanakan sampai selesai penyusunan RPHJP.
8. Hasil koordinasi adalah Rapat-rapat, Konsultasi Publik dan Pembahasan RPHJP di Pusat.
Manfaat koordinasi adalah Tersusunnya Dokumen RPHJP KPHP dan KPHL.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi adalah Penilaian dan pengesahan RPHJP.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

XI. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Forum Koordinasi Pengelolaan Aset
2. Materi Koordinasi adalah Pengelolaan Aset.
3. Instansi yang terlibat dalam koordinasi yaitu :



- a. Kementerian Agraria dan Tata ruang/ BPN Provinsi NTT, BPN Kota Kupang dan BPN Kabupaten Kupang.
 - b. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
4. Sumber dan Jumlah Anggaran :
DPPA SKPD Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jumlah Anggaran : Rp. 4.893.070.000,-
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
6. Jumlah PNS sebanyak 347 orang dengan Tingkat Pendidikan S2 = 20 orang, S1 = 193 Orang, Diploma III (D/III) = 27 Orang, SLTA = 100 Orang dan SLTP = 5 Orang, SD = 2 Orang. Ditinjau dari Pangkat dan Golongan, golongan IV = 26 pegawai, golongan III = 254 orang, golongan II = 66 orang, dan golongan I = 1 orang.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan :
 - a. Proses Penerbitan 29 Sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT
 - b. Pengukuran Penetapan batas tanah dan survei lokasi Pemanfaatan aset tetap milik Pemerintah Provinsi NTT.
 - c. Pengukuran dan telah dilakukan ganti rugi terhadap tanah yang telah di manfaatkan oleh Pemerintah Provinsi NTT kepada Pihak ke III;
Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Bolok seluas 69.901m², dan masih ada belum bisa terlaksana pada tahun Anggaran 2018 karena masih dilakukan proses negoisasi dengan para pemilik tanah di kawasan tersebut;
 - d. Eksekusi okupan yang mendiami tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
8. Hasil dan manfaat koordinasi adalah :
 - Terlaksananya kegiatan Proses Sertifikasi Tanah, dan Pengukuran serta Penetapan batas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT;
 - Terlaksananya pembebasan Lahan Kawasan Tanah Industri Bolok, serta terselsesaikan nya eksekusi okupan tanah milk Pemerintah Provinsi NTT, serta Penertiban aset – aset Pemerintah Provinsi NTT diantaranya Rumah Dinas, aset kios Kuliner di Stadion Oepoi, dan Aset – aset lain nya.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi : -
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -



XII. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Forum Koordinasi

Forum Koordinasi yang dilaksanakan adalah Rakornis Teknis Perhubungan se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Materi Koordinasi

Materi Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut yaitu dari 3 (tiga) sub sektor yaitu sub sektor darat, sub sektor laut dan sub sektor udara sebagai berikut :

- a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi yang berkualitas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
- b. Manajemen Aparatur Sipil Nasional Berbasis Kompetensi oleh Kepala Bidang Pengembangan Biro Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Arah dan Kebijakan Pemangunan Sarana Prasarana Transportasi Dalam Mendukung Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Kepulauan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam mendukung Kebijakan Pembangunan di Sektor Transportasi oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap penyelenggaraan Transportasi Darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT;
- f. Konsep Perencanaan Transportasi Bersinergi antara Pusat dan Daerah dalam mendorong Pengembangan dan Pembangunan sarana prasarana Transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;
- g. Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ditjen Hubla;
- h. Peranan Kantor Otoritas Bandara dalam mendukung Penyelenggaraan Transportasi Udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Otoritas Bandara wilayah IV Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi Vertikal yang terlibat dalam Rakornis Teknis Perhubungan se Provinsi NTT antara lain :



- a. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. UPT Pusat Kementerian Perhubungan di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- d. Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Stasiun Damri di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Peserta seluruhnya berjumlah ± 60 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rakornis Perhubungan se Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.202.334.000,-

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 136 orang.

b. Kualifikasi Pendidikan

SD= 1 orang; SLTP= 3 orang; SLTA= 46 orang; Diploma= 12 orang; Sarjana = 59 orang; Magister= 15 orang;

c. Pangkat dan Golongan

Golongan IV/a = 4 orang; Golongan IV/b = 6 orang; Golongan IV/c = - orang; Golongan IV/d = - Gol. III/a = 13 orang; Gol. III/b = 31 orang; Gol. III/c = 21 orang; Gol. III/d = 32 orang; Gol. II/a = 3 orang; Golongan II/b = 6 orang; Golongan II/c = 13 orang; Golongan II/d = 7 orang; Golongan I/d = 1 orang.

d. Pejabat Stuktural: 36 orang.

Eselon II = 1orang; Eselon III = 8 orang; Eselon IV = 27 orang.

e. Pejabat Fungsional: 2 orang.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi NTT.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Kesimpulan Rakornis

- a. Penyelenggaraan transportasi di Nusa Tenggara Timur belum dilaksanakan secara efisien, efektif dan ramah lingkungan;
- b. Permasalahan yang dihadapi :



- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas;
- Minimnya pendanaan untuk mendukung program/kegiatan di sektor perhubungan sehingga mengakibatkan operasional pada sarana dan prasarana perhubungan kurang maksimal;
- Masih sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana transportasi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Masih kurangnya koordinasi antar instansi dan antar Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak Lanjut dari Kegiatan Rakornis Perhubungan Provinsi se Provinsi NTT yaitu dengan mengeluarkan beberapa Rekomendasi Rakornis berupa kesepakatan umum yaitu :

- a. Penataan dan Sosialisasi serta penegakan regulasi/kebijakan sector perhubungan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Revitalisasi angkutan umum untuk kawasan aglomersi dan optimalisasi pelayanan simpul transportasi (bandara, terminal dan pelabuhan) sesuai dengan kewenangan;
- c. Penguatan manajemen dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangan;
- d. Pengembangan keterpaduan system transportasi darat, laut dan udara sesuai dengan kewenangan;
- e. Pola pembibitan dan penguatan kapasitas aparatur SDM Perhubungan dengan system MoU antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Rapat koordinasi teknis tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur perhubungan Tahun Anggaran 2019 disepakati akan diselenggarakan di kabupaten nagekeo.

10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

1. Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi.
 - a. Ada 5 (Lima) segmen sengketa batas wilayah yakni:
 - 1) Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Segmen Rantete);



- 2) Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
 - 3) Kabupaten Ngada dan kabupaten Manggarai Timur (Segmen Buntal dan Segmen Bakit);
 - 4) Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Segmen Totok-Malat; segmen Lokokalda-Nolata; segmen Bondobaghila-Lakori; Segmen Kahale-Wetana; Segmen Kahale-Karang Indah);
 - 5) Kabupaten Sumba Tengah dan Kab. Sumba Barat (segmen Lokory – Susuwandewa dan segmen Hupumada-Waemanu)
- b. Bidang batas antar Negara NKRI- RDTL ada 2 segmen antara lain:
- 1) Segmen Muara Noelbesi – Natuka (Kabupaten Kupang – Distric Oecusse).
 - 2) Segmen Bijael Sunan – Oben (Kabupaten TTU- Distric Oecusse).
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu ditindak lanjut)

Solusi:

- a. Batas antar Daerah Kabupaten/Kota :
- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersengketa secara intensif hingga tercapai satu komitmen bersama yaitu sepakat penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi kabupaten/kota.
 - 2) Memberikan fasilitasi dalam mempertemukan kedua belah pihak baik itu antar pemerintahan kabupaten maupun masyarakat yang bersengketa.
 - 3) Memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Penegasan Batas Daerah secara pasti kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang bersengketa.
- b. Batas Wilayah Negara :
- 1) Melakukan Fasilitasi berupa pertemuan Tokoh Adat, tokoh masyarakat, aparat TNI/Polri yang memahami tentang batas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan Distric Oekusi sebelum dilakukan referendum bagi Timor-Timur.
 - 2) Memfasilitasi rapat *Border Liaison Committee* (BLC) atau Komite Perantara RI-RDTL untuk memberikan masukan kepada pemerintah Pusat tentang penyelesaian batas wilayah Negara RI-RDTL di 2 segmen Yaitu segmen Noelbesi – Natuka dan Bijael Sunan-Oben.
 - 3) Melatih dan memberikan pemahaman dan pendalaman tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara kepada masyarakat.



Hasil dan tingkat penyelesaian:

- a. Batas antar daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Peninjauan lokasi di sub segmen Rantete dan sekitarnya;
 - Penandatanganan berita acara rapat dan berita acara peninjauan lokasi;
 - 2) Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
 - Adanya kesepakatan waktu pelacakan titik batas ke lapangan dan adanya kesepakatan penentuan titik koordinat serta tersedianya data awal sebelum melakukan pelacakan ke lapangan;
 - Dilakukan rapat Fasilitasi penyelesaian dan percepatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Belu dan Malaka di Kupang.
 - 3) Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.
 - Kedua kabupaten secara terpadu melakukan klarifikasi ulang dilapangan yang difasilitasi pemerintah provinsi sesuai hasil survey lapangan oleh tim BAK;
 - Hasil klarifikasi lapangan tersebut diserahkan ke BAK Kemendagri melalui Gubernur NTT.
 - 4) Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
 - Pemerintah provinsi NTT meneliti dan mengkonsolidasikan titik-titik batas yang disampaikan kedua kabupaten dan telah menghasilkan peta batas wilayah administrasi
 - 5) Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Tanggal 12-16 September 2018 pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Kemendagri, TOPAD) bersama kedua kabupaten melakukan survey di sub segmen Karang Indah-Wetana (segmen selatan)
- b. Batas Wilayah Negara.
 - 1) 2 (dua) segmen yang disengketakan hingga saat ini belum ada titik terang yaitu di segmen Noelbesi - Natuka (Kabupaten Kupang - Distric Oecusse) dan segmen Bijael Sunan - Oben (Kabupaten TTU - Distric Oecusse) karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
 - 2) Masyarakat memahami pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan dan Bela Negara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah .
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
 - a. Jumlah Pegawai.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan sebanyak 44 orang.
 - b. Kualifikasi Pendidikan.

SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 8 orang; Diploma = 1 orang; Sarjana = 24 orang; Magister = 10 orang;
 - c. Pangkat dan golongan.

Golongan IV= 9 orang; Golongan III = 30 orang; Golongan II = 5 orang; Golongan I = - orang.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

I. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Bencana yang terjadi :
 - a. Angin putting beliung/angin kencang.

Bencana angin putting beliung/angin kencang terjadi 155 kali di 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ngada, Flores Timur, Ende, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Kota Kupang. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan tempat tinggal dan gagal panen.
 - b. Banjir.

Bencana banjir terjadi 81 kali di 13 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ngada, Ende, Belu, Kabupaten Kupang, Kab. Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia), kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan ternak dan mengalami gagal panen.
 - c. Gelombang Pasang.

Gelombang Pasang terjadi 26 kali di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Ende, Mangagrai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada perahu motor nelayan sehingga mengalami kesulitan mata pencaharian. Selain itu juga adanya ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai.



d. Gempa Bumi.

Gempa bumi terjadi 16 kali di 8 kabupaten/kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk, Infrastruktur, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan lahan pertanian/perkebunan.

e. Kebakaran Rumah dan Lahan.

Bencana kebakaran terjadi 160 kali dan merupakan bencana yang paling banyak terjadi selama tahun 2018 di 9 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ngada, Ende, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Kota Kupang. Kejadian ini menyebabkan masyarakat kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia), mengalami kehilangan harta benda dan tempat tinggal.

f. Kecelakaan Transportasi.

Kecelakaan transportasi terjadi 3 kali di kabupaten Sabu Raijua yang menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia) dan kerusakan pada perahu motor sehingga nelayan mengalami kesulitan mata pencaharian.

g. Kekeringan.

Kekeringan terjadi di 11 kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Lembata, Manggarai Timur, Nagekeo, Rote Ndao, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Malaka dan Belu. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami gagal tanam, gagal panen dan kekurangan air bersih.

h. Konflik Sosial.

Konflik Sosial terjadi di Kabupaten Rote Ndao yang menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia).

i. Tanah Longsor.

Tanah Longsor terjadi 70 kali di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Ngada, Ende, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Kota Kupang. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia), kerusakan tempat tinggal, kerusakan pada tanaman pertanian/perkebunan gagal panen dan terjadinya hambatan arus lalu lintas.



Penanggulangannya:

Dalam rangka menanggulangi bencana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna memastikan kesiapan aparatur, sarana prasarana dan logistik dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana;
 - b. Menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana tanggap darurat setiap tahun anggaran;
 - c. Membangun kordinasi dengan OPD terkait dan NGO yang bergerak di bidang kebencanaan untuk penanganan berlanjut;
 - d. Menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menyampaikan laporan secara cepat, tepat dan akurat tentang kejadian bencana dengan mengaktifkan posko bencana 1x24 jam;
 - e. Penugasan tim kaji cepat dalam rangka verifikasi di lapangan untuk penyampaian laporan ke Gubernur, BNPB dan Presiden;
 - f. Memberikan bantuan logistik sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat;
 - g. Memfasilitasi usulan proposal Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan tanggap darurat dan pasca bencana.
2. Status Bencana
- Status bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan pernyataan Gubernur Bupati dan Walikota.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan jumlah Rp.9.186.963.000,- (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
- a. Pra Bencana :
 - 1) Mengaktifkan POSKO Provinsi dan Kabupaten Kota;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 3) Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - 4) Melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
 - 5) Gladi/simulasi penanggulangan Bencana.



- b. Saat Bencana :
 - 1) Melakukan Kaji Cepat yang meliputi, inventarisir kerusakan dan kerugian;
 - 2) Pemberian dukungan peralatan, logistik, dan Pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Pasca Bencana :
 - 1) Perencanaan penanggulangan bencana pasca bencana (pembuatan proposal, Verifikasi dan pembuatan pengantar Gubernur untuk proposal dari kabupaten/Kota).
 - 2) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terkena bencana pasca bencana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan sebanyak 47 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi Pendidikan.
SD = 1 orang; SLTP = - orang; SLTA = 16 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 26 orang; Magister = 2 orang.
 - b. Pangkat dan golongan.
Golongan IV/a = 3 orang; Golongan IV/b = 2 orang; Golongan IV/c = 0 orang; Golongan IV/d = 1 orang; Golongan III/a = 3 orang; Golongan III/b = 7 orang; Golongan III/c = 11 orang; Golongan III/d = 8 orang; Golongan II/a = 0 orang; Golongan II/b = 1 orang; Golongan II/c = 9 orang; Golongan II/d = 1 orang; Golongan I/a = 0 orang; Golongan I/b = 0 orang; Golongan I/c = 1 orang; Golongan I/d = 0 orang
 - c. Pejabat Struktural 12 orang terdiri dari: Kepala Pelaksana 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 2 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang dan Kepala Seksi 5 orang.
 - d. Fungsional : 1 orang yaitu Fungsional Arsiparis
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.
8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi.
Angin puting beliung/angin kencang, banjir, longsor, kekeringan, erupsi gunung api, Konflik sosial dan Kejadian Luar Biasa.



II. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Bencana yang terjadi:

a. Bencana Kebakaran

➤ Kota Kupang

- Bencana kebakaran gudang vulkanisir ban milik Roni Layangtara di wilayah Kabupaten Kota Kupang terjadi pada tanggal 05 Januari 2018 di Rt.010 Rw. 004 Jl Bunga Jati Kelurahan Oesapa barat Kecamatan Kelapa Lima.
- Kota Kupang Bencana kebakaran di Ruko pasar Oeba ludes pada pukul 16.45 WITA pada tanggal 13 Februari 2018 di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama tidak ada korban.
- Kota Kupang Bencana kebakaran 1 (satu) rumah ludes terbakar di Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Mantasi Kecamatan alak pada pukul 12.10 WITA pada tanggal 23 Februari 2018 tidak ada korban.
- Bencana kebakaran di Jl. Kelapa Gading RT. 38/RW. 13 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima pada tanggal 14 April 2018.
- Bencana kebakaran lahan kosong di perumahan RSS Oesapa Oesapa Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima pada tanggal 17 April 2018.
- Bencana kebakaran orang di depan pasar Inpres Naikoten RT. 04 RW.02 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Maulafa
- Bencana kebakaran 2 (dua) rumah di RT. 001/RW.001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima pada tanggal 08 Juli 2018.
- Bencana kebakaran di RT. 09/RW.03 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak pada tanggal 03 Agustus 2018.
- Bencana kebakaran di RT. 01/RW. 08 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo pada tanggal 10 Agustus 2018.
- Bencana kebakaran 1 (satu) rumah dan kios ludes terbakar di Jl. Soping senter RT.01/RW.08 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo;
- Bencana kebakaran 1 (satu) rumah makan dan 1 (satu) buah meubel di Kecamatan Oebobo pada tanggal 02 September 2018 pukul 22.30 WITA.
- Bencana kebakaran 2 (dua) rumah rusak berat di RT.15/RW.05 Jl. Cekdam 2 Kelurahan Manupatopen Kecamatan alak pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 17.00 WITA. dan kebakaran 1 (satu) unit rumah



An. Thomas Tanaubu di jl. Air lobang 2 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 12.40 WITA.

- Kabupaten Kupang.
Bencana kebakaran 1 Unit rumah ludes di Rt.04 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 10.22 WITA. Tidak ada korban.
- Kabupaten Malaka.
 - Bencana kebakaran 2 (dua) rumah terbakar ludes An. Bapak Antoru Temes dan Bapak Fransiskus Sale di Dusun Rasikun dan Dusun Alas selatan Kecamatan Kobalima Timur pada tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 11.10 WITA. Tidak ada korban.
 - Bencana kebakaran di RT.01/RW.01 Dusun Kampung Baru Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah pada tanggal 03 Agustus 2018.
- Kabupaten Ngada.
Bencana kebakaran di Kampung Adat Gurusina Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu pada tanggal 13 Agustus 2018.
- Kabupaten Sabu Raijua.
 - Bencana kebakaran 1 (satu) rumah di Desa Raemedia RT.001/RW.001 Dusun I Kecamatan Sabu Barat.
 - Bencana kebakaran di Dusun Bali, Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur pada tanggal 01 November 2018 pukul 12.01 WITA.
- Kabupaten Sikka.
Bencana kebakaran 1 (satu) buah Toko pesona gorden terbakar di Jl. Anggrek Kelurahan Kotauneng Kecamatan alak pada tanggal 11 September 2018 pada pukul 01.00 WITA.
- Kabupaten Sumba Barat.
 - Bencana kebakaran di lapangan Gloria padaeweta Kelurahan Padaeweta Kecamatan Waikabubak kerugian stand bambu atap nunbai 10 buah pada tanggal 05 September 2018 pada pukul 21.00 WITA.
 - Bencana kebakaran 17 (tujuh belas) rumah adat terbakar di kampung adat bodomoroto Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak.
- Kabupaten Ende.
Bencana kebakaran 32 (tiga puluh dua) rumah, 21 (dua puluh satu) rumah adat, 1(satu) buah keda (kantor adat), 10 (sepuluh) buah rumah penduduk di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita pada tanggal 29 Oktober



2018 pada pukul 14.00 WITA.

➤ Kabupaten Belu

Bencana kebakaran di RSUD Gabriel Manek SVD Atambua pada tanggal 06 November 2018 pada pukul 12.01 WITA. dan bencana kebakaran di Desa Renrua Kecamatan Raimanuk 2 (dua) Unit rumah pada tanggal 08 November 2018.

➤ Kabupaten Alor

Bencana kebakaran 1 (satu) perahu motor beserta BBM yang di perkirakan sebanyak 5 Ton di pelabuhan Dulionong Binongko Kelurahan Kalabahi Kota, Kec. Teluk Mutiara pada tgl 07 November 2018 pukul 17.45 WITA.

➤ Kabupaten Rote Ndao

Bencana kebakaran 1 (satu) buah gudang milik Mr. Mike Francis di Desa Nembrala Kec. Rote Barat tanggal 09 November 2018 pukul 23.00 WITA.

b. Bencana Banjir

➤ Kota Kupang

- Bencana banjir terjadi pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 19.00 WITA . Tagana bersama warga membersihkan selokan yang tersumbat di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa.
- Bencana banjir terjadi pada tanggal 22 Pebruari 2018 pada pukul 06.15 WITA di Kelurahan Penfui.

➤ Kabupaten Kupang

Bencana banjir terjadi pada tanggal 15 Januari 2018 di Dusun 5, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat mengalami 33 rumah terendam banjir , dan mengakibatkan rusaknya pupuk, bibit jagung dan bawang merah. 6 (enam) unit motor air terbawa arus beserta pipa air peralatan rumah tangga terbawa banjir.

➤ Kabupaten Malaka

- Bencana banjir terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 di Betun pada pukul 17.00 WITA. Mengakibatkan kerusakan lahan 49,1 Ha, 1 (satu) unit rumah rusak berat, 60 (enam puluh) rumah rusak ringan
- Bencana banjir terjadi pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 22.00 WITA di Desa Degu Kamerang, Desa Deoklaran, Desa Sukerlaku. Bencana banjir di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah mengakibatkan 40



(empat puluh) unit rumah penduduk rusak ringan 187 Ha sawah dan kebun jagung tegenang air rusak berat. Bencana banjir pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Montaaain, Kecamatan Malaka Barat mengakibatkan 40 (empat puluh) unit rumah penduduk rusak berat (RB) dan tidak layak di huni. Sebagian ternak penduduk hilang terbawa banjir, lahan sawah dan kebun mengalami kerusakan

➤ Kabupaten Belu.

Bencana banjir terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 di RT.005/RW.002 Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur pada pukul 17.00 WITA mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia An. Bernadus Seran.

➤ Kabupaten Manggarai.

Bencana banjir terjadi pada tanggal 7 Februari 2018 di Dusun Waewuo Desa Sombi Kecamatan Reok Barat yang mengakibatkan.

c. Bencana Tanah Longsor.

➤ Kabupaten TTU.

Bencana tanah longsor terjadi pada tanggal 21 Pebruari 2018 di Kelurahan Peboko, Kecamatan Kefa Utara.

➤ Kota Kupang.

Bencana tanah longsor terjadi pada tanggal 23 Desember i 2018 pukul 09.00 di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa.

➤ Kabupaten Ngada.

Bencana tanah longsor terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 05.30 WITA di Desa Salalejo Timur, Kecamatan Mauponggo mengakibatkan 5 (lima) unit rumah tertimbun longsor, 3 (tiga) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang luka , 1 (satu) orang selamat.

d. Bencana Angin Kencang.

➤ Kota Kupang.

- Bencana angin puting beliung pada tanggal 01 Januari 2018 di Kelurahan Nunleu Kecamatan kota Raja mengakibatkan rusak berat (RB);

- Bencana angin puting Beliung pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 18.00 WITA di RT. 016/RW.004 Kelurahan Lasiana kecamatan Kelapa Lima mengakibatkan 4 (empat) rumah warga Rusak Berat (RB) di perkirakan mengalami kerugian Rp. 100.000.000,-



- Kabupaten Kupang.
 - Bencana angin Putting Beliung pada tanggal 30 Januari 2018 di Desa Naibonat Kecamatan Kupang Timur;
 - Bencana angin putting Beliung pada tanggal 18 November 2018 pukul 17.00 WITA di Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Tengah. Mengakibatkan 6 (enam) rumah penduduk rusak berat (RB), dan 3 (tiga) rumah rusak ringan (RR).
- Kabupaten Lembata.

Bencana angin kencang pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 14.00 WITA di Desa Panama kecamatan Buyasuri. Mengakibatkan 1 (satu) orang mengalami luka-luka tertimpa pohon.
- Kabupaten Rote Ndao.

Bencana angin kencang pada tanggal 18 Juni 2018 di RT.10 gang Tujuh jaya Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain.
- Kabupaten Manggarai Barat

Bencana angin putting beliung pada tanggal 19 November 2018 pukul 16.30 WITA di Desa Golo sepang Kecamatan Boleng.
- Kabupaten Sumba Timur

Bencana angin kencang pada tanggal 14 Desember 2018. Di Kelurahan Temu Kecamatan Kenatang dan Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu.
- e. Bencana Gempa Bumi
 - Kabupaten Rote Ndao

Bencana Gempa Bumi pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 05.49 WITA. Lokasi 59 Km barat laut Rote Ndao NTT.
 - Kabupaten Flores Timur
 - Bencana Gempa Bumi pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 09.38. Lokasi 3,8 SR, 8,15 LS, dan 123,28 BT, kedalaman 12 KM;
 - Bencana Gempa Bumi pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 06.10 WITA. di lokasi 3,5 SR, 7,78 LS dan 123,17 BT, 69 Km Timur Laut Larantuka kedalaman 10 Km;
 - Bencana Gempa Bumi pada tanggal 29 Juli 2018 di lokasi 7,30 LS, 122,72 BT, (115 Km barat Laut Flores Timur).
 - Kabupaten Sikka

Bencana Gempa Bumi di laut sawu berdampak di Kabupaten Ende dan Sikka. Pada tanggal 05 Februari 2018 pukul 02.55. Lokasi 5,3 SR, 9,16



LS, dan 122,51 BT, 47 Km arah selatan kota hepeng, 138 Km.

➤ Kabupaten Sumba Timur.

- Bencana Gempa Bumi pada tanggal 21 Pebruari 2018 pukul 08.33 di lokasi 4,3 SR, 10,31 LS dan 120,36 BT, 46 Km Tenggara Sumba Timur kedalaman 14 Km.
- Bencana Gempa Bumi (5,2 SR) pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 06.27 WITA di lokasi 10,56 LS, 120,20 BT (66 Km Barat Daya Sumba Timur) , Gempa Bumi (5,3 SR) pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 06,59 WITA (56 Km Barat Daya Sumba Timur) pada tanggal 02 Oktober 2018 (6,3 SR) pukul 06.59 WITA di lokasi 10,57LS, 120,25 BT (66 Km Barat Daya Sumba Timur). Pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 19.38 WITA di lokasi 10,47 LS, 120,16 BT (58 Km Barat Daya Sumba Timur), Gempa Bumi pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 00.56 WITA di lokasi 10.07 LS, 120.80 BT (77 Km barat Daya Sumba Timur), Bencana Gempa Bumi pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.37 WITA di lokasi 10.55 LS, 119.97 BT (77 Km Barat Daya Sumba Timur).

➤ Kabupaten Alor.

- Bencana Gempa Bumi pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 16.21 WITA. Di lokasi 2,8 SR, 8,51 LS, dan 124,87 BT, 51 Km Tenggara Kalabahi kedalaman 49 Km.
- Bencana Gempa Bumi pada tanggal 27 Agustus 2018 di lokasi 8,22 LS, 124,55 BT (4 Km arah Timur Kota Kalabahi).

➤ Kabupaten Manggarai

Bencana Gempa Bumi pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 12.00 WITA di lokasi 3,3 SR, 9,18 LS dan 120,25 BT, 57 Km Barat Daya Manggarai kedalaman 12Km.

➤ Kabupaten Sumba Barat.

Bencana gempa Bumi pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 10.12 WITA di lokasi 3,5 SR, 10,18 LS dan 119,48 BT, 59 Km Tenggara Sumba Barat kedalaman 10 Km.

➤ Kota Kupang.

Bencana Gempa Bumi pada tanggal 27 Agustus 2018 di lokasi 10,01 LS, 123,41 BT, (28 Km Barat Laut, tanggal 28 Agustus 2018 di lokasi 10,96 LS, 124,16 BT (10 Km Tenggara Kupang) dan pada tanggal 29 Agustus 2018 di lokasi 10,95 LS, 124,19 BT (111 Km Tenggara Kupang).



- Kabupaten Manggarai Timur.
Bencana Gempa Bumi pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.53 WITA di lokasi 7,63 LS, 120,33 BT, (33 Km Tenggara Manggarai Timur) dan Bencana Gempa Bumi pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.53 WITA di lokasi 7,63 LS, 120,33 BT (114 Km Barat Laut Manggarai Timur).
- Kabupaten Belu.
Bencana Gempa Bumi pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 07.49 WITA di lokasi 8.99 LS, 123,21 BT (38 Km Timur Laut Belu). Dan pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 08.07 WITA di lokasi 9,29 LS, 125,45 BT (62 Km Tenggara Belu).
- Kabupaten Sumba Barat Daya
Bencana Gempa Bumi (3,2SR) pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 10.06 WITA di lokasi 9.82 LS, 118.95 BT (39 Km Barat Daya Sumba Barat Daya).

2 Status Bencana.

Status Bencana Lokal

3. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari APBN sebesar Rp.3.667.108.000,- dana dekonsentrasi.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Disetiap Kabupaten telah disiapkan Gudang Bencana untuk mengantisipasi bila terjadi bencana.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

a. Kualifikasi Pendidikan.

SD = 2 orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 104 orang; DI = 3 orang;DII = 17 orang; Sarjana = 83 orang; Magister = 14 orang;

b. Pangkat dan golongan.

Golongan IV = 14 orang; Golongan III= 131 orang; Golongan II= 73 orang; Golongan I= 4 orang;

c. Pejabat Stuktural: 32 orang.

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 9 orang; Eselon IV = 26 orang;



- d. Pejabat Fungsional: 21 orang.
Penyuluh Sosial = 1 orang, Arsiparis = 5 orang, Peksos = 15 orang.
- 7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 70 orang.
- 8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
Bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, dan gempa.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).
Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum guna mengantisipasi gangguan yang terjadi di daerah (konflik SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) antara lain :
 - a. Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi.
 - b. Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing.
 - c. Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
 - d. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - e. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Kualifikasi Pendidikan.
SD = - orang; SLTP = 1 orang; SLTA = 17 orang; Diploma = 2 orang; Sarjana = 29 orang; Magister = 3 orang;.
 - b. Pangkat dan golongan.
Golongan IV= 6 orang; Golongan III = 43 orang; Golongan II = 3 orang; Golongan I = - orang.
4. Penanggulangan dan Kendalanya -
 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
Pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna menanggulangi gangguan yang terjadi di daerah (konflik sara, anarkisme, separatism atau lainnya), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu melibatkan/ bekerjasama serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, baik itu unsur POLRI, unsur TNI (angkatan darat, laut dan udara), Badan Intelijen Negara (BIN) maupun forum-forum di tingkat daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik, antara lain : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
 6. Sumber dan Jumlah anggaran.
Anggaran bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Adapun jumlah anggaran per kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp.144.000.000,- Realisasi : Rp.139.143.770,-
 2. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- Realisasi : Rp.133.238.800,-
 3. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp.43.315.800,-Realisasi : Rp.43.025.800,-
 4. Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing dengan anggaran sebesar Rp.44.198.500,- Realisasi : Rp.42.239.500,-
 5. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan anggaran Rp.48.843.750,- dan Realisasi : Rp.46.018.080,-



Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama 1 (satu) tahun anggaran disusun berdasarkan rangkaian pelaksanaan urusan pemerintahan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini disampaikan kepada Pemerintah yang mencakup beberapa hal, yakni : Urusan Konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan); Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Urusan Pemerintahan Umum dan Indikator Kinerja Kunci (IKK); serta Tugas Pembantuan. Khusus Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kinerjanya ditentukan pula oleh kinerja Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, dengan muatan meliputi: 1). Tataran pengambil kebijakan, digambarkan dalam 13 aspek dengan 39 indikator kinerja, 2). Tataran pelaksana kebijakan digambarkan dalam 8 (delapan) aspek administrasi umum, dan 3). Capaian kinerja 22 urusan wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah 22 Kabupaten/Kota dan berbagai stake holder terkait, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara nasional, dalam rangka pencapaian target RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa LPPD ini masih membutuhkan penyempurnaan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat melalui peningkatan kapasitas aparatur di daerah serta dukungan sumberdaya lainnya.

Demikian LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 ini disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan penilaian kinerja Pemerintahan Daerah (Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota) dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekian dan terima kasih.

Kupang, 22 Maret 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

